



**MENYERAP ASPIRASI  
MENCiptAKAN SOLUSI  
NATIONAL INTEREST  
DAN AGENDA  
PEMBANGUNAN**

Kiprah Tahun Kedua Wakil Ketua DPR RI  
Bidang Industri dan Pembangunan

**Dr. (H.C.) RACHMAT GOBEL**

Editor:  
Herman Effendi



**MENYERAP ASPIRASI  
MENCIPTAKAN SOLUSI**

# **NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN**

**Kiprah Tahun Kedua Wakil Ketua DPR RI  
Bidang Industri dan Pembangunan**

**Dr. (H.C.) RACHMAT GOBEL**

**Sekretariat Jenderal  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
2022**

**MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI  
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN**

**Kiprah Tahun Kedua Wakil Ketua DPR RI  
Bidang Industri dan Pembangunan**

**Dr. (H.C.) RACHMAT GOBEL**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

*All rights reserved*

Perpustakaan Nasional  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
xii + 466 hlm., 17 x 24 cm

ISBN 978-623-5898-01-8  
Cetakan Kedua, Maret 2022

Penulis:

Nining Indra Shaleh (Koordinator)

Nasihin Masha

Budi Jatnika

Himawan Basuki

Rini Koentarti

Andreas Ambesa

Mulyadin Permana

Hafizur Rahman

Ajeng Kusumaning Ayu

Muh. Adriansah Laitte

Editor:

Herman Effendi

Korektor Naskah:

Nining Indra Shaleh

Foto:

Rifqy M. Irsyad

Rancang Sampul dan Tata Letak:

Dito Sugito

Diterbitkan oleh:

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Tlp. 021—571 5697 Faks. 021—571 5421

Surel: bag\_penerbitan@dpr.go.id

# KATA PENGANTAR

**B**UKU "National Interest dan Agenda Pembangunan" ini adalah bagian laporan pelaksanaan agenda kegiatan Rachmat Gobel sebagai anggota DPRI RI Fraksi Partai NasDem dan Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) sepanjang masa sidang periode Oktober 2020-September 2021. Buku ini merupakan lanjutan dari laporan masa sidang tahun sebelumnya (2019-2020) yang diberi judul "Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi".

Tetap dalam tema Menyerap Aspirasi Mencari Solusi yang selalu menjadi semangat Rachmat Gobel, buku National Interest dan Agenda Pembangunan ini berisi tentang langkahnya sebagai anggota parlemen dalam menjaga kepentingan nasional dalam pelaksanaan agenda pembangunan.

Frasa "National Interest dan Agenda Pembangunan" dipilih tim penulis karena inilah yang selalu menjadi perhatian utama Rachmat Gobel. Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, ia selalu menekan bahwa setiap agenda pembangunan ekonomi harus mengacu pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini adalah roh sistem perekonomian nasional, dan harus terwujud dalam setiap dinamika kebijakan pembangunan ekonomi serta kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel berjuang untuk terus mengawal pelaksanaan agenda pembangunan yang dirancang mitra kerjanya di pemerintah agar selalu sejalan dengan Pasal 33 tersebut. Memperkokoh sistem perekonomian dan memberi kemaslahatan dan keadilan bagi segenap anak bangsa.

Isu besar yang masih membayangi perekonomian nasional sampai saat ini, menurut Rachmat Gobel adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi hasil pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik. Tanpa ada perbaikan secara signifikan, isu ini akan menjadi beban berat bagi struktur perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2045 sebagai Negara Industri Maju.

Fakta di lapangan menunjukkan, potret kemiskinan dan ketimpangan ini masih sangat nyata. Isu inilah yang menjadi salah satu fokus utama Rachmat Gobel dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dan pimpinan DPR RI baik dalam bidang legislasi, anggaran, pengawasan maupun diplomasi ke sejumlah negara.

Rachmat Gobel optimis, dengan pendekatan yang lebih holistik dan kesadaran untuk bersinergi yang lebih kuat, baik di pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, potret yang membebani harkat dan martabat bangsa ini bisa diatasi.

Kuncinya adalah bagaimana memberi fokus yang lebih besar kepada sektor-sektor ekonomi yang selama ini menjadi pendukung perekonomian rakyat yaitu pertanian dan UMKM. Lebih dari 97% angkatan kerja Indonesia dan kantong-kantong kemiskinan serta potret ketimpangan sangat jelas tergambar di sektor ini.

Berbagai upaya menyerap aspirasi dan membangun inspirasi dalam rangka menghapus potret kemiskinan dan ketimpangan itu telah dilakukan Rachmat Gobel melalui sejumlah program kerjanya. Program yang diusung telah memunculkan optimisme, seperti terlihat semakin besarnya dukungan dari berbagai instansi dan lembaga.

Dalam semangat restorasi yang diusung Partai NasDem yang menjadi inspirasinya, Rachmat Gobel melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Berdialog dengan rakyat dan berbagai kalangan, mendiskusikan dan mencari solusi atas masalah di bidang industri dan pembangunan.

Melalui buku ini, masyarakat diharapkan bisa memahami latar belakang dan motivasi yang menjiwai kegiatan Rachmat Gobel dan juga visi Partai NasDem dalam menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan bagi Restorasi Indonesia. Mengembalikan semangat kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Solusi dan gagasan telah diperjuangkan dengan berbagai inisiatif dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, sumber daya manusia, warisan budaya bangsa. Ini terlihat nyata dalam berbagai kunjungannya selama reses ke sejumlah daerah.

Dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel juga turut aktif memperkuat diplomasi kerjasama ekonomi dengan berbagai negara dan lembaga internasional. Tujuannya adalah untuk menggalang kerjasama dan sinergi yang lebih kuat untuk meningkatkan nilai tambah potensi perekonomian nasional, terutama di bidang pertanian dan industri.

Dengan selalu memohon petunjuk dan ridha Allah Yang Maha Kuasa, serta dukungan dari partai, Rachmat Gobel yakin, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti tertuang dalam Pasal 33 UU 1945 bisa tercapai.

Tim Penulis



*Rachmat Gobel  
bersama Presiden  
Republik Indonesia  
Joko Widodo  
pada acara Pidato  
Kenegaraan  
16 Agustus 2021.*

# UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera buat kita semua

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, marilah kita sama-sama meminta bimbinganNya agar selalu mendapat petunjuk dan pertolongan dalam setiap langkah kita menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anak bangsa.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung dan mempercayakan aspirasinya, serta memberi inspirasi bagi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI, pada tahun sidang 2020-2021.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada kader Partai NasDem dan rekan-rekan sejawat di DPR RI, atas semua kerjasamanya dalam mengemban dan melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota legislatif.

Tidak lupa terima kasih atas dukungan keluarga besar, isteri dan anak-anak, serta teman-teman dan sahabat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penulis, staf di DPR RI, sehingga laporan kegiatan selama satu tahun sidang 2020-2021 bisa diterbitkan dalam bentuk buku "National Interest dan Agenda Pembangunan".

Kami menyadari, pelaksanaan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI masih jauh dari sempurna, namun kami bertekad untuk terus berupaya keras meningkatkan pengabdian, demi terwujudnya Indonesia Yang Makmur, Sejahtera dan Bermartabat.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, selalu membimbing langkah-langkah kita dalam membangun Indonesia Yang Lebih Baik.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam Hormat

Rachmat Gobel

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang

No. Anggota 401



# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**iii**



**UCAPAN TERIMA KASIH**

**vii**



**BAB I  
SELALU BERUPAYA MENGEDEPANKAN  
KEPENTINGAN NASIONAL**

**1**



**BAB II  
MENGGERAKKAN AGRIBISNIS  
MELALUI KEBIJAKAN YANG  
BERORIENTASI NILAI TAMBAH**

**17**



**BAB III  
INISIASI MENGURAI BENANG  
KUSUT PUPUK SUBSIDI DAN UPAYA  
MEMBUDAYAKAN PUPUK NONSUBSIDI**

**47**



**BAB IV**  
**OPTIMALISASI PASAR NASIONAL**  
**UNTUK PRODUK DALAM NEGERI**

**67**



**BAB V**  
**LEGISLASI UNTUK FONDASI KEBIJAKAN**  
**YANG LEBIH RESPONSIF**

**93**



**BAB VI**  
**DIPLOMASI PARLEMEN DALAM**  
**ARUS GLOBALISASI YANG KIAN DERAS**

**123**



**BAB VII**  
**MEMBANGUN SEMANGAT RESTORASI**  
**DALAM KEBERAGAMAN**

**221**



**BAB VIII**  
**BANTUAN PROGRAM KERJA UNTUK**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

**243**



**BAB IX**  
**PENGAWASAN MENUJU KEBIJAKAN**  
**YANG LEBIH BERKUALITAS**

**259**



**BAB X**  
**APBN 2022: ANGGARAN TRANSISI**  
**DI TENGAH KETIDAKPASTIAN**

**299**



**BAB XI**  
**TEKAD RACHMAT GOBEL BAGI**  
**KEMENANGAN NASDEM DI SULAWESI**

**323**



**BAB XII**  
**KUNJUNGAN KERJA WAKIL KETUA**  
**DPR RI BIDANG INDUSTRI DAN**  
**PEMBANGUNAN RACHMAT GOBEL DARI**  
**FRAKSI PARTAI NASDEM KE DAERAH**  
**PEMILIHAN PROVINSI GORONTALO**  
**TAHUN SIDANG 2020 - 2021**

**347**

**LAMPIRAN**

**449**

**TENTANG PENULIS**

**457**





**Bagi Rachmat Gobel, untuk menentukan kepentingan nasional di bidang ekonomi panduannya sudah sangat terang yaitu Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini merupakan fondasi sistem pembangunan ekonomi Indonesia. Pasal ini mengamanatkan, perekonomian disusun berdasarkan prinsip kerakyatan**





## SELALU BERUPAYA MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN NASIONAL

**N**ATIONAL Interest atau kepentingan nasional adalah frasa atau terminologi yang paling sering mengemuka dalam pembicaraan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Dr. (H.C.) Rachmat Gobel. Ini tentu tidak mengherankan, topik kepentingan nasional selalu menjadi yang terdepan dalam setiap pemikirannya. Jauh sebelum terjun ke politik yaitu saat aktif sebagai pelaku usaha dan berbagai organisasi, aspek kepentingan nasional telah menjadi inti dalam setiap kiprahnya.

Semua itu adalah buah dari nilai-nilai yang telah tertanam sejak usia dini pada dirinya. Sebagai putera tertua, sedari kecil Rachmat Gobel diharapkan untuk jadi pengayom keluarga besar dan penerus usaha ayahnya yaitu Alm Drs H. Thayeb Mohammad Gobel, pelopor industri elektronika nasional di bawah bendera PT National Gobel yang kini telah berganti nama menjadi PT Panasonic Manufacturing Indonesia.

Ayahnya menanamkan semangat untuk selalu mengedepankan kemaslahatan, berpikir positif menghadapi setiap persoalan dan dalam menjalankan tanggung jawab. Ini yang juga membuat Rachmat Gobel piawai dalam menyerap berbagai aspirasi dan menggalang sinergi dengan berbagai pihak. Ia selalu berpandangan, keberhasilan tidak bisa dicapai sendiri.



*Rachmat Gobel bersama dengan ayahanda, dimana ayahanda selalu mengajarkan kedisiplinan, bertanggung jawab serta kepedulian terhadap sesama kepada Rachmat Gobel*

Semangat, keyakinan dan dedikasi yang kuat terhadap kemaslahatan telah mengantarkan Rachmat Gobel menuju berbagai prestasi. Tidak hanya mampu menjaga warisan sang Ayah, Rachmat Gobel berhasil mengembangkan jaringan usaha keluarga besar Gobel. Ia juga mendapat kepercayaan untuk memimpin berbagai organisasi sosial dan dunia usaha seperti Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ).

Di era pemerintahan SBY, Rachmat Gobel dipercaya menjadi anggota Komite Inovasi Nasional dan sebagai Ketua Pelaksana SEA Games 2011. Di

era Presiden Jokowi, Ia dipercaya menjadi Menteri Perdagangan 2014-2015 dan pada 17 Januari 2017 diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Jepang. Pada Pemilihan Legislatif 2019, melalui Partai Nasdem Ia berhasil memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihan Gorontalo dan menjadi anggota DPR RI, kemudian dipercaya untuk duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang)



*Rachmat Gobel menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh*

Rachmat Gobel juga banyak mendapat penghargaan antara lain Honorary Doctorate Degree (Dr. H.C.) dari *Tokushoku University* pada 2002, kemudian pada 2014 menerima anugerah yang sama Dr. (H.C.) dari perguruan tinggi tertua Jepang yaitu *Chou University*. Sebelumnya, pada 2009 Rachmat Gobel mendapat penghargaan sebagai Perekayasa Utama Kehormatan dalam Bidang Teknologi Manufaktur dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

## Martabat Bangsa

Bagi Rachmat Gobel, untuk menentukan kepentingan nasional di bidang ekonomi panduannya sudah sangat terang yaitu Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini merupakan fondasi sistem pembangunan ekonomi Indonesia. Pasal ini mengamanatkan, perekonomian disusun berdasarkan prinsip kerakyatan. Sistem perekonomian nasional harus bisa menjamin terselenggaranya demokrasi ekonomi, keadilan, pembangunan berkelanjutan, kemandirian serta mampu menjaga keseimbangan kemajuan dalam bingkai kesatuan nasional agar "kepentingan nasional kita adalah bagaimana mewujudkan semangat yang tertuang pada pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian yang berkeadilan dan mengedepankan kepentingan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat," kata Rachmat Gobel.

Setiap kebijakan atau gerak agenda pembangunan harus bisa mewujudkan prinsip partisipasi dengan memberi hak yang seadil-adilnya kepada setiap orang atau kelompok masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi masing-masing. Setiap kemajuan yang diperoleh dari hasil pembangunan haruslah dirasakan semua lapisan masyarakat dan mereka ikut

serta di dalamnya. Dengan kata lain, kemajuan ekonomi rakyat haruslah melekat atau inheren dengan kemajuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Rachmat Gobel selalu menegaskan, fokus pembangunan adalah manusia atau rakyat. Sasarannya adalah meningkatkan harkat dan martabat bangsa yaitu memampukan atau memandirikan rakyat dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Ini mensyaratkan, pengelolaan kebijakan agenda pembangunan yang harus selalu mengedepankan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi setiap elemen bangsa.

"Mempertahankan dan menjaga kepentingan nasional seperti yang diamanatkan konstitusi menjadi tanggung jawab bersama, apalagi bagi yang diberi

**"Kepentingan nasional kita adalah bagaimana mewujudkan semangat yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian yang berkeadilan dan mengedepankan kepentingan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat,"**

amanah memegang kekuasaan, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” kata Rachmat Gobel.

Sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan selama ini, namun sejumlah persoalan besar masih membelit dalam bentuk berbagai ketimpangan di tengah masyarakat. Kesenjangan yang tinggi dalam penguasaan asset fisik maupun non-fisik.

Kondisi itu terlihat nyata, dan akan menjadi beban yang semakin berat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Beban ini akan terasa kian berat jika dikaitkan dengan upaya mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia. Berbagai kesenjangan yang ada juga akan sangat mempengaruhi martabat dan kemandirian bangsa.

Rachmat Gobel menjelaskan, pekerjaan terbesar ialah bagaimana menyusun dan menerapkan agenda pembangunan yang betul-betul efektif untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang kini dirasakan. Setiap elemen bangsa hendaknya mempunyai peluang yang setara dalam proses distribusi hasil pembangunan fisik maupun non-fisik, tapi dalam realitanya belum sepenuhnya terpenuhi.

Oleh karena itu, dalam agenda pembangunan, masalah yang harus diperhatikan bukan hanya pada cara memacu pertumbuhan ekonomi, tapi juga bagaimana menata distribusi hasil pembangunan itu sendiri.

“Masalah kita bukan hanya memacu pertumbuhan dengan melakukan investasi sebesar-besarnya, juga bagaimana investasi itu berkontribusi mengatasi berbagai ketimpangan yang masih sangat dirasakan sebagian besar masyarakat. Ini hanya bisa dilakukan jika tersedia agenda pembangunan berkualitas,

**“Masalah kita bukan hanya memacu pertumbuhan dengan melakukan investasi sebesar-besarnya, juga bagaimana investasi itu berkontribusi mengatasi berbagai ketimpangan yang masih sangat dirasakan sebagian besar masyarakat. Ini hanya bisa dilakukan jika tersedia agenda pembangunan berkualitas, mampu memperbaiki struktur kesejahteraan masyarakat agar semuanya siap menghadapi tantangan kedepan. Inilah yang harus menjadi perjuangan bersama,**

mampu memperbaiki struktur kesejahteraan masyarakat agar semuanya siap menghadapi tantangan kedepan. Inilah yang harus menjadi perjuangan bersama,” kata Rachmat Gobel.

Dalam kaitan itu, persoalan pokok yang selalu mendapat sorotan Rachmat Gobel ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kesenjangan di sektor pendidikan dan ketimpangan kesejahteraan serta ketimpangan struktural antar pelaku ekonomi.

## Kesenjangan Pendidikan

Peningkatan kualitas SDM masih mengalami banyak tantangan, antara lain masih besarnya jumlah masyarakat yang belum mampu berperan aktif dalam dunia pendidikan. Secara umum tingkat pendidikan memang telah membaik, namun data juga menunjukkan bahwa kemajuan itu belum menjangkau seluruh penduduk.

Berbagai langkah yang sudah dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan, juga belum sepenuhnya meningkatkan kualitas pembelajaran, menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi. Kesenjangan pendidikan terlihat kian lebar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tanpa perbaikan signifikan, kondisi ini akan menjadi kendala bagi Indonesia untuk bisa keluar dari *middle income trap*, apalagi untuk menggapai masuk dalam kelompok negara maju. Bonus demografi yang menjadi *comparative advantage*, bisa berubah menjadi bencana akibat sebagian besar SDM tidak terdidik sehingga produktivitas dan *skill*-nya rendah.

Menurut data Potret Pendidikan 2020 yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi murni (APM) pada tingkat pendidikan dasar memang sudah mendekati 100%, namun untuk tingkat menengah dan tinggi masih jauh dari memadai. APM tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat baru 80,12%, dan ini berarti ada sekitar 20% anak di usia SMP putus sekolah. Angka yang lebih rendah terlihat pada APM

**Bonus demografi yang menjadi *comparative advantage*, bisa berubah menjadi bencana akibat sebagian besar SDM tidak terdidik sehingga produktivitas dan *skill*-nya rendah.**

SMA/Sederajat yaitu hanya 61,25% yang artinya sekitar 38,75% anak usia ini tidak bersekolah. Bahkan untuk APM tingkat Perguruan Tinggi (PT) tercatat hanya 19,32%.

Indikator tersebut jauh dari memuaskan karena APM untuk pendidikan menengah atas baru sekitar 61,75%. Padahal, menurut survei Bank Dunia, untuk bisa terbebas dari *middle income trap*, minimal 76% sumber daya manusia mempunyai pendidikan sekolah menengah atas.

Kondisi pendidikan sangat berpengaruh pada *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Seperti diketahui, posisi IPM Indonesia saat ini masih berada pada ranking 107 dari 189 negara. Indonesia kalah jauh dibandingkan Malaysia dan Thailand di posisi 62 dan 79. "Meluaskan dan memperbaiki akses pendidikan bagi mayoritas penduduk yang kurang mampu adalah persoalan besar yang perlu segera diselesaikan. Redistribusi kekayaan non-fisik inilah yang masih menjadi salah satu pertanyaan mendasar dalam proses pembangunan di Indonesia, terutama dalam kaitan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," kata Rachmat Gobel.

Keberhasilan pendidikan merupakan hal pokok pada kemajuan suatu bangsa. Membangun SDM unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi agar bisa melahirkan generasi yang mampu menjadi penggerak atau lokomotif pembangunan. Di sinilah peran penting dunia pendidikan pada penduduk usia sekolah yang berumur 7-24 tahun, dimana mereka inilah yang akan memanfaatkan berbagai peluang yang ada di masa depan. Semakin besar komposisi penduduk pada rentang usia ini yang aktif dalam dunia pendidikan, kian besar peluang untuk menjadikan mereka sebagai penggerak pembangunan.

Menurut data Potret Pendidikan 2020 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), masih banyak penduduk usia pendidikan 7-24 tahun yang putus pendidikan. Meski program Wajib Belajar 12 tahun sudah dimulai sejak 2016, persentase partisipasi sekolah

**"Meluaskan dan memperbaiki akses pendidikan bagi mayoritas penduduk yang kurang mampu adalah persoalan besar yang perlu segera diselesaikan...."**

masih tergolong belum memadai. Berbagai data yang ada menggambarkan, pendidikan belum bisa menggapai seluruh lapisan masyarakat dan akan berdampak pada akses terhadap kegiatan produktif.

Persoalannya tidak hanya sebatas ketersediaan infrastruktur, ketimpangan pendidikan juga sangat dipengaruhi ketimpangan pendapatan atau tingkat kesejahteraan. Keberhasilan upaya memperbaiki kualitas pendidikan tidak hanya bisa disandarkan pada langkah memperbaiki infrastruktur baik fisik maupun non-fisik, tapi juga harus diikuti perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat.

## Tingkat Kemiskinan

Sangat perlu disadari, konsekuensi dari keadaan kesejahteraan yang buruk menimbulkan ancaman bagi pembangunan manusia, peningkatan produktivitas, stabilitas sosial dan politik, pada akhirnya berdampak pada pembangunan secara keseluruhan. Data menunjukkan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, angka kemiskinan masih tergolong tinggi.

Menurut data Profil Kemiskinan 2021 yang dipublikasi BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2021 mencapai 10,14% atau sekitar 27,5 juta

orang. Artinya, 1 dari 10 dari orang Indonesia tergolong miskin. Angka ini didasarkan pada garis kemiskinan yaitu pengeluaran perkapita Rp 458.947. Bahkan, dari 27,5 juta orang penduduk miskin itu, 10,9 juta orang diantaranya tergolong miskin ekstrim dengan pengeluaran per kapita berdasarkan konsep *purchasing power parity* (PPP) hanya setara dengan Rp 12.000 per hari.

Angka-angka tersebut sekaligus menggambarkan masih besarnya ketimpangan kesejahteraan di tengah masyarakat. Ini semakin terasa jika dilihat dari penguasaan kekayaan. Sebagai gambaran, berdasarkan survei CREDIT SUISSE INTERNATIONAL beberapa waktu lalu, 10% penduduk terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 75% total

**Perlu disadari, konsekuensi dari keadaan kesejahteraan yang buruk menimbulkan ancaman bagi pembangunan manusia, peningkatan produktivitas, stabilitas sosial dan politik, pada akhirnya berdampak pada pembangunan secara keseluruhan**

kekayaan penduduk. Bahkan, jika dilihat dari kekayaan 1% orang terkaya, mereka mampu menguasai 45,6% total kekayaan penduduk,

Angka ini jauh berbeda dengan negara lain seperti Jepang, dimana 10% penduduk terkaya di negara ini hanya menguasai 48,8% total kekayaan penduduk dan untuk 1% orang terkaya hanya menguasai 18,6% total kekayaan penduduk.

### Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Per Maret 2021

| Wilayah            | Persentase Penduduk Miskin (%) |       |       | Jumlah Penduduk Miskin (ribu) |           |           |
|--------------------|--------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                    | Kota                           | Desa  | Total | Perkotaan                     | Pedesaan  | Total     |
| Sumatera           | 8,77                           | 11,6  | 10,15 | 2.324,87                      | 3.739,43  | 6.064,30  |
| Jawa               | 8,06                           | 12,91 | 9,67  | 8.313,12                      | 6.540,31  | 14.753,43 |
| Bali Nusa Tenggara | 8,95                           | 18,12 | 13,84 | 640,22                        | 1.477,71  | 2.117,93  |
| Kalimantan         | 4,67                           | 7,44  | 6,09  | 375,73                        | 634,95    | 1.010,68  |
| Sulawesi           | 5,88                           | 13,34 | 10,29 | 477,95                        | 1.570,00  | 2.047,95  |
| Maluku-Papua       | 5,63                           | 28,50 | 20,66 | 144,69                        | 1.403,79  | 1.548,48  |
| Indonesia          | 7,89                           | 13,10 | 10,14 | 12.176,58                     | 15.366,15 | 27.542,77 |

Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia 2021, BPS

Ketimpangan kesejahteraan itu terjadi antara lain karena adanya ketimpangan dalam struktural ekonomi. Dalam hal ini, menurut Rachmat Gobel, ada beberapa masalah besar yang harus mendapat perhatian secara sangat serius seperti ketimpangan pada penguasaan kegiatan produksi yaitu antara kelompok usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan pengusaha besar.

Meski diakui sebagai sektor yang strategis, upaya mendorong peningkatan kinerja KUMKM masih jauh dari maksimal. Kesenjangan antara pelaku di sektor ini dengan korporasi besar tidak pernah terselesaikan, bahkan dirasakan kian jauh. Baik dari sisi beban yang harus dipikul maupun kemampuan meningkatkan nilai tambah, ketimpangannya masih sangat mencolok.

Kondisi ini tidak hanya membuat pelaku KUMKM kian tertinggal, bebannya juga semakin berat. Secara total, kontribusi nilai tambah yang dihasilkan KUMKM terhadap PDB memang mencapai sekitar 63%, atau lebih besar dibandingkan korporasi besar yaitu 37%. Namun beban yang ditanggung KUMKM jauh lebih besar yaitu sekitar 97% tenaga kerja atau sekitar 119,5 juta orang. Beban inilah yang antara lain membuat produktivitas KUMKM kalah jauh dibandingkan usaha besar. Ini membuat pendapatan sektor ini terutama usaha mikro sangat kecil sehingga sulit meningkatkan kesejahteraan, apalagi untuk naik kelas.

Berdasarkan data 2019, menurut perhitungan UMKM Indonesia, jumlah tenaga kerja di sektor mikro mencapai 109,8 juta orang atau 89% dari total tenaga kerja. Dengan jumlah unit usaha sebesar 62,1 juta, total pendapatan usaha yang dihasilkan mencapai Rp 4.727 triliun atau sekitar 37% PDB. Dengan angka ini, rata-rata pendapatan per unit usaha mikro hanya sekitar Rp 76,126 juta per tahun.

Untuk usaha kecil jumlahnya mencapai 757.090 unit, menampung 5,93 juta tenaga kerja atau 4,81% dari total tenaga kerja. Total pendapatan usaha Rp 1.234 triliun (8,91% PDB) atau rata-rata per unit Rp 1,630 miliar per tahun. Sedangkan kelompok usaha menengah, jumlahnya 58.627 unit, menampung 3,79 juta tenaga kerja atau 3,07% total tenaga kerja. Total pendapatan usaha per unit Rp 1.742 triliun ( 12,57% PDB), sehingga rata-rata pendapatannya Rp 29,720 miliar per tahun.

### Pendapatan Berdasarkan Kelompok Usaha

| Kelompok Usaha | Unit Usaha    |            | Pendapatan Usaha   |                |                     |
|----------------|---------------|------------|--------------------|----------------|---------------------|
|                | Jumlah (unit) | Persentase | Total (Rp triliun) | Persentase PDB | Rata-Rata (Rp juta) |
| Usaha Mikro    | 62.106.900    | 98,70      | 4.727              | 34,12          | 76,126              |
| Usaha Kecil    | 757.090       | 1,20       | 1.234              | 8,91           | 1.639,202           |
| Usaha Menengah | 58.627        | 0,11       | 1.742              | 12,57          | 29.720,777          |
| Usaha Besar    | 5.460         | 0,01       | 5.136              | 37,07          | 940.699,633         |

Sumber: UMKM Indonesia, 2020

Untuk usaha besar yang jumlahnya hanya 5.469 unit dan menampung 3,8 juta pekerja atau 3,07% total tenaga kerja. Total pendapatan mencapai Rp 5.136 triliun (37,07 PDB) sehingga rata-rata pendapatan usaha per unit Rp 940.689 miliar.

Angka-angka tersebut menggambarkan, produktifitas usaha besar 12.394 kali lipat lebih besar dibandingkan usaha mikro, 583 kali lipat daripada usaha kecil dan 32 kali lipat dibandingkan usaha menengah. Ini menyiratkan, produktivitas usaha mikro dan usaha kecil kalah jauh dan membuat mereka secara umum lebih rapuh dan mudah tergilas oleh tekanan persaingan dan berbagai gejolak perekonomian.

Tidak hanya sampai di situ, kondisi itu telah membuat kesenjangan kesejahteraan antara kelompok masyarakat juga kian tajam, terutama dirasakan pada mereka yang berada di dalam kelompok usaha mikro. Sebagian besar kantong-kantong kemiskinan ada pada kelompok ini dan ini telah melahirkan ironi dalam kehidupan berbangsa.

Di satu sisi ada orang yang hidup penuh keleluasaan, di sisi lain masih puluhan juta orang dari bagian bangsa ini hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, dari 27,5 juta orang penduduk miskin saat ini, menurut data BPS, sekitar 10,9 juta orang diantaranya tergolong miskin ekstrim dengan pengeluaran per kapita berdasarkan konsep *purchasing power parity* (PPP) hanya setara dengan Rp 12.000 per hari.

*"Ironi ini tidak boleh berlarut-larut. Bukan hanya terkait soal tingkat kehidupan mereka yang masuk dalam kelompok miskin, tapi juga martabat kita sebagai bagian bangsa ini. Memperbaiki ketimpangan ini harus menjadi agenda semua kalangan, dan menjadi fokus utama agenda pembangunan nasional,"* kata Rachmat Gobel.

Secara politik, keinginan untuk mengatasi ketimpangan tersebut sudah cukup memadai. Persoalannya adalah efektivitas di tingkat kebijakan masih belum memadai. Perkembangan sektor KUMKM masih sangat

**Secara politik, keinginan untuk mengatasi ketimpangan tersebut sudah cukup memadai. Persoalannya adalah efektivitas di tingkat kebijakan masih belum memadai. Perkembangan sektor KUMKM masih sangat terbatas, dan ini makin dirasakan saat Pandemi Covid-19 sekarang ini.**

terbatas, dan ini makin dirasakan saat Pandemi covid-19 sekarang ini. Mayoritas KUMKM yaitu 82,9% sangat merasakan dampak negatif dari pandemi ini sehingga kinerja mereka anjlok, hanya sebagian kecil yaitu 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif.

Melalui program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) pemerintah memang telah menyalurkan dana insentif. Untuk 2021 misalnya, pada tahap I (Juli 2021) telah terealisasi bantuan untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp 11,76 triliun. Kemudian untuk tahap II, pada September telah tersalurkan anggaran Rp 3,4 triliun untuk 2,9 juta pelaku usaha mikro.

Namun bantuan tersebut dirasakan belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan KUMKM. Ini terbukti dari hasil survei *United Nations Development Programme/UNDP* terhadap 3.011 UMKM di Indonesia pada Agustus 2021 yang menunjukkan, masih ada 24% KUMKM tidak beroperasi selama pandemi covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 35,2% responden beralasan kekurangan uang untuk membiayai produksi.

Data lainnya, sebanyak 30,2% responden menutup usaha karena permintaan atas barang yang mereka jual menurun drastis. Kemudian, 27,5% menutup usahanya karena regulasi pemerintah, seperti terdampak kebijakan PPKM. Ada pula 4,9% responden menutup usahanya karena kesulitan mengakses keuangan internal. Lalu, 2,2% responden beralasan kesulitan mengakses bahan baku.

Catatan penting lain dari struktur KUKM, menurut Rachmat Gobel yang harus menjadi perhatian adalah kenyataan bahwa besar usaha perorangan dan informal ada di sektor agrikultur, baik petani dan nelayan dan peternak. Berdasarkan proporsi tenaga kerja, sekitar 30% ada di sektor ini. Menjadi sangat penting untuk memperhatikan kemajuan dari sektor agrikultur tersebut. Upaya meningkatkan kemajuan di bidang usaha ini tidak hanya mampu berkontribusi mengatasi ketimpangan, sekaligus juga akan memperkuat ketahanan pangan.

**Catatan penting lain dari struktur KUKM, menurut Rachmat Gobel yang harus menjadi perhatian adalah kenyataan bahwa besar usaha perorangan dan informal ada di sektor agrikultur, baik petani dan nelayan dan peternak**

Atas realitas itulah, Rachmat Gobel selalu menyuarakan agar sektor KUMKM, agrikultur lebih mendapat perhatian dari kebijakan pemerintah. Keduanya adalah kunci bagi Indonesia dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional untuk menghadapi berbagai tantangan, apalagi dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 atau 100 Tahun Indonesia merdeka yaitu menjadi salah satu Negara Maju di pentas dunia.

“Dari berbagai persoalan yang dihadapi KMUKM saat ini, apalagi sepanjang pandemi covid-19, makin menunjukkan, perlunya perbaikan kualitas kebijakan agribisnis dan UMKM. Kebijakan harus lebih fokus, dan terkoordinasi dengan lebih baik. Intervensi dan insentif dari pemerintah harus lebih kuat terutama untuk meningkatkan akses sektor ini terhadap pasar, keuangan dan teknologi. Ibarat orchestra, sektor agrikultur dan KUMKM membutuhkan dirigen yang mampu memadukan setiap gerak dengan sektor terkait, tidak hanya instansi pemerintah, tapi juga berbagai asosiasi pelaku usaha,” kata Rachmat Gobel.

Inilah yang selalu menjadi perjuangan Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang. Menyuarakan berbagai hambatan yang dihadapi rakyat di lapangan, dan mendorong pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang memberi solusi bagi peningkatan kualitas ekonomi masyarakat secara luas.





Modernisasi dengan penggunaan infrastruktur dan teknologi modern untuk sektor pertanian memang tidak terelakkan lagi dalam era kemajuan saat ini. Untuk meningkatkan produktivitas, petani tidak hanya dituntut untuk memaksimalkan produksi, tapi juga harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan permintaan pasar.





# BAB II

## MENGERAKKAN AGRIBISNIS MELALUI KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI NILAI TAMBAH

**D**IBANDINGKAN potensi yang ada, perkembangan sektor pertanian masih jauh dari yang diharapkan. Potensi 34,8 juta hektar lahan yang bisa digarap dan 35,25 juta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, belum tergarap secara maksimal. Sampai kini, sebagian besar kantong-kantong kemiskinan diisi oleh mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan data sumber penghasilan utama pada 2020, sebesar 46,3% rumah tangga miskin berasal dari sektor pertanian. Sedangkan rumah tangga miskin dari sektor industri 6,58% dan lainnya 32,10%. Angka ini mengidentifikasi dengan jelas bahwa rata-rata nilai tambah yang dihasilkan mereka yang bekerja di sektor pertanian jauh di bawah sektor industri atau sektor pun lainnya.

“Terlepas dari berbagai langkah yang sudah dilakukan pemerintah selama ini, data-data menunjukkan bahwa memperkuat pendekatan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah kian menjadi keharusan untuk sektor pertanian,” kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

Kebijakan yang berorientasi pada nilai tambah adalah kebijakan yang memungkinkan petani menyelaraskan preferensi konsumen terhadap produk pertanian atau pangan dengan karakteristik bentuk, ruang, waktu, identitas, dan

kualitas yang mana akan sangat sulit ditemui pada komoditas pertanian yang diproduksi secara tradisional. Pertanian tidak bisa hanya menghasilkan bahan baku yang hanya dipakai/dikonsumsi sebagai kebutuhan primer, tetapi harus memberikan nilai tambah yang diolah menjadi barang sekunder dan tersier.

Pertanian bernilai tambah juga merupakan strategi penting untuk kewirausahaan pertanian dan pembangunan pedesaan. Ini sangat terkait dengan kepentingan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian serta martabat bangsa.

## Membangun Pertanian Berkualitas

Badan pangan dunia *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam sejumlah laporannya selalu menegaskan bahwa sektor pertanian tidak bisa lagi ditangani dengan kebijakan yang bersifat *business usual* atau biasa-biasa saja seperti yang umumnya terjadi selama ini. Intinya badan ini mengingatkan, kebijakan pertanian yang selama ini mengedepankan penggunaan pada sumber daya alam secara besar-besaran telah menyebabkan deforestasi besar-besaran, kelangkaan air, penipisan tanah dan tingkat emisi gas rumah



Rachmat Gobel menyerahkan secara simbolis bantuan traktor kepada kelompok tani di Kota Gorontalo

kaca yang tinggi, dan ini tidak dapat menghasilkan pangan dan produksi pertanian yang berkelanjutan.

Sektor pertanian membutuhkan kebijakan yang lebih inovatif dan holitis agar bisa tampil menjadi sektor berkualitas. Perlu perbaikan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan membantu mengatasi perubahan iklim. Sektor pertanian yang berkualitas, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga menjadi lokomotif dalam meningkatkan kesejahteraan serta tetap mengedepankan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.



*Rachmat Gobel menyerahkan bantuan traktor untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian kepada kelompok tani di Kota Gorontalo.*

Menurut Rachmat Gobel, modernisasi dengan penggunaan infrastruktur dan teknologi modern untuk sektor pertanian memang tidak terelakkan lagi dalam era kemajuan saat ini. Untuk meningkatkan produktivitas, petani tidak hanya dituntut untuk memaksimalkan produksi, tapi juga harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan permintaan pasar. Mengembangkan usaha pertanian tidak lagi bisa dengan mengandalkan proses alamiah secara tradisional, tetapi diperlukan penerapan teknologi

modern untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Pelaku usaha tani tidak bisa hanya menghasilkan bahan baku yang hanya dipakai/dikonsumsi sebagai kebutuhan primer, tetapi harus memberikan nilai tambah yang diolah menjadi barang sekunder dan tersier.

Bagi Indonesia, menurut Rachmat Gobel, membangun sektor pertanian berarti membangun seutuhnya, meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemandirian mereka yang masih tertinggal, sekaligus mengamankan ketahanan pangan nasional. Sampai saat ini, sektor pertanian masih menjadi penopang utama mata pencaharian masyarakat, terutama di pedesaan. Masih sangat banyak diantara petani ini yang tingkat kesejahteraannya jauh tertinggal.



*Rachmat Gobel menjadi keynote speaker dalam acara FGD yang diadakan oleh Bulog pada Juni 2021*

Data Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2020 menyebutkan, tenaga kerja pertanian jumlahnya mencapai 35,25 juta orang per Agustus 2020. Angka ini tentu belum termasuk keluarga petani yang hidup dari hasil pertanian dan keluarga buruh tani yang mengelola atau bekerja di sektor pertanian.

Menurut Rachmat Gobel, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di sektor ini menjadi salah kunci, baik pendidikan formal maupun informal seperti penyuluhan, pelatihan dan pembinaan. Saat ini kualitas SDM di sektor ini memang masih sangat rendah sehingga pengelolaan usaha tani cenderung

konvensional atau tradisional. Ini menyebabkan rendahnya produktivitas karena kurangnya kemampuan mengadopsi teknologi.

Untuk mencapai pertanian yang berkualitas tidak cukup hanya menyiapkan infrastruktur, sarana, prasarana, dan teknologi pertanian. Harus terintegrasi dengan bidang lainnya. Artinya, peningkatan kualitas pertanian mengharuskan penguatan sumber daya manusia dan *supporting* pembiayaan dan teknologi modern yang diadopsi di dalam pengelolaan pertanian di setiap level mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, distribusi pasca panen, termasuk peningkatan produktivitas tanah melalui pupuk berkualitas.



*Rachmat Gobel bersama dengan para petani dalam kegiatan memberikan pelatihan untuk membudidayakan jagung lebih produktif*

Rachmat Gobel percaya bahwa melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal, pendidikan berorientasi pertanian, penyediaan infrastruktur yang memadai, alat-alat pertanian yang canggih, dan dukungan *political will* pemerintah untuk membangun pertanian yang maju, maka sudah pasti kita bisa menghasilkan produk pertanian berkualitas dan melimpah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan bisa diekspor.

Ia juga mendorong adanya industri pengolahan yang bagus untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk yang berkualitas dan variatif. Satu jenis hasil pertanian harus bisa menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomi atau diolah menjadi barang lebih bernilai tinggi. Jika hal ini bisa

dilakukan dengan baik, maka setiap proses pengelolaan pertanian bisa menjadi potensi bisnis yang sangat besar dan menguntungkan, menyerap tenaga kerja, dan memiliki nilai tambah yang tidak sekedar mengandalkan nilai primer dari komoditas pertanian.

Selain itu, menurut Rachmat Gobel, infra struktur kelembagaan di sektor pertanian juga harus diperkuat. Ini sangat diperlukan untuk mendukung permodalan dan sistem pemasaran yang baik untuk menjamin hasil pertanian sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi dan rantai pasok yang efektif dan terintegrasi harus dibangun untuk menjaga kualitas produksi saat sampai di tangan konsumen.

Tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pembangunan pertanian berkualitas menjadi sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Seperti diketahui, saat ini impor komoditi pangan masih sangat besar dan semakin beragam. Tidak hanya impor beras, jagung, gula dan gandum, tapi juga bawang merah, bawang putih dan cabai.



76<sup>TH</sup>



## Bangun Ekosistem untuk Petani Milenial



“Harus ada solusi terintegrasi. Bangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, dari soal modal dan inovasi teknologi, hingga diversifikasi produk hilir pertanian.”

**Rachmat Gobel**

*Wakil Ketua DPR RI*



## Agribisnis dan Petani Milenial

Kita sebenarnya dibuat tercengang mendengar fakta, jumlah petani cenderung turun dari tahun ke tahun. Banyak kalangan generasi muda yang enggan terjun jadi petani. Padahal jumlah generasi ini semakin membludak yang menurut BPS saat ini sebanyak 145,39 juta orang atau lebih dari separuh total populasi kita (53,81%). Persoalannya, kenapa mereka enggan jadi petani? Ini harus dipikirkan bersama, karena di saat berbagai negara berlomba meningkatkan produksi pangan dengan teknologi sangat modern, anak-anak muda mereka menjadi garda terdepan.

Dunia pertanian kita memang seolah-olah jauh dari generasi muda. Banyak aspek yang menciptakan kondisi ini, mulai dari citra yang jauh dari modernisasi, terlihat kumuh, terbelakang, susah dan kemiskinan. Padahal di sisi lain, potensi sektor ini sangat besar. Sebagai negara tropis yang dikenal subur dan iklim yang mendukung, Indonesia mempunyai lahan yang luas.

Menurut data Statistik Pertanian 2019, dari potensi yang ada, luas penggunaan lahan pertanian pangan di Indonesia baru mencapai 34,8 juta hektar. Masih ada lahan yang belum diusahakan seluas 10.770.888 Ha (30,92%). Dari lahan yang sudah digarap itu, 7.105.145 Ha (20,40%) berbentuk sawah, tegal/ kebun 11.697.807 Ha (33,59%), kemudian ladang/huma 5.256.223 Ha (15,09%).

Terlepas dari berbagai aspek yang membuat generasi muda enggan jadi petani, meningkatkan wawasan generasi muda terhadap sektor pertanian harus dilakukan. Agar kalangan ini bisa melihat dengan lebih jernih potensi yang ada, tidak sekedar memandangi sektor pertanian dari sisi citra yang ada sekarang ini. Perlu ditekankan, sektor pertanian tidak hanya sebatas pada bersawah atau terjun ke ladang, tapi jauh lebih luas dari itu. Usaha pertanian atau lebih dikenal agribisnis adalah mulai dari penyediaan bahan baku, proses tanam, pengembangbiakan, panen, pasca panen, dan proses pengolahan.

**Dunia pertanian kita memang seolah-olah jauh dari generasi muda. Banyak aspek yang menciptakan kondisi ini, mulai dari citra yang jauh dari modernisasi, terlihat kumuh, terbelakang, susah dan kemiskinan. Padahal di sisi lain, potensi sektor ini sangat besar...**

Setiap proses dalam agribisnis mengandung banyak sekali nilai ekonomi yang bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, jika geluti secara serius. Setiap elemen dalam produksi dan distribusi pertanian dapat dijelaskan sebagai aktivitas agrobisnis, baik digarap sendiri (pertanian subsisten) ataupun menggunakan jasa orang atau pihak lain, hasil panen dimanfaatkan sendiri atau dikelola oleh pihak ketiga, semua usaha atau jasa yang terkait di dalamnya bisa menjadi bagian bisnis yang menguntungkan dan menyerap tenaga kerja.

Di berbagai kesempatan, Rachmat Gobel selalu berusaha mengingatkan dan mendorong pemerintah bersama legislatif untuk terus berupaya maksimal mendorong modernisasi pertanian dari hulu ke hilir. Kemajuan pertanian akan sangat berarti untuk menjaga kepentingan nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang digdaya dan sejahtera dari hasil kekayaan alam dan kesuburan tanahnya.

Rachmat Gobel menyambut baik dan sangat mendukung program pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian untuk melibatkan anak muda di sektor pertanian. Membuat program yang menarik atau membuat tertarik generasi milenial dalam mengambil bagian untuk memajukan pertanian.

"Membangun visi bersama dengan menarik generasi milenial untuk menjadikan Indonesia menjadi negara besar dengan kekuatan agraris yang kuat adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan," kata Rachmat Gobel.

**Rachmat Gobel  
menyambut baik dan  
sangat mendukung  
program pemerintah,  
khususnya Kementerian  
Pertanian untuk  
melibatkan anak muda  
di sektor pertanian.**

Perlu upaya membangkitkan optimisme generasi muda bahwa menjadi petani merupakan salah satu langkah tepat. Menjadi petani tidak hanya berurusan dengan cangkul dan lumpur, tetapi sebaliknya, menjadi petani bisa mengadopsi teknologi yang sangat modern sekalipun. Menjadi petani, bahkan, bisa menjadi orang kaya raya dengan hasil pertanian yang memang dibutuhkan masyarakat di seluruh dunia sebagai kebutuhan primer.

Harus diyakinkan bahwa sektor pertanian sangat menjanjikan untuk masa depan, tidak perlu enggan dan gengsi untuk menjadi petani.

Banyak negara berhasil menarik generasi mudanya terjun ke sektor ini seperti China dan Jepang.

Di China, banyak pemuda-pemudi yang menjadi petani, bahkan ada lulusan doktor terbaik universitas ternama di China mau menjadi petani dan kemudian menjadi pengusaha pertanian yang sukses. Memanfaatkan aplikasi/ jejaring sosial bernama *WeChat* untuk menjalankan usaha dan memasarkan produknya, banyak petani muda negara ini yang sukses menjadi petani modern. Banyak pula perusahaan-perusahaan swasta modern yang didirikan oleh anak muda dan didukung oleh pemerintah.

Perusahaan-perusahaan itu membantu mengerjakan usaha tani dari pembibitan, penanaman, panen, dan mengurus hasil panen menggunakan teknologi modern, robot, alat-alat canggih, *artificial intelligence tools*, teknologi *drone*, rekayasa genetika, *botanical science*, dan sebagainya.



**Rachmat Gobel menyerahkan bantuan alsintan kepada petani milenial di Kabupaten Bone Bolango**

Di negeri dengan penduduk terbesar di dunia itu, usaha pertanian tidak lagi mengandalkan banyaknya tenaga manusia, tetapi kualitas teknologi yang diterapkan oleh petani dan mendapat dukungan penuh pemerintah. Mereka mencukupi kebutuhan hidup 1,44 miliar penduduknya, bahkan sampai diekspor ke berbagai negara di dunia. Hal ini menunjukkan linearnya penggunaan teknologi modern dengan luasnya partisipasi anak muda dalam menggarap pertanian suatu negara.

Contoh lain adalah Jepang. Pemerintah Jepang punya rasa tanggungjawab yang sangat kuat terhadap petani. Pemerintah sangat mendukung produktivitas petani, rakyat Jepang pun cinta hasil pertanian dalam negeri mereka. Pemerintah membantu mesin, memberikan subsidi dan mengontrol harga supaya petani untung dan rakyat tetap bisa beli. Untuk urusan mengatur dan mengorganisasi petani.



**Rachmat Gobel bersama dengan petani milenial di Kabupaten Bone Bolango**

Pemerintah Jepang membentuk Nokyo atau JA (*Japan Agriculture*) yang mengurus soal keseluruhan produksi, mengatur *packaging*, urus transportasi, menyediakan semua kebutuhan modal, sampai penjualan produk ke tangan konsumen. Keseluruhan proses berada dalam komitmen pemerintah menyediakan pangan sebagai kebutuhan vital untuk rakyat, khususnya bagi kesejahteraan petani.

Persoalan yang dihadapi sektor pertanian memang sangat kompleks, namun dengan pendekatan yang lebih holistik dan kebijakan yang terkoordinir serta terintegrasi, berbagai persoalan itu bisa diurai dan diatasi. Bila ini bisa diwujudkan, prospek usaha di bidang pertanian akan lebih menjanjikan dan akan menarik lebih banyak kalangan milenial untuk terjun mewujudkan Indonesia sebagai negara agraris yang kuat dan handal.

## Food Estate dan Kemandirian Petani

Program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini adalah *food estate*. Program andalan pemerintah ini mengusung konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Mengenai progres pengembangan *food estate*, sejauh ini sudah terdapat 30.000 hektar lahan yang ditanam dan sudah panen dalam program ini.

Berdasarkan sejumlah tolak ukur utama seperti realisasi luas tanam dan panen yang tinggi, meningkatnya produksi indeks pertanaman, dan produktivitasnya, pelaksanaan *food estate* di beberapa daerah berjalan cukup baik.

Di luar sejumlah persoalan yang masih menjadi catatan seperti pemilihan lokasi yang tidak *accessible*, kurang subur, lahan rusak, berpotensi banjir, menurut Rachmat Gobel, program *food estate* ini memberi peluang untuk membangun kemandirian bagi petani. Untuk itu program ini harus bisa memberi iklim yang kondusif bagi penguatan kelembagaan di kalangan petani. Seperti mendorong petani untuk membangun sistem koperasi dengan petani itu sendiri sebagai anggotanya. Koperasi ini yang akan menyiapkan pupuk dan bibit, membeli hasil panen petani (*off taker*), dan bisa bekerja sama dengan Bulog sebagai *off taker* terakhir.

**program *food estate* ini memberi peluang untuk membangun kemandirian bagi petani. Untuk itu program ini harus bisa memberi iklim yang kondusif bagi penguatan kelembagaan di kalangan petani.**

Menurutnya, melalui kerja sama dengan Bulog misalnya, petani bisa buat produk beras premium yang hasil bisa dirasakan langsung oleh petani, bukan lagi oleh pemain besar sebagai pihak ketiga. Hal ini bisa memecahkan persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, khususnya di kantong-kantong pertanian.

Selain itu, langkah penting yang harus dilakukan untuk memajukan pertanian dan program *food estate* adalah dengan sistem pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir. Sistem terintegrasi artinya petani menjadi pemain utama dalam pengelolaan dan bisnis pertanian (agribisnis), dengan dibantu oleh pemerintah dan berbagai pihak, tentunya. Untuk mencukupi kebutuhan akan bibit, pupuk, alsintan, sarana dan prasarana pertanian, petani misalnya, petani bisa mengandalkan koperasi.



*Rachmat Gobel memberikan pengarahan kepada petani di wilayah food estate Provinsi NTT*

Persoalan yang tak kalah penting adalah akses modal. Melalui sistem pertanian terintegrasi, petani bisa mengakses modal melalui koperasi yang merupakan swakelola modal oleh petani itu sendiri atau mengakses modal



*Rachmat Gobel bersama pada saat kunjungan di wilayah food estate Provinsi NTT*

dari perbankan melalui badan hukum koperasi yang didirikan oleh petani. Maka, pertanian terintegrasi akan membawa kemandirian bagi petani, tidak menggantungkan harapan pada subsidi pemerintah seperti melalui pupuk subsidi, suntikan modal. Petani bisa mandiri dengan mengelola bisnis pertanian dengan kemampuan sendiri yang menghasilkan nilai tambah dan peningkatan produktivitas pertanian.

Pemerintah hanya perlu mendorong dan memfasilitasi petani dengan bantuan-bantuan yang bersifat meningkatkan kemandirian, penguatan kualitas, dan modernisasi pengelolaan pertanian, serta menuntun petani untuk menggerakkan agribisnis yang memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan petani.

Dengan pertanian yang maju dan dikelola secara mandiri, bisa memastikan keberlangsungan mata pencaharian bagi 35,25 juta tenaga kerja pertanian dan jutaan anggota keluarganya. Mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh masyarakat dengan hasil pertanian dalam negeri yang dikelola secara modern dan membangun petani handal dari generasi muda.

Melalui pembangunan pertanian berkualitas dan modern, anak muda akan menerima profesi sebagai petani karena memberikan hasil yang memuaskan. Adanya sentuhan teknologi kekinian yang menjadi semangat mereka, dan menjadi petani tidak lagi dipandang primitif, kotor, dan miskin. Sistem agribisnis terintegrasi akan menjadi magnet buat dan akan mempercepat kemandirian petani.



# UMKM Perlu Dukungan agar Segera Bangkit



“Semua sektor merasakan, dan harus mendapatkan dukungan. Yang paling penting adalah UMKM, harus kita jaga. Perlu program-program yang memudahkan mereka di masa pandemi.”

**Rachmat Gobel**

*Wakil Ketua DPR RI*



## Bantuan Untuk Petani dan UMKM

Dalam mewujudkan pendekatan nilai tambah dalam pembangunan pertanian, Rachmat Gobel telah membangun sejumlah proyek percontohan yang menerapkan sistem pertanian terintegrasi melalui demplot yang dibangunnya di Gorontalo, Jawa Timur, dan NTT. Sistem terintegrasi dilakukan melalui edukasi *by doing* dan melibatkan anak muda. Dengan menyediakan fasilitas *demonstration plot* (demplot) sebagai tempat praktik langsung di lapangan, petani bisa melihat bagaimana petani cara produksi, mengolah lahan, panen, dan mengolah hasil panen dengan baik.

Melalui demplot-demplot itu, anak-anak muda belajar menjadi petani berkualitas dengan mengadopsi sistem pertanian modern, juga menjadi mandiri dengan tidak mengandalkan pupuk subsidi dari pemerintah (menggunakan pupuk nonsubsidi). Hasilnya, produktivitas pertanian naik tiga kali lipat. Hasil panen tiga kali lipat lebih banyak dan terjaga kualitasnya.



*Rachmat Gobel menyerahkan bantuan alsintan berupa 2 unit traktor di Kabupaten Pohuwato*

Komitmen Rachmat Gobel mengembangkan dan memajukan pertanian tidak berhenti di infrastruktur saja, tetapi juga pada alat mesin pertanian (alsintan) yang sangat dibutuhkan untuk melangkah pada sistem pertanian



*Rachmat Gobel menyerahkan bantuan alsintan kepada kelompok tani di Kecamatan. Tabongo, Kabupaten Gorontalo*

modern. Ia udah membagikan ratusan *power thresher*, puluhan *combine harvester* besar, dan alat-alat pertanian modern lainnya kepada para petani se-Indonesia, khususnya di Gorontalo. Mesin-mesin ini sangat membantu produktivitas tanam dan panen hasil pertanian sehingga tidak banyak mengeluarkan biaya, juga pekerjaan semakin efektif dan efisien.

Bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk fisik, atau tidak sekedar memberikan bantuan kemudian tidak diperhatikan perkembangannya. Melalui tim yang dibangunnya, Rachmat Gobel terus mendampingi petani yang dibantu melalui demplot-demplot yang telah disediakan dengan pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan pertanian.

Rachmat Gobel juga mendatangkan bantuan ahli dari daerah lain atau dari universitas yang memang memiliki keahlian dalam proses pengelolaan pertanian. Pendampingan yang dilakukan oleh kader Partai NasDem yang pernah menjadi menteri perdagangan ini adalah pendampingan pasca panen atau penjualan hasil pertanian, termasuk tidak menganjurkan menggunakan pupuk subsidi.

Sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, Rachmat Gobel juga sudah bersumbangsih membangun 10 titik irigasi pada tahun 2020, 50 titik irigasi pada tahun 2021, dan telah berkomitmen akan membangun lebih banyak titik lagi pada tahun 2022. Bantuan irigasi sebesar 200 juta per titik ini, sudah diberikan oleh Rachmat Gobel kepada para petani di Gorontalo, Lumajang, dan Sulawesi Selatan.

## **Mendorong Semangat Kemitraan Untuk Memperkuat Pembangunan Daerah**

Kinerja pembangunan nasional merupakan agregasi dari capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, percepatan pembangunan daerah sangat menentukan dalam pencapaian sasaran visi pembangunan nasional 2045 yaitu menjadikan Indonesia Sebagai Negara Maju. Namun masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang belum mampu menggali potensinya secara maksimal.

Upaya membantu daerah mengatasi berbagai kendala dalam percepatan pembangunan menjadi sangat penting, salah satunya adalah dengan mendorong daerah untuk lebih aktif membangun kemitraan di antara elemen masyarakat.



**Rachmat Gobel menerima kunjungan Bupati Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau beserta rombongan, di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Jakarta**

*"Melibatkan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menggali potensi ekonomi daerah. Membangun semangat kemitraan diantara elemen masyarakat menjadi salah satu cara yang efektif dan harus dilakukan,"* kata Rachmat Gobel.

Data menunjukkan, meski era otonomi daerah sudah berjalan lebih dari 20 tahun, sebagian besar daerah belum mampu mandiri. Hasil reviu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2020, sekitar 88% daerah masuk dalam katagori belum mandiri. Ini menunjukkan, sebagian besar Pemda masih sangat tergantung pada transfer dana APBN dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Bahkan menurut reviu tersebut, mayoritas Pemda yaitu 93,04% tidak mengalami perubahan status/kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013. Seperti terlihat pada tabel, sebagian besar IKF terendah ada pada tingkat kabupaten. Dari 378 LKPD pemerintah kabupaten (Pemkab) yang direviu, 369 (98%) diantaranya masuk dalam katagori belum mandiri. Baru 8 kabupaten yang masuk katagori menuju mandiri dan satu kabupaten masuk katagori mandiri.

### Klasifikasi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Tahun 2020

| Status IKF     | Provinsi |      | Kabupaten |       | Kota   |      |
|----------------|----------|------|-----------|-------|--------|------|
|                | Jumlah   | (%)  | Jumlah    | (%)   | Jumlah | (%)  |
| Belum Mandiri  | 10       | 30%  | 369       | 98%   | 64     | 70%  |
| Menuju Mandiri | 16       | 49%  | 8         | 2%    | 26     | 28%  |
| Mandiri        | 7        | 21%  | 1         | 0,26% | 2      | 2%   |
| Sangat Mandiri | 0        | 0%   | 0         | 0%    | 0      | 0%   |
| Jumlah         | 33       | 100% | 378       | 100%  | 92     | 100% |

Sumber: BPK-Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemda Tahun 2020

Untuk wilayah perkotaan, meski terlihat lebih baik dibandingkan kabupaten, jumlah yang masuk dalam katagori belum mandiri masih besar. Dari 92 LKPD pemerintah kota (Pemkot) yang direviu, 64 (70%) diantaranya tergolong belum mandiri. Baru 26 kota yang masuk dalam katagori menuju mandiri dan 2 berhasil masuk dalam katagori mandiri.



*Rachmat Gobel menerima kunjungan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Jakarta*

Pada tingkat provinsi, dari 33 LKPD pemerintah provinsi (Pemprov) yang direviu, baru 7 provinsi (21%) yang sudah tergolong mandiri. Sisanya, 16 provinsi (49%) tergolong menuju mandiri, 10 provinsi belum mandiri (30%).

Data-data itu menunjukkan, perlu upaya lebih keras untuk percepatan pembangunan di daerah. Tidak hanya untuk mencapai tujuan otonomi daerah yaitu pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, juga untuk memperkuat fondasi dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rachmat Gobel, dalam kunjungannya ke berbagai daerah terlihat bahwa sebetulnya potensi untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah sangat terbuka. Namun diakui, kendala dan tantangan yang dihadapi tidak kalah besar, baik terkait kualitas dan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan anggaran pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat secara luas.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemda harus mengembangkan cara berpikir yang lebih terbuka. Perlu disadari, pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pihak atau pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok



*Rachmat Gobel menerima kunjungan Bupati Sampang, Jawa Timur di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Jakarta*

masyarakat lainnya. Mengkoordinasikan langkah-langkah secara sinergis, saling ketergantungan dan saling terkait menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan di daerah.

## Dituntut Lebih Kreatif

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan agar daerah terdorong untuk kreatif mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan target pembangunan yang sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Dengan demikian, setidaknya ada dua aspek dalam pelaksanaan otonomi ini yaitu meningkatkan wewenang pemerintah daerah, sekaligus memberi tanggung jawab yang lebih luas untuk menggali potensi secara optimal. Keberhasilan dalam mengemban tanggung jawab ini sangat tergantung sejauh mana Pemda mampu merespons secara cepat dan tepat berbagai dinamika kebutuhan masyarakat.

Sejalan berbagai perkembangan teknologi dan informasi, dinamika kebutuhan tersebut berkembang sangat cepat. Oleh karena itulah, menurut Rachmat Gobel, Pemda dituntut untuk lebih kreatif melakukan berbagai inovasi. Mengembangkan wawasan kewirausahaan bagi kepala daerah menjadi sangat penting agar mampu melihat setiap potensi yang sesuai karakteristik wilayahnya.

*"Dengan menggunakan sudut pandang kewirausahaan, akan banyak sekali potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja seperti melalui sektor industri dan pariwisata maupun pertanian,"* kata Rachmat Gobel.

Mengembangkan sektor usaha menjadi sangat penting, tidak hanya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja, tapi juga untuk memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk APBD. Pengembangan sektor usaha juga sekaligus bisa mendorong pengembangan Badan Usaha

***"Dengan menggunakan sudut pandang kewirausahaan, akan banyak sekali potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja seperti melalui sektor industri dan pariwisata maupun pertanian,"***



*Rachmat Gobel didampingi oleh Bupati mengunjungi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.*

Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dengan demikian, keuangan daerah akan lebih mandiri sehingga ketergantungan pembangunan daerah terhadap dana APBN berkurang.

Setiap Pemda perlu mempunyai analisa tentang peluang usaha. Disamping mendorong investor swasta, Pemda harus bisa mengembangkan BUMD yang berbasis potensi atau kearifan lokal. Dalam hal ini, menjalin kemitraan strategis seperti dengan BUMN dan pembentukan BUMD dapat menjadi pilihan kebijakan untuk optimalisasi potensi ekonomi di daerah.

Menurut Rachmat Gobel, dari sejumlah program yang ia coba kembangkan di Dapil (Provinsi Gorontalo) dan sejumlah daerah lainnya, peluang mengembangkan kemitraan strategis ini cukup besar. Banyak BUMN dan lembaga pemerintah, termasuk swasta tertarik untuk mempunyai mitra di daerah.

*"Ada sejumlah proyek percontohan yang telah saya kembangkan bersama LSM dan organisasi kepemudaan untuk mendorong kemitraan strategis BUMN dengan sejumlah kelompok tani dan UMKM. Hasilnya sangat mengembirakan."* kata Rachmat Gobel.

## Pengembangan Produk Lokal

Salah satu kunci utama dalam mengembangkan kemitraan strategis adalah kemampuan Pemda dalam mengidentifikasi kearifan dan budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi modal peningkatan daya saing. Dengan keragaman budaya yang begitu luas, daerah mempunyai potensi untuk mengembangkan produk lokal, baik melalui sektor pertanian, industri kerajinan maupun pariwisata.



*Rachmat Gobel mengunjungi UMKM di Kota Gorontalo*

Banyak negara yang telah berhasil menjadikan pengembangan produk lokal sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Konsep ini dikenal sebagai *one village one product* (OVOP) dan kini semakin populer di dunia. Dengan konsep OVOP ini, daerah menetapkan produk yang memiliki keunikan untuk kemudian dikembangkan guna mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini memberikan kontribusi pendapatan cukup besar bagi daerah, karena produknya memiliki keunggulan dan bahkan bisa masuk di pasar internasional.

Menurut Prof. Dr. Morihiko Hiramatsu yang merupakan perintis konsep OVOP, ada tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian. Pertama, menurut Morihiko yang mengembangkan konsep ini saat menjabat sebagai Gubernur Oita, Jepang pada 1980 adalah semangat *local yet global* yang bermakna menghasilkan produk atau jasa yang bernilai lokal dan dapat diterima secara global. Kemudian melaksanakannya dengan cara meningkatkan kualitas produk melalui proses pelatihan teknis peningkatan mutu produksi dan desain.

Kedua, *sreliance and creativity* yang berarti memanfaatkan potensi yang dimiliki secara kreatif dengan usaha yang mandiri. Ketiga, *human resource development* yaitu mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar memiliki semangat untuk kreatif dan mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman.

Produk yang dipilih untuk dikembangkan tidak harus selalu dalam bentuk *tangible product* (berupa barang dan jasa), tapi bisa juga dalam bentuk *intangibile product*, misalnya mengangkat produk-produk kesenian dan kebudayaan lokal yang khas, atau mengembangkan potensi sumber daya alam untuk pariwisata.

Di Indonesia terdapat sekitar 74.000 desa yang memiliki keunikan atau ciri khas. Mayoritas desa-desa tersebut eksis disektor pertanian atau agrikultur. Dengan kultur tersebut, sangat potensial dikembangkan OVOP, dan Pemda mempunyai peran yang sangat strategis untuk ini.

Peluang untuk mengembangkan produk lokal berbasis OVOP ini semakin terbuka dengan kian meningkatnya alokasi untuk Dana Desa dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11 Tahun 2021) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 2 Februari 2021. Keduanya merupakan adalah stimulus untuk mengembangkan produk lokal dan kewirausahaan lokal yang berbasis UMKM.

"Selain mengembangkan wawasan kewirausahaan, Gubernur, Bupati dan Walikota perlu mempunyai kemampuan memainkan peranan sebagai *dirigen*, mengkoordinir berbagai instansi yang ada, termasuk instansi perwakilan pemerintah pusat. Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah atau Forkopemda harus dihidupkan," kata Rachmat Gobel.



Dalam mengembangkan pertanian, tidak boleh terpisah, tetapi terintegrasi dengan pengembangan ekonomi lainnya seperti Koperasi dan UMKM. Pengembangan Koperasi dan UMKM di sektor pertanian menjadi linear dengan penyerapan hasil pertanian, semakin bagus badan usaha UMKM pertanian, maka semakin besar hasil pertanian yang terdistribusikan,





# BAB III

## INISIASI MENGURAI BENANG KUSUT PUPUK SUBSIDI DAN UPAYA MEMBUDAYAKAN PUPUK NONSUBSIDI

**M**ESKI sudah sejak era 1970-an sebagai salah satu sarana utama membantu petani, sampai saat ini produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi masih saja dibelit berbagai persoalan. Setiap musim tanam, petani selalu saja berteriak menghadapi kelangkaan, mereka kesulitan mendapat pupuk subsidi. Di sisi lain, berbagai instansi yang terlibat dalam produksi dan distribusi pupuk subsidi ini selalu merasa dan menyatakan, sudah melakukan langkah dan kebijakan yang tepat.

Persoalan pupuk subsidi memang seperti benang kusut. Bahkan Presiden Jokowi pernah bicara keras soal ini. Pasalnya, tiap tahun melalui APBN pemerintah selalu mengucurkan dana puluhan triliun untuk subsidi, tapi petani masih berteriak kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

"Kalau setiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan dari sisi produksi. Ada yang salah, ada yang tidak benar di situ," kata Jokowi seperti dikutip berbagai media saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (11/1/2021).

Seperti Presiden Jokowi, Rachmat Gobel juga mempunyai keprihatinan yang sama. Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Ia berupaya mengurai dan mencari titik temu masalah yang membelit pupuk subsidi ini, seperti konflik kepentingan antar sektoral yang menyebabkan masalah ini yang berlarut larut sehingga menjadi persoalan klasik. Kepentingan sektoral ini sering menyebabkan distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

Rachmat Gobel menegaskan, penanganan masalah pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir, demi tercapainya distribusi secara merata. Persoalan ini harus dilihat secara total, dari ketinggian desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Masalah harus dilihat secara objektif pada setiap tahapan distribusi.

Mengingat berbagai masalah itu, sebagai langkah inisiatif maka pada 25 Januari 2021 Rachmat Gobel mengadakan Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI dengan dengan Pimpinan Komisi IV, VI, VII dan XI. Disepakati, untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang menjadi pusat di kelangkaan pupuk bersubsidi.

Dari hasil kunjungan kerja itu ditemukan berbagai bentuk persoalan, diantaranya adalah; (1) *data base* pupuk kurang akurat ; (2) verifikasi penerima dan distribusi pupuk bersubsidi bermasalah, serta tidak tepat sasaran ; (3) pemerintah mempunyai hutang kepada PT. Pupuk Indonesia (*Holding Company*) sebesar Rp 5,692 triliun sehingga mempengaruhi kinerja produksi pupuk.

### Data Piutang Pemerintah ke Perusahaan Pupuk (Rp juta)

| Perusahaan             | Piutang 2019 | Perkiraan Piutang 2020<br>(unaudited) | Tota Piutang |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| PT Pusri Palembang     | 305.023      | 165.198                               | 470.221      |
| PT Pupuk Kaltim        | 291.303      | 72.804                                | 364.107      |
| PT Pupuk Kujang        | 258.408      | 238.886                               | 497.294      |
| PT Petrokimia Gresik   | 2.604.130    | 1.282.467                             | 3.886.597    |
| PT Pupuk Iskandar Muda | 324.603      | 149.440                               | 474.043      |
| Total                  | 3.783.468    | 1.908.795                             | 5.692.261    |

Sumber : materi RDP di Komisi IV dengan Kementerian BUMN

Selanjutnya sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan komisi, pada 9 Februari 2021, Rachmat Gobel mengundang menteri terkait yang menangani pupuk bersubsidi untuk melakukan rapat konsultasi. Rapat ini dihadiri 4 menteri yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menkeu Sri Mulyani dan Menperin diwakili oleh Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam. Dari DPR RI hadir pimpinan Komisi IV, VI, VII dan XI DPR RI.

Sebagai pimpinan rapat Rachmat Gobel menyampaikan bahwa "ketahanan energi, pangan, dan air merupakan tiga tujuan utama pembangunan berkelanjutan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*". Oleh karena itu industri pupuk merupakan bagian yang memiliki peran sangat strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah pemerintah dengan menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga kesejahteraan petani akan meningkat.

Dalam rapat Ia juga menyampaikan beberapa data antara lain tentang pengurangan subsidi pupuk dalam APBN 2021 dan kebutuhan pupuk. Alokasi anggaran pupuk bersubsidi dikurangi menjadi Rp 25,276 triliun dengan volume 7,2 juta ton. Sementara itu berdasarkan data Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 23,2 juta ton untuk 16,5 juta petani atau senilai Rp 67,12 triliun, sehingga kekurangan terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp 41,905 triliun.

Kemudian dari segi penyediaan bahan baku, pasokan gas bumi untuk PT Pupuk Indonesia sampai tahun 2021 masih surplus, tetapi mulai tahun 2022 diperkirakan mulai terjadi defisit pasokan sebesar -25 MMSCFD, defisit -64 MMSCFD tahun 2023, -327 MMSCFD di tahun 2024 dan seterusnya diproyeksikan defisit terus meningkat hingga -286 MMSCFD di tahun 2028.

Selanjutnya mengenai harga gas ke pabrik pupuk. Secara umum, harga gas bumi rata-rata ke PT Pupuk Indonesia Persero sebesar US\$ 6 per MMBTU, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi karena *toll fee* yang cukup tinggi.

**"ketahanan energi, pangan, dan air merupakan tiga tujuan utama pembangunan berkelanjutan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*". Oleh karena itu industri pupuk merupakan bagian yang memiliki peran sangat strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.**

Pendistribusian pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran, perlu adanya evaluasi serta kajian secara mendalam terhadap kebijakan pupuk bersubsidi, sebagai salah satu alternatif program subsidi pupuk dialihkan menjadi subsidi langsung kepada keluarga petani (KK-Tani).



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyapa Menteri Pertanian Yasin Limpo sebelum Rapat Konsultasi dimulai*

Selain membicarakan permasalahan pupuk bersubsidi, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan para menteri yang hadir juga membicarakan alternatif yang terkait kebijakan tentang ketersediaan pupuk bersubsidi dan permasalahan yang dihadapi serta solusi tindak lanjutnya. Beberapa hal yang juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang adalah sebagai berikut :



**Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel memimpin Rapat Konsultasi dengan lima Menteri (Pertanian, BUMN, Keuangan, ESDM dan Perindustrian) membahas Pupuk Bersubsidi.**

Berdasarkan data Pupuk Indonesia permintaan terhadap pupuk tidak bisa didukung oleh *supply* pupuk sehingga ada *gap* antara permintaan dan penawaran dari tahun 2017 s.d. 2021

Berdasarkan data dari Ditjen PSP Kementerian Pertanian kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun 2021 sebesar 23,2 juta ton senilai Rp 67,12 Triliun, namun alokasi anggaran Kementerian Pertanian RI tahun 2021 untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp 25,276 Triliun dengan volume 7,2 Ton. Sehingga untuk tahun anggaran 2021 terjadi kekurangan anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp 41,905 Triliun, sedangkan jumlah petani penerima subsidi kurang lebih 16,5 juta orang.

Dalam pengamanan keberlangsungan produksi pupuk urea bersubsidi, Komisi VII telah meminta Ditjen Migas ESDM, SKK Migas dan BPH Migas untuk menjamin kepastian pasokan gas bumi sebagai bahan baku. Pemerintah membuat kajian tentang kebijakan *domestic market obligation* sebagai alternatif kebijakan penyelesaian alokasi gas dalam negeri.



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan lima Menteri (Pertanian, Keuangan, BUMN, ESDM dan Perindustrian) untuk membahas Pupuk Bersubsidi*



*Para Menteri yang hadir pada Rapat Konsultasi DPR RI yaitu (dari kiri ke kanan) Menteri ESDM (Arifin Tasrif), Menteri Pertanian (Yasin Limpo), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Menteri BUMN (Erick Thohir), dan Dirjen IKFT (Muhammad Khayam) yang mewakili Menteri Perindustrian membicarakan "Pupuk Bersubsidi" yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang.*



*Rapat Konsultasi DPR RI tentang Pupuk Bersubsidi dihadiri oleh Menteri BUMN (Erick Thohir), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Menteri Pertanian (Yasin Limpo) dan Menteri ESDM (Arifin Tasrif).*

Terkait dengan pembiayaan pupuk bersubsidi, sampai saat ini PT Pupuk Indonesia ( *Holding Company* ) mempunyai tagihan kepada Pemerintah sebesar kurang lebih 5,692 triliun. Apabila kondisi ini tidak segera diselesaikan, dapat mempengaruhi kinerja PT. Pupuk Indonesia dalam mensukseskan kebijakan pupuk bersubsidi.

Kemudian, banyak persoalan klasik yang belum beres, seperti masalah penyimpangan pupuk subsidi, kelangkaan pupuk, soal kartu tani, dan masalah tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Banyak sekali kasus yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia yaitu laporan tentang penyalahgunaan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dengan dipasarkan sebagai pupuk non subsidi dan bahkan pupuk subsidi tidak sampai ke tangan petani. Ada celah dalam pengawasan distribusi karena tanggung jawab produsen hanya sampai ke level 3, sementara di level 4 dari pengecer ke petani itu diatur oleh Kementan dan Kemendag yang kiosnya berada di level kabupaten/ kecamatan/ desa.

## Mendapat Apresiasi

Inisiatif Rachmat Gobel mendapat sambutan antusias dari instansi terkait dan Komisi DPR RI. Langkah ini mendapat apresiasi yang tinggi karena dalam sejarah persoalan pupuk belum pernah dilakukan rapat konsultasi seperti yang diinisiasinya ini. Karena bersifat konsultasi, rapat ini memang tidak untuk merumuskan satu kebijakan.

Namun demikian, rapat ini telah menghasilkan pemahaman yang sama bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran, perlu adanya evaluasi serta kajian secara mendalam. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah kebijakan pupuk subsidi perlu dilanjutkan atau dicarikan alternatif lainnya agar pemberian subsidi tersebut tepat sasaran. Sebagai salah satu alternatifnya program subsidi pupuk dialihkan menjadi subsidi langsung kepada keluarga petani (KK-Tani).

Rapat juga menyepakati, hasil pembahasan terkait dengan permasalahan ketersediaan pupuk untuk peningkatan produksi pangan, perlu adanya langkah pembenahan secara holistik, baik permasalahan dari hulu hingga hilir. Hasil pembahasan ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya dalam hal pelaksanaan pendistribusian agar pupuk selalu tersedia setiap saat, tepat sasaran dan sesuai dengan data yang disampaikan oleh Menteri Pertanian. Ini penting untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Rachmat Gobel mengakui, masalah pupuk subsidi ini memang sangat kompleks dan butuh waktu untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi yang efektif. Namun belajar dari pengalaman negara lain, katanya, perlu dicarikan solusi agar petani tidak perlu tergantung pada pupuk subsidi.

Alternatif itu, menurut Rachmat Gobel adalah mendorong petani memakai dan menggunakan pupuk non subsidi. Alasannya, penggunaan pupuk non subsidi memberikan keuntungan 2 sekaligus atau 3 pihak yaitu (1) bagi petani, produktivitasnya akan naik sehingga akan lebih sejahtera, (2) kinerja pabrik

**Rachmat Gobel mengakui, masalah pupuk subsidi ini memang sangat kompleks dan butuh waktu untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi yang efektif.**

pupuk menjadi baik karena tidak terbebani program subsidi, dan (3) bagi negara/pemerintah akan sangat membantu tercukupinya pasokan pangan karena meningkatnya produktivitas lahan pertanian padi.

## Berbagai Pandangan

Inisiatif Rachmat Gobel telah berhasil mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan. Memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan sudut pandang masing-masing. Berbagai pandangan ini akan menjadi bahan masukan bagi setiap instansi dalam rangka pelaksanaan reformasi pupuk bersubsidi dan untuk evaluasi ketahanan pangan. Disepakati rapat konsultasi ini perlu dilaksanakan secara periodik, minimal satu kali dalam satu tahun.

Pandangan yang disampaikan berbagai instansi itu sekaligus juga telah memberikan gambaran mengenai peta masalah pupuk yang begitu rumit, seperti ibarat benang kusut. Seperti yang disampaikan oleh Rachmat Gobel, penyelesaian masalah pupuk subsidi harus melalui pendekatan yang holistik dan ini memerlukan waktu.



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Pimpinan Komisi VI, VII,XI dan empat Menteri*

## Pandangan Menteri Pertanian

Menteri Pertanian Yasin Limpo dalam rapat menekankan pentingnya keberadaan pupuk subsidi terutama untuk peningkatan produktivitas komoditi pangan. Yasin antara lain mengemukakan (1) Permasalahan pupuk sangat penting dalam hal produktivitas pertanian, berdasarkan data tahun 2020 telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik, pada kuartal II, III, dan IV; (2) Pentingnya pupuk bersubsidi terhadap peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan menjadi tujuan dari peningkatan produktivitas pertanian nasional, yang ditunjukkan dalam produktivitas padi Indonesia, menduduki urutan ke-2 (kedua) pada Tahun 2018 di bawah Vietnam dari 9 (sembilan) negara-negara *FAO* di Asia; (3) Meminta agar subsidi pupuk jangan dicabut, karena sangat besar manfaatnya kepada petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 2 (dua) hektar sekaligus menunjukkan wujud kepedulian Pemerintah membantu/melindungi petani kecil; (4) Kementerian Pertanian selalu berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar pasokan pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar dan membenahi keadaan di lapangan terkait tata kelola, agen-agen yang diperbaiki, membuat *road map* dukungan pemerintah di sektor pertanian, peningkatan pemantauan dan pengawasan (*monitoring*);

## Pandangan Menteri ESDM

Menteri ESDM Arifin Tasrif pada upaya untuk meningkatkan kinerja dalam penyaluran gas bagi pabrik pupuk. Menteri Arif antara lain menyampaikan; (1) Penyesuaian harga gas bumi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi diprioritaskan penggunaannya untuk suplai ke industri pupuk nasional dan petrokimia; (2) Realisasi pasokan gas untuk pabrik pupuk milik Pemerintah sesuai dengan permintaan untuk kebutuhan produksi industri pupuk; (3) Melakukan pemetaan dan proyeksi pemenuhan kebutuhan gas untuk industri pupuk.



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dan Menteri ESDM Arifin Tasrif membahas Pupuk Bersubsidi.*

## Pandangan Menteri BUMN

Menteri BUMN Erick Tohir dalam pandangannya menekankan akan melakukan langkah meningkatkan sinergitas dalam mengatasi berbagai masalah pupuk bersubsidi. Pandangan Menteri Erick antara lain; (1) BUMN *holding* pupuk akan meningkatkan kapasitas produksi dan optimasi HPP (Harga Pokok Produksi); (2) Kementerian BUMN melihat Indonesia masih merupakan market yang besar, meskipun dalam situasi pandemi covid-19 namun BUMN Pupuk masih mengimpor bahan baku, seperti *phosphate*; (3) Untuk memastikan *supply chain* dari hulu ke hilir dan memastikan ketersediaan bahan baku, Kementerian BUMN bersama BUMN *holding* pupuk akan mengeksplorasi tambang *phosphate* di luar negeri; (4) Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait potensi target akuisisi di luar negeri seperti di Yordania dan Maroko; (5) Kementerian BUMN akan memastikan sinergisitas antara BUMN *holding* pupuk dengan BUMN *holding* pertambangan untuk proses akuisisi tambang *phosphate* di luar negeri; (6) Kementerian BUMN akan melakukan reformasi pupuk nasional dengan cara meningkatkan pengelolaan BUMN *holding* pupuk secara lebih profesional dan ; (7) mengusulkan reformasi Pupuk Subsidi Langsung.

## Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat antara lain mengemukakan; (1) Realisasi anggaran untuk subsidi pupuk meningkat setiap tahun naik 5%-6% dengan jumlah produksi 8-9 (delapan sampai sembilan) juta ton. Untuk itu Menteri Keuangan menyarankan untuk menggunakan anggaran subsidi pupuk yang masih ada semaksimal mungkin. (2) penghitungan besaran anggaran subsidi dalam APBN dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, HPP (Harga Pokok Produksi), harga gas, dan nilai tukar rupiah; (3) terkait tagihan pupuk subsidi PT. Pupuk Indonesia ( *Holding Company* ) kepada Pemerintah sebesar Rp.5.692.261.000.000,- (±Rp.5,69 Triliun) tersebut, Pemerintah akan membayar tagihan tersebut setelah dilakukan audit oleh BPK.

## Pandangan Menteri Perindustrian

Dirjen IKFT Muhammad Khayam mewakili Menperin menyampaikan; (1) untuk mendukung penugasan subsidi dan melayani pasar komersil Pupuk Indonesia  *group*  memiliki unit produksi di Lhokseumawe, Palembang, Cikampek, Gresik, dan Bontang; (2) kinerja penjualan pupuk anorganik subsidi oleh PT Pupuk Indonesia  *group*  sangat baik dengan dukungan stok yang mencukupi sehingga pupuk dapat diperoleh dengan mudah hingga di Lini IV; (3) faktor yang menyebabkan kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) adalah kenaikan harga gas, kurs inflasi, volume subsidi, harga BBM solar dan beban bunga.

## Pandangan Komisi IV DPR RI

Sesuai dengan tupoksi dan temuan di lapangan, Komisi IV menyampaikan; (1) mengapresiasi pernyataan Menteri BUMN yang tidak akan mencabut subsidi pupuk untuk petani dan Menteri Keuangan yang menyarankan untuk menggunakan anggaran subsidi pupuk yang masih ada semaksimal mungkin; (2) pemerintah perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian tentang kriteria definisi "petani miskin" yang mengatakan petani yang mempunyai lahan pertanian kurang dari dua hektar menjadi kurang dari satu hektar;

## Pandangan Komisi VI DPR RI

Dalam rapat konsultasi ini, Komisi VI menyampaikan; (1) tidak mencukupinya kapasitas produksi PT. Pupuk Indonesia harus dicari solusi,

misalnya melalui impor atau harus ada pembangunan pabrik pupuk yang baru, terkait permasalahan harga gas yang menjadi suplai bahan baku pabrik pupuk harus mendapat perhatian terutama infrastruktur gas tersebut; (2) KartuTani yang belum dimanfaatkan secara maksimal, contoh penggunaan Kartu Tani hanya 1% (didaerah Banten), harus dicek keberadaannya untuk mencari solusi permasalahan tersebut karena berpengaruh dengan pilihan-pilihan kebijakan tentang pupuk subsidi.

## Pandangan Komisi VII DPR RI:

Wakil dari Komisi VII dalam rapat antara lain menyampaikan; (1) gas sebagai salah satu bahan baku industri pupuk harus terus dijaga keberadaannya, diperlukan kebijakan strategis untuk mengatasinya dengan mengurangi volume ekspor gas agar dialihkan kepada industri pupuk agar tidak terjadi kekurangan gas untuk bahan bakarnya; (2) subsidi pupuk saat ini yang menjadi masalah bukan karena kebijakannya, tetapi pupuk dan gas (BBM) tidak tepat sasaran kepada penerima manfaatnya dan harus mendapat perhatian semua pihak untuk mengatasinya; (3) terkait dengan harga gas, Komisi VII DPR RI telah meminta kepada BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat terkait *toll fee* sehingga usaha pengangkutan gas bumi dapat berjalan secara efisien. Penurunan harga gas menjadi US\$ 6 per MMBTU tersebut akan menghasilkan *multiplier* efek berupa penghematan subsidi pupuk sekitar Rp. 1,4 triliun per tahun. Penurunan harga gas juga dapat meningkatkan *competitiveness* dari produk yang dihasilkan.

## Pandangan Komisi XI DPR RI

Wakil dari Komisi XI DPR RI dalam rapat menegaskan; (1) anggaran subsidi untuk pupuk sebesar Rp 25 Triliun pada tahun 2021 telah diberikan, walaupun tidak semua petani menerima manfaat tersebut; (2) pemerintah perlu menjaga deviasi Harga Pokok Produksi dengan Harga Eceran pupuk subsidi tidak terlalu besar, karena akan berdampak pada kurang tepat sasaran seperti terjadi pada distribusi subsidi BBM; (3) perlu adanya pendataan kepada petani agar dapat menerima pupuk subsidi tepat waktu dengan volume yang diharapkan dapat disalurkan langsung kepada petani yang bersangkutan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.



Setelah selesai Rapat Konsultasi Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melakukan pertemuan dengan para Menteri dan Pimpinan Komisi VI, VII dan XI

## Membudayakan Pupuk Non Subsidi

Rachmat Gobel berkeyakinan, membudayakan pemakaian pupuk non subsidi di kalangan petani bisa menjadi alternatif yang cukup efektif dalam mengurangi beban masalah program pupuk subsidi. Keyakinan itu datang dari bukti kuat yaitu dari hasil *pilot project* berupa demonstration plot (demplot). Program ini la kembangkan bekerjasama dengan sejumlah kelompok tani, pabrik pupuk dan LSM di berbagai dari daerah dan terbukti penggunaan pupuk non subsidi memberikan keuntungan lebih baik kepada petani.

Meski harga pupuk non subsidi lebih tinggi dari pupuk subsidi, namun produktivitas tanaman meningkatkan berkali kali lipat. Hasil peningkatan produktivitas yang bisa mencapai 2-3 kali lipat untuk tanaman padi, jauh lebih tinggi dibandingkan selisih harga pupuk non subsidi dengan pupuk subsidi. Kualitas hasil produksi juga menjadi lebih baik.

*Pilot project* pertama dikembangkan di daerah pemilihan (dapil) sendiri yaitu di sejumlah kabupaten provinsi Gorontalo. Bekerjasama dengan



**Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi Wakil Bupati Sumba Barat Daya Marthen Christian Taka dan Ketua DPD NasDem Sumba Barat Daya Markhus Dairo Tallu serta Kelompok Tani pada waktu Panen Raya Demplot Padidi Sumba Barat Daya**

kelompok tani, koperasi, PT. Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia Gresik, sejak awal 2020 lalu tim yang dibentuk Rachmat Gobel menggarap sejumlah demplot di berbagai desa dengan mengembangkan tanaman padi, jagung dan tanaman hortikultura seperti cabai, tomat dan bawang. Hasilnya sangat mengembirakan, dimana hasil produksi padi yang sebelumnya sekitar 4-5 ton per ha, naik menjadi 9-10 ton per ha.

Untuk tanaman tomat, jika sebelumnya menggunakan pupuk subsidi hanya bisa menghasilkan 24 ton per ha, naik menjadi 43,2 ton per ha dengan kualitas yang lebih baik, besar, isinya lebih tebal sehingga tidak cepat busuk. Hal yang sama juga terlihat pada penggunaan pada tanaman cabai. Produksinya naik dari sebelumnya hanya sekitar 8 ton per ha menjadi 12 ton per ha.

Kemudian sejak 2021, Rachmat Gobel memperluas proyek demplotnya ke provinsi lain di Sulawesi, termasuk ke Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Lumajang di Jawa Timur. Dengan skema yang sama yaitu kerjasama dengan pabrik pupuk, kelompok tani, hasil yang dicapai juga sangat mengembirakan, sama seperti yang dicapai di Gorontalo.



*Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan sedang melakukan panen raya demplot padi di Sumba Barat Daya, NTT tanggal 5 April 2021.*

Pada panen bersama Kecamatan Wewewa Timur, SBD pada 5 April 2021, kelompok tani Ndara Tana yang mengelola demplot melaporkan bahwa pemakaian pupuk nonsubsidi terbukti mampu meningkatkan produktivitas kelompok ini dari sebelumnya hanya sekitar 5 ton menjadi 9 ton. "Hasilnya bagus. Dengan pupuk subsidi cuma menghasilkan sekitar 5 ton per hektar, tapi dengan pupuk non-subsidi menjadi 9,4 ton per hektar," kata Ketua Kelompok Tani Ndara Tanah, Andreas Umbu Wosa.

Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rachmat Gobel melakukan kerjasama mengembangkan demplot dengan 5 kelompok tani dari Desa Mendak, Desa Segulung, Desa Ngeranget, Desa Padas, dan Desa Tileng. Tetap menggandeng PT. Pupuk Kaltim, melalui kelompok tani ini ia menyerahkan 5 ton pupuk subsidi. Karena kesibukan jadwal kerja, bantuan diserahkan melalui Staf Khususnya Nining Indra Shaleh dan dihadiri oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Jawa Timur VIII Soehartono, Wali Kota Kota Madiun Maidi, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur ibu Sri Sajekti Sudjunadi, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Madiun Taupan Devyanto, dan perwakilan dari PT. Pupuk Kaltim.

Berdasarkan pengalamannya itu, menurut Rachmat Gobel, saat ini dibutuhkan suatu gerakan yang masif dan bersinergi untuk melakukan pencerahan kepada petani bahwa pemakaian pupuk nonsubsidi jauh lebih menguntungkan. Tidak hanya itu, petani juga akan lebih mandiri karena tidak lagi tergantung pada bantuan subsidi pupuk dari pemerintah.

Sebetulnya bagi petani, akan sangat menguntungkan jika pemakaian pupuk nonsubsidi ditingkat, dan pupuk subsidi dikurangi bahkan bisa dihapus. Anggaran subsidi pupuk yang jumlahnya sangat besar setiap tahunnya, bisa dialihkan ke dalam bentuk bantuan yang lebih produktif seperti program peningkatan teknologi dan program lain yang lebih strategis.

Jangan diartikan, ajakan meningkatkan penggunaan pupuk nonsubsidi berarti mengurangi bantuan untuk petani, tapi dananya dialihkan ke program yang lebih produktif. Bayangkan saja, dengan kebutuhan pupuk subsidi yang sebesar Rp 67,12 Triliun per tahun (tahun 2021), jika dipakai untuk membangun irigasi, infrastruktur pertanian, menyediakan benih berkualitas, dan bantuan alat mesin pertanian, tentu petani akan lebih maju dan sejahtera.

Dalam berbagai kesempatan Rachmat Gobel selalu menegaskan, pemberdayaan petani harus dilakukan dalam program yang terintegrasi sehingga solusinya bisa lebih menyeluruh. Dalam istilah Rachmat Gobel, pemberdayaan petani harus menggunakan konsep *agri solution*, dimana berbagai masalah yang ada tidak hanya dilihat dari satu sektoral aja. Inilah yang tengah dilakukan melalui proyek *demplot* yang kini kian tersebar di berbagai daerah.

Setiap kelompok tani dirangsang untuk memikirkan berbagai masalah yang mereka hadapi, dan kemudian mencari solusinya. Dalam hal ini, kemudian Rachmat Gobel bersama tim mencarikan solusi. Karena itulah, bantuan yang diberikan kepada kelompok tani tidak sebatas dukungan pengadaan pupuk non subsidi, tapi juga kebutuhan lain yang diperlukan kelompok tani yang menjadi peserta *pilot project demplot*.

**Dalam hal ini, kemudian Rachmat Gobel bersama tim mencarikan solusi. Karena itulah, bantuan yang diberikan kepada kelompok tani tidak sebatas dukungan pengadaan pupuk non subsidi, tapi juga kebutuhan lain yang diperlukan kelompok tani yang menjadi peserta *pilot project demplot*.**

Ia juga mengedepankan, pentingnya petani melalui kelompok masing-masing meningkatkan kualitas usaha taninya, salah satunya adalah membentuk koperasi. Banyak hal yang bisa dilakukan petani secara mandiri melalui koperasi, mulai dari mendapatkan bibit unggul, kebutuhan pupuk, insektisida, alsinta sampai pemasaran.

*"Dalam mengembangkan pertanian, menurut Rachmat Gobel, tidak boleh terpisah, tetapi terintegrasi dengan pengembangan ekonomi lainnya seperti Koperasi atau UMKM. Pengembangan Koperasi dan UMKM di sektor pertanian menjadi linear dengan penyerapan hasil pertanian, semakin bagus badan usaha UMKM pertanian, maka semakin besar hasil pertanian yang terdistribusikan,"* kata Rachmat Gobel.

Melalui Kelompok Koperasi Rachmat Gobel (KK RG), Ia sudah banyak memberikan bantuan kepada kelompok tani dan koperasi yang mereka bentuk. Sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan iklim koperasi pertanian yang baik, melalui KK RG, Ia menyalurkan bantuan modal sesuai kebutuhan masing-masing yang rata-rata berkisar Rp 300 juta-Rp 500 juta. Bantuan ini tidak sepenuhnya dalam bentuk tunai, tetapi 70% berupa pupuk, bibit untuk pupuk dan 30% sisanya dalam bentuk uang tunai.



Banyak pengusaha dan asosiasi industri mengeluhkan praktik tidak sehat dalam lelang pengadaan di instansi pemerintah maupun BUMN. Mereka sering dikalahkan karena berbagai hal yang tidak masuk akal. Menurut Rachmat Gobel, dari informasi yang ia dapat dari asosiasi industri, seringkali terjadi pemenang sudah ditetapkan sebelum lelang diselenggarakan atau dikenal sebagai praktik ijon.





# BAB IV

## OPTIMALISASI PASAR NASIONAL UNTUK PRODUK DALAM NEGERI

**S**ETIAP negara berkepentingan untuk menghidupkan produksi dalam negeri atau produk nasionalnya. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus menjadi prioritas dan mutlak, bahkan harus diakselerasi. Produk dan pasar nasional wajib dilindungi dari gempuran produk impor.

Namun sayangnya, Indonesia bisa dikatakan belum berhasil secara efektif melindungi dan menghidupkan produk dalam negeri. Keberpihakan terhadap produk nasional dirasakan masih lemah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, produk impor kian merajalela masuk, dan telah sangat merugikan bagi prospek pengembangann produk nasional.

“Memprihatinkan, pasar dalam negeri kita yang seharusnya menjadi modal utama untuk mengembangkan produk nasional, kian hari semakin digerogoti produk impor. Kebijakan yang lebih dan tegas dalam melindungi pasar dalam negeri sangat dibutuhkan agar pasar kita yang besar ini betul-betul menjadi modal pengembangan produk nasional. Ini sangat penting, karena terkait dengan kepentingan nasional kita sebagai bangsa yaitu ketahanan dan kemandirian ekonomi secara menyeluruh,” kata Rachmat Gobel.



*Rachmat Gobel melakukan kunjungan ke pabrik sepeda dalam negeri*



*Rachmat Gobel bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunawan Sadikin meninjau alat ventilator buatan dalam negeri milik PT. PHCI*



*Rachmat Gobel mengunjungi pasar guna melihat harga-harga sembako pada saat pandemi Covid-19, di Pasar Kota Gorontalo.*

## Lahan Subur Produk Impor

Indonesia adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia sehingga tergabung dalam kelompok negara G-20. Sejumlah lembaga internasional seperti *Pricewaterhouse Coopers (PwC)* menyebutkan, pada 2030 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan *Purchasing Power Parity* diperkirakan akan mencapai US\$ 5,42 triliun dan masuk 10 besar dunia, dari saat ini berada dalam posisi 16 besar. Angka ini akan terus meningkat naik menjadi US\$ 10,52 triliun pada 2050 sehingga masuk ke posisi 4 besar dunia setelah China, India dan Amerika Serikat.

*"Proyeksi itu menunjukkan betapa besarnya potensi pasar dalam negeri kita ke depan. Ini harus dijaga agar tidak hanya menjadi lahan subur produk impor. Keberpihakan terhadap produk dalam negeri menjadi satu keharusan agar berkembang dan mampu bersaing menghadapi produk asing,"* kata Rachmat Gobel.

Dari tahun ke tahun serbuan produk impor memang terlihat semakin deras, nilainya melonjak tajam. Tidak hanya mengambil alih pasar produk lokal, arus impor ini juga telah menggerus surplus neraca perdagangan dan kian mengancam keseimbangan eksternal perekonomian nasional.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan impor dalam 10 tahun terakhir ini jauh melebihi ekspor. Sepanjang periode 2010-2020, nilai impor naik pesat mencapai rata-rata 16,19%, sementara ekspor hanya meningkat rata-rata 10%. Inilah membuat trend surplus neraca perdagangan terus mengalami penurunan, dan mengancam keseimbangan eksternal perekonomian nasional.

Bahkan, dalam 10 tahun terakhir ini neraca perdagangan beberapa kali mengalami defisit, suatu yang sangat jarang terjadi pada sejarah perekonomian nasional periode sebelumnya. Dalam rentang 2010-2020, defisit neraca perdagangan defisit sebanyak 5 kali yaitu pada tahun 2012 sebesar US\$ 1,66 miliar, 2013 sebesar US\$ 4,07 miliar, 2014 sebesar US\$ 2,57 miliar. Kemudian pada 2018 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 8,7 miliar dan 3,04 miliar.

| Perkembangan Neraca Perdagangan 2010-2020 (US\$ miliar) |        |       |        |       |       |        |        |        |        |        |        |                       |
|---|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Keterangan  | 2010   | 2011  | 2012   | 2013  | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Rata-Rata Pertumbuhan |
| Ekspor  | 157,77 | 203,4 | 190,03 | 182,6 | 176,3 | 150,39 | 144,48 | 169,82 | 180,01 | 167,68 | 163,31 | 10,39%                |
| Impor   | 135,66 | 177,4 | 191,69 | 186,6 | 178,8 | 142,69 | 136,65 | 157,98 | 188,71 | 170,72 | 142,57 | 16,19%                |
| Surplus/<br>Defisit                                     | 22,11  | 26,01 | -1,66  | -4,07 | -2,57 | 7,70   | 8,83   | 11,84  | -8,70  | -3,04  | 21,74  |                       |

Sumber: BPS 2021 (diolah)

Jika kecenderungan ini tidak bisa segera teratasi, tekanan terhadap keseimbangan eksternal bisa dipastikan akan terus berlanjut dan kian meningkat. Ini tentu akan membahayakan stabilitas perekonomian secara menyeluruh, seperti terhadap upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya ekonomi dalam negeri, penyerapan tenaga kerja dan nilai tukar rupiah dan pada akhirnya akan melemahkan kemandirian bangsa dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang kian ketat.

## Sektor Pangan Terancam

Berdasarkan klasifikasi penggunaan produk, laju pertumbuhan impor terutama terjadi pada barang konsumsi. Impornya sepanjang 2010-2020 mengalami peningkatan 48,8 % atau jauh di atas rata-rata pertumbuhan total impor 16,19%. Ini membuat porsi impor pangan terhadap total impor naik dari 7,36% pada 2010 menjadi 10,35% pada 2020. Pada periode yang sama, impor untuk bahan baku dan penolong naik 17,5% atau relatif sama dengan pertumbuhan total impor sehingga porsinya relatif stabil sekitar 72,9%. Untuk impor barang modal cenderung turun yaitu minus 1,47%, sehingga porsinya turun dari sekitar 19,84% pada 2010 menjadi 16,62% pada 2020.



*Sebuah situs berita [agroindonesia.co.id](http://agroindonesia.co.id) membuat ilustrasi tentang impor beras di tengah panen padi*

Dilihat secara lebih rinci, peningkatan impor barang konsumsi itu berasal dari impor poduk pangan, dimana pertumbuhannya sepanjang 2010-2020 mencapai 58,7%. Sebagai gambaran, menurut data BPS, pada 2010 impor bahan pangan baru mencapai US\$ 9,75 miliar, pada 2020 sudah mencapai

US\$ 15,44 miliar sehingga pangasanya terhadap total impor naik dari sekitar 7% menjadi 11%.

Tidak hanya nilainya yang meningkat, ragam produknya juga semakin luas. Impor pangan mulai dari gula, beras, gandum, jagung, kedelai, susu, kakao, daging, bawang putih, cabai, kentang, ubi kayu, lada, garam sampai tembakau.

Untuk 2021, menurut BPS, sampai semester I (Januari-Juni) impor pangan sudah mencapai US\$ 6,13 miliar. Nilai impor terbesar adalah gandum sebesar US\$ 1,55 miliar, gula senilai US\$ 1,49 miliar, kedelai US\$ 873,3 juta, susu US\$ 425,8 juta, kakao US\$ 286,3 juta dan daging US\$ 276,5 juta. Berikutnya, tembakau US\$ 274,2 juta, bawang putih US\$ 196,2 juta, jagung 99,8 juta, cabai US\$ 59,4 juta, garam

*"Data-data itu membuat miris. Bagaimana bisa, sebagai negara agraris dengan lahan yang luas, tanah yang subur, laut yang luas, ketergantungan Indonesia terhadap impor pada komoditi pangan terus meningkat,"* kata Rachmat Gobel.

## Industri Manufaktur dan Deindustrialisasi

Serbuan produk impor juga sangat dirasakan pada sektor industri manufaktur. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan impor produk industri manufaktur rata-rata 32%. Yang sangat memprihatinkan, pertumbuhan ini juga terjadi pada barang-barang yang dulu dikenal sebagai produk unggulan Indonesia seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), kayu olahan. Mengacu pada data BPS, sepanjang 2010-2020 impor peralatan listrik naik 50,22%, TPT 37,06%, produk kayu olahan 39,01%.

Dan yang tidak kalah memprihatinkan, serbuan impor juga datang dari produk industri yang mana seharusnya Indonesia mempunyai daya saing kuat, seperti industri plastik, produk logam dasar, makanan olahan, karet olahan, karena potensi bahan bakunya tersedia melimpah di Indonesia. Sepanjang 2010-2020, impor bahan plastik mengalami peningkatan 62,21%, produk logam dasar naik 40,39%, makanan olahan 82,01%, karet olahan 31,56%.

Serbuan produk impor sudah sangat mengganggu kondisi industri manufaktur nasional, kinerjanya merosot tajam. Laju pertumbuhannya yang dulu selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi leading sector, dalam satu dekade terakhir kondisinya terseok-seok. Kontribusi sektor ini



*Sebuah situs berita Sindonews.com membuat ilustrasi tentang impor baja murah China*

terhadap perekonomian anjlok, dari dulu mencapai sekitar 30% PDB, dalam 10 tahun terakhir turun menjadi 20% PDB.

Pada tahun 2010 kontribusi terhadap PDB masih sekitar 28%, tapi pada tahun 2020 lalu sudah turun ke posisi 19% PDB atau mengalami penurunan hampir 10% dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Oleh karena itulah berbagai kalangan mengingatkan bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi.

Meski deindustrialisasi sering dianggap lumrah dan terjadi secara global, apa yang terjadi di Indonesia dinilai berlangsung terlalu cepat dan terjadi saat PDB masih tergolong rendah yaitu sekitar US\$ 4.000 per tahun. Negara lain seperti Malaysia dan Thailand juga mengalami penurunan kontribusi industri pengolahan, namun berlangsung lebih lambat yaitu hanya turun sekitar 4% dalam 10 tahun terakhir. Bahkan di Korea Selatan, deindustrialisasi baru terjadi pada saat pendapatan per kapita negara ini sudah mencapai di atas US\$ 33.000 per tahun.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia deindustrialisasi di Indonesia terjadi terlalu dini atau prematur. Padahal, saat ini Indonesia

sangat membutuhkan kinerja industri manufaktur yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, mendorong transformasi ke produk yang bernilai tambah tinggi, memperkuat transfer teknologi.

Data-data tersebut mengisyaratkan, betapa pentingnya untuk melakukan restorasi secara menyeluruh di bidang perekonomian karena masalah yang dihadapi sangat struktural. Kebijakan ekonomi saat ini belum mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi produk nasional untuk berkembang dan mempunyai daya saing kuat.

Jika yang terjadi saat ini tidak bisa diatasi atau terus berlanjut, fondasi struktur ekonomi nasional akan rapuh menghadapi persaingan global yang kian ketat. Negeri ini sangat membutuhkan industrialisasi agar bisa mewujudkan visi menjadi negara maju pada 2045 mendatang.

*"Kegagalan kita melakukan restorasi di berbagai sektor ekonomi akan membuat visi membawa Indonesia menjadi salah satu Negara Industri Maju ke pentas dunia, hanya akan menjadi mimpi. Harus ada gebrakan untuk memperbaiki kondisi industri nasional saat ini,"* kata Rachmat Gobel.

## Bentengi Pasar Domestik

Membentengi atau memproteksi pasar domestik harus menjadi prioritas utama saat ini dengan membatasi impor produk tertentu dengan memperketat persyaratan, dan menerapkan berbagai standar *World Trade Organization* (WTO). Proteksi sangat lazim dilakukan, tidak hanya oleh negara berkembang, namun negara maju juga melakukannya.

Harus diakui, tingkat liberalisasi perdagangan di Indonesia tergolong tinggi, sehingga barang impor dengan mudah bisa masuk. Instrumen hambatan dagang yang diterapkan masih sangat sedikit. Menurut data Kementerian Perindustrian, Indonesia hanya memiliki 102 *safeguard*, sementara negara lain seperti China memiliki 1.020 *safeguard*, Thailand 226, dan Filipina 307.

Untuk anti dumping, Indonesia hanya punya untuk 48 produk, Sedangkan India memiliki 280 dan Filipina 250 instrumen anti dumping. Begitu juga dengan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib yang disebut *technical barrier to trade*, Indonesia baru memberlakukan SNI Wajib pada 172 jenis produk, jauh lebih sedikit dibandingkan Uni Eropa sebanyak 4.004, China 1.170, Thailand 585, Filipina 250, dan Malaysia 227.

“Langkah memproteksi pasar dalam negeri masih jauh dari yang seharusnya bisa dilakukan, dan ini sangat merugikan. Proteksi harus diperkuat dan secara aturan WTO peluang itu sangat terbuka, sayangnya selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baik melalui Komisi maupun Fraksi Partai NasDem DPR RI saya akan berupaya untuk mendorong agar proteksi pasar dalam negeri ini diperkuat,” kata Rachmat Gobel.

Melihat situasi saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa serbuan produk impor sudah menjadi bahaya laten sehingga kebutuhan untuk memproteksi pasar dalam negeri sudah sangat mendesak. Tidak cukup hanya dengan himbauan, perlu kebijakan atau instrumen yang lebih jelas. Apalagi dengan kian berkembangnya pasar *e-commerce* yang menjadi salah satu pintu masuk produk impor.

Seperti terungkap dalam data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, paket kiriman *e-commerce* yang masuk ke Indonesia naik tajam. Pada 2018 jumlah paket barang impor melalui *e-commerce* baru mencapai 19,57 juta paket, pada 2019 sudah naik 57,92 juta paket dan angka ini terus meningkat. Mengutip hasil survei Katadata Insight Center, sebagian besar barang impor yang masuk melalui *e-commerce* adalah produk elektronik 37%, sepatu 26%, pakaian 21% dan gawai 16.

Dengan nilai transaksi yang sudah mencapai Rp 266,3 triliun pada 2020, pasar *e-commerce* Indonesia memang menjadi sangat menarik. Tak heran *platform e-commerce* asing tergiur untuk masuk ke Indonesia, bahkan melakukan investasi untuk membangun gudang dan menjual langsung di *platform* mereka.

Yang lebih memprihatinkan, banyak diantara produk yang ditawarkan *platform e-commerce* itu adalah produk UMKM dari luar negeri, sehingga sangat merugikan pelaku UMKM dalam negeri. Oleh karena itu, penataan *e-commerce* menjadi sangat penting dilakukan.

**“Langkah memproteksi pasar dalam negeri masih jauh dari yang seharusnya bisa dilakukan, dan ini sangat merugikan. Proteksi harus diperkuat dan secara aturan WTO peluang itu sangat terbuka, sayangnya selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baik melalui Komisi maupun Fraksi Partai NasDem DPR RI saya akan berupaya untuk mendorong agar proteksi pasar dalam negeri ini diperkuat,”**

Selain proteksi melalui perdagangan, memperkuat kebijakan hilirisasi industri juga menjadi langkah yang perlu mendapat prioritas. Lemahnya hilirisasi selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing sektor industri manufaktur selama ini karena sangat tergantung pada bahan baku dan bahan penolong impor. Disamping itu, langkah ini juga akan memperkuat ekspor yang selama ini didominasi oleh komoditi primer baik dari sektor pertambangan maupun agro.

*"Hilirisasi akan memberi nilai tambah yang tinggi pada komoditi primer di sektor tambang dan agro, menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa masuk ke kelompok negara maju,"* kata Rachmat Gobel.

## Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Serbuan produk impor juga terjadi dalam pengadaan barang pemerintah yang dibiayai APBN. Meski berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk memberi kemudahan terhadap produk dalam negeri dalam lelang yang diadakan Kementerian dan BUMN, dalam praktiknya tidak berjalan efektif.

Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2/M-Ind/Per/2014 misalnya, disebutkan bahwa untuk produk dalam negeri yang telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% harus mendapat preferensi harga dalam pengadaan barang oleh pemerintah dan BUMN. Bahkan

untuk produk dengan TKDN 40%, pemerintah dan BUMN diwajibkan menggunakannya.

Namun dalam praktiknya, aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Masih banyak keluhan dari pelaku dan asosiasi industri manufaktur kesulitan untuk memenangkan lelang pengadaan barang oleh pemerintah ataupun BUMN. Pasalnya, pelaksana lelang cenderung memenangkan produk impor.

*"Ini sangat disayangkan, karena setiap tahun alokasi dana APBN untuk pengadaan barang ini sangat besar. Tahun 2021 saja misalnya, alokasi dana untuk pengadaan*

**"Praktik semacam itu tidak boleh terjadi lagi, seharusnya instansi pemerintah dan BUMN menjadi pionir dalam penggunaan produk dalam negeri. Saya minta kepada pemerintah agar melakukan gebrakan dalam pengawasan pelaksanaan TKDN ini,"**

*barang dan jasa pemerintah mencapai lebih dari Rp 600 triliun, belum termasuk pengadaan BUMN. Ini harus menjadi pasar captive produk dalam negeri, tapi pada praktiknya tidak,"* kata Rachmat Gobel.

Oleh karena itu pengawasan terhadap pelaksanaan TKDN menjadi sangat penting dan krusial. Berdasarkan data dilapangan, meskipun sudah memenuhi TKDN 25% bahkan lebih, berbagai "permainan" telah menyebabkan produk dalam negeri tidak bisa memanfaatkan fasilitas preferensi harga yang disediakan pemerintah.

Banyak pengusaha dan asosiasi industri mengeluhkan praktik tidak sehat dalam lelang pengadaan di instansi pemerintah maupun BUMN. Mereka sering dikalahkan karena berbagai hal yang tidak masuk akal. Menurut Rachmat, dari informasi yang ia dapat dari asosiasi industri, seringkali terjadi pemenang sudah ditetapkan sebelum lelang diselenggarakan atau dikenal sebagai praktik ijon.

"Praktik semacam itu tidak boleh terjadi lagi, seharusnya instansi pemerintah dan BUMN menjadi pionir dalam penggunaan produk dalam negeri. Saya minta kepada pemerintah agar melakukan gebrakan dalam pengawasan pelaksanaan TKDN ini," kata Rachmat Gobel.





# Pelabuhan Anggrek akan Jadi **Lokomotif Kemajuan Gorontalo**



“Misi besarnya adalah membangun Gorontalo menjadi makmur dan maju. Ini bagian dari warisan untuk anak cucu kita semua. Kita bangga jika melihat senyum anak cucu kita semua.”

**Rachmat Gobel**

*Wakil Ketua DPR RI*



## Misi Besar di Balik Pengembangan Pelabuhan Anggrek dan Rencana Kawasan Produk Halal

Rachmat Gobel sebagai wakil rakyat dari Gorontalo, bersama sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat telah menyusun *roadmap* pembangunan daerah, yang disebut Visi Pembangunan Gorontalo 2051. Kini masyarakat Gorontalo harus semakin optimis, menuju terwujudnya Visi Pembangunan 2051 tersebut, yaitu Dari Daerah 5 Termiskin Menuju 5 Termakmur. Berbagai sarana dan prasana pendukung kian tersedia, satu diantaranya adalah dimulainya pengembangan Pelabuhan Anggrek yang sudah bertahun-tahun ditunggu-tunggu dan lainnya adalah rencana proyek pengembangan kawasan produk halal di provinsi ini. Ada misi besar di balik keduanya, yaitu mengubah potret masyarakat bumi Gorontalo dari gambar yang penuh kemiskinan menjadi kemakmuran.

Misi itu pastilah bukan hanya sebatas jargon, tapi adalah cita-cita luhur dari Rachmat Gobel, putera Gorontalo yang dedikasinya sudah terlihat nyata dalam berbagai bidang selama ini. Kiprahnya kian bergelora, setelah sebagian besar masyarakat Gorontalo menitipkan kepercayaan kepadanya, yang ditandai raihan suara tertinggi pada Pileg 2019. Bagi Rachmat Gobel ini adalah amanah besar yang sifatnya wajib diperjuangkan.

*"Mari bersama-sama kita mengubah potret masyarakat Gorontalo, dari provinsi miskin menjadi wilayah makmur. Mendorong pembangunan, mengangkat harkat dan martabat rakyat Gorontalo, membangun warisan yang menjadi kebanggaan generasi penerus,"* kata Rachmat Gobel saat acara penyerahan pengelolaan pelabuhan Anggrek kepada kepada PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT), dari pengelola sebelumnya Kantor Unit Penyelenggara Kelas II Pelabuhan Anggrek, Dirjen Perhubungan Laut pada Selasa (28/09,2001).

**"Mari bersama-sama kita mengubah potret masyarakat Gorontalo, dari provinsi miskin menjadi wilayah makmur. Mendorong pembangunan, mengangkat harkat dan martabat rakyat Gorontalo, membangun warisan yang menjadi kebanggaan generasi penerus,"**



***Seremonial peresmian pengelolaan pelabuhan anggrek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)***

Serah terima ini menjadi tanda, mulai berjalannya pengembangan pelabuhan Anggrek untuk 30 tahun ke depan. Membangun Anggrek menjadi pelabuhan hub logistik dan bagian rantai strategis untuk meningkatkan konektivitas, tidak hanya untuk Gorontalo dan tapi juga dalam skala nasional. Memperkuat posisi daerah ini sebagai pintu terdepan perdagangan luar negeri untuk kawasan Asia Timur Jauh seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan Hongkong.

Realisasi proyek ini tergolong cepat. Rencana induknya baru disahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Desember 2019 melalui surat keputusan KM No. 263 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek. Pembiayaannya diputuskan masuk dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang artinya sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Pada Juni 2021, Kementerian Perhubungan memutuskan untuk mempercayakan pengembangan Anggrek kepada PT AGIT karena proposal konsorsium ini dinilai paling meyakinkan sebagai pelaksana KPBU, dan pada September 2021 serah terima proyek sudah bisa terealisasi.



*Menteri Perhubungan sedang memberi penjelasan tentang pengembangan Pelabuhan Anggrek*



*Menteri Perhubungan dan Rachmat Gobel sedang meninjau pengembangan Pelabuhan Anggrek*



*Rachmat Gobel bersama dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia meninjau lokasi pelabuhan anggrek*

Diakui oleh Menteri Budi Karya, semangat investor yang tergabung dalam konsorsium AGIT memang luar biasa dan ini sangat membantu dalam mempercepat realisasi proyek ini. Dalam hitungan komersial atau bisnis, proyek ini sebetulnya tidak bisa dikatakan terlalu menjanjikan karena berada di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) sehingga risikonya sangat besar. Namun gairah konsorsium yang sangat tinggi, seperti dikatakan Menhub, adalah energi yang sangat membantu dalam pengembangan pelabuhan Anggrek ke depan.

“Semangat investor tergolong luar biasa, karena kalau sisi komersial proyek ini sebetulnya tidak begitu menarik. Tapi ada tantangan lain yang mungkin mereka lihat, yaitu pengembangan wilayah dan ini bisa menjadi menarik, serta memberi prospek yang luar biasa dalam jangka panjang, termasuk mendukung tol laut yang menjadi visi Presiden Jokowi,” kata Budi yang ikut hadir dalam acara penyerahan pengelolaan Anggrek.

Oleh karena itu Menhub berpesan agar investor untuk selalu ingat akan komitmennya sehingga harapan yang ditumpukan pada pengembangan pelabuhan Anggrek dapat berjalan sesuai target. Tidak sebatas dapat segera meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo serta kawasan sekitarnya, tapi juga memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian dan daya saing Indonesia, terutama untuk Kawasan Timur.

## Lokomotif Pembangunan

Sebagai putera daerah dan juga anggota legislatif dari daerah pemilihan Gorontalo, Rachmat Gobel sangat antusias dengan pengembangan pelabuhan Anggrek. Ia yakin, satu daerah akan lebih cepat maju dengan fasilitas transportasi yang berkualitas, terutama pelabuhan. Sejarah menunjukkan, kemajuan ekonomi dan peradaban berawal dari kawasan pelabuhan seperti terlihat pada proses pembangunan negara yang maju, di mana mereka memiliki fasilitas pelabuhan yang mumpuni.

“Kami akan mendorong agar investor yang menjadi pengelola untuk membangun kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha, agar misi menjadikan pelabuhan ini sebagai lokomotif pembangunan Gorontalo bisa segera terwujud. Investor harus bisa membangun sinergi agar bisa membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan *hinterland* yang ada di berbagai kabupaten. Ini akan membuka peluang usaha dan kegiatan ekonomi baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Rachmat Gobel.

Secara nasional, lanjut dia, pengembangan pelabuhan ini akan ikut berkontribusi mendorong Gorontalo untuk tampil sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pasalnya, terdapat potensi daerah ini di bidang agribisnis seperti komoditas jagung, cokelat, kelapa, perikanan serta berbagai hilirisasinya.

**Kami akan mendorong agar investor yang menjadi pengelola untuk membangun kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha, agar misi menjadikan pelabuhan ini sebagai lokomotif pembangunan Gorontalo bisa segera terwujud.**

Rachmat Gobel optimis, sinergi akan bisa membawa pelabuhan ini menjadi sentral pertumbuhan karena berada di area pengembangan berbagai komoditi pertanian di kawasan *hinterland* dan menjadi pendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Gorontalo-Paguyaman-Anggrek-Kwandang (Gopandang). Anggrek akan berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan, serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi.

Pengembangan Anggrek memang sudah lama mendapat perhatian khusus dari Rachmat Gobel. Dengan latar belakang pengalaman yang panjang sebagai pelaku dunia usaha, Ia sangat paham potensi dan peran strategis pelabuhan ini baik bagi pembangunan provinsi Gorontalo maupun nasional, terutama kawasan Indonesia Timur. Karena itulah, Rachmat Gobel memasukan pengembangan pelabuhan ini masuk dalam bagian strategi *roadmap* Visi Gorontalo 2051.

**Diakui banyak kalangan, peran Rachmat Gobel sangat besar dalam memacu progres pengembangan pelabuhan Anggrek, dengan terus menyampaikan aspirasi masyarakat Gorontalo kepada pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.**

Diakui banyak kalangan, peran Rachmat Gobel sangat besar dalam memacu progres pengembangan pelabuhan Anggrek, dengan terus menyampaikan aspirasi masyarakat Gorontalo kepada pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia sendiri juga mengakui, dukungan Presiden Jokowi melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Bappenas Suharso Manoarfa, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat membantu terealisasinya proyek ini.

"Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, sehingga aspirasi masyarakat Gorontalo untuk mempunyai pelabuhan dengan fasilitas modern ini bisa terealisasi," kata Rachmat Gobel.

## Pelabuhan Modern

Ruang lingkup proyek KPBU Pelabuhan Anggrek meliputi penyediaan dermaga untuk peti kemas yang dapat mengakomodir kapal bertambat sebesar 30.000 DWT, *general cargo* untuk mengakomodir kapal sebesar 10.000 DWT. Peningkatan kapasitas dan kualitas kegiatan bongkar muat barang, peti kemas, curah, serta penyediaan dan pelayanan jasa terkait kepelabuhan. Pengembangan pelabuhan ini perlu dilakukan karena kapasitas operasional dermaga saat ini sudah melampaui standar kinerja pelabuhan, di mana fasilitas yang tersedia sudah tidak memadai untuk melayani secara optimal kapal peti kemas dan kargo ukuran besar.

Pelabuhan logistik ini akan dikembangkan dalam dua tahap dimana tahap I berlangsung 2021-2022 dan tahap II 2031-3032. Secara total dibutuhkan investasi Rp 1,4 triliun yang sepenuhnya ditanggung oleh investor. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dengan membangun dermaga peti kemas yang sanggup mengakomodir kapal dengan bobot 30.000 DWT dan 10.000 DWT untuk kapal *general cargo*.

Tidak sebatas itu, AGIT sebagai investor dan pengelola juga telah menyiapkan disain strategi untuk menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan modern, yang dilengkapi perluasan terminal, peningkatan layanan bongkar muat barang dan peti kemas, serta curah, dan berbagai fasilitas lain seperti peti kemas berpendingin (*reefer container*). Hal menarik, AGIT juga mengadopsi konsep *green port* yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan *sustainable development goals* (SDGs).

## Produk Halal dan Potensi Budaya

Menurut Rachmat Gobel, sebagai wilayah yang tergolong 3T, Gorontalo dituntut untuk bisa melakukan perubahan besar agar masyarakatnya tidak tergilas arus globalisasi. Tanpa ada perubahan nyata dalam skala besar, kondisi masyarakat menjadi rawan terhadap berbagai masalah sosial dan ekonomi. Kondisi ini akan membuat mereka rentan terhadap berbagai hal yang mengurangi rasa aman dan nyaman.

“Tanpa perubahan besar, potret kemiskinan akan tetap menghiasi sebagian besar rakyat Gorontalo. Di tempa arus globalisasi yang kian deras, kondisi ini akan membuat repot Kalpoda, Korem, Kejaksaan Tinggi, termasuk Angkatan Laut,” katanya.

Setelah berhasil mendorong realisasi pengembangan pelabuhan Anggrek, Rachmat Gobel tengah menyiapkan gagasan untuk mengembangkan Gorontalo sebagai salah satu pusat kawasan pengembangan produk halal. Ia melihat, potensi ke arah ini sangat besar, sumber daya alam dan kultur atau budaya masyarakat sangat mendukung.

Gagasan ini disampaikan setelah kunjungan Rachmat Gobel ke Turki guna menghadiri undangan pemerintah Turki dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau *Organization of Islamic Cooperation (OIC)* dalam penyelenggaraan *World Halal Summit ke 7 dan World Halal Expo ke-8* di Istanbul, Turki pada 25-28 November 2021.

Dalam kunjungannya bersama delegasi DPR RI dan sejumlah tokoh dari Gorontalo, Rachmat Gobel sangat terkejut oleh kenyataan bahwa produsen produk halal dunia masih dikuasai negara-negara dengan penduduk Islam minoritas seperti Brasil, Australia, Prancis, Jerman, dan Selandia Baru. Di sisi lain, potensi pasar produk halal dunia terus berkembang yang saat ini sudah mencapai US\$ 7 triliun dan diproyeksikan naik menjadi US\$ 11 triliun pada 2024. Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar, Indonesia harus lebih fokus untuk membidik pertumbuhan pasar produk halal dunia ini.

Selain memenuhi undangan Turki dan OKI, kunjungan Rachmat Gobel ke negara ini juga dimaksudkan untuk melihat langsung pengembangan industri produk halal, khususnya Turki sendiri. Negara ini mampu membangun industri halal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)-nya dengan kemampuan teknologi yang dimiliki negara itu.

“Banyak negara Islam lainnya yang memproduksi produk halal, namun Turki merupakan negara dengan mayoritas muslim yang mampu membangun industri, bukan sekadar membangun pabrik. Struktur industri halalnya sangat kuat. Kalau perlu, untuk mengembangkan industri halal di dalam negeri, kita bekerja sama dengan Turki atau

Setelah berhasil mendorong realisasi pengembangan pelabuhan Anggrek, Rachmat Gobel tengah menyiapkan gagasan untuk mengembangkan Gorontalo sebagai salah satu pusat kawasan pengembangan produk halal.

negara muslim lainnya yang hadir pada ajang ini,” katanya seusai melibat berbagai produk yang tampil dalam expo.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, lanjut Rachmat Gobel, Indonesia harus banyak belajar agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk halal dunia, tapi juga menjadi pemain atau produsen utama dan Gorontalo mempunyai potensi besar untuk berperan. Potensi sumber daya alam tersedia seperti komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, budaya atau kultur masyarakat juga sangat kental dengan nilai-nilai Islami.

Sejak masuk beberapa abad lalu, agama Islam berkembang pesat di Gorontalo sehingga nilai-nilai kehalalan sudah melekat kuat sejak ratusan tahun dalam setiap kegiatan hidup masyarakat daerah ini. Praktik halal sudah menjadi bagian yang menyatu pada sebagian besar masyarakat yang mendapat julukan Serambi Madinah ini, tidak sulit bagi mereka menerima syarat kehalalan dari setiap proses produksi yang mereka lakukan.

Dari pengalamannya melihat begitu banyak kehidupan masyarakat dalam setiap kunjungan ke berbagai pelosok, Rachmat Gobel berkesimpulan bahwa masyarakat Gorontalo mempunyai semangat yang kuat untuk maju. Ini terbukti, banyaknya tokoh nasional yang lahir dari darah Gorontalo. Sebut saja Dr. Ing BJ Habibie, ahli teknologi pesawat terbang yang sukses sebagai Presiden dalam mengawal peralihan dari era orde baru ke era reformasi, sehingga Indonesia bisa berkembang seperti sekarang. Kemudian ada John Ario Katili, saintis di bidang geologi yang juga merupakan Doktor Geologi pertama di ITB dan juga Indonesia. HB Jasin seorang sastrawan terkenal, yang sampai saat ini sulit dicariandingannya. Kemudian, Jusuf Syarif (JS) Badudu seorang ahli bahasa terkemuka dan Thayeb Mohammad Gobel yang merupakan perintis industri elektronika nasional, yang juga merupakan ayah dari Rachmat Gobel.

“Gorontalo telah melahirkan banyak tokoh nasional, mereka lahir dan besar dalam

**Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, lanjut Rachmat Gobel, Indonesia harus banyak belajar agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk halal dunia, tapi juga menjadi pemain atau produsen utama dan Gorontalo mempunyai potensi besar untuk berperan.**

semangat budaya Gorontalo. Ini membuktikan kultur Gorontalo mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kuat dan produktif. Ini adalah potensi dan saya melihat jika disediakan pemantik, gelora masyarakat Gorontalo akan bangkit untuk mewujudkan kemakmuran,” kata Rachmat Gobel.

Oleh karena itu, Rachmat Gobel optimis, gagasan menjadikan Gorontalo sebagai pusat kawasan produk halal adalah sesuatu yang realistis, bukan sesuatu utopis. “Mari kita semuanya bersinergi untuk membangkitkan semangat membangun warisan yang membanggakan bagi generasi penerus. Inilah misi di balik pengembangan pelabuhan anggrek dan gagasan membangun kawasan produk halal,”.



“

“Setiap tahapan pembuatan undang-undang harus dilalui dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab agar dapat menciptakan aturan yang antisipatif dan responsif, sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi terciptanya solusi untuk seluruh lapisan masyarakat,”

”



# BAB V

## LEGISLASI UNTUK FONDASI KEBIJAKAN YANG LEBIH RESPONSIF

**M**ENGHASILKAN peraturan perundangan yang menjamin terciptanya fondasi yang kuat bagi kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kepentingan nasional adalah semangat yang selalu dibawa oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam menjalankan fungsi legislasinya. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat berbagai peraturan, setiap undang-undang haruslah mewakili aspirasi rakyat, mampu menciptakan iklim yang adil bagi masyarakat dan antisipatif terhadap berbagai perkembangan dinamika sosial, politik dan ekonomi.

Oleh karena itu setiap tahapan dalam proses pembuatan undang-undang haruslah dilaksanakan secara serius dan penuh tanggung jawab. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Undang-undang yang dihasilkan harus bersifat antisipatif terhadap perkembangan dinamika kebutuhan masyarakat kedepan, dan responsif terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

*"Setiap tahapan pembuatan undang-undang tersebut harus dilalui dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab agar dapat menciptakan aturan*

*yang antisipatif dan responsif, sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi terciptanya solusi untuk seluruh lapisan masyarakat,"* kata Rachmat Gobel.

Untuk periode 2020-2024, ada 248 Rancangan Undang Undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dari jumlah itu, 33 RUU diantaranya masuk dalam Prolegnas Prioritas seperti ditetapkan pada Sidang Paripurna DPR RI 23 Maret 2021.



**Rapat Badan Musyawarah DPR RI membahas mengenai Penetapan Prolegnas Prioritas tahun 2021 untuk dijadwalkan dalam Rapat Paripurna DPR RI**

Sejalan dengan posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dan anggota Fraksi Partai Nasdem, dari 33 RUU yang di tetapkan dalam Prolegnas Prioritas itu, 11 (sebelas) RUU yang menjadi fokus Rachmat Gobel dan Fraksi Partai NasDem. RUU ini akan didorong secara maksimal masuk dalam pembahasan dan disahkan menjadi Undang-Undang.

RUU tersebut adalah (1) RUU Perlindungan Data Pribadi; (2) RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; (3) Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan; (4) RUU Pendidikan Kedokteran; (5) RUU Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; (6) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; (7) RUU Masyarakat Hukum Adat; (8) RUU Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (9) RUU Badan Usaha Milik Desa; (10) RUU Badan Usaha Milik Negara; (11) RUU Energi Baru dan Terbarukan.



*Rachmat Gobel menghadiri rapat Paripurna DPR RI pembahasan prolegnas Prioritas tahun 2021*

## RUU Perlindungan Data Pribadi

Rancangan Undang Undang ini merupakan usulan pemerintah dan masuk ke dalam *list* Prolegnas Prioritas tahun 2021 Nomor 23 . Fraksi Partai NasDem mengawal dan mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera dituntaskan pembahasan dan disahkan. Ini bukan karena Kementerian Komunikasi dan Informasi di pimpin oleh kader Partai NasDem namun kebutuhan terhadap kehadiran undang undang yang mengatur pengelolaan data pribadi sudah sangat mendesak. UU ini sangat penting di era digital sekarang ini untuk menghindari terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

Sebagai gambaran, pada Mei 2020 diketahui bahwa ada akun yang menyebutkan bahwa mereka menguasai 91 juta data pengguna dan 7 juta data *merchant* Tokopedia. Akun ini menyatakan sudah menjual 15 juta data



**Rachmat Gobel bertemu dengan Johny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika) membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**

tersebut yang mencakup gender, lokasi, username, nama lengkap pengguna, alamat *e-mail*, nomor ponsel, diduga dijual disitus gelap (*dark web*).

Kemudian pada akhir Mei 2021, sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telpon, *e-mail* dijual di situs gelap (*dark web*), diduga bocor ke publik yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi masyarakat.

Harus diakui, secara umum kesadaran bahwa data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus di lindungi, masih sangat rendah. Ini antara lain terlihat banyaknya postingan yang mengandung konten data pribadi baik di sejumlah *platform* media sosial maupun diberbagai grup jejaring sosial. Selain itu data pribadi juga harus dilindungi saat masyarakat menggunakan platform system elektronik (*e-commerce*, transportasi *online*, *fintech*, dan lain-lain).

Oleh karena itu, dalam dunia digital yang berkembang pesat seperti saat ini, kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data masyarakat serta



*Unsur pimpinan DPR RI melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi mengenai pembahasan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi)*

mengurangi potensi kejahatan yang dilakukan oleh penyimpan data terhadap pemilik data. Semangat menghadirkan UU ini sama dengan Undang-Undang ITE yakni kesadaran atas maraknya kejahatan pada dunia *cyber*.

RUU Perlindungan Data Pribadi diajukan pemerintah ke DPR RI pada tanggal 24 Januari 2020 melalui Surat Presiden (Supres) Nomor: R-05/Pres/01/2020. Surat ini ditindaklanjuti oleh DPR RI pada 3 Februari 2020 melalui Rapat Konsultasi pengganti Bamus antara Pimpinan DPR RI dan pimpinan Fraksi pada masa persidangan II tahun Sidang 2019-2020 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan tingkat I bersama dengan Pemerintah.

Sampai saat ini proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dalam tahapan pembahasan di Komisi I DPR RI. Dalam dinamika pembahasannya terdapat beberapa poin-poin krusial yang menjadi pembahasan, yakni (1) Data pribadi yang bersifat elektronik dan non elektronik; (2) Hak subjek data dan kewajiban pengendalian data; (3) Pelanggaran dan sanksi; (4) Otoritas lembaga independen pengawas perlindungan data pribadi.



*Rapat Paripurna DPR RI perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*

Dalam dinamika pembahasan, masih terjadi ketidaksepahaman antara Komisi I dengan pemerintah, khususnya mengenai otoritas Lembaga independent pengawas perlindungan data pribadi. Komisi I menginginkan lembaga pengawas ini merupakan institusi yang langsung bertanggung jawab dengan presiden sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dapat dilakukan secara objektif. Namun pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kominfo menginginkan Lembaga pengawas tersebut berada dibawah Kementerian.

Permasalahan tentang lembaga independen ini yang membuat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sampai saat ini belum menemukan titik temu antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah.

Melihat permasalahan tersebut Rachmat Gobel akan melakukan komunikasi politik khususnya dengan Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan kader Partai NasDem dengan Komisi I DPR RI. Langkah ini dimaksud untuk mencari titik temu antara DPR dan pemerintah sehingga RUU ini bisa segera disahkan. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

*"Harus dicari ada titik temu agar pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi bisa tuntas. Saya akan terus melakukan upaya-upaya politik agar segera bisa memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia,"* kata Rachmat.

## RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah masuk dalam *list* Program Legislasi Nasional Prioritas nomor 27. Merupakan usul inisiatif dari pemerintah dan masuk dalam tahap pembahasan yang berproses pada pembicaraan tingkat I. RUU ini merupakan pengintegrasian antara UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengintegrasian dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar lebih komprehensif. Ini akan membantu pendanaan daerah secara merata dan proporsional dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.



*Rapat Badan Musyawarah DPR RI membahas mengenai RUU HKPD*

RUU ini mencakup pemberian sumber-sumber pendanaan (*revenue assignment*) diantaranya : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan potensi masing-masing daerah; (2) Dana Bagi Hasil (DBH) guna mengurangi ketimpangan vertical antara Pusat dan Daerah; (3) Dana Alokasi Umum (DAU) guna mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah; (4) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan (5) Pemberian insentif fiskal dan pembiayaan sebagai instrument akselerasi pembangunan daerah, serta Dana Otsus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Dalam pembahasan RUU ini Rachmat Gobel berperan sebagai anggota Panja dari Fraksi Partai NasDem untuk melakukan pembahasan di Komisi XI DPR RI. Ia berperan aktif dalam pembahasan dan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk memberikan arahan agar substansi dari RUU dapat meningkatkan pembangunan di daerah. Tujuannya adalah agar pengawasan terhadap dana APBN yang disalurkan ke daerah serta APBD bisa berjalan efektif dan dikelola secara efisien untuk keberhasilan pembangunan di daerah.



***TIM membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi Partai NasDem yang difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sedang membahas DIM RUU HKPD***

Dalam pembahasan di tingkat fraksi Partai NasDem ada beberapa poin penting yang mendapat perhatian khusus dari Rachmat Gobel untuk dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan dibahas di Komisi

XI DPR RI. Diantaranya, (1) perlu perluasan defenisi daerah penghasil, dimana yang dimaksud dengan daerah penghasil kriterianya terdapat mulut tambang, sumur dan industri; (2) penambahan presentase jumlah pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), yang semula 15% menjadi 18 %; dan (3) fleksibelitas daerah dalam melakukan pencarian dana di luar dari APBN. Tiga poin inilah yang menjadi isu sentral yang dibawa Rachmat Gobel dan Fraksi Partai NasDem.

Dalam dinamika pembahasan di Komisi XI DPR RI, seluruh fraksi yang ada mendukung terbentuknya RUU ini, dan ditargetkan pada akhir tahun 2021 pembahasan sudah selesai untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

## RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Melalui pembahasan yang cukup panjang, pada 7 Oktober 2021 DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang Undang. RUU ini merupakan perubahan kelima dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diusulkan pemerintah pada 5 Mei 2021 dengan surpres Nomor : R-21/Pres/05.2021. Saat itu pemerintah mengusulkan judul dari RUU ini adalah RUU Ketentuan Perpajakan (KUP), namun dalam dinamika pembahasannya di DPR RI khususnya Komisi XI judul berubah nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

RUU HPP lahir untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang harus direspon agar roda pembangunan terus bisa bergerak cepat dan daya saing ekonomi Indonesia bisa terus ditingkatkan. Setidaknya Ada 3 (tiga) alasan penting yang menjadi latar belakang kelahiran UU ini yakni (1) terjadinya perlambatan ekonomi global; (2) adanya potensi stagnasi perekonomian Indonesia (*middle income trap*); dan (3) belum optimalnya daya saing Indonesia.

Substansi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini mengatur mengenai reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan Indonesia. UU ini mengusung konsep *omnibus law* dengan menyisir 3 Undang-Undang, yakni : UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (PPH), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Langkah ini dengan tujuan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sejak awal pembahasan UU ini mendapat tanggapan beragam dari publik diantaranya terkait dengan pasal kenaikan PPN menjadi 11% dan

pajak sembako. Pasal ini dinilai sangat membebani masyarakat khususnya dari kelompok menengah kebawah. Pengenaan tarif PPN menjadi 11% akan membuat barang kebutuhan pokok menjadi naik. Dari kalangan dunia menilai, kenaikan tarif PPN bisa menjadi kontraproduktif dengan pemulihan ekonomi yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah akibat dari dampak pandemi Covid-19.



*Rapat Paripurna DPR RI Pengesahan RUU HPP menjadi Undang-Undang*

Dalam kaitan itulah, untuk menjembatani berbagai aspirasi tersebut, Fraksi Partai NasDem memberikan beberapa catatan di dalam dinamika pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Catatan-catatan ini pada prinsipnya harus menjadi peringatan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang ini.

Sikap Fraksi Partai NasDem tersebut dituangkan dalam Pandangan Mini Fraksi Partai NasDem dan dibacakan pada 29 September 2021, yakni :

1. Fraksi Partai NasDem bersepakat dengan Panja bahwa mengingat sifat RUU KUP yang mengatur perubahan beberapa Undang-undang sekaligus (UU

- KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai, UU Pengampunan Pajak), bahwa RUU KUP ini merupakan RUU yang menggunakan metode *omnibus law* dan diberi nama RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar mencerminkan substansi, maksud, dan tujuan pembentukan UU;
2. Berkaitan dengan KUP Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa:
    - a. Perlu adanya relaksasi dan rasionalisasi sanksi administratif terkait pemeriksaan WP dan OP dan yang berkaitan dengan keberatan dan banding harus sesuai semangat UU Cipta Kerja;
    - b. Penting Integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan NPWP serta perlunya menyesuaikan dengan RUU PDP yang sementara dibahas;
    - c. Pentingnya asistensi penagihan pajak global yang bersifat timbal balik, pengaturan tentang kuasa wajib pajak, pembatalan usulan kewenangan penangkapan/penahanan, moderasi pengaturan pengadilan secara *in absentia* dan pemidanaan korporasi, dan program pengungkapan sukarela wajib pajak untuk mendorong kepatuhan pajak.
  3. Berkaitan dengan PPh Fraksi Partai NasDem berpendapat perlunya perbaikan lapisan tarif PPh OP yang berpihak pada lapisan penghasilan terendah (Rp 60 juta) dan kenaikan tarif menjadi 35% untuk kelompok atas, tarif final yang kompetitif untuk pendalaman pasar keuangan, pengaturan ulang tarif PPh Badan sebesar 22% yang tujuannya untuk mendukung terjaganya basis pajak, penambahan *threshold* peredaran *bruto* tidak kena pajak untuk UMKM, pengaturan tentang penyusutan dan amortisasi, pembatalan usulan tentang GAAR dan AMT;
  4. Berkaitan dengan PPN komitmen keberpihakan Fraksi Partai NasDem sangat jelas kepada masyarakat menengah kebawah, bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial dibebaskan dari pengenaan PPN. Selain itu, skema PPN Final untuk sektor tertentu sebagai pengganti skema multitarif, penyesuaian tarif PPN secara bertahap sampai dengan 2025;
  5. Berkaitan dengan Cukai Fraksi Partai NasDem berpendapat perlu adanya penegasan ranah pelanggaran administratif dan prinsip *ultimum remedium* (penghentian penyidikan) pada tindak pidana cukai untuk kepentingan penerimaan negara dan kepastian hukum;

6. Berkaitan dengan Pajak Karbon Fraksi Partai NasDem berpendapat pentingnya komitmen penyusunan peta jalan (*roadmap*) pajak karbon dan pasar karbon bersama DPR, penetapan subjek, objek, dan tarif pajak karbon, dan insentif bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon;
7. Fraksi Partai NasDem berpendapat pentingnya mempertahankan fasilitas untuk WP UMKM yang diatur Pasal 31E UU PPh, penyesuaian tarif PPN secara bertahap seiring pemulihan ekonomi, perbaikan bracket penghasilan kena pajak untuk WP OP kelompok bawah, sekaligus mengatur *threshold* peredaran *bruto* tidak kena pajak sebagai bentuk pemihakan nyata bagi WP UMKM;
8. Fraksi Partai NasDem mengapresiasi kinerja panja RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dalam hal ini Pemerintah dan Anggota Komisi XI DPR RI yang telah bekerja secara intensif, tepat waktu dan tepat tujuan melakukan pembahasan RUU. Kerja intensif tersebut tercermin dalam rapat pembahasan yang dilakukan secara marathon dan terkoordinasi, dengan tetap berpegang pada tata tertib dan prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan yang profesional dan akuntabel;
9. Fraksi Partai NasDem mengapresiasi atas sensitivitas Pemerintah dan DPR dalam membahas RUU ini yang selalu mengedepankan kepentingan publik (masyarakat banyak) diatas kepentingan lainnya. Sensitivitas itu dapat tercermin dari beberapa hal diantaranya; yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dibebaskan dari pengenaan PPN, selain itu tetap mempertahankan fasilitas untuk WP UMKM yang diatur Pasal 31E UU PPh.

Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang berperan penting khususnya bagi tim penyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi Partai NasDem. Ia memberikan fasilitas bagi Tim untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) secara maksimal.

Arahan Rachmat Gobel kepada seluruh tim penyusun DIM adalah kehadiran UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan harus mampu mengkatrol pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan negara yang berasal dari pajak, serta harus mampu meningkatkan investasi di Indonesia khususnya dari luar negeri karena Rancangan Undang-Undang ini akan menyempurnakan seluruh sistem perpajakan di Indonesia.



*Rachmat Gobel bersama dengan Menteri Keuangan melakukan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

## RUU Prioritas Partai NasDem

Terkait dengan semangat restorasi, dalam Prolegnas Prioritas 2021 ada 4 RUU yang menjadi prioritas Partai NasDem yaitu RUU Pendidikan Kedokteran, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Masyarakat Hukum Adat. Dalam pandangan Partai NasDem kehadiran undang-undang yang terkait dengan 4 hal tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Oleh karena itulah, anggota Fraksi Partai NasDem akan memberikan perhatian lebih pada pembahasan 4 RUU tersebut agar bisa berjalan lancar dan bisa memenuhi aspirasi masyarakat dan menjadi solusi bagi peningkatan iklim kehidupan masyarakat luas.

## RUU Pendidikan Kedokteran

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran telah diusulkan dari periode 2014-2019 oleh anggota Fraksi Partai NasDem (Alm) Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih, MM., M.H, dan dilanjutkan pada priode 2019-2024. Dalam memperjuangkan RUU ini Fraksi Partai NasDem mendorong Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.



*Drs. H. Tamanuri menyerahkan pandangan Fraksi Partai NasDem terkait dengan penetapan usul inisiatif RUU Pendidikan Kedokteran menjadi usul dari DPR RI, sumber : humas DPR RI*

Perjuangan ini telah menemukan titik terang, dimana saat ini DPR RI telah menetapkan RUU ini menjadi usul inisiatif DPR pada 29 September 2021. Dengan ditetapkannya menjadi usul inisiatif DPR bisa dipastikan akan segera dilanjutkan untuk dilakukan pembahasan di tingkat I. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran penting Fraksi Partai NasDem, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panja penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran di Badan Legislasi (Willy Aditya).

Fraksi Partai NasDem telah melakukan langkah-langkah maju untuk menggandeng semua pihak dalam menyelesaikan RUU Pendidikan Kedokteran untuk segera masuk dalam pembahasan tingkat I.

Kehadiran Undang-Undang Pendidikan Kedokteran sudah menjadi suatu keharusan karena masyarakat saat ini banyak mengeluhkan mengenai penyebaran dokter, dan biaya pendidikan kedokteran yang mahal. Kedua masalah ini diungkapkan oleh beberapa perwakilan fakultas kedokteran dan dokter-dokter muda yang terdampak buruknya sistem Pendidikan kedokteran di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diadakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 1 September 2021.

Melihat desakan dan kebutuhan masyarakat Rachmat Gobel akan berupaya maksimal untuk mendorong RUU Pendidikan Kedokteran segera dilakukan pembahasan di tingkat I. Senada dengan desakan dan kebutuhan masyarakat, sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menegaskan "bahwa untuk saat ini dunia kedokteran Indonesia tengah menghadapi beragam penyakit generatif dan serangan virus biologis dan dilain pihak pendekatan kurikulum pendidikan kedokteran sangat kaku untuk mengkoordinasikan Kerjasama antara sains teknologi berbagai bidang. Kekakuan ini menyebabkan kelambatan antisipasi dokter dalam mengkoordinasikan masing-masing keahlian".

Dalam menyukseskan RUU Pendidikan Kedokteran Rachmat Gobel mengapresiasi serta mendukung Langkah yang dilakukan oleh Willy Aditya dengan menugaskan 3 Tenaga Ahli untuk mendampingi Willy Aditya dalam melakukan belanja masalah terkait dengan Pendidikan Kedokteran di beberapa Provinsi di Indonesia.

Sebagai Langkah awal dilakukan penjangkaran permasalahan di Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan seminar. Seminar itu telah digelar oleh DPW Partai NasDem Jawa Timur dilakukan pada 8 Juni 2021 dengan tema "Restorasi Humanisme Pendidikan Kedokteran" dan seminar 9 Juni 2021 di Fakultas Kedokteran

**"bahwa untuk saat ini dunia kedokteran Indonesia tengah menghadapi beragam penyakit generative dan serangan virus biologis dan dilain pihak pendekatan kurikulum pendidikan kedokteran sangat kaku untuk mengkoordinasikan Kerjasama antara sains teknologi berbagai bidang. Kekakuan ini menyebabkan kelambatan antisipasi dokter dalam mengkoordinasikan masing-masing keahlian".**

Universitas Airlangga dengan tema “Tantangan Globalisasi Pendidikan Kedokteran Indonesia di Era Disruptif.”

Dari dua hasil kegiatan di atas dapat disimpulkan beberapa point penting, yakni :

1. Fraksi Partai NasDem berkomitmen dan konsisten untuk menghilangkan instrumen-instrumen yang menghambat bagi kemajuan dunia Pendidikan Kedokteran di Indonesia;
2. Fraksi Partai NasDem yang diwakili oleh Willy Aditya akan melakukan list terkait dengan mahasiswa yang di DO (*Drop Out*) yang difasilitasi oleh DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur dalam hal pendataan, karena tidak lulus ujian kompetensi. Dalam rangka mendorong RUU Rachmat Gobel mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh Fraksi Partai NasDem untuk melaksanakan belanja masalah yang akan dilaksanakan di 10 Provinsi di Indonesia.



Seminar di DPW Partai NasDem Jawa Timur dengan tema “Restorasi Humanisme Pendidikan Kedokteran”



## Serap Aspirasi Tentang RUU Perlindungan PRT

Sudah menjadi **tanggung jawab** kita untuk menerima aspirasi itu. Kami mendorong pekerja rumah tangga bisa menjadi bagian dalam **meningkatkan produktivitas** & juga mendapatkan devisa dari luar

**Rachmat Gobel**  
Wakil Ketua DPR RI



## RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Fraksi Partai NasDem berhasil mengawal kembali RUU Pekerja Rumah Tangga yang sudah sekitar 17 tahun belum menunjukkan progres. RUU ini berhasil masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 dan tercatat sebagai daftar prioritas nomor 11.

RUU ini sangat dibutuhkan karena saat ini menurut data ILO, tidak kurang 5 juta pekerja rumah tangga (PRT) yang mengharapkan kepastian hukum. Kebutuhan akan RUU ini bukan hanya disuarakan oleh PRT namun terdapat beberapa LSM diantaranya Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang terus gencar menyuarakan agar RUU PRT segera di bahas dan disahkan. Aspirasi dan desakan dari publik ini dilandaskan keinginan memberikan perlindungan hukum bagi PRT dari kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Ketiga hal ini merupakan kasus yang sering dialami oleh PRT. Setidaknya tahun 2015 hingga 2019 terdapat 2.148 kasus kekerasan yang dialami mereka.

Mandegnya pembahasan selama ini tidak terlepas dari dinamika politik serta banyaknya distorsi konsep mengenai RUU ini. Tidak bisa di pungkiri masih ada sejumlah fraksi yakni Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berpandangan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan tidak fleksibel, banyak aturan-aturan dari Rancangan Undang-Undang tersebut yang membebani pemberi kerja serta kurang sesuai dengan budaya di Indonesia.

Dalam pusran desakan publik dan dinamika yang ada di DPR RI, sebagai Wakil Pimpinan DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel telah menyatakan komitmennya akan terus mengawal serta mendorong anggota Fraksi Partai NasDem yang ada di Badan Legislasi DPR RI untuk menggandeng seluruh fraksi untuk

**Dalam pusran desakan publik dan dinamika yang ada di DPR RI, sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel telah menyatakan komitmennya akan terus mengawal serta mendorong anggota Fraksi Partai NasDem yang ada di Badan Legislasi DPR RI untuk menggandeng seluruh fraksi untuk segera melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.**

segera melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ini dilakukan Rachmat agar negara bisa memberikan kepastian hukum kepada ± 5 Juta PRT, serta diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan yang sering dialami oleh PRT. Menjadi tekadnya RUU ini segera untuk dibahas dan disahkan.

Rachmat Gobel menegaskan, RUU ini mengatur hal-hal prinsip yang berkesesuaian dengan budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks relasi kerja misalnya, menurut Rachmat, relasi kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja serta jasa penyalur atau penyedia pekerja rumah tangga haruslah dibangun berdasarkan azas *pro justitia* agar memberi perlindungan hukum dan rasa adil terhadap semua pihak.

Kemudian dalam sudut pandang kultural Rachmat Gobel berpendapat bahwa "Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan Rancangan Undang-Undang yang sosio-kultural (mengedepankan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan kemanusiaan)".

Oleh karena itu Ia menegaskan, jalan panjang dan terjal dalam menggolkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus diakhiri sehingga bisa disahkan menjadi undang undang. Hal yang terus dilakukan oleh Rachmat Gobel ini seiring dengan upaya dari Fraksi Partai NasDem yang menugaskan kepada kader-kadernya di Badan Legislasi DPR RI untuk terus berjuang menyuarakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk segera dibahas dan disahkan.

## RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam daftar *list* Prolegnas Prioritas tahun 2021 nomor 16 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. RUU ini telah diusulkan sejak periode 2014-2019. Dalam perjalanannya mengalami banyak dinamika diantaranya RUU ini pernah di keluarkan dari daftar list Prolegnas Prioritas pada tahun 2020. Namun dengan perjuangan serius dari Fraksi Partai NasDem Rancangan Undang-Undang ini kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Dalam pembahasan penyusunan di Badan Legislatif, setidaknya terdapat tiga poin penting dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yakni; (1) adanya kekosongan payung hukum untuk masalah kekerasan seksual; (2) aparat penegak hukum harus berperspektif korban; (3) undang-undang ini harus berpihak kepada korban.

Untuk mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar segera di bahas dan disahkan, Fraksi Partai NasDem telah melakukan berbagai upaya, diantaranya mengadakan forum-forum diskusi, *Focus Grup Discussion* (FGD) yang diadakan oleh Forum Denpasar 12 dan difasilitasi oleh Lestari Moerdijat sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Dalam beberapa kali diskusi dengan melibatkan komunitas perempuan, LSM dan akademisi, semuanya menunggu DPR RI untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar diantaranya merupakan kekerasan seksual, serta 419 kasus yang melibatkan anak sebagai korban dari kekerasan seksual. Data ini menjelaskan bahwa masyarakat menunggu adanya suatu kepastian hukum untuk melindungi korban-korban dari kekerasan seksual baik perempuan maupun anak.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel menegaskan “perlu adanya percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dimana saat ini isu kekerasan seksual belum memiliki payung hukum”. Selain itu Rachmat Gobel juga menegaskan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual perlu ditekankan perspektif perlindungan korban, hal ini penting menjadi perhatian semua fraksi yang ada di DPR RI, karena hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur mengenai penindakan bagi pelaku namun belum ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan kepada korban.

RUU ini akan terus diperjuangkan seluruh anggota Fraksi Partai NasDem termasuk Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel. Ini untuk menjawab keresahan publik terkait dengan kebutuhan akan hadirnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

**“perlu adanya percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dimana saat ini isu kekerasan seksual belum memiliki payung hukum”.**

## RUU Masyarakat Hukum Adat

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional tahun 2021 urutan Nomor 19 dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu Rancangan Undang-Undang yang menjadi usul dari anggota Fraksi Partai NasDem (Sulaeman L.Hamzah) Dapil Papua.

RUU ini pernah di bahas di DPR RI dari tahun 2014 dengan judul Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA), namun pembahasannya tidak dapat terselesaikan sampai akhir jabatan DPR RI periode 2009-2014. Pada tahun 2017 dengan substansi yang tidak jauh berbeda Fraksi Partai NasDem mengusulkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat masuk kedalam Program Legislasi Nasional Prioritas. Dimana sebagai pengusul Fraksi NasDem membentuk TIM Fraksi yang bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan penyusunan draf RUU dan Naskah Akademik.



*Rachmat Gobel pada saat Kunjungan Kerja ke Pulau Sumba Provinsi NTT, dalam Kunjungan Kerja ini Rachmat Gobel juga melakukan sosialisasi terkait dengan RUU Masyarakat Hukum Adat*

Pada periode 2019-2024, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat belum mendapatkan respon baik dari fraksi-fraksi lain yang ada di DPR RI maupun dari pemerintah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Fraksi Partai NasDem untuk terus memaksimalkan serta mendorong seluruh pihak untuk duduk bersama dalam rangka mempercepat penyusunan serta pembahasan.

Fraksi Partai NasDem terus mendorong Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk dibahas dan disahkan karena didasari atas kebutuhan "belum optimalnya perlindungan bagi masyarakat adat dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat".

Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang akan terus mendorong serta mengawal RUU Masyarakat Hukum Adat ini. Dalam berbagai kesempatan, Rachmat Gobel selalu menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan dan penting karena "masyarakat adat perlu mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif dari negara".

## RUU Di Bawah Korinbang

Dalam kedudukan sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ada 4 komisi yang berada dalam ruang lingkup tupoksi Rachmat Gobel yaitu Komisi IV, V, VI dan VII. Pada tahun 2021 ada beberapa RUU sedang dalam tahap penyusunan dan pembahasan di komisi-komisi ini antara lain; (1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (2) RUU Badan Usaha Milik Desa; (3) RUU tentang Badan Usaha Milik Negara; (4) RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Keempat RUU ini menjadi perhatian bagi Rachmat Gobel, bukan hanya sekedar sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang memiliki tupoksi sebagai koordinator Komisi IV, V, VI dan VII, tapi adalah bentuk komitmennya menjalankan fungsi legislasi yaitu memberi kepastian hukum, kemanfaatan serta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## RUU tentang Perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pembahasan RUU ini berada di bawah Komisi V DPR RI, masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas nomor 4. Status RUU ini sedang dalam pembahasan yakni tahap pembicaraan tingkat I di Komisi V DPR RI. Dalam pembicaraan tingkat I Rachmat Gobel mendorong kepada seluruh anggota Panja untuk “merampingkan birokrasi terkait dengan pengambilan keputusan dalam membangun jalan yang ada di Indonesia khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)”. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena kebutuhan akan jalan yang baik akan meningkatkan produktivitas serta ekonomi masyarakat.

Rachmat Gobel mendorong agar pembahasan RUU ini bisa segera dituntaskan sehingga bisa disahkan pada Tahun sidang 2021-2022.

## RUU Badan Usaha Milik Desa

RUU ini juga berada di dalam wewenang Komisi V DPR RI dan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Nomor 33. Merupakan usul dari DPD RI, dan menyerahkan pembahasannya kepada Komisi V DPR RI. Namun karena substansi dari RUU ini juga melibatkan mitra kerja dari Komisi VI DPR RI, maka diputuskan untuk harmonisasi dari Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh Baleg DPR RI.

Dalam dinamika pembahasan di Baleg DPR RI, akan dilakukan harmonisasi khususnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah. Ini penting dilakukan karena banyak substansi dari RUU Badan Usaha Milik Desa diatur dalam aturan turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa Rachmat Gobel, pada 18 September 2021 menerima audiensi dari masyarakat Situbondo Jawa Timur. Dalam audiensi tersebut terdapat beberapa poin aspirasi yang disampaikan masyarakat yaitu (1) pentingnya memperkuat BUMDes Bersama yang dibentuk oleh antar desa; (2) dibutuhkan regulasi yang menjadi payung hukum terkait BUMDes yang didirikan atas beberapa desa; (3) dibutuhkan suntikan dana dari pemerintah guna mengembangkan usaha BUMDes agar usaha BUMDes semakin meningkat.



*Ketua DPW Jawa Timur Partai NasDem menyampaikan aspirasi terkait dengan BUMDes Bersama yang telah di bentuk di Kabupaten Situbondo, kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.*



*Rachmat Gobel bersama setelah menerima audiensi dari perwakilan pengurus BUMDes dari masyarakat Situbondo*

Ketiga aspirasi tersebut akan di perjuangkan Rachmat Gobel untuk menjadi perhatian bagi DPR RI dan pemerintah dalam membuat regulasi baik itu Undang-Undang maupun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini Peraturan Pemerintah.

## RUU tentang Badan Usaha Milik Negara

Rancangan Undang-Undang ini berada dalam ruang lingkup Komisi VI, masuk dalam daftar prolegnas prioritas nomor 5, Rancangan Undang-Undang ini masih dalam tahap penyusunan di Komisi VI DPR RI.

Dalam melakukan penyusunan RUU Rachmat Gobel mendorong Komisi VI DPR RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah secara intens, hal ini dilakukan agar nantinya hal yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini dapat mengatur Badan Usaha Negara dengan lebih baik, hal ini dilakukan agar Badan Usaha Milik Negara dapat memberikan keuntungan bagi negara.

## RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan masuk dalam daftar prolegnas prioritas nomor 6 dan berada dalam ruang lingkup Komisi VII DPR RI. RUU ini masih dalam tahap harmonisasi di Komisi VII DPR RI.



*Rachmat Gobel bersama dengan Ketua Komisi VII DPR RI menerima audiensi METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia), terkait dengan RUU Energi Baru Terbarukan*

Terkait dengan RUU ini pada 18 November 2021, Rachmat Gobel melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi VII DPR RI untuk membicarakan produk legislasi yang saat ini sedang di bahas di Komisi ini. Dari hasil pertemuan tersebut Rachmat Gobel mendorong komisi VII DPR RI untuk segera menyelesaikan penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan.

Menurut Rachmat, Indonesia sangat memerlukan undang-undang yang mengatur energi baru dan terbarukan karena mempunyai potensi besar di bidang sektor ini. *"Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil dan non fosil yang melimpah namun belum tertata dengan baik. Ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan pemanasan global,"* kata Rachmat Gobel.

Hal ini dilakukan oleh Rachmat Gobel dalam rangka mendukung program Nawacita jilid 2 Presiden Joko Widodo khususnya yang terkait dengan lingkungan "pembangunan kesinambungan berbasis lingkungan". Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang akan terus berupaya dan mendorong Komisi VII DPR RI menuntaskan pembahasan RUU ini. Ia juga akan melakukan pendekatan kepada seluruh fraksi yang ada di DPR RI agar ikut serta mendorong penyusunan dari Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini.

### RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021

| No. | Posisi/Proses    | Judul Rancangan Undang-Undang  | Pengusul        |
|-----|------------------|--|-----------------|
| 1.  | Penyusunan       | RUU Perubahan atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran   | DPR             |
| 2.  | Penetapan Usulan | RUU tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia                  | DPR, Pemerintah |
| 3.  | Penyusunan       | RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem | DPR             |
| 4.  | Pembahasan       | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan                              | DPR             |
| 5.  | Penyusunan       | RUU Perubahan atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara                              | DPR             |
| 6.  | Penyusunan       | RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan   | DPR             |
| 7.  | Pembahasan       | RUU Perubahan atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana                                | DPR             |
| 8.  | Penetapan Usulan | RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan  | DPR             |
| 9.  | Pembahasan       | RUU tentang Perubahan atas UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional                   | DPR             |
| 10. | Terdaftar        | RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (Omnibus Law)                       | DPR, Pemerintah |

|     |                  |   |                 |
|-----|------------------|---|-----------------|
| 11. | Penyusunan       | RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga   | DPR             |
| 12. | Penetapan Usulan | RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat         | DPR             |
| 13. | Penetapan Usulan | RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, Manado                          | DPR             |
| 14. | Penetapan Usulan | RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Papua Barat | DPR             |
| 15. | Penyusunan       | RUU Perubahan atas UUU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran   | DPR             |
| 16. | Penyusunan       | RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual   | DPR             |
| 17. | Penyusunan       | RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol   | DPR             |
| 18. | Pembahasan       | RUU tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara   | DPR             |
| 19. | Harmonisasi      | RUU tentang Masyarakat Hukum Adat   | DPR             |
| 20. | Pembahasan       | RUU tentang Praktik Psikologi   | DPR             |
| 21. | Terdaftar        | RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama   | DPR             |
| 22. | Penetapan Usulan | RUU tentang Badan Pembinaan Idiologi Pancasila  | Pemerintah      |
| 23. | Pembahasan       | RUU tentang Pelindungan Data Pribadi  | Pemerintah      |
| 24. | Pembahasan       | RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia                            | Pemerintah      |
| 25. | Selesai          | RUU Perubahan atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua                                   | Pemerintah      |
| 26. | Terdaftar        | RUU tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  | Pemerintah      |
| 27. | Pembahasan       | RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah  | Pemerintah      |
| 28. | Terdaftar        | RUU tentang Ibu Kota Negara   | Pemerintah      |
| 29. | Terdaftar        | RUU tentang Hukum Acara Perdata   | Pemerintah      |
| 30. | Terdaftar        | RUU tentang Wabah   | Pemerintah      |
| 31. | Selesai          | RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan                | DPR, Pemerintah |
| 32. | Terdaftar        | RUU tentang Daerah Kepulauan  | DPD             |
| 33. | Pembahasan       | RUU tentang Badan Usaha Milik Desa  | DPD             |



**“Seiring kian derasnya arus globalisasi, peran dan dukungan diplomasi DPR RI sebagai lembaga parlemen menjadi kian strategis agar kerjasama luar negeri berjalan efektif serta kepentingan nasional bisa terus terjaga,”**





# BAB VI

## DIPLOMASI PARLEMEN DALAM ARUS GLOBALISASI YANG KIAN DERAS

**D** era globalisasi sekarang ini, tidak ada satupun negara yang bisa mengisolasi diri. Semakin deras arus globalisasi, kian besar kebutuhan untuk memperkuat kerjasama antar negara. Menggali berbagai manfaat dalam hubungan kerjasama, menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai kepentingan nasional, termasuk dalam bidang ekonomi seperti sektor perdagangan dan investasi.

Era globalisasi telah menuntut hubungan yang makin kompleks, baik dalam tataran bilateral maupun multilateral. Sebagai konsekuensinya, kemampuan diplomasi menjadi semakin penting dan semakin luas. Diplomasi sebagai ujung tombak dalam membangun kerjasama tidak bisa lagi hanya diserahkan kepada eksekutif (pemerintah), tapi juga harus melibatkan berbagai komponen bangsa, termasuk parlemen yaitu DPR RI.

Indonesia juga sangat menyadari itu seperti tertuang dalam Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 pada UU ini, secara eksplisit disebutkan bahwa Hubungan Luar Negeri terdiri dari pemerintah dan non pemerintah, dimana DPR RI masuk di dalamnya. Pasal ini mengamanatkan agar anggota dan pimpinan DPR RI dituntut untuk aktif mendukung diplomasi.

Peran diplomasi DPR RI juga diatur dalam Pasal 69 ayat 2 UU No 17 Tahun 2014, yaitu menjalankan fungsi representasi rakyat dan mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kemudian Pasal 116 UU MD3 memberikan mandat kepada Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam pelaksanaan diplomasi parlemen yang mencakup aktivitas internasional DPR RI baik secara bilateral, maupun multilateral.

*"Seiring kian derasnya arus globalisasi, peran dan dukungan diplomasi DPR RI sebagai lembaga legislatif menjadi kian strategis agar kerjasama luar negeri berjalan efektif dan kepentingan nasional bisa terus terjaga,"* kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

Fungsi diplomasi parlemen adalah untuk menjalin hubungan kerja sama diplomatis antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara maupun dengan para Duta Besar negara sahabat. Melalui jalur ini parlemen dapat membangun citra Indonesia serta memperkuat kinerja hubungan kerja sama dengan berbagai negara.

Menjalankan amanat UU tersebut, sepanjang Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 atau pada tahun ke 2 sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel aktif menjalankan berbagai fungsi

diplomasi parlemen, baik dengan melakukan pertemuan dengan duta besar negara sahabat dan melakukan kunjungan muhibah ke sejumlah negara. Berinteraksi dengan pejabat pemerintahan maupun anggota parlemen dari negara sahabat.

Rachmat Gobel diundang sebagai pembicara secara virtual dalam *Inter-Parliamentary Global Cooperation of Sustainable Development Goals (SDGs)* diselenggarakan oleh parlemen Uzbekistan yang dikenal *Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan*. Kemudian menghadiri *World Halal Summit ke 7* yang diselenggarakan oleh organisasi kerjasama negara Islam atau *the Organization of Islamic Cooperation (OIC)* di Turki dan *TEKNOFEST* yang juga diadakan di Turki.

**"Seiring kian derasnya arus globalisasi, peran dan dukungan diplomasi DPR RI sebagai lembaga legislatif menjadi kian strategis agar kerjasama luar negeri berjalan efektif dan kepentingan nasional bisa terus terjaga,"**

## Menerima Kunjungan Duta Besar

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 atau pada tahun ke 2 Rachmat Gobel beberapa kali menerima audensi Duta Besar (Dubes) negara sahabat yaitu dari Turki, Jepang, Uzbekistan dan Belarusia serta Perwakilan Perdagangan dan Ekonomi Taiwan untuk Indonesia (TETO) di Jakarta.

Pertemuan dengan Dubes Turki Mr. Mahmut Erol Kilic berlangsung pada Desember 2020. Disamping membicarakan hubungan yang lebih kuat bagi Indonesia-Turki, pertemuan ini juga membicarakan persiapan dan rencana kunjungan muhibah DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Pertemuan ini juga membicarakan upaya mempercepat penandatanganan perjanjian kerjasama komprehensif kedua negara atau *Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA)*. Perjanjian ini diharapkan akan meningkatkan nilai investasi dan perdagangan kedua negara.

Secara resmi, pertemuan Rachmat Gobel dengan Duta Besar Jepang Kanasugi Kenji pertama kali pada 21 April 2021, kemudian diikuti pertemuan berikutnya 11 Juni 2021 dan 25 Agustus 2021. Pertemuan berlangsung sangat akrab, bahkan pada pertemuan Dubes Jepang dengan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel masing-masing didampingi isteri dalam jamuan makan malam di kediaman Rachmat Gobel.

Silaturahmi Rachmat Gobel dengan Dubes Kanasugi Kenji telah terjalin sejak lama, dan berlangsung dengan baik. Sebelum menjadi Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel sudah mempunyai hubungan emosional dengan negara Jepang, kader Partai NasDem ini merupakan alumni "*Chuo University*" di Tokyo dan juga ditugaskan Presiden RI Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Indonesia untuk Jepang.

**Silaturahmi Rachmat Gobel dengan Dubes Kanasugi Kenji telah terjalin sejak lama, dan berlangsung dengan baik. Sebelum menjadi Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel sudah mempunyai hubungan emosional dengan negara Jepang, kader Partai NasDem ini merupakan alumni "*Chuo University*" di Tokyo dan juga ditugaskan Presiden RI Joko Widodo sebagai Utusan Khusus**

Dalam berbagai pertemuan tersebut, keduanya saling bertukar pikiran dan pandangan dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, pariwisata dan kebudayaan kedua negara. Disamping itu juga membicarakan bagaimana meningkatkan perekonomian kedua negara di masa pandemi covid-19.

Kepada Kanasugi Kenji, selain meningkatkan investasi dan perdagangan, Rachmat Gobel juga minta agar Jepang lebih memperhatikan transfer teknologi. Keduanya sepakat, hubungan kedua negara tidak hanya dilandaskan kepentingan ekonomi, melainkan hubungan dari hati ke hati antar kedua negara.

Pertemuan dengan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Ulugbek Rozukulov juga berlangsung tiga kali yaitu Februari 2021, 31 Mei 2021 dan 10 Juni 2021. Semua pertemuan tersebut berlangsung di gedung DPR RI, membicarakan peningkatan kerjasama perekonomian dan perdagangan kedua negara serta strategi menangani pandemi covid-19.

Pertemuan ini kemudian diikuti kunjungan muhibah delegasi DPR RI yang ke Uzbekistan yang dipimpin oleh Rachmat Gobel. Menindaklanjuti hasil kunjungan muhibah, pada pertemuan 10 Juni 2021 Rachmat Gobel juga mengundang Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi untuk bertemu dengan Ulugbek. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI.

Pada 31 Agustus 2021 Rachmat Gobel menerima kunjungan Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Valery Kolesnik untuk membicarakan peningkatan hubungan bilateral maupun multilateral antara parlemen Indonesia dan Belarusia. Dalam pertemuan ini, Rachmat Gobel mengemukakan rencana delegasi DPR RI untuk melakukan kunjungan muhibah ke Republik Belarusia. Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama di bidang industri dan perdagangan kedua negara, selain itu juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan pupuk nasional dan pabrik traktor dan *dump truck* yang nantinya dapat dibuat kerjasama antara Indonesia dan Belarusia.

**Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama di bidang industri dan perdagangan kedua negara, selain itu juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan pupuk nasional dan pabrik traktor dan *dump truck* yang nantinya dapat dibuat kerjasama antara Indonesia dan Belarus.**

## Kunjungan Muhibah Ke Turki

Hubungan diplomatik Indonesia Turki secara resmi dibuka sejak 1950. Kemudian pada 1958, Indonesia mulai membuka Kedutaan Besar RI di Ankara. Sama-sama tergabung dalam negara G20, *Organization of Islamic Conference (OIC)* dan Organisasi Delapan Negara Berkembang (D 8), hubungan Indonesia-Turki sudah sejak lama terjalin erat.

Namun dalam kerjasama perdagangan dan investasi masih sangat perlu ditingkatkan. Nilai perdagangan kedua negara baru sekitar US\$ 1,5 miliar, dimana Indonesia mengalami surplus. Nilai perdagangan ini masih jauh dari potensi yang seharusnya. Dengan total *Gross Domestic Product (GDP)* gabungan lebih US\$ 1.800 miliar yaitu Indonesia sekitar US\$ 1.050 miliar dan Turki US\$ 761 miliar, nilai perdagangan kedua negara berpotensi untuk ditingkatkan minimal menjadi US\$ 10 miliar.

Ekonomi Turki dalam 20 tahun terakhir ini mengalami kemajuan pesat, pendapatan per kapita naik 3 kali lipat dari US\$ 3.000 pada tahun 2000 menjadi US\$ 4 9.000 pada 2020. Turki berhasil naik dari negara *middle income country* menjadi *middle upper income country*. Dengan total GDP sekitar US\$ 761 miliar dan penduduk 80 juta orang, Turki merupakan pasar potensial bagi berbagai produk Indonesia.

*"DPR RI akan mendorong kerjasama ekonomi Indonesia-Turki untuk lebih ditingkatkan. Masing-masing mempunyai banyak potensi dan berpeluang besar untuk disinergikan,"* kata Rachmat Gobel.

Saat ini Indonesia dan Turki tengah menunggu penandatanganan perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif IT-CEPA yang realisasinya tertunda akibat covid-19. Perjanjian ini diharapkan meningkatkan arus perdagangan dan investasi ke dua negara dan juga hubungan yang masyarakat (*people to people contact*) yang lebih erat. Juga tengah direncanakan untuk membentuk mekanisme bilateral pada *High Level Strategic Council (HSCL)*.

**"DPR RI akan mendorong kerjasama ekonomi Indonesia-Turki untuk lebih ditingkatkan. Masing-masing mempunyai banyak potensi dan berpeluang besar untuk disinergikan,"**

Kunjungan muhibah delegasi DPR RI ke Turki berlangsung dari 14-19 Desember 2020. Ikut serta dalam delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Koribang Rachmat Gobel ini adalah perwakilan Komisi dan Fraksi yaitu Charles Meikyansyah (Komisi IV/Fraksi Partai NasDem), Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Komisi III/Fraksi PKS), Mufti Anam (Komisi VI/Fraksi PDIP), Hasby Anshory (Komisi XI/Fraksi Partai NasDem), Fauzi Haji Amro (Komisi XI/Fraksi Partai NasDem). Juga ikut serta wakil pemerintah yaitu Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kasan, dan Dirut PT. Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo.

Rombongan delegasi DPR RI mendapat sambutan antusias dari pemerintah Turki dan dijadualkan bertemu dengan Kementerian Perdagangan Turki, Kementerian Industri dan Teknologi, *Turkish Scientific And Technological Research Council* (TUBITAK), *Turkish Space Agency* (TUA) dan produsen pupuk terbesar Eti Maden.

## Pertemuan dengan Kementerian Perdagangan

Dalam kunjungan ke Kementerian Perdagangan, delegasi DPR RI diterima oleh *Deputy Minister* Gonca Yillmaz Batur. Pertemuan didahului minum kopi bersama, dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai upaya memperlancar kerjasama di sektor perdagangan. Gonca Yillmaz Batur menyampaikan, perdagangan RI-Turki harus lebih ditingkat karena belum mencerminkan potensi riil kedua negara. Namun Gonca meminta agar Indonesia mengimpor lebih banyak karena sejak 2015 neraca perdagangan Turki selalu mengalami defisit dengan Indonesia. Per 2019 lalu, Indonesia surplus US\$ 700 juta.

Turki juga berharap perundingan IT-CEPA yang telah berlangsung sejak 2017 dan terhambat di tahun 2020 akibat pandemi covid-19, bisa segera dituntaskan dan ditandatangani secepatnya. Pihak Turki percaya, IT-CEPA akan meningkatkan potensi nilai perdagangan kedua negara bisa mencapai US\$ 10 miliar.

Kerjasama Indonesia-Turki perlu ditindaklanjuti dengan *high economic commission* sebagai mekanisme kerja yang mencakup semua kerja sama ekonomi dan perdagangan dari hulu sampai ke hilir. Beberapa sektor yang berpotensi untuk dikerjasamakan oleh Indonesia dan Turki yang telah teridentifikasi dan dapat ditindaklanjuti serta ditingkatkan seperti industri pertahanan, perkapalan, teknologi, e-commerce.

Namun pihak Turki menyebutkan bahwa belum terdapat *agreement* di bidang konstruksi antara Indonesia-Turki. Selain itu pihak Turki kembali menawarkan agar kontraktor Turki dapat terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan. Kontraktor Turki telah berpengalaman dalam mengerjakan proyek ibukota baru Kazakhstan di Astana.



***Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Anggota DPR RI Charles Meikyansyah dan Hasby Anshory serta Kasan dalam pertemuan dengan Kementerian Perdagangan Turki***

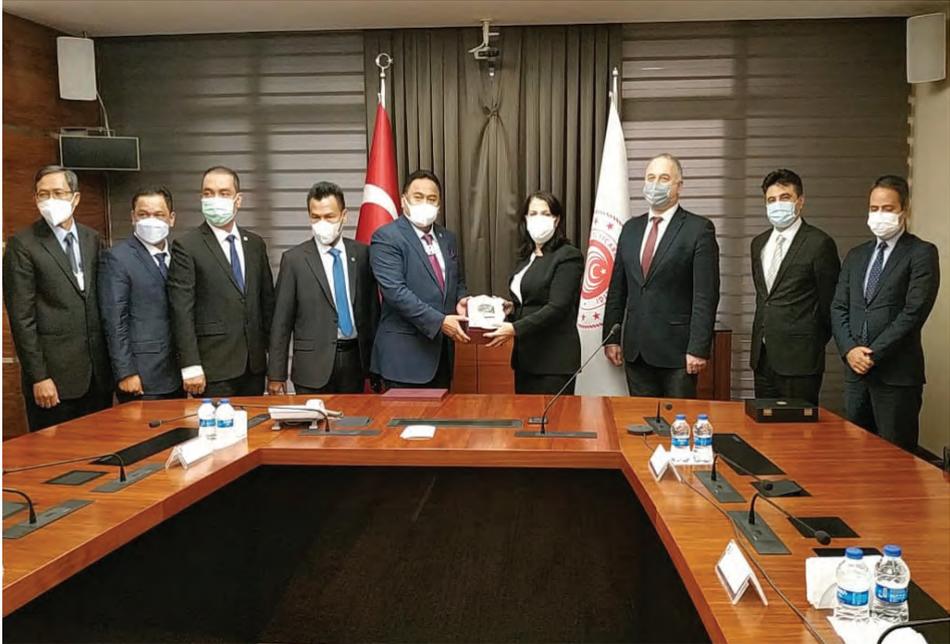
Sementara itu Rachmat Gobel menyampaikan, Turki adalah sahabat dekat Indonesia sehingga kunjungan Delegasi DPR RI tidak hanya memberikan kabar baik, tetapi juga bukti kuatnya kerjasama dua negara. Ia menegaskan, parlemen Indonesia akan mendorong pemerintah dan pelaku usaha memanfaatkan peluang yang muncul dari *omnibus law* UU Cipta Kerja dengan membangun kerjasama baru dengan Turki.



*Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Wakil Menteri Perdagangan Turki Gonca Yillmaz Batur dan jajarannya.*



*Bertukar Cenderamata antara Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Wakil Menteri Perdagangan Turki Gonca Yillmaz Batur.*



*Tukar cinderamata antara Delegasi DPR RI dan Kementerian Perdagangan Turki.*

Senada dengan Gonca, Rachmat Gobel mengatakan, kerjasama Indonesia-Turki mempunyai prospek yang luar biasa karena kedua negara sama-sama mempunyai potensi ekonomi dalam negeri yang besar. Turki adalah salah satu kekuatan ekonomi global dan sangat penting bagi Indonesia. Dengan GDP saat ini sekitar US\$ 780 miliar dan diproyeksi akan menjadi ekonomi terbesar ke 12 dengan GDP sebesar US\$ 2,9 triliun dalam beberapa tahun ke depan, posisi Turki akan menjadi kian strategis bagi Indonesia.

Bagi Indonesia, menurut Rachmat Gobel, posisi Turki sangat strategis dalam rangka memperluas ekspor ke *non-tradisional market*, apalagi negara ini telah berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Ditengah situasi yang sulit dan ancaman *middle income trap* serta pekerjaan rumah defisit neraca perdagangan, kemitraan dagang dengan Turki akan memperluas pasar Indonesia.

*"DPR RI berkeinginan agar jalinan kerjasama Indonesia-Turki semakin diperluas seperti ke bidang infrastruktur termasuk infrastruktur pertanian, seperti pengembangan food estate, mengingat Indonesia adalah negara pertanian,"* kata Rachmat Gobel.

## Pertemuan dengan Kementerian Industri dan Teknologi

Didampingi Dubes RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal, kunjungan delegasi DPR RI ke Kementerian Industri dan Teknologi Turki diterima oleh *Ministry of Industry and Technology Republic of Turkey* yaitu *Deputy Industry* Mehmet Fatih Kacir dan *Deputy Technology* Cetin Ali Donmez serta Dirjen Perindustrian Halil Ibrahim Cetin, Dirjen Teknologi Nasional Zekeriya Costu, dan Dirjen Urusan Uni Eropa dan Luar Negeri Mustafa Erdogan. Ikut serta dalam pertemuan itu adalah *President Turkish Scientific And Technological Research Council* (TUBITAK) Dr. Ahmet Arif Ergin dan *Presiden Turkish Space Agency* (TUA) Mr. Serdar Huseyn Yilidirim.



**Jajaran Kementerian Industri dan Teknologi Turki, dalam pertemuan dengan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang.**

Dalam pertemuan ini terungkap bahwa salah satu kunci keberhasilan Turki mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam dua dekade terakhir ini adalah karena negara ini menerapkan pendekatan *triplehelix* yaitu membangun kerjasama yang kuat antara perguruan tinggi (akademik), pelaku industri dan pemerintah. Langkah ini berhasil mendorong pengembangan teknologi melalui penelitian dan pemberdayaan yang tengah berkembang di Turki.



*Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel dalam pertemuan dengan Kementerian Industri dan Teknologi Turki.*

Dalam pembicaraan dijelaskan, pengembangan teknologi telah membawa Turki mencapai kemandirian dalam sektor industri dan pertanian. Hampir sepenuhnya mereka mampu memenuhi kebutuhan industri dari hasil produksi sendiri dan menjadikannya sebagai produk unggulan. Bahkan selama pandemi covid-19, negara ini telah berhasil meningkatkan ketahanan pangannya.

Kedua *Deputy Minister* dari *Ministry of Industry and Technology Republic of Turkey* itu menyampaikan beberapa pandangan antara lain persahabatan bangsa sudah terjalin lama harus menjadi landasan kuat bagi kerjasama kedua negara. Diharapkan Forum Konsultasi Bersama (FKB) yang sudah dibentuk sejak 2011, dapat ditingkat ke tahap *Hight Level Strategic Council* dan segera dideklarasikan .

Perlu ada jalinan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi antara Kementerian Perindustrian Indonesia dan Turki. Perjanjian yang mengatur kerjasama ini sedang dalam proses dan akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki. Lembaga ini juga mendukung adanya rencana kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik



***Deputy Industry Mehmet Fatih Kacir dan Deputy Technology Cetin Ali Donmez Kementerian Industri dan Teknologi Turki serta Presiden TUBITAK Prof. Amet Arif Ergin dalam pertemuan dengan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.***

dalam melakukan penelitian, riset bagi pengembangan produk untuk bisa menjadi produk unggulan Indonesia. Pihak Turki juga menyatakan minat untuk ikut melakukan investasi pada pembangunan Ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.

Pada kesempatan itu, Presiden TUBITAK Prof. Amet Arif Ergin menawarkan kerjasama riset dan teknologi, dan mengusulkan pertukaran tenaga ahli, dimana tenaga ahli menetap sementara agar terjadi *brainstorming*, kerjasama penelitian dan pengembangan.

Sebagai pimpinan delegasi, Rachmat Gobel menyambut gembira pandangan Kementerian Industri dan Teknologi Turki tersebut. Ia juga menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa sama seperti Turki, Indonesia juga mengharapkan perjanjian kerjasama komprehensif Indonesia Turki (*IT-CEPA*) dapat ditanda tangani oleh kedua negara sebelum kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia. Catatan, pada pertemuan itu disinggung rencana Erdogan akan berkunjung ke Indonesia pada semester I 2021, namun tertunda karena merebaknya kembali pandemi covid-19.

Rachmat Gobel juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan perusahaan pupuk Eti Maden, yang rencana akan ditindak lanjuti dengan kerjasama kedua perusahaan pupuk negara yaitu PT. Petrokimia Gresik, Indonesia dengan Eti Maden, Turki.

Mengenai tawaran TUBITAK dalam kerjasama bidang riset dan teknologi, akan disampaikan kepada Kementerian Riset, BPPT dan LIPI agar dapat segera ditindak lanjuti.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Gobel menjelaskan, Indonesia terus memperkuat iklim dunia usaha antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan melakukan investasi ke Indonesia. Diharapkan, dengan adanya UU ini, investor Turki dapat meningkatkan kerjasama dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi.



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan oleh-oleh kopi produk dalam negeri kepada Jajaran Kementerian Industri dan Teknologi Turki.*

Beberapa kerja sama Indonesia–Turki telah direalisasikan, diantaranya kerjasama di bidang industri pertahanan, Menteri Pertahanan RI pada 19 Desember 2020 telah menandatangani kontrak kerja sama industri pertahanan terbesar, dan ini menjadi fondasi yang kuat bagi kedua negara.

Sejumlah perusahaan konstruksi Turki juga telah menyatakan rencana melakukan investasi pada beberapa proyek di Indonesia termasuk pembangunan ibu kota baru Indonesia. Rencana ini tengah dalam pembicaraan dengan mitra mereka di Indonesia.



***Saling tukar cinderamata antara Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Wakil Menteri Bidang Industri Memet Kacir***

Seusai melakukan pertemuan di Kementerian Industri dan Teknologi Turki ini, kepada delegasi DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, penting bagi Indonesia untuk melakukan sinergi dengan Turki dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing negara. "Kita perlu mengarahkan kejasama untuk mengembangkan penelitian bersama. Kita mempunyai banyak bahan baku dan bagaimana potensi ini bisa diolah dan dibuat dalam satu kerjasama penelitian untuk meningkatkan kualitas produk seperti dari produk pertanian dan perkebunan Indonesia," katanya.

Gagasan dan ide-ide Rachmat Gobel mendapat dukungan dari Anggota DPR RI. Apalagi untuk sektor perdagangan, Turki bisa menjadi salah satu pintu masuk utama produk ekspor Indonesia ke pasar Eropa karena negara ini tergabung dalam Uni Eropa. Sebaliknya, Turki bisa menjadikan pasar Indonesia sebagai pintu masuk mereka ke pasar ASEAN.



*Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang bersama Kementerian Industri dan Teknologi Turki, di depan kantor Kementerian Industri dan Teknologi, Ankara, Turki*

## Pertemuan dengan Eti Maden

Turki adalah produsen boron terbesar yang menguasai 73% total produksi dunia. Boron merupakan bahan mineral alami yang mempunyai banyak manfaat, termasuk untuk pertanian. Boron merupakan bahan baku pupuk mikro yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian. Boron sangat penting bagi tanaman agar bisa mencapai kualitas hasil yang tinggi.

Eti Maden merupakan perusahaan negara Turki yang memegang peranan penting dalam pengembangan dan perdagangan boron di dunia. Perusahaan ini berdiri sejak 1935 dan merupakan satu-satunya institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Turki dalam pengembangan dan pemasaran boron. Sekitar 55%-60% dari produksi boron Eti Maden dipasarkan ke lebih dari 100 negara.

Penggunaan Boron antara lain untuk sektor pertanian (15%), industri kaca LCD, screen dan laboratorium (50%), keramik (15%) dan sektor kimia (10%). Penggunaan Boron di sektor pertanian terbanyak di Brazil yaitu 180.000 ton/tahun. Sedangkan penggunaan di Indonesia baru sekitar 65.000-75.000 ton/tahun, atau setara dengan penggunaan di Malaysia.

Kunjungan delegasi DPR RI ke Eti Maden adalah untuk menjajaki peluang kerjasama dalam pengembangan pupuk mikro oleh industri pupuk nasional

seperti PT. Petrokimia Gresik. Dalam pertemuan dengan manajemen Eti Maden, delegasi DPR RI juga didampingi oleh *Conselor Minister KBRI Hikmat Moeljawan*.

Rombongan diterima oleh *Head of Marketing and Sales Department, Omar Catal* dan *Export Area Sales Manager, Burak Gulguler*. Rachmat Gobel menyebutkan, pertemuan ini merupakan peninjauan awal rencana kerja sama kedua negara dalam bidang pertanian dan produksi pupuk. Menurutnya, Indonesia dan Turki dapat bersinergi dalam memproduksi pupuk yang berkualitas. Kedua negara tersebut bisa saling melengkapi baik dari bahan baku produksi, teknologi hingga pemasaran.



***Pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Head of Marketing and Sales Department, Omar Catal dan Export Area Sales Manager, Burak Gulguler PT. Pupuk Eti Maden Turki didampingi oleh Conselor Minister KBRI Hikmat Moeljawan dan Dirut. PT. Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo***

Beberapa pokok pembicaraan dalam pertemuan ini antara lain adalah, Eti Maden siap bekerjasama dengan Indonesia. Jika Indonesia memerlukan boron dalam jumlah yang lebih banyak, perusahaan ini siap mendukung. Eti Maden juga menyatakan bersedia melakukan kerjasama di bidang penelitian.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Direktur PT. Petrokimia Gresik menyampaikan harapannya dapat bekerja sama dengan Eti Maden untuk penyediaan pupuk mikro. PT. Reayasa Industri siap bekerja sama apabila Eti Maden melakukan ekspansi.



**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Conselor Minister KBRI Hikmat Moeljawan dan Dirut. PT. Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo**



**Head of Marketing and Sales Department, Omar Catal dan Export Area Sales Manager, Burak Gulguler PT. Pupuk Eti Maden dan Jajaran waktu menerima Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.**



**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan cinderamata (Replika Gedung DPR RI) kepada PT. Pupuk Eti Maden, Turki**

Mengenai informasi dari Eti Maden yang menyatakan bahwa adanya hambatan untuk memasukkan Boron ke Indonesia, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang menanggapi bahwa hal ini bisa diantisipasi dengan kerja sama pengembangan pupuk bersama-sama termasuk penelitian agar bisnisnya menjadi besar.

Menanggapi hasil pertemuan, Rachmat Gobel mengatakan, DPR RI mendukung penuh rencana kerjasama PT. Petrokimia Gresik dengan Eti Maden. Ia juga melihat, kunjungan ini makin menguak potensi kerjasama Indonesia-Turki dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing.

*"Pertemuan ini sangat strategis. Turki mempunyai bahan baku yang tidak dimiliki oleh Indonesia, dan kita harapkan bisa melakukan sinergi. Bukan hanya sebatas memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, tetapi bagaimana kerjasama ini dapat mengembangkan penelitian bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pertanian dan produk perkebunan Indonesia,"* kata Rachmat Gobel.

## Kunjungan Muhibah ke Uzbekistan

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Uzbekistan telah melakukan reformasi besar-besaran pada perekonomiannya. Sampai lima tahun lalu pemerintah Uzbekistan masih menerapkan kebijakan proteksionisme aktif, dengan membatasi impor melalui tidak adanya konversi mata uang nasional secara bebas, biaya bea cukai yang tinggi dan hambatan non-tarif. Selain itu, terdapat hambatan formal dan informal yang signifikan terhadap pergerakan bebas orang dan modal lintas batas. Semua ini membuat Uzbekistan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam pembagian kerja internasional dan untuk membangun industri yang kompetitif.

Mulai tahun 2017, pemerintah Uzbekistan melakukan liberaliasi ekonomi antara lain dengan membebaskan konversi mata uang secara gratis, menghilangkan sejumlah hambatan administratif untuk pergerakan barang dan orang dan mengurangi biaya bea cukai. Hubungan diplomatik Indonesia dan Uzbekistan resmi dimulai pada 23 Juni 1992, dan Indonesia membuka kedutaan besar di Tashkent pada 1994. Setelah dua tahun, Uzbekistan baru membuka Kedutaan Besarnya di Indonesia tahun 1996. Kedua negara sudah lama menjajaki berbagai peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, namun sampai saat ini belum berjalan maksimal.

Uzbekistan menyadari posisi strategis Indonesia yang merupakan jaringan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Sementara Indonesia mengakui kepentingan strategis Uzbekistan sebagai pintu gerbang Asia Tengah, ekonomi yang berkembang juga merupakan pasar potensial. Selain itu kedua negara tersebut adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Uzbekistan tertarik untuk melakukan kerja sama di bidang pertanian dan perikanan sebagaimana dibicarakan Wakil PM Uzbekistan saat bertemu Presiden RI pada 21 Agustus 2017. Keinginan Uzbekistan disambut baik oleh pemerintah Indonesia, dan kebijakan pemerintah didukung oleh DPR RI serta menyambut baik upaya kerja sama kedua negara tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik, angka perdagangan Indonesia - Uzbekistan selama 5 tahun terakhir cukup berfluktuatif. Neraca perdagangan Indonesia dengan Uzbekistan pada tahun 2019 mencapai US\$ 31,237 juta, turun 50.79% dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk ekspor, Indonesia meningkat lebih dari US\$ 3 juta dari yang semula US\$ 5,5 juta menjadi

US\$ 8.7 juta. Penurunan terjadi pada impor Indonesia dari Uzbekistan yaitu dari US\$ 55,83 juta menjadi US\$ 22,50 juta.

Untuk periode Januari- November 2020, impor Indonesia dari Uzbekistan turun 11.70% bila dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari US\$ 20,373 juta menjadi US\$ 17,989 juta. Kedepannya dengan mendorong masuknya produk-produk unggulan Indonesia ke Uzbekistan, diharapkan neraca perdagangan akan semakin seimbang antara kedua negara.

Potensi besar antara Indonesia dan Uzbekistan perlu ditindak lanjuti dengan memperkuat kerjasama yang sudah dijajaki untuk dikembangkan oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Uzbekistan Zoyir Mirzaev. Negara ini mempunyai potensi pasar yang cukup besar bagi berbagai produk Indonesia seperti kopi, teh, karet, kertas, furniture, rempah-rempah. Dan Uzbekistan ingin mengekspor pupuk dan buah-buahan mereka ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga tengah melihat Uzbekistan sebagai salah satu pintu masuk produk Indonesia ke kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur. Berbagai inisiatif kemitraan untuk memajukan kerjasama bilateral terutama di bidang perdagangan kedua negara digagas pada pertemuan ke-8 Komite Konsultasi Bilateral (KKB) Indonesia – Uzbekistan yang dilakukan secara virtual di Jakarta 23 Juli 2020.

Diantaranya membicarakan upaya peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara, kerjasama politik, keamanan, serta pariwisata dan kebudayaan. Selain meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi, Uzbekistan - Indonesia juga akan mencoba untuk melakukan kerjasama di bidang pertanian, terkait dengan industri pupuk seperti produksi pupuk Kcl.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melakukan kunjungan kerja muhibah ke

**Potensi besar antara Indonesia dan Uzbekistan perlu ditindak lanjuti dengan memperkuat kerjasama yang sudah dijajaki untuk dikembangkan oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Uzbekistan Zoyir Mirzaev. Negara ini mempunyai potensi pasar yang cukup besar bagi berbagai produk Indonesia seperti kopi, teh, karet, kertas, furniture, rempah-rempah. Dan Uzbekistan ingin mengekspor pupuk dan buah-buahan mereka ke Indonesia.**

Uzbekistan dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara, dan melihat dari dekat peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Bersama sejumlah anggota DPR RI dari berbagai fraksi, Rachmat Gobel melakukan kunjungan kerja selama lima hari ke Uzbekistan yaitu dari 15 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2021.

Delegasi DPR RI dalam kunjungan tersebut terdiri dari Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai NasDem, Ketua Badan Legislatif (Baleg) Suparman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya dari Fraksi Partai NasDem, Wakil Ketua Baleg Ahmad Baidowi dari Fraksi PPP, Anggota Komisi XI Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra, Anggota Komisi IV Muhamad Syahrudin dari Fraksi PAN, dan Anggota Komisi III Taufik Basari dari Fraksi Partai NasDem.

Kunjungan tersebut juga mengikut sertakan wakil dari Kementerian Perindustrian yaitu Dirjen Kimia Industri Farmasi dan Tekstil Muhammad Khayam, wakil dari Kementerian Perdagangan yaitu Staf Ahli Menteri Perdagangan Arlinda, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi. Dan juga mengikutsertakan Pimpinan Redaksi Media Cetak dan Elektronik.

Selama di Uzbekistan, delegasi DPR-RI melakukan pertemuan dengan Ketua Senat Oliy Majlis Parlemen Uzbekistan, Dewan Pimpinan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan, Wakil Perdana Menteri/Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Uzbekistan, Wakil Perdana Menteri/Menteri Pariwisata dan Olah Raga dan Ketua Dewan Pimpinan perusahaan pupuk Uzkiyosanoat, Direktur perusahaan perdagangan kimia Uzkiyoiimpex serta kunjungan ke Pusat Perpustakaan, Museum dan UKM di Samarkand dan Tashkent.

**Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melakukan kunjungan kerja muhibah ke Uzbekistan dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara, dan melihat dari dekat peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Bersama sejumlah anggota DPR RI dari**

## Pertemuan dengan Kementerian Pariwisata dan Olah Raga

Dalam pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Olah Raga Aziz Abdulkhakimov ini, delegasi DPR RI didampingi oleh Duta Besar LBBP RI untuk Uzbekistan Sunaryo Kartadinata. Menteri Aziz Abdulkhakimov menyambut delegasi secara antusias. Ia berharap kunjungan DPR RI yang dipimpin Rachmat Gobel ini akan lebih meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Uzbekistan yang sudah terjalin lama melalui perjalanan sejarah yang panjang.

Tercatat, Presiden Pertama RI Soekarno pernah melakukan kunjungan historis ke Uzbekistan pada 1956 dan ini meninggalkan kesan yang mendalam pada rakyat Uzbekistan. Soekarno ikut berjuang meyakinkan pemerintah Uni Soviet saat itu untuk menemukan makam Imam Al-Bukhori, seorang perawi ahli hadis terkenal.

Sepanjang pertemuan delegasi DPR RI dengan Menteri Abdulkhakimov, kedua belah pihak membahas beberapa hal seperti upaya memperkuat kerjasama dan kolaborasi di bidang ekonomi, budaya, wisata, peninggalan bersejarah dan pendidikan. Uzbekistan memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi dan mitra kerja sama yang strategis, sehingga mengharapkan kerjasama yang ada perlu ditingkatkan demi kemanfaatan bersama.



*Dalam kunjungan ke Kementerian Pariwisata dan Olahraga Uzbekistan, Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel diterima dengan hangat oleh Menteri Pariwisata dan Olah Raga Uzbekistan Aziz Abdulkhakimov dengan menggunakan Pakaian Kebesaran Uzbekistan (baju adat kehormatan)*



*Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel bersama dengan Menteri Pariwisata dan Olah Raga Uzbekistan Aziz Abdulkhakimov, (dengan latar belakang foto Presiden RI Pertama Ir. Soekarno pada waktu berkunjung ke Makam Imam Bukhariß)*

Dalam kesempatan itu, Abdulkhakimov mengungkapkan daya tarik pariwisata Uzbekistan, khususnya wisata religi seperti mengunjungi Kompleks Makam Imam Bukhari (Parawi hadist terkenal). Untuk mendorong kerjasama bidang pariwisata, Abdulkhakimov menawarkan kerjasama di bidang transportasi yaitu penerbangan langsung dari Indonesia ke Uzbekistan. Ia juga menawarkan fasilitas diskon khusus bagi wisatawan Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam diharapkan dapat melakukan perjalanan religi ke Uzbekistan.

Abdulkhakimov mengharapkan, saat melakukan perjalanan Umrah ke tanah suci Arab Saudi, jamaah Indonesia melanjutkan perjalanannya ke Uzbekistan, mengunjungi kota Bukhara di Samarkand. Banyaknya peninggalan tokoh Islam pada masa lalu yang layak dikunjungi seperti makam Imam Al-Bukhari yang terletak sekitar 25 km dari Samarkhand. Makam imam terkenal ini mendapat status sebagai warisan dunia dari UNESCO.

Banyak situs lain yang menarik di negara ini, seperti diketahui sebelum masehi agama Budha sudah masuk wilayah ini. Kemudian pada abad pertama Masehi, St Thomas dan St Andreas menyebarkan agama Kristen di wilayah ini. Berbagai arsitektur masa lalu yang terkait dengan bangunan kuil dan gereja banyak terdapat di Uzbekistan.



**Pertemuan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Menteri Pariwisata dan Olah Raga Uzbekistan Aziz Abdulkhakimov, didampingi oleh Anggota DPR RI dan Dirut Metro TV Don Bosco Selamun, Pimred Berita Satu TV, Primus Dorimulu dan Pimred kumparan. Com Arifin Asyhad.**

Selain wisata religi dan budaya, Uzbekistan juga kaya akan wisata alam. Negeri empat musim ini memiliki pegunungan dengan lembah yang indah. Pada musim salju wisatawan bisa bermain ski dan di musim panas, pelancong bisa melihat padang-padang terbuka. UNESCO telah menetapkan sepuluh tempat di Uzbekistan sebagai situs warisan budaya yang perlu dijaga kelestariannya.

Sebagai Deputy Perdana Menteri dan Menteri Pariwisata Uzbekistan, Abdulkhakimov secara khusus sangat mengharapkan Rachmat Gobel bisa menjembatani hubungan yang lebih kuat antara rakyat Uzbekistan dengan rakyat Indonesia. "Saya berharap pak Rachmat Gobel bisa menjembatani hubungan yang lebih kuat antara Indonesia dan Uzbekistan. Saya disini selalu mengucapkan kata *rachmat* tiap hari dan berkali-kali. Di Uzbekistan kata *rachmat* itu berarti terima kasih kepada Tuhan," kata Abdulkhakimov.

Berbagai tawaran kerjasama ini disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Ia berjanji, tawaran kerjasama ini akan disampaikan kepada Menteri Pariwisata RI, dengan harapan agar kunjungan wisatawan Indonesia ke Uzbekistan, juga diikuti oleh kunjungan wisatawan dari Uzbekistan ke Indonesia. Ia juga berjanji mendorong pembentukan *sister city* dengan Lumajang, Jawa Timur dengan salah satu kota di Uzbekistan. Simbol kota Lumajang adalah pisang dan Uzbekistan membutuhkan pisang.



**Menteri Pariwisata dan Olah Raga Uzbekistan Aziz Abdulkhakov mengajak Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel untuk melihat kompleks Kementerian Pariwisata dan Olah Raga Uzbekistan.**

“Hubungan Indonesia-Uzbekistan bukan hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tapi berlandaskan hubungan antara *people to people*, yang berlanjut pada hubungan dari hati ke hati antara masyarakat Indonesia dan Uzbekistan,” kata Rachmat Gobel.

## **Pertemuan Dengan Senat Oliy Majlis**

Dalam kunjungan ke Senat Oliy Majlis Uzbekistan, delegasi DPR RI disambut langsung oleh Ketua Senat Tanzila Kamalovna Narbayeva yang didampingi sejumlah anggota Senat Uzbekistan. Dalam sambutannya, Tanzila menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara besar dan cukup maju oleh Uzbekistan. Ia juga menegaskan, kunjungan Delegasi DPR RI tersebut sangat berguna, Uzbekistan ingin belajar dari Indonesia yang memiliki banyak pengalaman.

Sebagai pimpinan delegasi Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan pihak Senat Uzbekistan, dan Uzbekistan dinilai sebagai negara yang cukup penting bagi Indonesia. Kesamaan budaya kedua negara yang penduduknya sama-sama mayoritas Islam menjadi landasan yang kuat dalam membangun hubungan dan *people to people contact*.



*Kedatangan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel disambut hangat oleh Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan Tanzila Kamalovna Narbayeva di Gedung Parlemen Uzbekistan*



*Jabat Tangan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan Tanzila Kamalovna Narbayeva tanda persahabatan kedua Parlemen Indonesia dan Uzbekistan.*



*Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel pada saat pertemuan dengan Senat Oliy Majlis Uzbekistan, di Gedung Parlemen.*



*Pertemuan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan didampingi oleh Duta Besar LBBP RI untuk Uzbekistan di Gedung parlemen Uzbekistan.*



**Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan, menerima cinderamata dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel (replika Gedung DPR RI)**



**Ketua Senat Oliy Majlis Uzbekistan, memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel (kerajinan khas Uzbekistan)**



*Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Ketua dan Anggota Senat Oliy Majlis Uzbekistan, di Gedung Parlemen Uzbekistan.*

Rachmat Gobel juga mengungkapkan harapannya agar hubungan kerjasama yang sudah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan dan diperluas. Di bidang ekonomi dan perdagangan, kerjasama diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi sumber daya masing-masing negara.

Rachmat Gobel dan Tanzila juga juga membicarakan isu-isu bersama, dan sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan dan kerja sama baik dalam tataran bilateral maupun regional dan internasional. Dalam tataran bilateral misalnya kerjasama yang lebih kuat di tingkat parlemen seperti dalam pembuatan undang –undang, mendorong kerjasama yang lebih erat di antara pelaku dunia usaha dalam memanfaatkan potensi lain kedua negara.

Dalam kerjasama regional dan bilateral, keduanya sepakat untuk parlemen Indonesia dan Uzbekistan saling mendukung dalam berbagai kegiatan organisasi dan konferensi internasional yang terkait isu-isu global.

Dengan adanya diplomasi ini Rachmat Gobel mengatakan bahwa kunjungan ini akan menjadi jembatan hubungan perdagangan, industri, maupun pembangunan dalam bidang lainnya.

## Pertemuan dengan Dewan Legislatif Oliy Majlis

Tidak hanya melakukan pertemuan dengan Senat, delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Dewan Legislatif Oliy Majlis. Kedatangan Rachmat Gobel bersama rombongan disambut antusias oleh Ketua Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan Ismailov Nurdinjon. Dalam pertemuan ini, Dewan Legislatif mengungkapkan harapannya agar Indonesia-Uzbekistan dapat segera mengembangkan "roadmap" tentang kerjasama Indonesia-Uzbekistan.



*Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi oleh Duta Besar RI LBBP Uzbekistan Sunaryo Kartadinata diterima oleh Anggota Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan.*

Rachmat Gobel menyampaikan, Uzbekistan merupakan mitra penting bagi Indonesia, dimana kedua negara memiliki kesamaan budaya dan agama yang diharapkan dapat didorong penguatan kerjasama kedua belah pihak demi kepentingan bersama. Hubungan kedua negara sudah ditandai sejak kunjungan Presiden RI pertama Ir. Soekarno ke Uzbekistan pada 1956, di mana saat itu negara ini masih berada di bawah Uni Soviet.

Kedua negara perlu mengintensifkan hubungan timbal balik melalui kunjungan bersama baik dari kalangan lembaga legislatif, pemerintah dan pebisnis maupun touris/masyarakat, sehingga kerja sama dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang bermanfaat. Kerja sama tidak hanya "G to G", tetapi "people to people contact" atau p to p.



*Kunjungan Kehormatan Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendapat standing applause.dari Anggota Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan .*



*Pertemuan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan Pimpinan Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan didampingi oleh Dubes LBBP RI Uzbekistan*



***Ketua Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan,  
Ismailov Nurdinjon***



***Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan  
Pembangunan Rachmat Gobel***

Dengan mengikutsertakan perwakilan dari Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI, menurut Rachmat Gobel, diharapkan kunjungan delegasi DPR RI memberi nilai tambah lebih dalam mendukung kerja sama bilateral yang telah berlangsung selama ini.

Pertemuan tersebut juga membahas dan mendiskusikan beberapa hal untuk meningkatkan kerja sama kedua negara antara lain sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dapat didorong kerjasama antar ulama. Di bidang pendidikan perlu dilakukan program pertukaran pelajar dan mahasiswa serta memperkuat kerja sama antar perguruan tinggi.

Selanjutnya, meningkatkan kerjasama antar parlemen, penguatan *Parliament Friendship Group* RI-Uzbekistan. Memperluas kerja sama di bidang potensial, seperti pengembangan kerja sama perdagangan, ekonomi (termasuk melakukan ekspor produk maupun implementasi yang belum digarap), investasi, budaya, sehingga akan dapat memberi dampak signifikan bagi kedua negara.



*Pertemuan Delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Pimpinan Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan*



*Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Ketua dan Anggota Legislative Oliy Majlis Uzbekistan di Gedung Parlemen Uzbekistan.*



*Ketua Dewan Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan Ismailov Nurdinjon memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel sebagai Ketua Delegasi DPR RI ke Uzbekistan pada kunjungan kehormatan Delegasi DPR RI ke Uzbekistan, disaksikan oleh Ketua Komisi VIIDPR RI Sugeng Suparwoto dan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memberikan produk kopi dalam negeri kepada Ketua Dewan Legislative Uzbekistan*



*Anggota DPR RI Willy Aditya memberikan produk makanan pisang dalam negeri kepada Ketua Dewan Legislative Uzbekistan, disaksikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.*



*Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Dirut PT. Pupuk Kaltim, Pimpinan Redaksi Media dan Staf Khusus Korinbang DPR RI di depan Gedung Parlemen Uzbekistan.*

## Pertemuan dengan Uzkimyosanoat dan Uzkimyimpex

Dalam kunjungan ke dua perusahaan negara Uzbekistan ini delegasi DPR RI diterima oleh Ketua Dewan Pimpinan Uzkimyosanoat Mirzamakhmudov Jurabek Tursunpulatovich, dan Direktur Uzkimyimpex Uzbekistan Mukhamedjanov Timur Rasulovich. Dalam pertemuan ini delegasi DPR RI didampingi Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI, Staf Ahli Menteri Perdagangan RI dan Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim serta Duta Besar LBBP RI Uzbekistan.

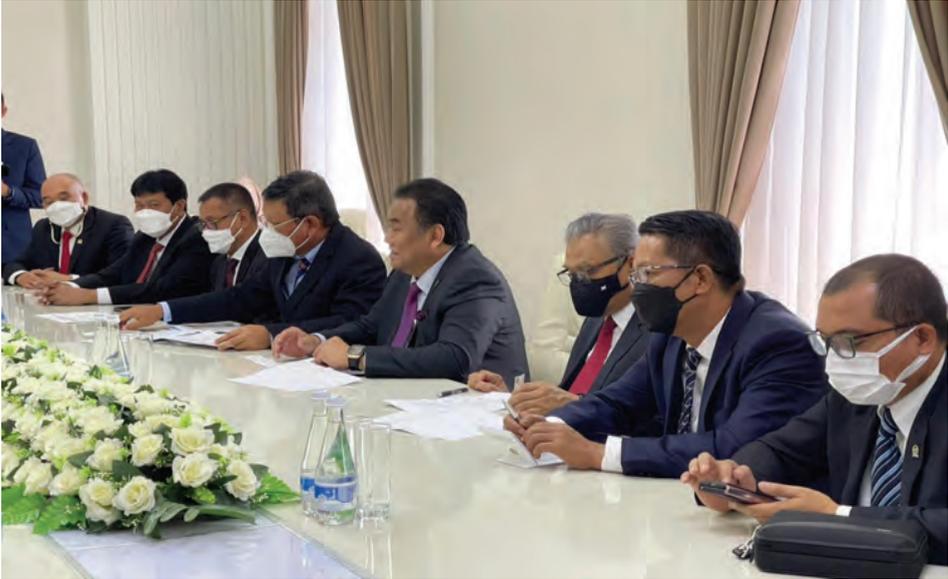
Pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Ketua Dewan Pimpinan Uzkimyosanoat dan Direktur Uzkimyimpex Uzbekistan ini untuk membahas potensi kerja sama Indonesia dan Uzbekistan ke depan. Uzkimyosanoat adalah perusahaan pupuk terbesar Uzbekistan, sedangkan Uzkimyimpex merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang perdagangan kimia.



*Pertemuan Delegasi DPR RI dengan Ketua Dewan Pimpinan Uzkimyosanoat dan Direktur Uzkimyoimpex Uzbekistan*



*Dalam pertemuan tersebut Ketua Delegasi DPR RI Rachmat Gobel menjelaskan perlunya meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan khususnya di bidang pupuk.*



*Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Dubes LBBP RI Uzbekistan, Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian dan Dirut PT. Pupuk Kaltim dalam pertemuan dengan Dewan Pimpinan Uzkimyosanoat dan Direktur Uzkimyoimpex Uzbekistan.*

Pertemuan ini membahas masalah bahan baku pupuk. Uzbekistan memiliki pabrik pupuk yang mengandung unsur hara Nitrogen, Phosphat dan Kalium (NPK) di Samarkand dengan kapasitas 250.000 ton per tahun. Seluruh bahan baku NPK berasal dari lokal. Selain itu terdapat Uz-Potash yang termasuk industri Kalium Klorida (KCl) dengan kapasitas sebesar 600.000 ton.

Rachmat Gobel melihat, peluang Uzbekistan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pupuk di tanah air, khususnya terkait bahan utama yang selama ini dibutuhkan Indonesia untuk memproduksi pupuk, yaitu KCl. Indonesia bukan merupakan negara produsen KCl, selama ini kebutuhannya dipasok dari Rusia, Kanada, dan Laos. Dalam pertemuan ini Indonesia dapat mencari peluang dari Uzbekistan yang bisa dijadikan alternatif untuk pemasok keperluan KCl di Indonesia.

Meski Uzbekistan juga memiliki batasan ekspor bahan pupuk terkait dengan keperluan dalam negeri, namun kedepannya diharapkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan, tidak hanya pupuk, namun juga bahan-bahan lainnya, termasuk KCl.

Selain membicarakan masalah pupuk, dalam pertemuan tersebut Delegasi DPR RI juga membicarakan produksi kapas dan bahan sintetis. Uzbekistan memiliki produksi kapas sebanyak 1 juta ton per tahun, namun Uzbekistan juga membutuhkan bahan sintetis sebagai campuran dalam pengelolaan kapas tersebut (*viscose, polyester, rayon, dll*). Uzbekistan juga dapat mempelajari produksi dan pengolahan bahan tekstil di Indonesia seperti *viscose* dan *polyester*.

Menanggapi pertemuan ini, Dirjen Industri, Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian RI Muhammad Khayam yang mendampingi Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan penawaran bahan baku dari Indonesia seperti urea dan pupuk lainnya, serta bahan *viscose, polyester, rayon* dapat diimport dari Indonesia.

"Ada peluang kerja sama ekonomi yang lebih baik antara Indonesia dengan Uzbekistan, sehingga bisa memacu neraca perdagangan kedua negara. Kami mendorong terjadinya kolaborasi antara pelaku industri Indonesia dan Uzbekistan, misalnya di sektor industri pupuk. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak daya saing," kata Muhammad Kayam.

Sebagai pimpinan Uzkimyosanoat, Mirzamakhmudov menyatakan minatnya akan produksi karet mentah Indonesia serta pengolahannya. Pihak Uzbekistan menyadari, produksi karet di Indonesia sangat besar jumlahnya dan dapat juga mencukupi kebutuhan karet mentah Uzbekistan, khususnya terkait dengan produksi ban kendaraan (sebagai informasi : Uzbekistan memiliki satu-satunya pabrik yang memproduksi ban mobil dengan merk "BARS" dan terletak di kota Angren).

Pertemuan juga membahas mengenai kendala pengiriman logistik ke Uzbekistan, yaitu terkait infrastruktur yang disebabkan oleh

**"Ada peluang kerja sama ekonomi yang lebih baik antara Indonesia dengan Uzbekistan, sehingga bisa memacu neraca perdagangan kedua negara. Kami mendorong terjadinya kolaborasi antara pelaku industri Indonesia dan Uzbekistan, misalnya di sektor industri pupuk. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak daya saing,"**

kondisi geografis (*double landlocked*) sehingga biaya pengirimannya akan mahal. Kedua belah pihak menyetujui penjajakan kerja sama dalam bidang industri dan bahan baku pupuk serta penjajakan kerja sama sektor pertanian dan tekstil.

Selain potensi kerja sama dibidang industri pupuk, Rachmat Gobel mengatakan, ada peluang di sektor industri agro. Uzbekistan membutuhkan buah-buah tropis, seperti pisang, buah naga, alpukat, dan kopi untuk konsumsi warganya maupun untuk mendukung industrinya. Karena itu, Ia menyampaikan, akan mendorong agar ada *sister city* antara kota di Uzbekistan dengan daerah-daerah di Indonesia penghasil buah-buah tropis, seperti contoh Kabupaten Lumajang yang merupakan daerah penghasil pisang di Jawa Timur bisa dicarikan daerah di Uzbekistan untuk dijadikan *sister city*. Daerah dan kota-kota lain penghasil buah naga dan kopi, bisa juga melakukan hal yang sama.

## Pertemuan dengan Menteri Investasi dan Perdagangan

Dalam kunjungan ini Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel disambut baik oleh Deputi PM/Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Uzbekistan Umurzakov Sardor Uktamovich dan jajarannya. Keduanya sama-sama menyadari adanya berbagai potensi yang dimiliki oleh kedua negara yang belum dioptimalkan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Selain punya kesamaan agama, kedua negara juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Deputi PM menginginkan segera ada aksi konkret yang dilakukan oleh kedua negara (Indonesia – Uzbekistan).

Dalam pelaksanaan aksi konkrit tersebut, Umurzakov mengusulkan agar Indonesia dan Uzbekistan segera membentuk *working group*/kelompok kerja, terdiri dari pejabat Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan sejumlah lembaga terkait. Kelompok Kerja akan menyusun sektor dan bidang usaha yang perlu dikerjasamakan, maka dipandang perlu untuk membuat perencanaan secara lengkap dengan target yang hendak dicapai dan jadwal kegiatan.

Ia juga menyebutkan, sebagai negara *double landlocked* tidak ada laut dan diapit oleh negara-negara yang tidak memiliki laut, Uzbekistan sedang merencanakan pembangunan jalur transportasi, kombinasi rel kereta api dan jalan raya dari Uzbekistan ke Rusia, dan dari Rusia ke Afghanistan hingga



*Jabat tangan selamat datang Deputy PM Uzbekistan merangkap Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Umurzakov Sardor Uktamovich kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel dalam rangka kunjungan Muhibah Delegasi DPR RI ke Uzbekistan.*



***Pertemuan Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Wakil Perdana Menteri/Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Uzbekistan Mr. Umurzakov Sardor Uktamovich dan Jajaran.***

Pakistan. Pembangunan jalur transportasi ini termasuk dalam banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan Indonesia untuk mempercepat pembangunan di Uzbekistan.

Kedua negara akan menyelenggarakan pertemuan antar pemerintah (*Joint Comission ke-2/Inter-Governmental Cooperation for Economy and Technical Commission (IGCET Meeting)*) Indonesia-Uzbekistan guna membicarakan sejumlah bidang kerja sama dengan melibatkan kalangan pemerintah maupun non-pemerintah.

Selain itu juga ada usulan untuk segera direalisasikan sinkronisasi data neraca perdagangan diantara dua negara dan perlunya dukungan penyelenggaraan expo perusahaan-perusahaan dari Indonesia dan Uzbekistan.

Kepada Umurzakov, Rachmat Gobel meminta agar Neraca Perdagangan Indonesian-Uzbekistan diseimbangkan. Sekitar 66% impor Indonesia dari Uzbekistan pada 2020 adalah bahan baku pupuk. Hingga tahun 2020, Indonesia masih defisit dalam perdagangan dengan Uzbekistan. Pada 2020, impor Indonesia dari Uzbekistan sebesar US\$ 18,16 juta. Dari jumlah itu, sebanyak US\$ 12,27 juta atau 66% adalah bahan baku untuk *fertilizers* atau bahan baku untuk pupuk. Di dunia, hanya beberapa negara yang memiliki bahan baku khusus untuk pupuk. Selain Uzbekistan, ada Rusia dan Kanada.



**Pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel dan Wakil Perdana Menteri/Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Uzbekistan Mr. Umurzakov Sardor Uktamovich didampingi Duta Besar LBBP RI untuk Uzbekistan Sunaryo Kartadinata,**

Mengenai usulan pembentukan *working group*, Rachmat Gobel mengatakan ini merupakan sebuah langkah konkret dari kunjungan selama di Uzbekistan. "Potensi Indonesia dan Uzbekistan sangat besar. Selain punya kesamaan agama, kedua negara juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Tanpa ada langkah konkret, potensi besar kedua negara yang baru sedikit dieksploitasi, akan tetap menjadi potensi. Saya akan segera menindaklanjuti pembentukan *working group* setiba di Jakarta, dan akan berbicara dengan Menteri Perdagangan RI, Kementerian mana yang akan dilibatkan dalam *working group* tersebut," katanya.

Soal pembangunan infrastruktur, Rachmat Gobel menilai, banyak hal yang bisa dikerjasamakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan di Uzbekistan, baik bidang infrastruktur transportasi, baku berbasis rel maupun berbasis jalan. Indonesia memiliki sejumlah BUMN berpengalaman, di antaranya PT. INKA untuk kereta api dan PT. Hutama Karya, PT. Wijaya Karya Tbk, dan PT. Waskita Karya untuk jalan raya.



*Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Menteri Investasi dan Perdagangan Uzbekistan Mr. Umurzakov Sardor Uktamovich didampingi Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Dubes LBBP RI untuk Uzbekistan Sunaryo Kartadinata, Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI Mohammad Khayam, staf Ahli Menteri Perdagangan RI Arlinda, Dirut PT. Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi, Dirut Metro TV Don Bosco Salamun, Pimred Berita Satu TV Primus Dorimulu, Pimred Kumparan.Com Arifin Asydhad dan Staf Khusus Korinbang DPR RI Nasihin Masha.*

## Kunjungan ke Samarkand

Mengakhiri kunjungan ke Uzbekistan, delegasi DPR RI sempat mengunjungi kota Samarkand, Bukhara yang dulunya dikenal sebagai jalur sutra, perlintasan manusia dari Asia bagian selatan, barat, dan timur menuju Eropa Timur dan Eropa Barat, dan sebaliknya. Samarkand dikenal sebagai daerah tujuan wisata religi karena banyak tokoh Islam yang berasal dari kota ini atau dimakamkan di kota ini. Selain Imam Al-Bhukari, ada makam Abu Mansur Maturidi, Baha-us-Din Naqsband, dan Abdul Khalid Ghajadwani. Di samping objek wisata rohani Islam, ada kuil dan gereja tua warisan masa lalu yang juga ditetapkan UNESCO sebagai *international heritage*.

Saat kunjungan delegasi DPR RI, makam Imam Bukhari sedang diperluas dan akan dibangun masjid besar yang bisa menampung 40 ribu jamaah. Disamping itu, pada tahun 2018 telah dibangun museum yang megah di dekat makam Imam Bukhari tersebut.



*Kunjungan Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel ke Wilayah Samarkand disambut dan diterima baik oleh Gubernur Samarkand didampingi oleh Imam Masjid Imam Bukhari.*



*Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang diajak meninjau Lokasi Perluasan Masjid dan Makam Imam Bukhari di Samarkand*

Rachmat Gobel bersama delegasi disambut oleh Wakil Gubernur dan Mufti Besar Samarkand. Kemudian melakukan pertemuan dengan Imam Masjid Imam Bukhari. Sebagai rasa hormat kepada Rachmat Gobel bersama rombongan, tuan rumah memotong seekor sapi besar di kawasan makam Imam Bukhari yang dagingnya akan diberikan kepada masyarakat sekitar.



*Delegasi DPR RI dan pejabat kota Samarkand berdoa bersama di Makam Imam Bukhari (Marawis Hadis).*



*Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Rachmat Gobel mengunjungi Makam Imam Bukhari (seorang Marawis Hadist) yang sedang dipugar untuk diperluas didampingi oleh Direktur Pengelola dan Imam Besar masjid Imam Bukhari, Samarkand.*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Ketua Komisi VII DPR RI mengunjungi Museum dan Perpustakaan Imam Bukhari di Samarkand*

## Kunjungan Muhibah Ke Belarusia

Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel tiba di Bandara Internasional Minsk, Belarusia, pada Kamis 21 Oktober 2021, disambut langsung oleh Wakil Ketua Parlemen Belarusia, *Valery Mitskevich* di ruang VVIP. Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Anggota Komisi X Ratih Megasari Jangkaru, Anggota Komisi XI Heri Gunawan. Disamping itu juga mengikutsertakan dari Kementerian Perdagangan RI, Staf Ahli Menteri Perdagangan Sutriyono Edi, serta Kementerian Perindustrian RI, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Muhammad Khayam, dan juga didampingi oleh Dubes RI untuk Rusia dan Belarusia Jose AM Taveres.

Selain bertemu dengan Ketua Parlemen Belarusia, Delegasi DPR RI dijadualkan bertemu dengan sejumlah pejabat kementerian dan perusahaan negara. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendorong kerja sama yang lebih erat dan membuka pasar lebih besar bagi Indonesia.

## Kunjungan Kehormatan ke Parlemen

Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Koribang Rachmat Gobel didampingi oleh Duta Besar RI Moscow melakukan kunjungan kehormatan ke Parlemen Republik Belarusia, pada 21 Oktober 2021. Kedatangan delegasi diterima dan disambut baik oleh Ketua Parlemen Republik Belarusia Vladimir Andreichenko beserta Anggota Parlemen. Sambutan hangat parlemen dan candaan Rachmat Gobel membuat suasana lebih rileks.

Kedua pemimpin parlemen dalam pertemuan tersebut sama-sama mengakui bahwa neraca perdagangan kedua negara masih jauh dari potensi sehingga perlu lebih ditingkakan. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, perdagangan RI-Belarusia hanya US\$ 165,2 juta pada 2020, dengan defisit yang cukup besar bagi Indonesia. Impor Indonesia dari negara ini mencapai US\$ 151,1 juta. Pada Januari-Agustus 2021 perdagangan kedua negara sudah mencapai US\$ 153,4 juta, namun masih tetap defisit bagi Indonesia.

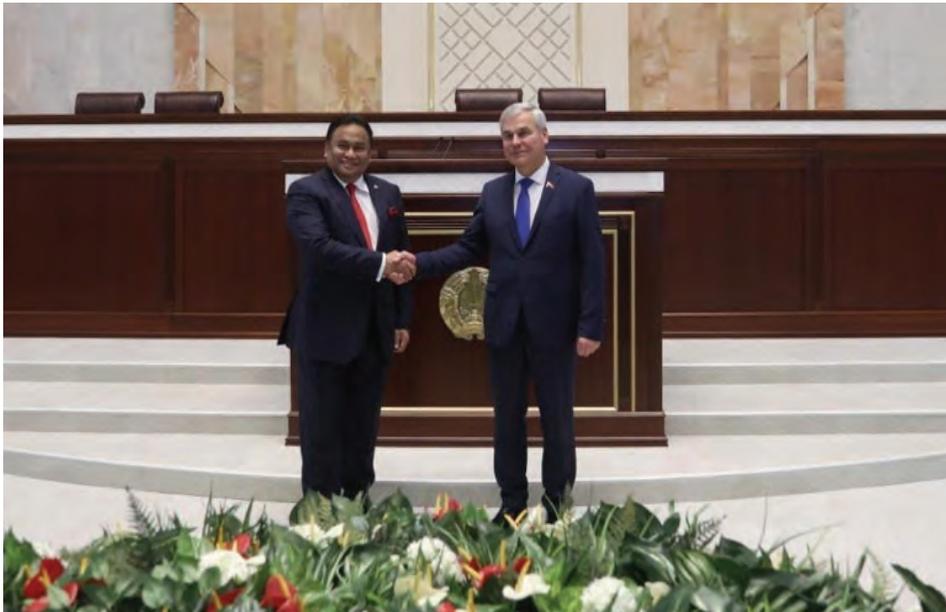
Rachmat Gobel meminta dukungan parlemen Belarusia agar mendorong percepatan FTA Indonesia-Eurasia (*FTA Indonesia-Eurasian Economic Union/ EAEU*) yang saat ini masih tahap *joint feasibility study*. Rachmat Gobel juga minta dukungan agar produk minyak sawit Indonesia bisa masuk lebih besar ke kawasan tersebut.

Inilah salah satu tujuan utama Delegasi DPR RI ke Belarusia, mendorong pemerintahan maupun dunia usaha masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan melengkapi.

Dalam pertemuan, Ketua Parlemen Belarusia Vladimir Andreichenko menyampaikan keinginan negaranya agar Indonesia membangun perwakilan tetap atau Kedutaan Besar di Republik Belarusia agar lebih memudahkan upaya meningkatkan hubungan kerja sama. Ia berharap ada kerja sama yang lebih luas di bidang pendidikan dan pariwisata.

Belarusia memiliki keunggulan di bidang pendidikan dengan perguruan tinggi modern dan berkualitas, dan berharap banyak orang Indonesia yang sekolah di negara ini. Sedangkan di bidang pariwisata, selama ini lebih banyak turis Belarusia yang datang ke Indonesia, terutama Bali. Sebelum pandemi Covid-19, tiap tahun 35.000 turis asal Belarusia datang ke Indonesia.

Secara khusus Vladimir Andreichenko juga meminta dukungan parlemen Indonesia agar perusahaan tambang di Indonesia memakai *dump truck* dari Belarusia, mengingat negara ini merupakan salah satu produsen *dump truck* terkemuka di dunia.



*Jabat tangan Ketua Parlemen Republik Belarusia Vladimir Andreichenko kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sebagai bentuk persahabatan kedua Parlemen Indonesia dan Belarusia*



*Pertemuan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan Parlemen Republik Belarusia di Gedung Parlemen Belarusia*



*Ketua Parlemen Belarusia Vladimir Andreichenko memberi buku tentang Belarusia kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel disaksikan oleh Anggota DPR RI*



*Ketua Parlemen Belarusia Vladimir Andreichenko memberi cenderamata patung bison, binatang khas dan ikon Belarusia kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.*



*Jabat tangan Wakil Ketua DPR RI dengan Ketua Parlemen Belarusia, sebagai tanda persahabatan.*

Sebagai Ketua Delegasi DPR RI, Rachmat menyampaikan harapan agar Indonesia dan Belarus dapat menciptakan hubungan dagang yang lebih seimbang antara kedua negara, salah satunya adalah melalui *joint investment* seperti pendirian pabrik *dump-truck* dan pembuatan traktor yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, serta dapat memanfaatkan karet Indonesia untuk pembuatan ban *dump-truck* dan traktor. Peningkatan ekspor lainnya dari Indonesia adalah hasil perikanan, tekstil, minyak kelapa sawit.

Sebagai tanda hormat, pada 22 Oktober 2021 Parlemen Belarusia menyelenggarakan jamuan makan malam untuk delegasi DPR RI. Jamuan berlangsung hangat yang ditandai aksi spontan Rachmat Gobel bertukar dasi dengan Wakil Ketua Parlemen Belarus Valery Mitskevich sebagai simbol keakraban dan persahabatan.

"Kita dasinya sama-sama berwarna biru. Ini menunjukkan kita satu hati. Bolehkah jika kita bertukar dasi," kata Rachmat Gobel dan langsung sambut oleh Valery. Momen ini pun disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan bahwa "Dasi ini nanti saya simpan khusus sebagai kenang-kenangan dan tanda persahabatan". Ini adalah bagian dari khas diplomasi Rachmat Gobel yang selalu mengedepankan pendekatan *heart to heart*, bukan *pocket to pocket*.

Valery mengaku terkejut dengan pertukaran dasi ini. "Ini pertama terjadi," ungkapnya dengan rasa senang.



*Pertukaran Dasi antara Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Wakil Ketua Parlemen Belarusia Valery Mitskevich*

## Pertemuan Dengan Deputi Menteri Luar Negeri Belarusia

Setelah dari Parlemen Belarusia, delegasi DPR RI melanjutkan kunjungan ke Wakil Menteri Luar Negeri Belarusia, Mikalay Borisevich. Dalam kesempatan ini, delegasi didampingi staf ahli Kementerian Perdagangan. Rachmat Gobel menyampaikan maksud kunjungan kerja yaitu meningkatkan kerja sama bilateral yang telah dirintis sebelumnya, melalui kunjungan kerja Ketua DPR RI, Marzuki Alie pada tahun 2013. Diharapkan, dengan kunjungan delegasi kali ini, kerja sama ekonomi kedua negara semakin meningkat dan akan dilanjutkan dengan kerja sama pendidikan, sosial dan budaya melalui *people-to-people contact*.

Pihak Kemlu Belarusia kembali mengangkat isu mengenai rencana pembukaan kantor penghubung KBRI Moscow di Minsk. Kemlu juga mengharapkan delegasi Indonesia dapat hadir secara *off-line* pada Sidang Komisi Bersama (SKB) dan *Political Consultation* RI-Belarusia pada November 2021.



**Wakil Menteri Luar Negeri Belarusia Mikalay Borisevich dan wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel pertemuan di Kantor Kementerian Luar Negeri di Minsk, Belarusia.**



*Pertemuan Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan Wakil Menteri Luar Negeri Belarusia*

## **Pertemuan Dengan Deputi Menteri Perindustrian dan Minsk Tractor**

Pada 22 Oktober 2021, Delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Deputi Menteri Perindustrian Belarusia, Dmitry Haritonchik dan manajemen OJSC *Minsk Tractor Works*, yang didampingi oleh Duta Besar RI Moscow merangkap Belarusia, Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI serta PT. Pupuk Kaltim.

Dalam pertemuan itu Dmitry Haritonchiks menyampaikan keunggulannya sektor industri Belarusia yang dapat memelihara dan menyempurnakan warisan teknologi dari Uni Soviet. Belarusia sendiri merupakan negara yang berorientasi pada ekspor dimana 40% dari hasil produksi dikonsumsi dalam negeri sedangkan 60% di ekspor ke negara lain.

Dimitry juga menginfokan, saat ini tengah dibahas draf *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Belarus di bidang Industri. Diharapkan melalui penandatanganan MoU ini, terjadi peningkatan hubungan kerja sama kedua negara di sektor industri.

Perwakilan *Minsk Tractor* menyampaikan, saat ini perusahaan ini tengah melakukan sertifikasi produknya agar bisa memasuk ke pasar Indonesia. Minsk Tractor sendiri telah memiliki pengalaman ekspor ke 110 negara di dunia.

Menanggapi hal ini, Rachmat Gobel mengajak *Minsk Tractor* untuk melakukan investasi bersama di Indonesia, dimana produk traktor Belarus dapat digunakan di Indonesia dan juga dapat dipasarkan di kawasan ASEAN. Bersama anggota delegasi lainnya, Rachmat Gobel melihat langsung pembuatan traktor Belarus Minsk Tractor Works yang mampu memproduksi 27 jenis traktor mulai dari kekuatan 9 pk hingga 359 pk di Minks, Belarusia.

Melihat industri tersebut dan keinginan Belarusia memasok alat beratnya ke Indonesia, Rachmat Gobel melihat peluang untuk mengeksport karet alam dan turunannya ke negara Belarusia. Indonesia memiliki kualitas karet yang bagus yang bisa digunakan sebagai bahan baku ban kendaraan alat berat Belarusia.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menawarkan Belarusia untuk mengimpor karet dari Indonesia guna memenuhi kebutuhan industri ban traktor dan alat berat negara itu, serta mengajak berinvestasi di Tanah Air. Menanggapi hal ini Dmitri mengakui, kualitas karet Indonesia bagus. Saat ini Belarusia mengimpor karet dari Vietnam dan Afrika Barat, namun tidak tertutup kemungkinan industri Belarusia mengimpor karet dari Indonesia.



**Kunjungan Wakil Ketua DPR RI ke pabrik Minsk Traktor, Belarusia didampingi oleh Ketua Komisi VII DPR RI dan Anggota DPR RI serta Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Dirut PT. Pupuk Kaltim**



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melihat produk traktor buatan Minsk Tractor Belarusia*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suprawoto dan anggota DPR RI Heri Gunawan bersama dengan Manajemen OJSC Minsk Tractor, Belarusia*



*Delegasi DPR RI dan Dubes Rusia merangkap Belarusia bersama para direksi Minsk Tractor*





*Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel, sedang melihat jenis mesin yang digunakan untuk traktor yang diproduksi oleh Minsk Tractor.*



**Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Anggota DPR RI Heri Gunawan melihat produk dari Minsk Tractor, Belarusia**

Rachmat Gobel mengatakan, tertarik dengan industri traktor dan alat berat yang dikembangkan Belarusia baik untuk pertanian, perkebunan, infrastruktur, hingga tambang. Belarusia mampu membangun industri traktor dan alat beratnya untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia untuk ekspor *dump truck* pertambangan.

Traktor besar produksi Belarusia juga dibutuhkan untuk pertanian berskala besar dan juga pertambangan, apalagi harga tambang seperti batu bara sedang tinggi saat ini. Selain melihat produksi traktor, delegasi DPR RI juga mengunjungi produsen *dump truck*, Belaz, yang merupakan salah satu pemain *dump truck* terkemuka di dunia. Saat ini sudah ada 80 *dump truck* Belaz yang sudah dipakai di Indonesia untuk pertambangan.

Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam mengatakan, akan menindaklanjuti kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel ke industri traktor di Belarusia, guna mengembangkan industri permesinan di Indonesia. Ia juga mengatakan, di Indonesia sudah ada industri yang memproduksi traktor tangan dengan dua ban yang sederhana. Ada lima perusahaan yaitu United Tractor, Caterpillar, Komatsu, ada Hyundai, tapi lebih



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menerima cinderamata dari Manajemen OJSC Belarus Minsk Tractor*



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memberikan cinderamata kepada Manajemen OJSC Belarus Minsk Traktor (Replika Gedung DPR)*



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melihat produk alat-alat dari Belarus Minsk Tractor*



*Pada saat kunjungan ke Pabrik Traktor Minsk, Belarus Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Ketua Komisi VII DPR RI dan dirut PT. Pupuk Kaltim didampingi oleh manajemen OJSC Minsk Tractor.*

ke *assembling* (perakitan). Dirjen IKFT berharap bisa dilakukan kerja sama dengan Belarusia untuk mengembangkan industri permesinan, khususnya traktor, mengingat Indonesia merupakan pasar yang besar dan bisa dijadikan basis produksi untuk domestik maupun ekspor.

Menurut Rachmat Gobel keberadaan pabrik *Belarus Minsk Tractor* di Indonesia sangat penting agar petani di Indonesia lebih percaya dan merasa nyaman menggunakan traktor tersebut karena ada kepastian suku cadang.

## Pertemuan Dengan Menteri Pertanian Belarusia

Pada 22 Oktober 2021, delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Belarusia Ivan Krupko serta Deputy Menteri Pertanian Igor Brylo. Ivan Krupko menyampaikan, pertanian merupakan sektor ekonomi utama Belarusia yang menyumbang sekitar 7% dari GDP total Belarusia. Selain itu Belarusia juga telah sanggup menghasilkan produk pertanian dengan jumlah melebihi konsumsi domestiknya, sebagai contoh produk-produk susu 2,5 kali lebih besar dari kebutuhan domestik dan produk daging 1,3 kali lebih besar.

Menurut data Kementerian Pertanian Belarusia, perdagangan produk pertaniannya dengan Indonesia baru mencapai US\$ 3 juta dalam 8 bulan pertama 2021. Belarusia berkeinginan untuk meningkatkan ekspor produk pertanian Belarusia ke Indonesia, terutama melalui pengakuan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga Belarusia "BelHalal".

Delegasi Indonesia dalam hal ini mengusulkan pembentukan *joint working group* dalam bidang pertanian antara Indonesia-Belarusia. Usulan ini disambut baik oleh pihak Belarusia.

Pada pertemuan ini turut hadir perwakilan dari perusahaan Farmasi terbesar di Belarusia "*Belphamprom*" dan menyatakan minat untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia khususnya untuk obat-obatan jadi. Menanggapi keinginan ini, Duta Besar RI Moskow menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pertemuan virtual antara perusahaan farmasi Indonesia dan perusahaan farmasi Belarusia untuk menjajaki peluang kerja sama, termasuk untuk obat-obatan herbal.

**Delegasi Indonesia dalam hal ini mengusulkan pembentukan *joint working group* dalam bidang pertanian antara Indonesia-Belarusia. Usulan ini disambut baik oleh pihak Belarusia.**



*Sambutan Selamat datang Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel pada kunjungan ke Kementerian Pertanian Belarusia*



*Pertemuan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Menteri Pertanian Ivan Krupto didampingi oleh Deputi Menteri Pertanian Belarusia Igor Brylo.*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menunjukkan produk herbal Indonesia kepada Menteri Pertanian Ivan Krupto disaksikan Ketua Komisi VII DPR RI*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menunjukkan produk kopi Indonesia kepada Menteri Pertanian Belarusia Ivan Krupto disaksikan Ketua Komisi VII DPR RI*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membagi-bagi produk herbal kepada jajaran Kementerian Pertanian Belarusia.*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Menteri Pertanian Belarusia dan jajaran*

## Kunjungan ke Perusahaan DumpTruck Belaz

Delegasi DPR RI juga berkesempatan berkunjung ke perusahaan/ pusat produksi "OJSC BELAZ" yang merupakan produsen truk tambang atau *dump-truck* dan juga fasilitas tambang potasium milik "OJSC Belaruskali" di kota Soligorsk.

Manajemen BELAZ mengatakan, telah membuka kantor perwakilan dan pusat servis/suku cadang di Kalimantan Timur, Indonesia. Salah satu produk unggulan dari perusahaan ini adalah sanggup memproduksi *dump-truck* berkapasitas muatan 450 ton.

Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel menyampaikan bahwa "bagaimana kalau ban truk tersebut dibuat dari karet Indonesia, (RI-Belarusia) join investasi dan Belarus bisa membina petani karet Indonesia agar bisa memasok karet untuk kebutuhan industri Belarusia.



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mencoba produk dump-truck "OJSC BELAZ" yang merupakan truk tambang atau dump-truck untuk fasilitas tambang potasium milik "OJSC Belaruskali" didampingi Kepala Operasional Teknisi.*



*Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel foto bersama di Pabrik Dump-Truck Belarusia*



*Seluruh Anggota Delegasi DPR RI dan Jajaran "OJSC Belaruskali" mencoba Dump-truck ukuran besar digunakan untuk pertambangan.*

## Pertemuan dengan Belarusian Potash dan Belaruskali

Pada 23 Oktober 2021, delegasi DPR RI melakukan kunjungan ke Tambang *Belarusian Potash* dan melakukan pertemuan dengan perusahaan pupuk Belaruskali. Belaruskali memastikan keberlangsungan *supply* pupuk potasium Belarus ke Indonesia, dimana pada tahun 2020, Indonesia mengimpor sekitar 692 ribu ton pupuk potasium dari Belarusia.



**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Ketua Komisi VII DPR RI dan Dirut PT. Pupuk Kaltim untuk persiapan meninjau tambang potash 500 M di bawah tanah**

Pihak Belaruskali mengharapkan Indonesia dapat meningkatkan kuota impor pupuk potasium dari Belarusia. Bahan baku pupuk potash atau kalium dan kendaraan alat berat mendominasi impor Indonesia dari negeri. Potasium memang menjadi andalan negara tersebut, mengingat Belarusia menjadi salah satu pemasok utama di dunia.



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berada di tambang potash Belaruskali 500 m bawah tanah.*



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel di tambang bawah tanah melihat langsung produksi bahan baku pupuk potash Belaruskali*





## Menghadiri Forum Internasional

Wujud peran diplomasi DPR RI tidak hanya sebatas untuk memperkuat hubungan antar negara, tetapi justru salah satu yang terpenting adalah bagaimana peran diplomasi ini menjadi ruang penting bagi Anggota DPR RI dalam meningkatkan kapasitas dan perannya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan dapat dijadikan bahan pembelajaran atas keterlibatannya sebagai delegasi Indonesia pada forum-forum internasional bersama parlemen negara lain.

Nilai pembelajaran dari setiap pertemuan forum internasional bermanfaat untuk kemudian dan dapat diterapkan saat bertugas di DPR. Salah satunya berupa perbandingan kebijakan antar negara yang sering menjadi bahan masukan dalam mengawasi kinerja pemerintah beserta otoritas terkait. Analisis perbandingan kebijakan yang kita terapkan menjadi salah satu cara DPR RI dalam melaksanakan proses pengawasan pembangunan di berbagai sektor termasuk di perdagangan, industri dan teknologi.

Dalam rangka kegiatan diplomasi parlemen, sepanjang menghadiri sejumlah forum internasional antara lain *Forum Inter-Parlementary Global Cooperation in the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)*, *World Halal Forum* dan *TEKNOFEST*.

### World Halal Summit 2021

*World Halal Summit* adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh *Organization of Islamic Cooperation (OIC)*, *The Islamic Centre for Development of Trade (ICDT)*, dan *Standard and Metrology for Islamic Countries (SMIC)*. Wakil Ketua DPR Korinbang Rachmat Gobel hadir atas undangan Presiden *World Halal Summit Council*. Acara yang digelar di Istanbul pada 25-28 November 2021 ini merupakan *World Halal Summit* yang ke-7 yang secara bersamaan juga diselenggarakan OIC Halal Expo ke-8.

Dalam kunjungan ini Rachmat Gobel didampingi sejumlah anggota DPR-RI yaitu Muhammad Amir Uskara dari Fraksi PPP, dan anggota DPR dari Partai Nasdem, Charles Meikyansyah. Hadir pula Kepala Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Doddy Rahady dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono.



*Sebagai tamu kehormatan pada Pembukaan Expo Halal 2021 di Turki, Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Amir Uskara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (tengah) dan Charles Meikyiansyah, Anggota Komisi IV DPR RI (kiri).*



*Expo Halal 2021 ""8th OIC Halal Expo and 7th World Halal Summit"" dibuka oleh Wakil Presiden Turki Fuat Oktay pada tanggal 25 November 2021 di Congress Center, Istanbul, Turki*

Dalam pertemuan *World Halal Summit* terungkap bahwa potensi pasar produk halal dunia kini sudah mencapai US\$ 7 triliun. Produk tersebut mencakup produk makanan, tekstil, pariwisata, kosmetika, obat-obatan, dan lain-lain. Angka ini jauh naik tajam dibandingkan 2017 yang baru mencapai US\$ 4 triliun. Pada 2024, nilainya diperkirakan akan mencapai US\$ 11 triliun. Namun sayangnya, produsen halal dunia masih dikuasai negara-negara dengan penduduk Islam minoritas, yaitu Brasil, Australia, Prancis, Jerman, dan Selandia Baru.

Untuk itu, melalui forum *World Halal Summit* ini, Rachmat Gobel menyarankan agar negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia serta lembaga-lembaga pemberi sertifikat halal di seluruh dunia harus duduk bersama untuk membangun kesamaan prosedur, ukuran, dan metode pengujian halal. "*Harus diakui saat ini masih ada perbedaan di antara negara-negara atau lembaga-lembaga pemberi sertifikat halal tentang hal-hal tadi,*" kata Rachmat Gobel.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus lebih fokus untuk membidik pertumbuhan pasar produk halal dunia ini. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus banyak belajar agar tidak hanya menjadi pasar produk halal dunia, tapi juga menjadi pemain atau produsen utama. Namun ironisnya, di Indonesia masih ada yang melihat kampanye produk halal sebagai upaya pemaksaan SARA. Mereka tidak melihatnya sebagai peluang pasar, tapi justru memotretnya dari sisi politis.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Gobel dan rombongan juga mengunjungi OIC Halal Expo-8. Tidak kurang dari 34.865 pengunjung yang hadir dan datang dari 94 negara dengan 378 peserta, termasuk sejumlah UMKM dari Indonesia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat langsung pengembangan industri produk halal, khususnya Turki. Negara ini mampu membangun industri halal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)-nya dengan kemampuan teknologi yang dimiliki negara itu.

**Indonesia juga harus lebih fokus untuk membidik pertumbuhan pasar produk halal dunia ini. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus banyak belajar agar tidak hanya menjadi pasar produk halal dunia, tapi juga menjadi pemain atau produsen utama.**



*Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel didampingi oleh Duta Besar RI di Turki, Lalu Muhammad Iqbal dalam pembukaan Expo Halal di Istanbul, Turki.*

*"Banyak negara Islam lainnya yang memproduksi produk halal, namun Turki merupakan negara dengan mayoritas muslim yang mampu membangun struktur industri yang kuat, terutama industri halalnya. Kalau perlu, untuk mengembangkan industri halal di dalam negeri, kita bekerja sama dengan Turki atau negara muslim lainnya yang hadir pada ajang ini," kata Rachmat Gobel.*

Menurut dia, salah satu keberhasilan Turki mengembangkan industri dan produk halal juga tidak lepas dari kemampuan negara itu membangun pariwisatanya, terutama pariwisata religi, dimana banyak peninggalan kejayaan Islam Turki Usmani berada di negara tersebut.

Di Indonesia, meski telah memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun ini belum mendorong produsen mengembangkan produk dengan sertifikasi halal. UU ini memang nilai agak longgar karena tidak ada ketentuan sanksi bagi yang tak melakukan sertifikasi. Hingga tahun 2020, baru 4,13 persen produk Indonesia yang memiliki sertifikat halal. Jumlah yang masih sangat rendah.



*Setelah Pembukaan Expo Halal 2021 di Turki, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berbincang dengan Amir Uskara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (No.2 dari kanan), Charles Meikyiansyah, Anggota Komisi IV DPR RI (No.2 dari kiri), Duta Besar RI di Turki Lalu M. Iqbal (No.3 dari kiri), Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggriono Sutarto (No.1 dari kanan) dan Kepala Badan Standar Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, Doddy Rahadi (No.1 dari kiri).*



*Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay setelah membuka Expo Halal 2021 mengunjungi Paviliun Indonesia dan disambut oleh Dubes RI untuk Turki lalu M. Iqbal.*

Wakil Ketua Komisi XI M Amir Uskara mendukung gagasan Rachmat Gobel. Ia mengatakan pemerintah perlu memberi dukungan yang lebih serius pada pengembangan produk halal di Indonesia, baik berupa insentif langsung maupun stimulus kepada UMKM untuk membangun produk halal.

Hal senada dikemukakan Charles Meikyansyah, Ia mengatakan, pengembangan produk halal harus dibangun dalam bingkai ekosistem ekonomi syariah yang jelas, agar bisa tumbuh optimal, di samping mempersiapkan sumber daya manusia hingga teknologi dan dukungan pemerintah.

Saat Rachmat Gobel menuju di ruang pameran, selain melihat-lihat produk yang dipamerkan oleh negara-negara lain, Rachmat Gobel berdialog dengan Badan Standardisasi Halal Turki, dan paling lama berada di stan Indonesia. Ia menyaksikan tarian Gorontalo, berdialog, dan juga berfoto bersama. Produk-produk Indonesia yang dipamerkan mulai dari herbal, rempah, kopi, hingga tekstil dan *handicraft*. Para peserta pameran dari Indonesia menyatakan puas karena produk Indonesia mendapatkan respon yang baik dari pengunjung.



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam kunjungan ke Istutusi Standarisasi Turki memberikan penjelasan terkait Standard Halal di Indonesia.*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, disambut oleh Tarian Tanah Leluhur Gorontalo pada kunjungan ke Paviliun Indonesia Expo Halal 2021 di Istanbul, Turki.*



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mengunjungi Paviliun Peserta Expo Halal produk Fashion , khususnya Pakaian Muslim yang sedang populer.*



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansyah, meninjau produk halal dari Indonesia yang dipamerkan di Paviliun Indonesia pada expo halal 2021 Turki .*



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, melihat produk jamu dari Peserta Expo Halal 2021 yang dipamerkan di Paviliun Indonesia.*

## Menghadiri TEKNOFEST 2021

TEKNOFEST adalah festival dirgantara dan teknologi yang diselenggarakan oleh Turki yang pertama kali diadakan pada 2018. Meski relatif baru, TEKNOFEST berhasil menarik berbagai negara dan industri teknologi tinggi. Pada 2019 pameran ini berhasil memecahkan rekor sebagai festival teknologi di Eropa yang paling banyak dikunjungi dengan partisipasi lebih dari 120 negara dan dikunjungi 1,5 juta orang.

Pada TEKNOFEST 2021 yang diselenggarakan 21-26 September 2021, tidak kurang dari 111 negara berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang digelar yaitu dari pameran produk sampai kompetisi teknologi. Ikut berpartisipasi, Indonesia mengikutsertakan dua BUMN yaitu PT. Dirgantara Indonesia (DI) dan PT. Industri Kereta Api (INKA) serta sejumlah lembaga riset dan pengembangan teknologi terkemuka untuk memamerkan hasil karyanya antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT. RAI, Artha Graha Group, PT. Pastac dan Carbon Addons. Ikut serta sejumlah perguruan tinggi yaitu dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Universitas Indonesia (UI).



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, melihat dan melakukan peninjauan ke paviliun-paviliun lokasi Festival Teknologi TEKNOFEST di Bandar Udara Atartuk Istanbul, Turki didampingi oleh Duta Besar RI di Turki Lalu Muhammad Iqbal dan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia Elfin Goentoro (21 September 2021).*



*Delegasi DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menghadiri undangan Festival Teknologi "TEKNOFEST" di Istanbul, Turki yang dibuka pada tanggal 21 September 2021.*

Selain untuk memenuhi undangan panitia, kehadiran Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama delegasi DPR RI di ajang pameran ini sekaligus untuk melihat langsung berbagai perkembangan yang sudah dicapai Turki dan negara yang menjadi peserta. Ini akan menjadi bahan perbandingan yang sangat penting dalam rangka mendorong industri *high-tech technology* Indonesia. Sekaligus juga untuk menjajaki berbagai peluang kerjasama strategis yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan sektor industri nasional.

Ikut serta dalam delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Rachmat Gobel ini adalah anggota DPR RI dari beberapa komisi dan fraksi. Mereka adalah dari Komisi I yaitu Anton Sukartono Suratno yang juga Wakil Ketua Komisi I (Demokrat) Djazuli Juwaini (PKS), Kresna Dewanata Phrosakh (Nasdem). Kemudian dari Komisi VI Muhammad Rapsel Ali (Nasdem), Ina Elisabeth Kobak (Nasdem) dari Komisi VII, Vera Fabyanti (Demokrat) dari Komisi XI. Dirut PT. Dirgantara Indonesia Elfein Gontoro dan Direktur Niaga Teknologi dan Pengembangan PT. DI Gita Amperiawan Sanui. Pada festival ini Indonesia menampilkan berbagai *prototype* produk teknologi seperti pesawat terbang CN 235 dan N 219 dan industri pertahanan. Dalam kesempatan ini Indonesia

juga akan menyelenggarakan *talkshow* dan penandatanganan kemitraan strategis dengan sejumlah pengembang teknologi dari Turki. Ajang adalah cara untuk *rebranding* Indonesia sebagai negara penghasil produk-produk berteknologi tinggi (*hight tech*).

“Kehadiran Indonesia di ajang ini sangat penting dan strategis, PT DI dan PT INKA memiliki potensi paling besar peluangnya untuk menjual produk/jasa ke Turki maupun ke negara ketiga melalui kemitraan dengan perusahaan Turki, hal ini sebagai momentum untuk memasuki pasar Turki dan kawasan *Middle East and North Africa*,” kata Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel mengatakan, melalui TEKNOFEST 2021 banyak hal yang bisa menjadi masukan bagi pengembangan teknologi di Indonesia. Festival ini dirancang untuk semua kalangan dan banyak sekali anak-anak sekolah yang datang mengunjungi paviliun/anjungan dari berbagai peserta. Ini adalah bagian dari strategi Turki untuk membangun mimpi dan kebanggaan generasi muda mereka untuk pengembangan teknologi serta rasa nasionalismenya lewat teknologi yang dimiliki dan dibangun oleh negara mereka.



**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Anggota DPR RI Vera Fabyanthy (Komisi XI), Kresna Dewanata Phrosakh (Komisi VI), Djazuli Juwaini (Komisi I), Ina Elizabeth Kobak (Komisi VII) dan Dirut PTDI Elfi Goentoro dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Festival TEKNOFEST Istanbul.**



**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) Dr. Ir. Elfen Goentoro, MBA dengan CEO Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) Dr.Mehmet Aktif Nacar mengenai kerjasama Aircraft Simulator untuk pesawat N219 didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukarto Suratto serta Duta Besar RI di Turki Lalu Muhammad Iqbal di Istanbul (21-9-2021).**



**CEO HAVELSAN, Dr.Mehmet Aktif Nacar memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel setelah penandatanganan MoU pada Festival Teknologi "TEKNOFEST" di Istanbul didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Duta Besar RI di Turki dan Dirut PT. DI. (21-9-2021)**



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memberikan Kopi produk Indonesia kepada Vice President, R&D Prototipe Turkish Aerospace Industries (TAI) Fahrettin Ozturk*



**Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima cinderamata dari President & CEO Turkish Aerospace Industries (TAI) Mr. Temel Kotil didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Anggota DPR RI**

Melalui ajang ini juga bisa dilihat, bagaimana Turki bisa membangun kemandirian dalam teknologi sehingga bisa tampil sebagai salah satu negara yang disegani di pentas dunia. Melalui *Turkey Aerospace Industries (TAI)*, negara ini mampu memiliki kekuatan dalam teknologi pesawat militer dan telah memproduksi banyak pesawat secara mandiri untuk kepentingan pertahanan seperti pesawat tempur, pesawat helikopter, pesawat tanpa awak (*drone*).

*"Untuk itu DPR RI perlu mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada BUMN bidang teknologi untuk dapat terus menghasilkan produk dan inovasi yang mampu bersaing di tingkat internasional,"* kata Rachmat Gobel.

Pada festival *TEKNOFEST* PT. DI menandatangani dua Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding (MoU)* dengan *Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN)* mengenai kerjasama *Aircraft Simulator* untuk pesawat N219. MoU ini ditandatangani oleh Dirut PT. DI, Dr. Ir. Elfien Goentoro, MBA dan CEO HAVELSAN, Dr. Mehmet Aktif Nacar, di booth PT. DI yang tergabung dalam Paviliun Indonesia di Festival "*TEKNOFEST*" 2021, Istanbul. Selain itu



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel disambut oleh Menteri Industri dan Teknologi Turki Mr. Mustafa Varank pada pertemuan Festival Teknologi TEKNOFEST di Istanbul, Turki (21-9-2021)*



***Pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Menteri Industri dan Teknologi Turki Mr. Mustafa Varank pada pertemuan Festival Teknologi TEKNOFEST di Istanbul, Turki (21-9-2021)***

juga penandatanganan kerja sama dengan *Turkish Aerospace Industries (TAI), Inc* mengenai kerjasama *N219 production extension, modernization and life extension of Turkish CN235 fleet, dan engineering support of development project*. Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU tersebut disaksikan oleh Waki Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukarto Suratno serta Dubes RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal dan beberapa Anggota DPR RI.

Rachmat Gobel mengatakan, kerjasama PT. DI dengan TAI harus bisa memberi manfaat besar bagi ke dua negara. Di satu sisi TAI sangat berpengalaman dalam mengembangkan pesawat militer, sementara PT. DI mempunyai pengalaman yang sangat panjang dalam mengembangkan pesawat sipil atau komersial.

Selain melihat berbagai produk di ajang *TEKNOFEST*, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel juga melakukan pertemuan dengan Menteri Industri dan Teknologi Turki Mustafa Varank untuk membicarakan kerja sama teknologi kedua negara. Dalam pertemuan ini Rachmat Gobel mengatakan, Indonesia dan Turki memiliki pemahaman yang sama untuk menjalin hubungan kerja sama teknologi kedirgantaraan dan ruang angkasa. Pertemuan berlangsung sangat produktif, dan banyak kesepahaman yang ditandatangani antara kedua



*Menteri Industri dan Teknologi Turki Mr. Mustafa Varank menjelaskan Replika Produk pesawat Turki kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukarto Suratno dan Anggota DPR RI antara lain Vera Fabyanthy (Komisi XI), Djazuli Juwaini (Komisi I),serta Anggota Delegasi lainnya di Festival TEKNOFEST Istanbul.*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memberikan produk kopi dalam negeri kepada Menteri Industri dan Teknologi Turki Mr. Mustafa Varank disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukarto Suratno dan Anggota Komisi I DPR RI Djazuli Juwaini serta Anggota DPR lainnya*

negara diantaranya PT.DI dengan *Turkey Aerospace Industries (TAI)* dan juga PTDI dengan *HAVELSAN*.

Indonesia Turki bersepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan pesawat N219 milik PT. DI, pengembangan kapasitas dan sumberdaya manusia, serta kerja sama teknologi masa depan.Turki akan belajar dari Indonesia untuk teknologi pesawat sipil, dan Indonesia akan belajar dari Turki untuk teknologi pesawat militer.

Dalam menjalankan peran diplomasinya sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel telah melaksanakan peran diplomasinya dengan melakukan pertemuan-pertemuan dan kunjungan Muhibah Delegasi DPR RI ke luar negeri dalam rangka mempererat hubungan bilateral dan multilateral antar dua negara (khususnya hubungan parlemen). Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel telah melakukan kunjungan ke beberapa negara yaitu: Turki, Uzbekistan dan Belarusia, disamping itu juga untuk meningkatkan kerjasama bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, dan teknologi.



**Penyambutan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyambut kedatangan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di kantor Kementerian Luar Negeri RI**



*Pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri RI*

Dari kunjungan tersebut Rachmat Gobel menginginkan adanya tindak lanjut kunjungan muhibah luar negeri tersebut, sehingga hasilnya menjadi hasil konkrit. Sebagai tindak lanjut kunjungan diplomasi tersebut Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel telah melakukan pertemuan dengan beberapa Menteri, yaitu: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada bulan Desember 2021. Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel menyampaikan hasil kunjungan muhibah sebagai berikut:

## **1. Kunjungan Muhibah ke Turki**

- a. Mendorong agar segera ditandatangani kerja sama perdagangan *Indonesia Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA)*, agar dapat meningkatkan neraca perdagangan Indonesia Turki lebih baik.

- b. TUBITAK, Turki menawarkan kerjasama bidang riset dan teknologi untuk Indonesia dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi kedepan;
- c. Dengan adanya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi investor, diharapkan Turki dapat berinvestasi di Indonesia;
- d. Mendorong adanya kerja sama pupuk antara PT. Petrokimia Gresik dengan Eti Maden, Turki untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

## Kunjungan Muhibah ke Uzbekistan

- a. Peningkatan kerjasama bilateral, regional dan internasional antar Parlemen/ *Parliamentary Friendship Group*;
- b. Selama ini kebutuhan bahan baku pupuk (Kcl) Indonesia didatangkan dari Uzbekistan penghasil bahan baku (Kcl) yang selama ini dibutuhkan industri pupuk. Kebutuhan ini akan meningkat seiring dengan pembangunan pabrik-pabrik NPK di Indonesia. Diharapkan kapasitas



**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Ulugbek Rozukulov sebagai tindak lanjut kunjungan Muhibah Delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ke negara Uzbekistan di Ruang Kerja Korinbang.**



**Pertemuan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Ulugbek Rozukulov dalam menindaklanjuti hasil kunjungan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ke Uzbekistan di Ruang Kerja Korinbang.**

- produksi dapat ditingkatkan, tidak hanya pupuk, namun juga bahan-bahan baku lainnya;
- c. Dengan adanya UU Cipta Kerja, mendorong agar Uzbekistan dapat berinvestasi ke Indonesia dalam energi baru terbarukan ;
  - d. Mendorong kerjasama ekonomi, perdagangan, industri, *holtikultura/* produk pertanian, serta penajakan *sister city* antar kota Uzbekistan, selain itu meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata serta pertukaran antar ulama (pengembangan kawasan Makam Imam Bukhari);
  - e. Uzbekistan berminat akan hasil produksi karet mentah Indonesia, untuk kebutuhan bahan baku produksi ban kendaraan;
  - f. Berharap kedua negara (khususnya perlemen) dapat mengembangkan roadmap terkait program kerja sama, dan berharap agar kerja sama terus ditingkatkan tidak hanya "G to G", tetapi "*p to p*" *contact* ;
  - g. Menteri Investasi dan Perdagangan Uzbekistan mengusulkan dibentuknya *working group* antara lain dengan Kementerian Perdagangan, Investasi, Perindustrian, Pertanian dan lembaga lainnya untuk menyusun perencanaan program yang akan dikerjasamakan;

### 3. Festival “*TEKNOFEST*” di Istanbul

- a. Indonesia 2021 pertama kali menjadi *Guest of Honour* dalam Festival Teknologi forum internasional dalam pengembangan riset dan teknologi (*high-tech*);
- b. Mendorong agar Pemerintah mengikut sertakan pelaku industri teknologi dalam negeri ke event internasional seperti *TEKNOFEST*, untuk pengembangan inovasi teknologi anak bangsa bersaing di pasar global/internasional;
- c. Dapat membangun mimpi dan nasionalisme anak bangsa terhadap perkembangan teknologi di Indonesia;
- d. Meningkatkan kerja sama Indonesia-Turki bidang teknologi terutama kedirgantaraan, sehingga dapat bersaing di pasar global/Internasional;
- e. Mendukung PTDI agar berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan internasional;
- f. Mendorong pemerintah memberikan alokasi anggaran yang signifikan dalam bidang riset dan teknologi agar menghasilkan produk teknologi unggulan yang dapat dimanfaatkan baik untuk masyarakat Indonesia maupun negara lain.

### 4. Kunjungan Muhibah ke Belarusia

- a. Meningkatkan industri pertanian Indonesia, dengan mendukung program pemerintah mengenai ketahanan pangan, negara Belarusia salah satu penghasil potasium sebagai bahan baku pupuk terbesar di dunia (kandungan potasiumnya mencapai 6,6 % miliar ton yang cukup untuk operasional perusahaan selama 120 tahun).
- b. Indonesia selama ini mengimport bahan baku pupuk potasium dari Belarusia yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian (Potasium yang selama ini mendominasi perdagangan Indonesia Belarusia):
- c. Belarusia mampu menjaga ketahanan pangannya, bahkan mampu mengekspor produk pertanian seperti susu, daging dan tanaman pangan. Indonesia harus belajar bagaimana Belarusia mencapai kedaulatan pangannya;
- d. Meningkatkan kerjasama industri permesinan (seperti traktor,

- dump-truck* dan industri lainnya) sebagai alsintan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, selain itu juga pertambangan, karena industri tersebut dibutuhkan di Indonesia;
- e Mendorong kerja sama industri Indonesia-Belarusia agar berinvestasi dengan membangun pabrik traktor di Indonesia (traktor produksi Belarusia memiliki kualitas yang bagus dan kompetitif), sehingga bisa masuk ke pasar Indonesia;
  - f Belarusia mengharapkan agar Pemerintah Indonesia membuka Perwakilan Republik Indonesia di Belarusia;





“

Bagi Rachmat Gobel, sama sekali tidak ada kesulitan dalam mempraktikkan nilai kebangsaan dan religiusitas secara bersamaan. Sejak kecil ia telah akrab dengan nilai-nilai ini yang diajarkan oleh ayahnya Thayeb Mohammad Gobel. Beliau merupakan tokoh pergerakan Sarekat Islam yang juga mengedepankan nilai kebangsaan.

”



# BAB VII

## MEMBANGUN SEMANGAT RESTORASI DALAM KEBERAGAMAN

“**P**ARTAI Nasdem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip Bhinneka Tungga Ika,” demikian bunyi Mukadimah Anggaran Dasar Partai Nasdem.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem menegaskan, partai ini adalah sebuah gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia. Gerakan untuk memulihkan, mengembalikan, dan memajukan Indonesia kepada cita-cita proklamasi. Untuk mencapai tujuan itu, Indonesia harus memegang prinsip persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan.

Oleh karena itu, keberadaan Partai Nasdem adalah bagian dari perwujudan nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan yang demokratis seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional.

Tidak hanya sebatas berhaluan kebangsaan, Partai Nasdem juga merupakan partai religius. Hal ini bisa dibaca pada Garis Besar Haluan Partai: "NasDem berprinsip bahwa nasionalisme dan demokrasi haruslah merujuk pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan nasionalisme sebagai pemersatu bangsa haruslah diisi dengan nilai-nilai spiritualitas. Spiritualitas akan membuat kemajemukan bangsa menjadi anugerah dari Sang Maha Kuasa dan akan melahirkan sikap toleran terhadap setiap bentuk perbedaan yang hadir. Spiritualitas juga akan mampu membuat segala bentuk kontestasi dan persaingan politik menjadi bermartabat."

Semua itu menjadi panduan bagi Rachmat Gobel dalam menjalankan fungsi sebagai Kader Partai NasDem yang diamanahkan untuk memangku jabatan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang. Ia selalu berusaha sebaik-baiknya menerapkan prinsip kebangsaan dan religiusitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

"Berdasarkan nilai-nilai dasar negara, ideologi partai, realitas sosial masyarakat serta latar belakang keluarga membawa saya kepada pemahaman bahwa perilaku hidup yang religius harus menjadi pendorong kemajuan bangsa. Bukan menjadi penghambat," kata Rachmat Gobel.

Bagi Rachmat Gobel, sama sekali tidak ada kesulitan dalam mempraktikkan nilai kebangsaan dan religiusitas secara bersamaan. Sejak kecil ia telah akrab dengan nilai-nilai ini yang diajarkan oleh ayahnya Thayeb Mohammad Gobel. Beliau merupakan tokoh pergerakan Sarekat Islam yang juga mengedepankan nilai kebangsaan. Sarekat Islam adalah organisasi yang dibesarkan seorang tokoh pergerakan kebangsaan HOS Tjokroaminoto. Melalui organisasi ini telah lahir tokoh dan guru bangsa seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muis.

Sampai akhir hayatnya Thayeb Mohammad Gobel juga aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang

**"Berdasarkan nilai-nilai dasar negara, ideologi partai, realitas sosial masyarakat serta latar belakang keluarga membawa saya kepada pemahaman bahwa perilaku hidup yang religius harus menjadi pendorong kemajuan bangsa. Bukan menjadi penghambat,"**



*Rachmat Gobel menghadiri muktamar Sarekat Islam di Kota Solo, 4 Desember 2021*



*Rachmat Gobel bersama Gubernur Jawa Tengah dan para tokoh di pembukaan muktamar Sarekat Islam di Kota Solo, 4 Desember 2021*

dideklarasikan pada 5 Januari 1973 sebagai fusi dari sejumlah partai Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSSI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Pertis) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Jas-jas seragam SI dan PPP masih tersimpan rapi di lemari peninggalan Thayerb Mohammad Gobel. Karena itu tak heran jika Rachmat Gobel memiliki darah religiusitas dan kebangsaan yang kuat.

## Memahami Sejarah Bangsa

Tidak hanya dari keluarga, pemahaman Rachmat Gobel terhadap pertautan nilai kebangsaan dan keagamaan juga datang dari pemahamannya terhadap sejarah bangsa Indonesia yang ia rujuk dari pidato tokoh proklamator kemerdekaan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato yang dikenal sebagai hari lahir Pancasila itu Bung Karno menyatakan, "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!"

Dasar Ketuhanan ini, kata Sukarno, telah menjadi sejarah bangsa dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. "Bagaimana seluruh

rakyat Indonesia pada garis besarnya? Kalau pada garis besarnya telah saya *gogo*, saya selami, sudah saya lihat secara historis, sudah saya lihat dari sejarah keagamaan, pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan," katanya, dalam pidato kursus Pancasila pada 1958.

Latar belakang sejarah yang panjang sebagai masyarakat yang beragama maka masyarakat Indonesia tidak lepas dari kehidupan keagamaan. Karena itu, semua agama yang kemudian datang mudah berkembang dan hidup subur. Ini karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius.

Dalam pidato 1 Juni, Sukarno menempatkan sila Ketuhanan pada urutan

Tidak hanya dari keluarga, pemahaman Rachmat Gobel terhadap pertautan nilai kebangsaan dan keagamaan juga datang dari pemahamannya terhadap sejarah bangsa Indonesia yang ia rujuk dari pidato tokoh proklamator kemerdekaan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945.

kelima, sedangkan urutan pertamanya adalah Kebangsaan. Namun urutan itu kemudian mengalami perubahan pada 22 Juni 1945 dan akhirnya dikukuhkan pada 18 Agustus 1945. Sila Ketuhanan menempati urutan pertama.

Tentang perubahan itu, latar belakangnya dapat dipahami dalam penjelasan Bung Hatta. Menurut Bung Hatta, Pancasila terdiri atas dua lapis fundamen, yaitu fundamen politik dan fundamen moral atau etik agama. "Bagi Bung Karno sendi politik didahulukan, sendi moral menjadi penutupnya," kata Bung Hatta. Pada akhirnya, keputusan yang dibuat dalam Panitia Sembilan maupun PPKI yang menjadi keputusan formal pengesahan Pancasila sebagai dasar negara seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, sila Ketuhanan menempati urutan pertama.

Dengan demikian meletakkan dasar moral di urutan teratas. Hal ini, kata Bung Hatta, yang ikut menjadi anggota Panitia Sembilan, sila Ketuhanan menjadi dasar "yang memimpin cita-cita negara" dan "memberikan jiwa kepada usaha" penyelenggaraan cita-cita negara tersebut. Perubahan ini juga memberikan tambahan pemahaman tentang sila Ketuhanan dari yang



*Rachmat Gobel bersama DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Oktober 2021.*

dimaksud Bung Karno. “Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin,” kata Bung Hatta. Tak hanya itu, kata Hatta, “Di bawah bimbingan sila yang pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu ikat-mengikat”.

Sila Ketuhanan ini memiliki posisi yang penting, sebagaimana sila Kebangsaan yaitu dasar moral, yang satunya menjadi dasar politik. Keduanya harus berjalan seiring, karena itu, slogan Bhinneka Tunggal Ika menempati posisi yang tak kalah pentingnya karena mengamanahkan persatuan.

Tentang persatuan itu, telah ditangkap dengan baik oleh para *founding fathers* dalam Panitia Sembilan. Sila Kebangsaan dinilai masih kurang tegas untuk konteks mempersatukan sehingga bunyinya berubah menjadi Persatuan Indonesia. Di sini kata persatuan menjadi penekanan tersendiri. Selain itu, sesuai Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” telah menempatkan Indonesia sebagai negara religius dan bukan negara sekular, namun juga bukan negara agama. Dasar-dasar inilah yang menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara Indonesia.

*“Sebagai kader Partai NasDem, saya harus bahwa nilai-nilai dasar negara dan partai, serta realitas sosial masyarakat Indonesia adalah penuntun kita untuk berperilaku hidup yang religius dan ini harus menjadi pendorong kemajuan bangsa, bukan menjadi penghambat,”* kata Rachmat Gobel.

## Membangun Politik Persabahatan

Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Tidak hanya terdiri berbagai suku dan bahasa, agamanya pun beragam. Menurut data BPS, tidak kurang dari 1.340 suku bangsa yang hidup Indonesia dengan berbagai perbedaan budaya yang membentuk keanekaragaman bangsa ini.

Negara Indonesia juga mengakui keragaman kehidupan keagamaan. Agama-agama pendatang, yaitu Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu merupakan agama-agama yang diakui keberadaannya. Demikian pula dengan penghayat kepercayaan, atau agama lokal, seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lainnya. Keanekaragaman di Indonesia semakin luas karena masyarakat juga terafiliasi kepada berbagai organisasi yang masing-masing

mempunyai ciri khas sendiri. Semua diberi hak hidup dan penghormatan yang sama.

Di dalam agama Islam ada organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama/NU (berdiri 1926, Surabaya), Muhammadiyah (1912, Yogyakarta), Persatuan Islam/Persis (1932, Bandung), Nahdlatul Wathan/NW (1953, Lombok Timur), Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Perti (1930, Bukittinggi), Al Jam'iyatul Washliyah/Al Washliyah (1930, Medan), Persatuan Umat Islam/PUI (1917, Majalengka), Mathla'ul Anwar (1916, Pandeglang), Hidayatullah (1973, Balikpapan), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia/DDII (1967, Jakarta), Ikatan Dai Indonesia/Ikadi, Wahdah Islamiyah (1988, Makassar), Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia/ICMI (1990, Jakarta), Sarekat Islam/SI (1912, Solo), Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia/PITI (1961, Jakarta), Al Khairaat (1930, Palu).

Atas prakarsa pemerintah sebagai organisasi payung dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada 1975. Selain itu juga terdapat organisasi Islam pemuda dan pelajar yang independen, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam/HMI (1947, Yogyakarta) dan Pelajar Islam Indonesia/PII (1947, Yogyakarta). Sedangkan ormas sejenis yang lain umumnya bernaung di bawah ormas Islam besar yang menjadi payungnya seperti PMII, IPNU, IPPNU, IMM, dan sebagainya.

Sedangkan ormas keagamaan lainnya adalah Konferensi Waligereja Indonesia/KWI (1955) untuk Katolik, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI (1950) untuk Kristen, lalu ada Perwalian Umat Budha Indonesia/Walubi untuk Budha, Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI (1959) untuk Hindu, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia/MATAKIN (1923) untuk Konghucu. Semua itu merupakan organisasi payung, karena di bawahnya masih terdapat lembaga-lembaga perkumpulan sendiri-sendiri. Bahkan untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat ratusan organisasi.

**"Sebagai kader Partai NasDem, saya harus membawa nilai-nilai dasar negara dan partai, serta realitas sosial masyarakat Indonesia adalah penuntun kita untuk berperilaku hidup yang religius dan ini harus menjadi pendorong kemajuan bangsa, bukan menjadi penghambat,"**

Keanekaragaman itu merupakan potensi sekaligus mendatangkan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Tantangan ini dari kenyataan bahwa segala hal yang menyangkut keyakinan dan tata nilai yang beragam selalu memiliki sisi manifes dan sisi laten. Sisi manifes selalu bernilai positif dan luhur, namun sisi laten justru berkebalikan mempunyai potensi menimbulkan konflik dan persaingan.

Sisi laten inilah yang seperti ditekankan Bung Karno hormat-menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi sangat penting dan harus selalu dijaga. Tidak ada egoisme. Pada titik inilah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai *weltanschauung*, sebagai pandangan dunia, sebagai *common platform*.

Oleh karena itu dalam pandangan Rachmat Gobel, meningkatkan kemampuan dalam komunikasi dan interaksi sesama anak bangsa menjadi sangat penting. Banyak hal bisa diselesaikan dengan lebih mudah jika komunikasi dan interaksi sesama anak bangsa berlangsung damai dan penuh persahabatan, termasuk dalam politik.

*"Politik persahabatan harus menjadi langgam utama dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini bukan saja karena Indonesia negeri yang bhinneka dan luas, tapi juga karena Indonesia adalah negara kepulauan sehingga jarak antar wilayah menjadi demikian niscaya memudahkan meletupnya konflik. Selain itu juga karena kemiskinan yang besar dan ketimpangan yang masih lebar. Dua hal ini merupakan bahan bakar yang efektif untuk menghanguskan kehidupan sosial,"* kata Rachmat Gobel.

Bukan hanya sebagai jargon, membangun politik persahabatan telah menjadi bagian inheren dalam pribadi Rachmat Gobel dalam menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan. Baik dalam berinteraksi secara formal maupun nonformal. Bahkan dalam menjalankan kegiatan diplomasi politik persahabatan telah menjadi ciri khasnya baik ketika menjadi Utusan Khusus Presiden Jokowi

**Meningkatkan kemampuan dalam komunikasi dan interaksi sesama anak bangsa menjadi sangat penting. Banyak hal bisa diselesaikan dengan lebih mudah jika komunikasi dan interaksi sesama anak bangsa berlangsung damai dan penuh persahabatan, termasuk dalam politik.**

untuk Jepang, maupun dalam menjalankan diplomasi parlemen ke berbagai negara.

Bagi Rachmat Gobel, politik persahabatan itu telah dicontohkan dengan bagus sekali oleh generasi yang menjadi *founding father* Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Para bapak bangsa memiliki politik persahabatan yang luhur. Usai berdebat di parlemen, mereka bisa berboncengan sepeda bersama, saling berkunjung ke rumah masing-masing, bahkan urunan membelikan rumah untuk yang belum punya rumah.

Nilai-nilai itulah, lanjut Rachmat Gobel, yang harus terus dirawat dan dilestarikan. Karena karakter seperti itu yang menjadi ciri dari bangsa-bangsa maju. Hubungan yang dibangun dalam semangat persahabatan akan membangun sinergi diantara anak bangsa, akan melahirkan berbagai ide dan gagasan cemerlang dan membentuk karakter yang kuat bagi bangsa ini.

Politik persahabatanlah yang misalnya membuat Rachmat Gobel selalu berupaya merespon dengan cepat berbagai masalah yang dihadapi. Sebagai ilustrasi, saat terjadi Badai Siklon Seroja di Flores yang menimbulkan banjir dan korban jiwa hingga lebih dari 100 orang pada April 2021 lalu, Rachmat Gobel langsung melakukan komunikasi dengan Uskup Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mgr Fransiskus Kopong Kung. Padahal saat itu Rachmat Gobel juga tengah was-was karena pada saat badai berlangsung ia tengah melakukan kunjungan kerja ke Sumba, NTT.

Namun segala rasa khawatir dan was-was pada dirinya langsung hilang begitu mendengar kabar bahwa badai telah membuat sejumlah wilayah NTT kebanjiran dan memakan banyak korban. Rachmat Gobel yang juga merasakan drama badai tersebut sehingga bisa membayangkan penderitaan yang harus dihadapi penduduk yang terkena bencana banjir. Karena itulah Rachmat Gobel langsung menghubungi dan berkomunikasi dengan Keuskupan Larantuka membawahkan Flores Timur dan Lembata untuk menawarkan bantuan. Korban terbesar berasal dari dua kabupaten.

**politik persahabatan itu telah dicontohkan dengan bagus sekali oleh generasi yang menjadi *founding father* Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Para bapak bangsa memiliki politik persahabatan yang luhur.**

Berkoordinasi Ketua DPW Partai Nasdem NTT, Rachmat Gobel menginstruksikan untuk membangun posko bencana dan dapur umum. " Saya menyampaikan simpati dan duka cita kepada Uskup serta apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang berduka. Nasdem segera membentuk posko bencana dan dapur umum untuk membantu korban bencana. Masyarakat membutuhkan bantuan pakaian, selimut, makanan, dan bantuan logistik lainnya. Semoga bisa segera pulih dan bencana lekas berlalu," kata Rachmat Gobel seperti dikutip sejumlah media.

Rachmat Gobel juga memanfaatkan momen hari raya keagamaan membangun komunikasi dan interaksi yang lebih kuat dengan dengan lembaga dan tokoh-tokoh agama. Setiap lebaran Idul Adha misalnya, Rachmat Gobel selalu menitipkan kurban berbagai organisasi Islam. Pada Tahun lebaran Idul Adha 2021 misalnya ia menitipkan hewan kurban ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, dan Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Banten.

Terinspirasi dari para *founding father*, dalam berinteraksi dan komunikasi tak harus ada kejadian atau bersifat materi. Rachmat Gobel selalu menjaga silaturahmi secara rutin seperti dengan Kiai Said Aqil Sirodj, Ketua Umum



Rachmat Gobel bersilaturahmi kepada Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj, 24 April 2021



*Rachmat Gobel berramah-tamah dengan Ketua Umum MUI merangkap Rois Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, 20 Maret 2021*



*Rachmat Gobel di damping oleh dua anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Nusa Tenggara Timur beserta uskup di Keuskupan Larantuka,, melakukan kunjungan ke Pulau Sumba, April 2021*

PBNU maupun dengan Rois Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Silaturahmi juga dilakukan dengan pimpinan pondok pesantren maupun pemimpin gereja.

Pesan politik persabatan ini juga ia kumandangkan pada berbagai kesempatan seperti saat menghadiri ibadah Ramadhan. Selama menjalankan ibadah Ramadhan 2021 di Gorontalo, Rachmat Gobel menggelar shalat tarawih berjamaah di aula di depan rumahnya, di Tapa yang dilokasi ini berdiri rumah adat warisan kerajaan Bolango. Bahkan ia diminta untuk selalu menjadi imam shalat Tarawihnya. Ketika berada di Jakarta, ia juga mengimami shalat tarawih di lingkungan keluarga besarnya.

Sementara itu saat menghadiri acara Natal di Gorontalo, Rachmat Gobel menyampaikan pesan bahwa sebagai bangsa yang majemuk, semua pihak harus saling bahu membahu dan hidup dalam harmoni untuk sama-sama membangun Indonesia menjadi lebih maju dan makmur. Indonesia, katanya, adalah negara kaya dan semua potensi harus dijaga untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

*"Sebagai wujud dalam membangun keharmonian, saya sengaja memperpanjang kunjungan kerja ke Gorontalo ini agar bisa ikut hadir dalam acara silaturahmi Natal ini,"* kata Racmat Gobel.



**Rachmat Gobel menghadiri acara Natal Gorontalo, 25 Desember 2021**

Di tengah berbagai kesibukan agenda kerja, Ia selalu berupaya untuk bisa ikut dalam berbagai acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain untuk mendengar nasihat ulama, kehadirannya dalam berbagai acara keagamaan ini sekaligus untuk menangkap aspirasi masyarakat.

*"Dalam acara seperti ini, kita ingin memperkuat iman kita, sekaligus memperkuat silaturahmi dengan masyarakat,"* kata Rachmat Gobel saat menghadiri peringatan Maulid Nabi SAW di Mesjid Agung Baiturrahim Gorontalo yang diisi tausih ulama terkenal Ustadz Das'ad Latif, pada Sabtu (13/11/2021)

## Pesantren dan Penguatan Karakter

Seperti kata Bung Hatta, sila pertama Pancasila memimpin sila-sila yang lain. Dengan demikian, sila Ketuhanan menjiwai sila-sila yang lain. Sebagai dasar moral, sila Ketuhanan menjadi fondasi bagi sila-sila yang lain. Tuhan adalah prima causa. Dengan demikian semua manusia sama dan sederajat. Karena Tuhan satu-satunya yang di atas manusia.

Dengan pemahaman yang seperti itu, yang merupakan kandungan dari Pancasila, maka sebagai masyarakat religius sudah seharusnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang percaya diri. Tak harus minder dan inferior di hadapan bangsa-bangsa lain. Semua manusia hakikatnya sama saja. Tak ada ras yang lebih unggul daripada ras yang lainnya. Jika ada perbedaan, maka hal itu lebih karena hasil usahanya. Sehingga semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi bangsa yang unggul.

"Kita tidak boleh minder dan rendah diri di hadapan bangsa-bangsa lain. Tapi kita juga tak menjadi sombong. Kita sederajat. Dengan prinsip ini maka Indonesia memiliki rasa percaya diri dalam pergaulan internasional sekaligus percaya diri dalam mengejar national interest Indonesia," kata Rachmat Gobel.

**"Kita tidak boleh minder dan rendah diri di hadapan bangsa-bangsa lain. Tapi kita juga tak menjadi sombong. Kita sederajat. Dengan prinsip ini maka Indonesia memiliki rasa percaya diri dalam pergaulan internasional sekaligus percaya diri dalam mengejar national interest Indonesia,"**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Simbol-simbol religiusitas itu misalnya tampak dari sebutan Aceh sebagai Serambi Mekkah, Gorontalo sebagai Serambi Madinah, Manado dengan patung Yesusnya, Manokwari sebagai Kota Injil, Bali sebagai Pulau Dewata, sejumlah kota disebut sebagai kota santri atau kota wali, dan sebagainya. Di setiap daerah selalu ada petilasan orang-orang suci dan keramat, bertebarannya rumah-rumah ibadah. Semua itu menunjukkan fakta ekspresi keberagaman masyarakat Indonesia.

Dengan kenyataan ini maka moralitas agama yang mengajarkan tentang kesetaraan manusia terhadap manusia lainnya harus menjadi nilai-nilai yang membangun kepercayaan diri dan kuat karakter, bukan seperti yang dinyatakan Mochtar Lubis maupun Koentjaraningrat. Namun nyatanya, dua cendekiawan ini justru memperlihatkan kondisi manusia Indonesia yang masih lemah karakter dan tidak percaya diri.

Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Inilah yang harus dijawab bersama. Moral agama dan ekspresi keagamaan ternyata bisa menjadi sesuatu yang tak selalu *in line*. Ternyata di antara moral dan ekspresi masih ada variabel lain. Pendidikan. Ajaran agama, moral agama, nilai-nilai agama tak bisa begitu saja melekat di dalam setiap manusia. Ia butuh internalisasi melalui para penafsirnya. Di sinilah pentingnya pendidikan. Karena itu pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses pemajuan bangsa, termasuk dalam hal pendidikan agama.

Dalam kaitan itulah Rachmat Gobel memiliki kepedulian terhadap pemajuan pendidikan keagamaan. Melalui program aspirasi Dewan yang diambil dari Kementerian PUPR, Rachmat Gobel membantu pembangunan asrama santri di pesantren milik Al Khairaat di Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Pesantren yang dipimpin Ustad Abdul Ghali itu telah berumur 53 tahun. Asrama tersebut memiliki kapasitas 56 kamar. Asrama itu akan langsung dilengkapi dengan dipan susun dua dan kasurnya serta lemari. Nilai proyek pembangunan asrama tersebut

Melalui program aspirasi Dewan yang diambil dari Kementerian PUPR, Rachmat Gobel membantu pembangunan asrama santri di pesantren milik Al Khairaat di Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo.

Rp 2,3 miliar. "Ini sumbangan terbesar yang pernah diterima pesantren ini," kata Abdul Ghali dalam sambutannya, Kamis, 29 Juli 2021.

Rachmat Gobel melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan pesantren tersebut. Dalam sambutannya, Rachmat menegaskan, pesantren merupakan pilar penting dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan, selain menekankan iptek, juga harus menguatkan imtak. Ada filososfi penting yang harus dipahami bersama. Sebelum kita memproduksi sesuatu maka yang harus kita lakukan lebih dulu adalah membangun sumberdaya manusianya.

"Kita ingin Gorontalo menjadi provinsi termakmur nomor lima di Indonesia dan pesantren harus berkontribusi menyiapkan sumberdaya manusianya. Dengan meningkatkan kualitas lembaga, sarana, dan prasarananya, kita harapkan kualitas sumberdaya lulusannya pun akan meningkat dengan lebih baik lagi," katanya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren atau dalam basa lain disebut *dayah*, *meunasah*, atau surau memiliki peran yang strategis dan memiliki sejarah yang panjang sejak sebelum Indonesia merdeka. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut disebutkan asas-asas penyelenggaraan pesantren adalah: (a) Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) kebangsaan; (c) kemandirian; (d) keberdayaan; (e) kemaslahatan; (f) multikultural; (g) profesionalitas; (h) akuntabilitas; (i) keberlanjutan; dan (j) kepastian hukum.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan pesantren, seperti disebutkan pada Pasal 3, yaitu: (a) membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; (b) membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; (c) meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

**"Kita ingin Gorontalo menjadi provinsi termakmur nomor lima di Indonesia dan pesantren harus berkontribusi menyiapkan sumberdaya manusianya. Dengan meningkatkan kualitas lembaga, sarana, dan prasarananya, kita harapkan kualitas sumberdaya lulusannya pun akan meningkat ...,"**

Adapun ruang lingkup pesantren, seperti dicatat pada Pasal 4, yaitu; (a) pendidikan; (b) dakwah; (c) pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU No 18 Tahun 2019 tersebut, maka penyelenggaraan dan keberadaan pesantren harus dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sejarah panjang pesantren sebagai lembaga sosial telah berperan besar bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam kerangka itu pulalah, Partai Nasdem sedang memperjuangkan gelar pahlawan untuk Syaikhona KH Kholil Bangkalan, Madura. KH Kholil adalah guru Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. KH Hasyim Asy'ari adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan Rois Akbar atau ketua umum pertama PBNU. Sebelum mendirikan NU, kakek KH Abdurrahman Wahid dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, itu meminta restu dari KH Kholil. KH Kholil memang menjadi guru para tokoh NU. Peran dan jasa KH Kholil sangat besar, namun hingga kini belum mendapat gelar pahlawan dari negara.

Dalam rangka mewujudkan keinginan agar negara memberikan tanda jasa sebagai pahlawan nasional, pada 20 Maret 2021 Rachmat Gobel membuka seminar nasional tentang Syaikhona Kholil di Surabaya. Seminar ini diadakan oleh Fraksi Partai Nasdem MPR RI dan DPW Partai Nasdem Jawa

Timur. Keputusan untuk memperjuangkan Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional merupakan keputusan resmi Partai Nasdem sejak Desember 2020. Seminar itu juga dihadiri Rois Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Syaikhona Kholil memiliki nama lengkap Muhammad Kholil bin Abdul Lahir. Beliau lahir 9 Shafar 1252 H atau 25 Mei 1835 dan wafat pada 29 Ramadhan 1343 H atau 24 April 1925. Beliau menjadi guru para pendiri NU seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Murid-muridnya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui pendidikan, pesantren, dan keteladanannya, KH Kholil telah menjadi inspirasi tentang wujud Islam Indonesia, nilai-nilai moral, dan

**Partai Nasdem sedang memperjuangkan gelar pahlawan untuk Syaikhona KH Kholil Bangkalan, Madura. KH Kholil adalah guru Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. KH Hasyim Asy'ari adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan Rois Akbar atau ketua umum pertama PBNU.**



**Rachmat Gobel menjadi Key note speaker dalam acara Seminar Nasional "Syaihona Kholil Guru Para Pahlawan", 20 Maret 2021**

nasionalisme di kalangan santri. Mereka inilah yang kemudian menjadi figur gerakan kebangsaan dan gerakan kemerdekaan Indonesia. *"Melalui syiar agama dan lembaga pendidikan maka lahirlah gerakan melawan penjajahan Belanda,"* kata Rachmat Gobel. Karena itu, pada 15 Februari 2019, Partai Nasdem telah membentuk tim untuk melakukan riset dan sosialisasi ke berbagai pihak untuk memperjuangkan KH Kholil untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. *"Ini harus menjadi upaya bersama semua komponen bangsa untuk memperjuangkan Syaikhona Kholil untuk menjadi pahlawan nasional,"* kata Rachmat Gobel.

Pengusulan gelar pahlawan nasional ini merupakan bagian dari membangun nilai-nilai dan keteladanan agar bangsa memiliki rujukan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Pepatah ini mengajarkan tentang perujukan nilai-nilai. Karena di balik kepahlawanan pasti ada kejuangan, keteguhan, karakter, dan prinsip-prinsip yang dikukahi.

Tak ada orang besar yang lembek. Karena itu pemberian gelar pahlawan merupakan bagian dari upaya mengokohkan karakter bangsa. Dan, KH Kholil adalah seorang tokoh agama. Jadi, moral agama memang merupakan faktor penting dalam pembentukan karakter bangsa.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang pengusulan gelar pahlawan bagi Syaikhona Kholil. Pertama, pesantren yang ia asuh memiliki murid-murid yang tersebar di berbagai daerah. Murid-muridnya tersebut kemudian menjadi pengasuh pesantren di daerahnya masing-masing seperti di Madura, Jawa, dan Bali. Kedua, Syaikhona Kholil merupakan sentrum pengkajian ilmu. Sehingga para santri berdatangan untuk berguru, tak hanya dari Jawa, tapi juga dari Tanah Melayu.

Ketiga, Syaikhona Kholil membangun dan memimpin jaringan ulama sebagai kekuatan kultural dalam kehidupan sosial politik di Nusantara. Keempat, Syaikhona Kholil menjadi pelopor implementasi instrument pendidikan Islam dalam membumikan ajaran Islam sehingga menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme. Kelima, Syaikhona Kholil menjadi pencetak kader ulama dan pahlawan nasional.

Keenam, Syaikhona Kholil mengajarkan nilai-nilai Islam Indonesia yang universal, moderat, terbuka, dan toleran. Ketujuh, Syaikhona Kholil melakukan penguatan nasionalisme di kalangan ulama dan santri serta menjadi embrio lahirnya pergerakan kebangsaan di lingkungan pesantren. Kedelapan, Syaikhona Kholil menjadi penentu lahirnya NU. Kesembilan, Syaikhona Kholil

melahirkan santri-santri yang menjadi simpul perlawanan terhadap kolonialisme.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Partai Nasdem bertekad bulat untuk memperjuangkan gelar pahlawan nasional untuk Syaikhona Kholil. Perjuangan ini memang belum berhasil karena pada tahun 2021 ini, dari empat pahlawan nasional yang ditetapkan pemerintah, Syaikhona Kholil belum termasuk. "Partai Nasdem akan terus memperjuangkannya karena sesuai penelitian, beliau sepatutnya menjadi pahlawan nasional," kata Rachmat Gobel.

... dari empat pahlawan nasional yang ditetapkan pemerintah, Syaikhona Kholil belum termasuk. "Partai Nasdem akan terus memperjuangkannya karena sesuai penelitian, beliau sepatutnya menjadi pahlawan nasional,



*Rachmat Gobel bersama Tokoh Agama dalam acara Seminar Nasional "Syaiikhona Kholil Guru Para Pahlawan", 20 Maret 2021*

Keluarga besar Rachmat Gobel juga membangun pesantren di Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Pesantren tersebut merupakan wasiat Thayeb Mohammad Gobel. Pesantren didirikan pada 1989, yaitu Pesantren Hubulo. Nama pesantren ini menggunakan nama moyang keluarga Gobel, dan secara kebetulan lokasinya di kaki bukit tempat kuburan Hubulo, raja Bolango yang berkuasa pada 1752-1772. Hubulo adalah raja Bolango pertama yang beragama Islam. Karena itu ia memiliki gelar Aulia Salihin, orang saleh awal.

Berkat ketokohan Hubulo, khususnya karena pengetahuan agama dan silaturahmi yang bagus, Hubulo disegani oleh pembesar dari kerajaan-kerajaan lain di Gorontalo – ada lima kerajaan utama yang membentuk persekutuan di Gorontalo, yaitu Gorontalo, Bolango, Limboto, Suwawa, dan Atinggola; posisi Bolango kemudian digantikan Boalemo setelah Bolango hijrah ke pedalaman karena menolak bekerja sama dengan kolonial Belanda. Kuburan Hubulo (lahir 1809 dan wafat 1793) adalah salah satu makam yang



*Rachmat Gobel Bersama santri di Pondok Pesantren Hubulo Gorontalo*

dikeramatkan di Gorontalo. Hubulo adalah pengucapan bahasa lokal untuk frasa Hubbulloh, cinta Allah. Dari kata Hubulo itu kemudian bermetamorfosis menjadi Gobel. Ini gara-gara pengucapan penjajah Belanda terhadap kata Hubulo. Orang Belanda mengucapkan Hubulo menjadi Hubel. Lalu pengucapan Hubel itu ditulis menjadi Gobel. Jadilah kata Hubbulloh menjadi Hubulo, dan akhirnya Gobel.

Dengan pembangunan pesantren tersebut, maka jejak dakwah Islam keturunan Hubulo terlembagakan hingga kini. Pesantren ini memiliki posisi yang strategis di kaki bukit, di tepi Sungai Bolango, dan dalam hamparan lembah dengan lanskap bukit-bukit di belakangnya. Suasana pesantren ini membuat nyaman penghuninya dengan hamparan rumput dan pepohonan yang ditata asri. Pesantren yang asri dan nyaman itu merupakan salah satu pesantren favorit di Gorontalo.



“

**Jadi bisa dibayangkan kesenjangan pembangunan ekonomi Indonesia. Inilah yang membuat saya lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke wilayah timur, jadi bukan karena semata daerah pemilihan (Dapil) saya di provinsi Gorontalo**

”



# BAB VIII

## BANTUAN PROGRAM KERJA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

**S**ELAIN percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Wakil Ketua DPR RI/Koribang Rachmat Gobel, tantangan terbesar lainnya dalam pembangunan ekonomi nasional adalah mengatasi kesenjangan antar wilayah yang masih sangat tinggi. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kawasan Indonesia Timur. Dalam hal ini, prakarsa Pemda dalam mengurangi kesenjangan di masing-masing daerahnya menjadi sangat penting.

Terkait kondisi itu, Rachmat Gobel mengakui, Ia memberi perhatian lebih terhadap masalah yang dihadapi Indonesia Timur. Ini bukan karena Ia berasal dari kawasan Timur, tapi data menunjukkan bahwa kawasan ini memang jauh tertinggal. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 84% dari sebaran daerah tertinggal berada di Indonesia Timur. Dari total 122 daerah tertinggal di tingkat kabupaten, 102 di antaranya berada di bagian Indonesia Timur, artinya hanya 20 daerah tertinggal saja yang ada di Indonesia bagian Barat dan Tengah.

Menurut data BPS, lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur yaitu provinsi Papua dengan angka kemiskinan 26,8%, Papua Barat 21,7%, NTT 21,12%, Maluku 17,99% dan Gorontalo 15,59%.

*"Jadi bisa dibayangkan kesenjangan pembangunan ekonomi Indonesia. Inilah yang membuat saya lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke wilayah*

*timur, jadi bukan karena semata daerah pemilihan (Dapil) saya di provinsi Gorontalo,” kata Rachmat Gobel.*

Rachmat Gobel juga menyoroti, perlunya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan soliditas dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Dari segi anggaran, dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah sudah cukup besar. Lebih dari sekitar 25% dana APBN dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada APBN 2021 misalnya, dari Rp 2.750 triliun belanja pemerintah pusat, sebesar Rp 795,48 triliun di antaranya dialokasikan untuk TKDD.

Namun sayangnya, realisasi dan penyerapan dana APBD sering kali lambat sehingga banyak dana Pemda yang mengganguk hanya di simpan di bank. Sebagai gambaran, menurut Kementerian Keuangan, per Oktober 2021, ada sekitar Rp 226 triliun dana APBD yang belum diserap dan di tempat di bank.

*“Hal seperti ini tidak boleh terjadi karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam upaya mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, Pemda seharusnya tidak menunda-nunda penyerapan dana APBD”* kata Rachmat Gobel.

## Menyebarkan Program Bantuan Kerja

Rachmat Gobel. menjelaskan, dalam setiap kunjungan kerja ke daerah ia selalu turun langsung ke masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi rakyat untuk kemudian mendiskusikannya dengan pejabat pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Dari sinilah kemudian Rachmat Gobel. mencari solusi yang bisa memberi inspirasi dan stimulan bagi percepatan pembangunan.

*“Sumpah jabatan saya sebagai anggota parlemen adalah memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus saya perjuangkan,”* kata Rachmat Gobel.

Dalam rangka mewujudkan sumpahnya itulah, Rachmat Gobel. merancang berbagai program kerja. Tidak hanya fokus pada daerah pemilihan (dapil) Gorontalo, bantuan program kerja juga disalurkan juga berbagai daerah lain. Menggandeng berbagai pihak, Rachmat Gobel. mendorong daerah untuk bekerjasama dengan pusat.

Bersama Bank Indonesia misalnya, Rachmat Gobel. telah menyalurkan berbagai paket bantuan, mulai dari untuk peningkatan pendidikan dan

pemberdayaan ekonomi. Tidak kurang dari 100 paket bantuan yang disalurkan bersama program CSR Bank Indonesia dengan nilai sekitar Rp 25 juta-135 juta per paket.

Bersama Kementerian PUPR, sepanjang Tahun 2020-2020 bersama mendorong terealisasinya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), irigasi, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) yang tersebar di berbagai wilayah Gorontalo.

Program BSPS merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas. Selain mampu meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni, program BSPS ternyata mampu mengubah kawasan kumuh menjadi salah satu objek wisata baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai contoh, bantuan Program BSPS di Kelurahan Dembe Satu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo di cat berwarna warni dan di lukis mural 3D. Program tersebut terealisasi 100% persen dimana pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 2500 unit dan 1700 unit pada tahun 2021.

Program Irigasi juga teralisasi seratus persen sebanyak 10 titik pada tahun anggaran 2020 dan 50 titik pada tahun anggaran 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan layanan irigasi dan tentunya sebagai solusi peningkatan ekonomi masyarakat saat musim pandemi.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) terealisasi seratus persen sebanyak 10 titik pada tahun 2020 dan 10 titik pada tahun anggaran 2021. Program ini bertujuan membangun sistem yang terpadu untuk penanganan pemukiman kumuh dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

**Program Irigasi juga teralisasi seratus persen sebanyak 10 titik pada tahun anggaran 2020 dan 50 titik pada tahun anggaran 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan layanan irigasi dan tentunya sebagai solusi peningkatan ekonomi masyarakat saat musim pandemi.**

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) juga terealisasi seratus persen sebanyak 10 titik untuk tahun anggaran 2020 dan sebanyak 10 titik pada tahun anggaran 2021. Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan sosial ekonomi wilayah berbasis pada potensi sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Selain memperjuangkan program PUPR di dalam daerah pemilihan Gorontalo, Rachmat Gobel juga memperjuangkan program di luar dapil. Melalui kerjasama dengan Ditjen Penyedia Perumahan, Program BSPS terealisasi sebesar 1000 unit BSPS pada tahun anggaran 2020 dan 300 unit di Sulawesi Tengah. Selain itu terealisasi pula pembangunan irigasi di wilayah yaitu sejumlah 5 titik di Lumajang, 10 titik di Nusa Tenggara Timur, dan 7 titik di Sulawesi Selatan.



*Penyerahan Bantuan Pupuk Non Subsidi (Phonska Plus)*

Program kerjasama juga dilakukan bersama dengan Kementerian Pertanian dengan sasaran di beberapa wilayah Provinsi Gorontalo pada tahun 2021. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Pra Panen) berhasil membagikan alsintan berupa traktor roda 2 dan 4 di Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, dan Kab. Puhwato dengan total 88 unit. Dilanjutkan dengan kerjasama dengan Ditjen Tanaman Pangan (Pascapanen) berhasil membagikan alsintan berupa *Combine Harvester Besar*, *Power Thresher*, *Power Thresher Multiguna*, dan *RMU (rice milling unit)* di Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo dengan total 52 unit.

Di luar Provinsi Gorontalo terealisasi di 5 titik pada tahun 2020 yaitu 3 Ton pupuk non subsidi di Sulawesi Selatan, 4 ton pupuk non subsidi di Sulawesi Barat, 2 ton pupuk non subsidi di Sulawesi Tenggara, 10 ton pupuk non subsidi di Nusa Tenggara Timur, dan 5 ton pupuk non subsidi di Jember. Sedangkan pada tahun 2021 pembagian pupuk non subsidi dilakukan di Madiun dengan jumlah 5 ton.



*Penyerahan Bantuan Pupuk Non Subsidi (Phonska Plus) di Kabupaten Jember Prov. Jawa Timur Oleh TA Watua Korinbang Bersama Direksi PT. Pupuk Indonesia*



*Penyerahan Bantuan Pupuk Non Subsidi (Phonska Plus) dengan Traktor roda dua di Kabupaten Ngada Prov. NTT oleh PT. Pupuk Indonesia*



*Penyerahan Bantuan Pupuk Non Subsidi (Phonska Plus) di Kabupaten Ende Prov. NTT oleh PT. Pupuk Indonesia*



*Penyerahan Bantuan Pupuk Non Subsidi (NPK Pelangi) di Kabupaten Ngada Prov. NTT PT. Pupuk Indonesia*



*Penyerahan Bantuan Pupuk Non Subsidi (NPK Pelangi) di Kabupaten Nagakeo Prov. NTT PT. Pupuk Indonesia*

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Di antaranya mengadakan demonstrasi plot (demplot) pertanian di Provinsi NTT. Selain itu, pengembangan sektor pertanian di NTT ini juga dikawal oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Para petani bakal diberikan pendampingan dari pengembangan lahan hingga panen. Diharapkan, pengawalan dapat meningkatkan hasil panen petani. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas para Petani dan harapan besar bisa menjadi lumbung pangan untuk wilayah NTT dan Sekitarnya.

Kementerian Perhubungan juga menjalin kerjasama dengan penyaluran 4 Bus Sekolah yang diperuntukkan bagi wilayah Gorontalo. Tidak berhenti disitu, kerjasama juga dilakukan dengan Bank Indonesia (BI) bagi UMKM dan masjid yang turut menyasar di beberapa wilayah Provinsi Gorontalo seperti Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. Bantuan dialokasikan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan gereja serta beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan total 58 penerima dengan total anggaran kurang lebih 1,5 milyar.

Memasuki tahun 2022, kerjasama akan kembali dilakukan bersama dengan Kementerian PUPR. Di wilayah Gorontalo akan diajukan setidaknya 50 titik irigasi, 5000 BSPS, 10 titik Pisew, 10 titik Kotaku, Bronjong yang disebar di 3 titik, sumur bor di 3 titik, dan pembangunan jembatan gantung di 1 titik lokasi. Adapun di luar wilayah Gorontalo diajukan 700 BSPS di wilayah Sulawesi Tengah, 7 titik irigasi di wilayah Sulawesi Selatan, 7 titik irigasi di Sulawesi Barat, 5 titik irigasi di Lumajang, dan Bronjong untuk 1 titik sungai di wilayah Nusa Tenggara Timur.

## **Bantuan covid-19 dan bencana di tanah leluhur tahun 2021**

### **Bantuan Covid-19**

Diawal tahun 2021 pandemi covid-19 masih melanda Indonesia dan menyebar cukup masif diseluruh provinsi di Indonesia termasuk Gorontalo, penyebaran covid-19 di awal tahun 2021 banyak merugikan bangsa Indonesia dimana bukan hanya sekedar melambatnya pertumbuhan ekonomi namun banyaknya korban yang meninggal.

Dalam melihat situasi ini Rachmat Gobel sebagai putra Gorontalo memiliki keperihatinan yang sangat mendalam, dalam rangka mengurangi beban masyarakat dan Pemerintah Daerah Gorontalo, Rachmat Gobel memberikan bantuan secara pribadi untuk penanganan covid-19 diawal tahun 2021 dan bantuan tersebut tersebar di beberapa kab/kota di Provinsi Gorontalo.

| No | JENIS BANTUAN                  | JUMLAH UNIT  | LOKASI  |
|----|--------------------------------|--------------|---|
| 1. | Alat Pelindung Diri (APD)      | 1.000 pcs    | Disebar di seluruh Kab/Kota Provinsi Gorontalo                |
| 2. | Ventilator                     | 9 unit       | Rumah sakit Dunda, Rumah sakit Alwi Sabu dan Rumah Sakit Toto |
| 3. | Sembako untuk bantuan covid-19 | 45.000 paket | Disebar di seluruh Kab/Kota Provinsi Gorontalo                |
| 4. | Beras Fortivit                 | 60 ton       | Disebar di seluruh Kab/Kota Provinsi Gorontalo                |



*Penyerahan secara simbolis oleh Rachmat Gobel , dalam memberikan bantuan beras Fortivit kepada masyarakat*



*Penyerahan secara simbolis oleh Rachmat Gobel, dalam memberikan bantuan alat ventilator*



*Penyerahan secara simbolis oleh Rachmat Gobel, dalam memberikan bantuan sembako*



# Pemda

## Harus Atasi Banjir Gorontalo

**Desa Datahu** selalu jadi **langganan banjir** setiap tahun, berharap ada solusi dari Pemda Gorontalo untuk mengatasi.

**Rachmat Gobel**

*Wakil Ketua DPR RI*





## Bantuan bencana alam

Selain bantuan untuk membantu penanggulangan pandemi covid-19, Rachmat Gobel juga memberikan beberapa bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban terdampak bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango, yang terjadi pada November 2021. Dalam situasi bencana banjir ini Rachmat Gobel menyebarkan bantuan di 3 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.

| No. | JENIS BANTUAN                         | JUMLAH UNIT | LOKASI  |
|-----|---------------------------------------|-------------|---|
| 1.  | Selimut                               | 2.000 pcs   | Disebar di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bone Bolango |
| 2.  | Kasur lipat                           | 2.000 pcs   | Disebar di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bone Bolango |
| 3.  | Daster                                | 1.000 pcs   | Disebar di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bone Bolango |
| 4.  | Jaket rescue dan topi                 | 300 pcs     | Disebar di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bone Bolango |
| 5.  | Jaket anti air untuk pengemudi bentor | 1.200 pcs   | Disebar di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bone Bolango |
| 6.  | Emergency kit                         | 1.200 pcs   | Disebar di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bone Bolango |



*Penyerahan secara simbolis oleh Rachmat Gobel, dalam memberikan bantuan Kasur lipat bagi warga yang terdampak bencana*





Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terdapat tiga hal yakni:

**Pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan.**

**Pembangunan proyek kereta cepat harus konsisten dengan konsep proposal awal dengan perjanjian *B to B*.**

**Penyelesaian permasalahan Garuda semua pihak harus memberikan dukungan karena Garuda adalah maskapai pembawa bendera bangsa.**





# BAB IX

## PENGAWASAN MENUJU KEBIJAKAN YANG LEBIH BERKUALITAS

**D**ALAM menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI (AKD) melakukan pencermatan, pendalaman, pembenahan dan penataan pengelolaan berbagai kebijakan dan program Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang, guna untuk memberikan pelayanan publik, dan dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat di berbagai bidang dan sektor. Mekanisme pengawasan itu dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mengetahui aspirasi atau laporan mengenai berbagai masalah yang dihadapi serta juga melakukan Kunjungan Kerja (KUNKER)

Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang diamanahkan untuk menjadi Ketua Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan berdasarkan **Keputusan DPR RI Nomor 5/DPR RI/II/2019-2020**, selain menjadi Ketua Tim Pengawasan Pembangunan Daerah Perbatasan Rachmat Gobel juga melakukan pengawasan terkait dengan beberapa permasalahan yang menjadi perhatian publik diantaranya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sderta permasalahan yang ssat ini membelit PT. Garuda Indonesia.

## Wilayah Perbatasan: Membangun Indonesia Dari Pinggiran

Pembangunan wilayah perbatasan terus digalakkan. Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah mewujudkan amanat konstitusi seperti tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan dalam Bab IXA Pasal 25A. Pasal 25A secara detail menjelaskan bagaimana negara harus menjamin penuh wilayah negara sebagai kedaulatan negara yang utuh, demi kesejahteraan segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat.

Wilayah perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia, memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keutuhan wilayah NKRI. Nilai yang strategis itu memiliki berbagai dimensi yang penting, yakni kedaulatan negara, pertahanan keamanan, dan ekonomi.

Untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan, Presiden Jokowi telah mengambil berbagai langkah dengan target hingga tahun 2024, aktivitas lintas batas negara akan dilayani oleh 26 (dua puluh enam) PLBN. Untuk mewujudkan itu, pada 24 April 2015 Presiden Jokowi telah mengeluarkan Inpres No.6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Sampai tahun 2019 telah dibangun 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masing – masing di Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Nanga Badau), Provinsi Nusa Tenggara Timur (PLBN Motaain, PLBN Wini, PLBN Motamasin ) dan Provinsi Papua (PLBN Skouw).

Selanjutnya, dalam kurun waktu 2020-2024 akan dibangun 18 (delapan belas) PLBN, 11 (sebelas), Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Berdasarkan Inpres No.1 Tahun 2019, terdapat 1 (satu) PLBN di Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang telah dibangun tahun 2020, sementara 10 (sepuluh) PLBN lainnya masih akan dibangun.

**Wilayah perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia, memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keutuhan wilayah NKRI. Nilai yang strategis itu memiliki berbagai dimensi yang penting, yakni kedaulatan negara, pertahanan keamanan, dan ekonomi.**

Diantaranya PLBN di Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kemudian dua PLBN di Kalimantan Barat yaitu Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan Sei Kelik, Kabupaten Sintang. Selanjutnya 4 PLBN di Kalimantan Utara yaitu di Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Labang di Kabupaten Nunukan, Long Midang di Kabupaten Nunukan, Long Nawang di Kabupaten Malinau. Kemudian 3 PLBN di NTT yaitu di desa Oepoli, Kabupaten Kupang dan di Napan Kabupaten Timor Tengah Utara dan satu lagi di Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Pada 11 Januari 2021 Presiden kembali mengeluarkan instruksi untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021. Inpres ini menyebutkan bahwa sampai 11 Januari 2023, pembangunan wilayah perbatasan akan lebih difokuskan pada kawasan perbatasan negara di Aruk (Provinsi Kalimantan Barat), Motaain (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Provinsi Papua). Mengacu pada Inpres No 1 Tahun 2021, berbagai program pembangunan di tiga kawasan ini ditujukan untuk mendorong: (1) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan negara; (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. (3) Penyerapan tenaga kerja di kawasan perbatasan negara, terutama masyarakat lokal dan masyarakat yang terdampak covid-19; (4) Pemerataan pembangunan dan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

Dalam Inpres tersebut ditetapkan 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 kementerian atau lembaga yang terkait. Ke-60 program kegiatan tersebut terdiri atas 21 program kegiatan di Aruk, 20 program di Motaain, dan 19 program kegiatan di Skouw.

Untuk program pembangunan kawasan Aruk, Kalimantan Barat ditekankan untuk mewujudkan kawasan ini sebagai produksi peningkatan hasil dan pemasaran dari pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Terdapat delapan kementerian yang melaksanakan program dan kegiatan pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Kalimantan Barat.

Dalam program kegiatan pembangunan

**Dalam Inpres tersebut ditetapkan 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 kementerian atau lembaga yang terkait. Ke-60 program kegiatan tersebut terdiri atas 21 program kegiatan di Aruk, 20 program di Motaain, dan 19 program kegiatan di Skouw.**

di Aruk Kementerian Pertanian akan mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Kelapa dan Jeruk, Lada dan Pembangunan Pusat Pembenihan dan Budidaya Padi Wawa, dan Padi Inbrida. Kemenperin akan mengembangkan Industri Pengolahan dan Kawasan Komoditas Jeruk, *Packaging* Komoditas Beras, Area Sentra Industri Lada, pengembangan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan beras premium.

Kementerian PUPR telah merencanakan peningkatan jalan Teluk Atong, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Sambas, pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM), dan pembangunan Jalan Sejajar Perbatasan yang merupakan Jalan Strategis Nasional di Kalimantan Barat. Kementerian Perhubungan akan melakukan pengembangan Terminal Barang dan Penumpang PLBN Aruk.

Kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan akan melakukan pembangunan Gudang/Depo Non SRG dan Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, Kementerian ESDM membangun SPBU di Aruk dan Jaringan Distribusi Listrik di Kawasan Perbatasan Aruk. Kementerian Desa PDTT meningkatkan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh dan Kementerian Komunikasi dan Informatika: peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi.

Sedangkan 20 program di Motaain Kabupaten Belu, NTT sasarannya adalah mewujudkan kawasan ini sebagai pusat pelayanan dan pusat distribusi barang dan jasa yang berbasis pertanian dan peternakan terpadu. Di kawasan

ini Kemendag akan melakukan revitalisasi pasar rakyat di Tasifeto Timur, Pembangunan Gudang/Depo Non SRG di Tasifeto Timur, dan revitalisasi pasar rakyat di Lamaknen Selatan. Kementerian Perindustrian merencanakan pembangunan Industri Pakan Ternak Ayam di Tasifeto Timur.

Kementan akan membangun kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran di Tasifeto Barat, rumah potong hewan standar ekspor di Tasifeto Timur, serta penyediaan bibit sapi untuk peningkatan produksi ternak di Tasifeto Timur. Kementerian PUPR menangani jalan yang menghubungkan Atapupu – Oikusi

**Sedangkan 20 program di Motaain Kabupaten Belu, NTT sasarannya adalah mewujudkan kawasan ini sebagai pusat pelayanan dan pusat distribusi barang dan jasa yang berbasis pertanian dan peternakan terpadu**

(Republik Demokratik Timor Leste), Penanganan Jalan dalam Kota Atambua yang terhubung dengan jalan Simpang Haliluik, pembangunan jalan masuk Sonis Laloran, jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, jalan penghubung PLBN Motaain – Atapupu, Ruas Jalan Fulur – Nualain – Henes, serta Ruas Jalan Lalu – Turiskain. Kemudian pembangunan Embung Air Baku di Kec. Lakmane, Penanganan dan Sumur Bor Air Tanah Dalam,

Kementerian Desa PDTT akan membangun embung teknis Naskasa dan pembangunan embung teknis Lookeu, sedangkan Kementerian ESDM membangun SPBU di Motaain dan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Motaain.

Sementara itu, 19 program di kawasan Skouw untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis pada pengembangan kluster pangan dan sabuk wisata perbatasan. Terdapat tujuh kementerian yang terlibat dalam pembangunan di Skouw. Kementerian Kelautan dan Perikanan: pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya, rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudidaya, serta pembangunan sarana budidaya benih dan pakan bagi kelompok pembudidaya.

Kementerian Pertanian: pengadaan benih padi hibrida, pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yambe, *Upgrading Rice Milling Unit*, pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung, dan pembangunan pengudangan beras. Kementerian Koperasi dan UKM: revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi di daerah perbatasan, tertinggal dan pasca bencana. Kementerian ESDM: pengembangan jaringan distribusi listrik di Distrik Muara Tami dan Abepura, dan pembangunan SPBU di Skouw.

Sedangkan program kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika: pengembangan jaringan telekomunikasi akses internet dan GSM. Kementerian Perhubungan: percepatan pembangunan dan operasionalisasi terminal barang internasional dan *showcase* di Kawasan PLBN Skouw. Kementerian PUPR:

**Kementerian  
Desa PDTT akan  
membangun embung  
teknis Naskasa  
dan pembangunan  
embung teknis  
Lookeu, sedangkan  
Kementerian ESDM  
membangun SPBU di  
Motaain dan jaringan  
distribusi listrik di  
kawasan perbatasan  
Motaain.**

pembangunan tambatan perah, pembangunan jalan jeramba di Enggros, peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi penghubung Kelurahan Koya Timur – Kelurahan Koya Barat, pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan dan pembangunan jalan poros Kampung Mosso – Kabupaten Keerom (lebar 4,5 meter).

Kementerian/Lembaga yang ditugaskan melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw dengan diberikan waktu dua tahun pelaksanaan yaitu tahun 2021 dan 2022, dengan sumber pembiayaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaan Inpres perlu mendapat perhatian khusus, dalam kondisi pandemi covid-19 ini, agar proses percepatan pembangunan di tiga wilayah tersebut: Aruk, Motaain dan Skouw dapat berlangsung sebagaimana sesuai rencana yang telah ditetapkan, sehingga proses kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dapat terealisasikan.

Apalagi dari perkembangan terakhir yang diketahui, dari Inpres ini yang sudah terlaksana hingga semester I Tahun 2021, dari 60 program kegiatan

tersebut, baru dua program yang telah selesai sekitar 3,33%, 42 program sedang berjalan (70%), dan 16 program masih tertunda, sekitar 26,67%. Dua program yang telah selesai tersebut adalah pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan di Skouw, Jayapura, Papua dan penanganan ruas jalan Fulur-Nualain- Henes, Motaain, Belu, Nusa Tenggara Timur.

Beberapa alasan-alasan tersebut selain kemungkinan mengalami kendala dan masih tertunda, hal lainnya bisa jadi dikarenakan adanya realokasi dan pengaturan ulang anggaran untuk penanganan kegiatan pandemik covid-19 baik pada anggaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

**Beberapa alasan-alasan tersebut selain kemungkinan mengalami kendala dan masih tertunda, hal lainnya bisa jadi dikarenakan adanya realokasi dan pengaturan ulang anggaran untuk penanganan kegiatan pandemik covid-19 baik pada anggaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.**

## Raker Timwas Perbatasan Dengan Pemerintah

Sebagai langkah mendukung program percepatan pembangunan daerah perbatasan, dalam Rapat Paripurna DPR RI 17 Desember 2019 DPR RI memutuskan membentuk Tim Pengawas tentang Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan). Tim dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sebagai Ketua Timwas, dan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua Timwas. Anggota tim sebanyak 29 orang terdiri atas perwakilan fraksi-fraksi dari lintas komisi (Komisi I s.d XI) DPR RI.

Timwas bertugas mengawasi pembangunan daerah perbatasan serta menyampaikan hasil pengawasannya dalam rapat paripurna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim akan mengidentifikasi dan mengawasi program kerja pemerintah di daerah perbatasan baik yang terkait dengan infrastruktur dan potensi pada koridor perbatasan. Terutama pada sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, dan kesehatan tanpa menyampingkan masalah keamanan.

Menurut Ketua Tim, Rachmat Gobel, pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup di wilayah perbatasan harus diutamakan dalam rangka meningkatkan nasionalisme dan juga kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Timwas perbatasan DPR RI dibentuk tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah yang memberikan perhatian besar untuk pembangunan di daerah perbatasan, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Timwas, menurut Rachmat Gobel, akan melihat langsung permasalahan kesejahteraan sosial yang masih ditemui terutama kemiskinan yang menjadi permasalahan yang dominan pada masyarakat di perbatasan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak kemajuan dan perkembangan pembangunan

**Timwas, menurut Rachmat Gobel, akan melihat langsung permasalahan kesejahteraan sosial yang masih ditemui terutama kemiskinan yang menjadi permasalahan yang dominan pada masyarakat di perbatasan.**

ekonomi yang signifikan di sana. Tentunya selain masalah-masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat di perbatasan, juga ingin melihat langsung sejauh mana dampak permasalahan pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut.

Selaku Ketua Timwas DPR RI, pada 15 Maret 2021 Rachmat Gobel mengundang Menteri terkait untuk melakukan rapat kerja. Hadir dalam rapat Menteri Dalam Negeri (Kepala BNPP), Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Dalam rapat Rachmat Gobel menekankan bahwa pendekatan pengelolaan wilayah perbatasan saat ini tidak lagi hanya menekankan kepada pendekatan pertahanan dan keamanan seperti sebelum tahun 2008. Sesuai dengan UU No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pengelolaan Wilayah Negara, pengelolaan kawasan perbatasan saat ini menekankan pendekatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan yang semuanya dijalankan secara bersamaan. Pemerintah juga telah membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) untuk provinsi, kabupaten/kota.

**Dalam rapat Rachmat Gobel menekankan bahwa pendekatan pengelolaan wilayah perbatasan saat ini tidak lagi hanya menekankan kepada pendekatan pertahanan dan keamanan seperti sebelum tahun 2008.**

Dalam rangka memfokuskan dan mempercepat pembangunan perbatasan wilayah negara, Dewan memberikan apresiasi atas ditetapkannya Inpres No 1 Tahun 2021. Juga disampaikan, pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan harus memperhatikan keterlibatan masyarakat sekitar. Selain pembangunan ekonomi yang menjadi perhatian utama dalam membangun wilayah perbatasan, masalah pertahanan dan keamanan harus tetap menjadi perhatian timwas DPR RI.

Sementara itu Mendagri /Kepala BNPP Tito Karnavian menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Tito Karnavian mengatakan,

pengelolaan perbatasan negara harus dilihat dari dua dimensi yaitu Dimensi Batas Wilayah Negara (*Boundary Dimension*) dan Dimensi Kawasan Perbatasan (*Frontier Dimension*).

Ia juga menekankan, kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama, untuk itu pemerintah tidak berhenti hanya pada pembangunan zona inti di PLBN untuk pelayanan lintas batas (kepabeanaan, imigrasi dan karantina), tetapi terus dilanjutkan dengan pembangunan pada zona pendukung dan memperlancar jalur konektivitas baik akses wilayah di perbatasan maupun ke negara tetangga. Diperlukan pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi agar kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terpadu dengan wilayah sekitarnya.

Sebagai tindak lanjut Inpres No 1 Tahun 2021, Mendagri selaku Kepala BNPP akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan pemerintah daerah pada pertengahan atau akhir Maret 2021 untuk memastikan kondisi di lapangan, akan melakukan peninjauan sekaligus koordinasi teknis langsung bersama pemerintah daerah untuk kawasan Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan Skouw di Kota Jayapura, Papua.

Sementara itu Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, turut memberikan beberapa penjelasan mengenai agenda kawasan perbatasan dalam konteks lima arahan Presiden RI yaitu; (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) penyederhanaan birokrasi; (4) transformasi ekonomi; (5) regulasi dan investasi.

Menurut Suharso Monoarfa presiden menyetujui untuk dilakukan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara di Aruk, Montaaain dan Skouw sebagai *Pilot Project*. Konsep percepatan pembangunan ekonomi di tiga kawasan perbatasan adalah kawasan Aruk dengan isu strategis pengembangan pertanian (padi) dan perkebunan (lada, kelapa, dan jeruk) dibutuhkan prasarana dan sarana untk pertanian, perkebunan dan dan perikanan.

Kemudian kawasan Motaain dengan isu strategis pengembangan peternakan sapi dan pertanian, dibutuhkan sarana berupa

**kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama, untuk itu pemerintah tidak berhenti hanya pada pembangunan zona inti di PLBN untuk pelayanan lintas batas (kepabeanaan, imigrasi dan karantina),**

penyediaan air bersih, sistem transportasi dan logistik, sistem perdagangan *online* (*e-commerce*). Untuk kawasan Skouw isu strategisnya membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan, pengembangan pusat-pusat pertanian dan perdagangan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dalam paparannya mengatakan bahwa dukungan Kementerian PUPR terhadap Inpres No 1 Tahun 2021, meliputi 17 kegiatan, dengan rincian tiga kegiatan sumber daya air, 12 kegiatan Bina Marga dan dua kegiatan Cipta Karya yang akan diselesaikan pada tahun 2021-2022.

Beberapa program kegiatan dilaksanakan pada tahun 2021 dan sebagian akan dilanjutkan pada 2022. Di kawasan perbatasan Aruk akan dilakukan pembangunan bidang jalan dan jembatan dengan target sepanjang 209,24 kilometer. Bidang pemukiman akan dilakukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan.

Untuk kawasan Motaain, Kementerian PUPR akan membangun dua unit sumur bor air tanah di kecamatan Tasifeto Timur tahun 2021 dan satu embung air baku di kecamatan Lakmanen Tahun 2022. Bidang jalan dan jembatan dengan target sepanjang 664, 28 kilometer.

Sedangkan di kawasan perbatasan Skouw Jayapura, Papua akan dibangun saluran irigasi primer perbatasan di Koya Timur Sepanjang 2,4 kilometer (sudah selesai). Bidang jalan dan jembatan, pembangunan jalan poros kampung Mosso sepanjang 30 kilometer. Jalan jaramba di Enggros sepanjang 5 kilometer, dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi.

Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam beberapa poin menjelaskan, sesuai Inpres No 1 Tahun 2021 program dari kementeriannya adalah peningkatan jalan perbatasan desa Temanjuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Aruk, sepanjang 2,16 kilometer. Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Motaain, NTT sepanjang 0,8 kilometer dan pembangunan jalan desa di desa Silawan,

**Untuk kawasan Motaain, Kementerian PUPR akan membangun dua unit sumur bor air tanah di kecamatan Tasifeto Timur tahun 2021 dan satu embung air baku di kecamatan Lakmanen Tahun 2022. Bidang jalan dan jembatan dengan target sepanjang 664, 28 kilometer.**



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel, selaku Ketua Timwas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, memimpin Rapat Timwas dengan Menteri terkait, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin 15 Maret 2021.*

## Pandangan dan Saran Anggota Timwas

Yohanis Fransiskus Lema, Fraksi PDI Perjuangan, asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTT; berterima kasih kepada presiden atas perhatiannya dalam membangun wilayah perbatasan (khususnya di perbatasan NTT). Menurut Yohanis selain infrastruktur seharusnya perlu juga dibangun untuk perekonomian masyarakat khususnya di sektor perikanan.

Edward Tannur, Fraksi PKB asal Dapil NTT meminta agar ada pembangunan pelabuhan khususnya di wilayah perbatasan NTT. Boyman Harun, Fraksi PAN asal Dapil Kalbar menekankan, pelaksanaan Inpres sudah baik dan bagus, namun untuk pembangunan sumber daya ekonomi masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan kekhasan daerah

Andreas Hugo Pareira, Fraksi PDI P asal Dapil NTT I mengatakan, terkait dengan warga pengungsi eks Timor Timur (Timor Leste) yang ada di NTT sangat meyedihkan permasalahan ini, harus segera diselesaikan karena pengungsi Timor Leste telah menjadi persoalan baru bagi masyarakat NTT.



*Rapat Timwas DPR RI dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) dan Menteri PPN/Bappenas*

**Mercy Christi Barends, Fraksi PDI Perjuangan asal Dapil Maluku meminta kepada Bappenas untuk melakukan perencanaan terkait dengan PLBN yang berbasis kelautan dan juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terkait PLBN yang berbasis kelautan.**

Mercy Christi Barends, Fraksi PDI Perjuangan asal Dapil Maluku meminta kepada Bappenas untuk melakukan perencanaan terkait dengan PLBN yang berbasis kelautan dan juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terkait PLBN yang berbasis kelautan.

Y. Jacki Uly, Fraksi NasDem asal Dapil NTT II menekankan pada masalah belum adanya gambaran besar pemangunan tentang wiayah perbatasan itu khususnya di provinsi NTT serta mempertanyakan apakah perlu kembali pendekatan keamanan di wiayah perbatasan NTT dan Timor Leste seperti di awal tahun 2000.

## Kesimpulan dan Catatan Raker Timwas DPR RI:

Dewan memberikan apresiasi atas ditetapkannya Inpres No 1 Tahun 2021. Model pembangunan kawasan Aruk, Motaain dan Skouw sebagaimana dalam Inpres ini diharapkan bisa mejadi *role model* , yang kemudian akan menjadi contoh pada pembangunan wilayah perbatasan lainnya.

Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan jangan sampai mengabaikan faktor keamanan. Pelibatan masyarakat harus diutamakan untuk meningkatkan nasionalisme bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Timwas DPR RI akan melaksanakan rapat lanjutan dengan beberapa Menteri terkait dan melaksanakan kegiatan raker, RDP, RDPU dengan instansi pusat/daerah dan melaksanakan peninjauan ke lokasi pembangunan wiayah perbatasan secara berkala bersama dengan pemerintah.

Hasil kerja Tim Pengawas akan dilaporkan kepada Rapat Paripura DPR RI dan akan mengundang kembali Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Perdagangan, untuk Rapat Timwas Perbatasan berikutnya.

Percepatan pembangunan wilayah perbatasan khususnya dalam pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, swasta, masyarakat sipil dan masyarakat lokal, tidak hanya ditangani oleh pemerintah pusat. Dukungan masyarakat luas sangat diperlukan agar seluruh komponen dapat terlibat setiap kegiatan pembangunan.

Keterlibatan investasi swasta juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi, pengemasan dan pemasaran. Pemerintah daerah diminta membuat perencanaan peruntukan tata ruang wilayahnya agar menjadi suatu konsep yang terpadu.

Patut diperhatikan adanya potensi gangguan seperti kegiatan ilegal, penyelundupan barang, perdagangan gelap narkoba, *illegal trafficking*, dan juga masih adanya tindakan memindahkan patok perbatasan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI.

**Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan jangan sampai mengabaikan faktor keamanan. Pelibatan masyarakat harus diutamakan untuk meningkatkan nasionalisme bagi masyarakat di wilayah perbatasan.**

## Kunjungan ke Wilayah Perbatasan

Sesuai Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, Timwas DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk mengidentifikasi permasalahan sosial ekonomi dan juga keamanan di wilayah perbatasan. Tujuannya untuk mencari masukan tentang solusi yang harus dilakukan agar pengelolaan perbatasan dapat berjalan lebih baik lagi.

Semula kunjungan akan dilakukan di ketiga lokasi perbatasan yaitu, di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua), namun dikarenakan jadwal yang padat dari anggota Timwas, kunjungan baru dilakukan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. Kunjungan ke Aruk dan Skouw akan dijadwalkan kemudian hari melihat jadwal anggota tim yang ada.

Kunjungan ke PLBN Motaain, Kabupaten Belu, NTT berlangsung 12-14 November 2021 dipimpin anggota Timwas dari Fraksi NasDem, Yakobus Jacki Uly, dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, didampingi Anita Jacoba Gah, Fraksi Partai Demokrat, yang juga dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Bupati Belu, Agustinus Taolin, Administrator PLBN Motaain, Engelberthus Klau dan beberapa pejabat terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PLBN Motaain diresmikan Presiden Joko Widodo 28 Desember 2016, secara geografis berada di desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten. Belu, NTT. Memiliki luas 8,5 hektar, PLBN ini terletak 296b Km dari kota Kupang dengan waktu tempuh sekitar 7 jam. PLBN Motaain terdiri atas unit-unit bangunan seperti, gedung utama, gedung kargo keberangkatan, gedung kargo kedatangan, wisma Indonesia, mess karyawan, plaza, pasar perbatasan dan area parkir.

Engelberthus Klau dalam perbincangan dengan Jacki Uly, pada Jumat 12 November 2021, menjelaskan tentang kegiatan di PLBN Motaain sepanjang pandemi covid-19. Menurut Klau kegiatan berlangsung seperti biasa, tidak

Sesuai Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, Timwas DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk mengidentifikasi permasalahan sosial ekonomi dan juga keamanan di wilayah perbatasan.

*lockdown*. Jadwal pelayanan Senin – Rabu pada pukul 09.00 - 14.00 Wita dan Selasa – Minggu pukul 09.00- 12.00 WITA.

Hal ini dikarenakan Timor Leste menerapkan kebijakan masuk ke Indonesia Senin dan Rabu 09.00 WITA – 14.00 WITA. Sedangkan Selasa-Minggu dibuka khusus dengan alasan kemanusiaan bagi orang yang ingin berobat, kedukaan, dan perawatan di rumah sakit.

Menurut Klau kegiatan ekspor tidak terganggu selama pandemi covid-19, PLBN Motaain melayani sekitar 50 – 80 kendaraan yang melintasi PLBN Motaain setiap minggunya. Masalah umum lainnya gangguan teknis di bidang komunikasi *online* yang kadang terganggu.

Dalam penjelasan kepada ketua rombongan Timwas DPR RI, Jacki Uly, Klau mengatakan adanya hambatan dan kendala jembatan di jalan negara satu-satunya yang berada di pintu perbatasan yang belum diperbaiki. Jembatan ini dangkal, mengalami keretakan dan kropos, sehingga ketika airnya meluap dikuatirkan rubuh. Saat ini PLBN melarang kendaraan berukuran berat melewati jembatan ini. Masalah lain seperti penyelundupan, narkoba, dan lain-lain dapat diantisipasi dengan adanya CCTV.

Selain itu juga dibahas mengenai jaringan internet wifi. Menurut Klau, sebelumnya memang ada kendala, sejak Juni 2021 kini telah dapat diatasi setelah akses internet tertangani oleh Kemeninfo melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI).

Timwas juga mendapat penjelasan krisis air bersih dan embung-embung di Kabupaten Belu yang menipis jika musim kemarau tiba. Salah satu kendalanya karena kebocoran pipa.

Dalam pertemuan malam harinya di kediaman dinas Bupati Belu, Agustinus Taolin, menjelaskan beberapa masalah seperti infrastruktur jalan, perbaikan jembatan, kesehatan, irigasi, jaringan internet, dan lain-lain yang sebelumnya ada kendala mulai teratasi. Menurut dia, Pemda Tingkat II Kabupaten Belu, masih menantikan realisasi anggaran dari pusat

Selain itu juga dibahas mengenai jaringan internet wifi. Menurut Klau, sebelumnya memang ada kendala, sejak Juni 2021 kini telah dapat diatasi setelah akses internet tertangani oleh Kemeninfo melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI)



**Rombongan Timwas DPR RI Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, dipimpin Yakobus Jacki Uly (tujuh dari kiri) dari Fraksi NasDem, disertai anggota Timwas lainnya dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah (tujuh dari kanan) berfoto bersama dengan Bupati Belu, NTT, Agustinus Taolin (baju putih tengah), Administrator PLBN Motaain, Engelberthus Klau (lima dari kanan) disertai dengan beberapa pejabat terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Jumat 12 November 2021.**

terkait dari beberapa proyek yang telah diputuskan dalam Inpres No 1 Tahun 2021 tersebut yang masih dalam *on progress* dan ditunda.

Di pagi hari, Sabtu 13 November 2021 dalam persiapan menuju ke pos lintas batas di Oepoli, Kabupaten Kupang, Tim Pengawasan menyempatkan diri mampir di desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT yang posisinya tidak jauh dari PLBN Motaain guna melihat hasil pemboran sumur di sana. Dengan kedalaman 60 meter dan debit air dua liter per detik, sumur ini melayani 2.000 orang dan juga untuk irigasi. Timwas juga mendapat penjelasan bahwa pembangunan jalan sepanjang 22 Km akan selesai 31 Desember 2021.

Menanggapi hal tersebut baik Y. Jacki Uly dan Anita Jacoba Gah mengatakan akan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi kepada Ketua Timwas Rachmat Gobel dan nantinya diadakan rapat khusus dengan beberapa menteri terkait dengan pembangunan kawasan PLBN Motaain.

Jacki Uly menambahkan, kegiatan ekonomi di sana tidak boleh melemah apalagi telah dibangun plaza, pasar, mess pegawai, dan wisma Indonesia



*Rombongan Timwas DPR RI Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, dipimpin Yakobus Jacki Uly (kanan) dari Fraksi NasDem, disertai anggota Timwas dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah (kiri), mengunjungi Sumur Sadi, desa Sadi, Kec Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 13 November 2021, didampingi Bupati Belu, NTT, Agustinus Taolin (baju putih tengah) dan beberapa pejabat terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah.*

untuk menunjang ekonomi di sana. Dia juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur baik PLBN Oepoli, jalan, dan jembatan jangan sampai terhambat dan harus selesai sesuai rencana yang dijadwalkan.

Anita Jacoba Gah menekankan perlunya perhatian utama lainnya yaitu bidang kepabeanaan, keimigrasian, kekarantiaan dan pengamanan secara terpadu, khususnya diperhatikan jalan-jalan pintas masuk dan keluar wilayah perbatasan yang tidak dapat terpantau atau yang dinamakan "jalan tikus".

Dari rangkaian keseluruhan paparan selama kunjungan Timwas diharapkan, wilayah perbatasan berpotensi menjadi *milestone* dan wajah terdepan Indonesia, sebagai cermin kemajuan pembangunan ekonomi yang merupakan tekad presiden Jokowi. Sejalan dengan butir ketiga "Nawa cita" yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, wilayah perbatasan tidak bisa dipisahkan dari gagasan kemandirian bangsa.

Pembangunan yang merata dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia harus tetap dikedepankan selain tentunya tetap memperhatikan segi pertahanan dan keamanan, karena wilayah yang stabil baik ekonomi dan keamanan adalah kunci bagi kemajuan Indonesia menuju masyarakat adil dan sejahtera.



“Jika terjadi pembengkakan biaya dalam proyek kereta cepat, serahkan kepada perusahaan-perusahaan yang membangun. **Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN.**”

**Rachmat Gobel**

Wakil Ketua DPR RI



## Mempertahankan Kepentingan Nasional Dalam Proyek Kereta-Cepat dan Garuda Indonesia

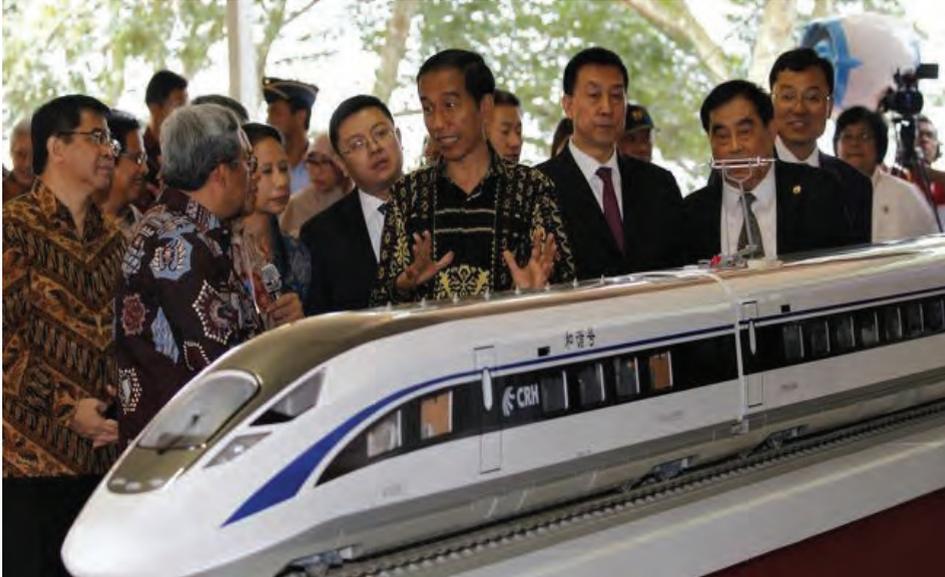
Dikenal sebagai pribadi yang santun, Rachmat Gobel adalah sosok yang tidak suka berbicara dalam bahasa yang keras, apalagi di depan publik. Namun bukan berarti ia tidak bisa melakukannya. Dalam menghadapi hal yang bersifat prinsip, Rachmat Gobel juga tidak akan segan untuk bicara lantang dan ini terlihat jelas dalam pandangannya terhadap kasus proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan PT. Garuda Indonesia.

Dalam soal kereta cepat yang dibangun oleh perusahaan patungan Indonesia-China PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melihat, ada sejumlah langkah pemerintah yang perlu disoroti karena akan sangat mengganggu dalam menjaga kepentingan nasional. Setidaknya ada tiga (3) poin mendasar yang perlu dikritisi yaitu tidak adanya sikap yang tidak tegas pemerintah terhadap KCIC atas terjadinya pembengkakan biaya investasi, penggunaan dana APBN yang melanggar komitmen bahwa proyek ini bersifat *business to business* (b t b), proses alih teknologi yang tidak jelas.

Mengenai masalah PT. Garuda Indonesia, Rachmat Gobel melihat, pemerintah jangan terlalu cepat membuka opsi untuk melakukan likuidasi terhadap BUMN yang kini terbelit utang dalam jumlah besar ini. Opsi harus dibicarakan pada titik terakhir, dan harus mempertimbangkan posisi strategis Garuda sebagai *flight carrier* dan berbagai kepentingan nasional yang selama ini diemban oleh perusahaan ini. Dalam menentukan penyelamatan Garuda likuidasi tidak bisa hanya didasarkan pada perhitungan faktor keuangan semata.

### Lika Liku Proyek Kereta Cepat

Sejatinya, Rachmat Gobel adalah pendukung pembangunan kereta cepat seperti yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itulah, meski memiliki kedekatan dengan Jepang, bahkan Ketua Asosiasi Persahabatan Indonesia-Jepang dan memiliki preferensi terhadap negara Mata Hari Terbit ini, Rachmat tidak pernah mempermasalahkan atau mengkritisi ketika pemerintah memilih menggandeng China dalam menggarap proyek ini.



*Presiden Republik Indonesia di depan desain kereta cepat Jakarta-Bandung*

Dilihat dari sejarahnya, perjalanan proyek ini memang penuh lika-liku. Gagasan pembangunan kereta cepat ini sudah ada sejak era Presiden SBY. Seperti dilaporkan majalah Tempo, pada April 2011 Kementerian Perhubungan membuat Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, yang di dalamnya memuat program kereta cepat Jakarta-Surabaya pada 2030. Lalu pada Oktober 2011, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggagas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Untuk mewujudkan gagasan itu, pemerintah meminta bantuan teknis dari pemerintah Jepang. Permintaan ini dipenuhi dengan menugaskan *Japan Interntional Cooperation (JICA)* melakukan prastudi dengan menggunakan hibah US\$ 500 ribu. Setelah studi awal ini selesai Maret 2012. Kemudian, Januari 2014 dilakukan studi kelayakan tahap pertama, dengan tetap dibiayai dana hibah Jepang US\$ 3,5 juta. Namun sampai masa jabatannya berakhir, SBY tidak berani mengambil keputusan atas hasil studi kelayakan JICA itu.

Kemudian, entah atas inisiatif siapa, pada saat kunjungan ke Cina pada Februari 2015, Presiden Jokowi Jokowi yang baru beberapa bulan dilantik menggantikan SBY membicarakan kemungkinan kerjasama pembangunan kereta cepat. China tampaknya tertarik.

Menteri BUMN yang saat itu dijabat Rini Soemarno meneken MoU dengan Negara Tirai Bambu untuk rencana kereta cepat Jakarta-Bandung. China kemudian melakukan studi kelayakan yang diberitakan menghabiskan dan US\$ 5 juta. Langkah Rini itu menandai terjadinya persaingan sengit Jepang vs China dalam memenangkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian dalam waktu singkat yaitu pada 11 Agustus 2015, China mengirim proposal dengan mengajukan biaya investasi pembangunan US\$ 5,585 miliar. Jepang tidak tinggal diam, merevisi proposal yang pernah dibuat di era SBY, pada 26 Agustus 2015 negara ini mengajukan proposal dengan penawaran US\$ US\$ 6,223 miliar.

Namun entah dari mana datangnya, pada September 2015 muncul rumor bahwa proyek kereta cepat ini dibatalkan. Rumor itu sempat dibenarkan Menko Perekonomian saat itu Darmin Nasution. Seperti ditulis Majalah Tempo, mengutip pendapat Presiden Jokowi, Darmin mengatakan, alasan pembatalan itu karena jarak Jakarta-Bandung yang hanya 150 km tak layak untuk kereta cepat. Pernyataan ini mendapat reaksi dari Jepang sehingga Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu Tanizaki Yasuaiki menjambangi Kantor Menko Perekonomian. Pertemuan itu berlangsung pada 23 September 2015.

Namun dalam kesempatan itu Darmin memberi pernyataan yang berbeda. Kepada Tanizaki, seperti diberitakan berbagai media, Darmin menjelaskan bahwa proyek kereta cepat tetap dilanjutkan dan diserahkan Kementerian BUMN atau tidak lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan. Juga dikatakan, proyek ini dijalankan dengan beberapa syarat yakni tidak menggunakan dana APBN baik langsung maupun tidak langsung atau murni *b to b*. Selain itu juga ditegaskan bahwa proyek ini tidak mendapat jaminan pemerintah.

Secara tiba-tiba, pada 1 Oktober 2015 pemerintah melalui Rini Soemarno langsung mengumumkan bahwa proyek ini akan digarap oleh China. "Begini soal kereta cepat supaya

**Menteri BUMN yang saat itu dijabat Rini Soemarno meneken MoU dengan Negara Tirai Bambu untuk rencana kereta cepat Jakarta-Bandung. China kemudian melakukan studi kelayakan yang diberitakan menghabiskan dan US\$ 5 juta.**

semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah dan ini transaksi *B to B* karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2015), seperti dimuat Kompas.com.

Menanggapi keputusan itu, Menteri Perhubungan saat itu Ignasius Jonan sempat mengingatkan agar petimbangannya jangan hanya soal biaya yang lebih murah, tapi yang utama justru aspek keselamatan. Namun Rini mengatakan, pemerintah ingin proyek ini bersifat *business to business* (B to B) dan China menyetujuinya. Faktor inilah yang diduga menjadi alasan Jonan tidak menghadiri acara *groundbreaking* proyek ini oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2016, di perkebunan teh Mandalasari, Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.

Secara resmi ada tiga alasan dikemukakan Rini mengenai mengapa memilih kereta cepat China daripada Jepang. Pertama, China menawarkan akan menggunakan skema *business to business* (b to b). Kedua, tidak menggunakan dana APBN. Ketiga, tanpa meminta jaminan pemerintah. Di balik itu ada hal lain yaitu janji transfer teknologi.

Meski menerima, Dubes Tanizaki sempat mengemukakan kekecewaannya atas keputusan pemerintah Indonesia. Pasalnya, Jepang telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan studi awal atas permintaan Indonesia sendiri. Tidak kurang dari US\$ 4 juta dana hibah Jepang yang disalurkan melalui JICA. Kemudian teknologi yang ditawarkan Jepang jauh lebih tinggi, termasuk dari sisi keamanan.

Tidak hanya pemerintahannya, masyarakat Jepang juga banyak yang kecewa dan ini tentu bisa dimaklumi. Seperti dikatakan Rachmat Gobel, bagi masyarakat Jepang teknologi kereta cepat *Shinkansen* yang ditawarkan Jepang ke Indonesia bukan sekadar barang industri, tapi sudah menjadi

**Secara resmi ada tiga alasan dikemukakan Rini mengenai mengapa memilih kereta cepat China daripada Jepang. Pertama, China menawarkan akan menggunakan skema *business to business* (b to b). Kedua, tidak menggunakan dana APBN. Ketiga, tanpa meminta jaminan pemerintah. Di balik itu ada hal lain yaitu janji transfer teknologi.**

simbol dan kebanggaan. Teknologi ini telah teruji, dan bahkan yang teknologi yang ditawarkan China juga berawal *Shinkansen* yang kemudian mereka kembangkan sendiri.

Pemerintah Indonesia bergerak cepat, pada 16 Oktober 2015, langsung dibentuk perusahaan patungan Indonesia-China yaitu PT. KCIC. Pemegang sahamnya, 60% dari Indonesia yang diwakili PT. Pilar Sinergi BUMN yang merupakan konsorsium PT. Wijaya Karya (selaku *leader*), PT. Jasamarga, PT. Perkebunan Nusantara VIII, dan PT. Kereta Api Indonesia. Kemudian China 40% yang diwakili *China Railway* atau juga disebut *Beijing Yawan HSR Co. Ltd* yang merupakan konsorsium *China Railway International Co. Ltd* (selaku *leader*), *China Railway Group Ltd*, *Sinohydro Corporation Ltd*, *CRRC Coproration Ltd*, dan *China Railway Signal and Communication Corp*.

Namun sebelum pembentukan perusahaan PT. KCIC diumumkan ke publik, pemerintah terlebih dahulu telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini ditandatangani pada 6 Oktober 2015 itu dengan ditegaskan menyebutkan bahwa proyek ini tak boleh ada penggunaan dana APBN dan tak mendapatkan jaminan pemerintah seperti tertuang pada Pasal 4 (2).

Perpres ini juga mewajibkan untuk memaksimalkan menggunakan kandungan lokal termuat dalam Pasal 6 (1). Pada Pasal 6 (2) ditegaskan tentang keharusan alih teknologi. Namun pemerintah juga memberi fasilitas seperti diatur Pasal 7 tentang kemudahan perizinan, biaya perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan.

Kini setelah berlangsung 6 tahun, keputusan menggandeng China sedang menghadapi ujian berat. Semua persyaratan yang diberikan pemerintah sudah diterabas. Penyelesaian proyek molor, dari pengerjaan yang dijadualkan tuntas 2018 dan beroperasi 2019, dalam kenyataannya sampai akhir 2021 pengerjaannya masih berlangsung. Biaya

**Kini setelah berlangsung 6 tahun, keputusan menggandeng China sedang menghadapi ujian berat. Semua persyaratan yang diberikan pemerintah sudah diterabas. Penyelesaian proyek molor, dari pengerjaan yang dijadualkan tuntas 2018 dan beroperasi 2019, dalam kenyataannya sampai akhir 2021 pengerjaannya masih berlangsung**

investasi juga terus membengkak. Janji tidak akan menggunakan dana APBN, kenyataannya pemerintah telah mengucurkan dana untuk mem-*backup* kelangsungan proyek ini. Inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan besar, apakah pemerintah telah mengkaji dengan sepenuhnya validitas kelayakan proyek yang ditawarkan China?

Dalam pandangan Rachmat Gobel, dilihat dari progres kinerja proyek sampai saat ini, munculnya pertanyaan itu bisa dimaklumi. Konsekuensinya terhadap kepentingan nasional memang sangat besar. Pembengkakan biaya investasi (*over run*) akan berdampak besar pada kemampuan pengembalian dana investasi itu sendiri, dan bisa dipastikan masalahnya akan bermuara risiko kenaikan tarif dan kualitas pelayanan kereta ini kepada masyarakat luas.

KCIC sudah dua kali mengumumkan terjadinya *over run*. Pertama pada 2018, KCIC mengatakan biaya investasi naik menjadi US\$ 6,071 miliar atau setara Rp 86,5 triliun. Kedua pada Oktober 2021, KCIC kembali mengumumkan biaya investasi naik lagi menjadi US\$ 7,97 miliar atau setara Rp 114,24 triliun. Angka sudah jauh melebihi penawaran awal China US\$ 5,585 miliar, bahkan sudah melewati angka yang diajukan Jepang US\$ 6,223 miliar.

Beban berat proyek ini semakin terasa, karena 75% dari biaya pembangunan berasal dari pinjaman China, hanya 25% dari modal KCIC. Meski dikatakan bahwa pinjaman ini tidak dijamin pemerintah, tapi fakta bahwa ada empat (4) BUMN yang terlibat sebagai pemegang saham tentu tidak bisa

menghilangkan kekhawatiran dampaknya pada pemerintah dan akhirnya juga akan menjadi beban rakyat banyak.

Sayangnya, tidak ada sikap yang tegas pemerintah terhadap kinerja KCIC. Alih-alih memberi sanksi, pemerintah malah merevisi Perpres No 107 Tahun 2015 dengan mengeluarkan Perpres No 93 tahun 2021. Dalam Perpres yang baru ini, pemerintah seakan-akan mengamini saja terjadinya pembengkakan biaya investasi yang diajukan KCIC, padahal nilainya sudah jauh lebih besar dari proposal awal, bahkan jauh melebihi penawaran Jepang.

**Dalam pandangan Rachmat Gobel, dilihat dari progres kinerja proyek sampai saat ini, munculnya pertanyaan itu bisa dimaklumi. Konsekuensinya terhadap kepentingan nasional memang sangat besar.**

Dalam Pepres No 93 tahun 2021, selain mengalihkan pimpinan konsorsium BUMN dari PT. Wijaya Karya ke PT. KAI seperti tertuang pada Pasal 1, pemerintah juga melakukan perubahan rute dari Jakarta-Walini-Bandung menjadi Jakarta-Padalarang-Bandung sehingga jalurnya menjadi lebih singkat, seperti tertulis pada Pasal 2.

Yang paling kontroversial adalah perubahan Pasal 4 Ayat (2) dimana pemerintah memberi izin untuk menggunakan dana APBN. Kemudian pada perubahan pasal 3 A ayat (2), dimuat aturan baru untuk mengatur tentang "pemberian penjaminan pemerintah". Inilah yang membuat, semua komitmen awal yang diatur pada Perpres No 17 Tahun 2015 menjadi buyar. Tiga janji awal pemerintah bahwa proyek bersifat *B to B*, tak menggunakan dana APBN, dan tak ada penjaminan pemerintah, telah rontok semua. Bahkan pemerintah telah melakukan injeksi melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. KAI sebesar Rp 4,3 triliun.

Dengan demikian, semua faktor yang membuat China memenangkan proyek ini telah diterabas semua. Biayanya sudah jauh lebih besar dari pada biaya usulan Jepang. Apakah ke depan ada jaminan tak ada kenaikan biaya lagi? Apakah ke depan ada jaminan tidak ada permintaan subsidi tarif atau tiket?

Berdasarkan semua itulah, Rachmat Gobel melihat harus ada tindakan tegas dan teguran dari pemerintah terhadap KCIC. Konsorsium ini harus dituntut berlaku transparan dan jujur. *"Demi kepentingan nasional, buka saja semuanya. Bagaimana dengan perhitungan konsultan sebetulnya agar kita tahu bagaimana masa depan pembiayaan pembangunan kereta cepat ini. Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,"* kata Rachmat Gobel.

Ia sangat menyayangkan langkah pemerintah memberikan suntikan modal Rp 4,3 triliun melalui skema PMN ke PT. KAI. "Pemerintah harusnya konsisten, soal kereta cepat serahkan ke investor sesuai dengan

**Berdasarkan semua itulah, Rachmat Gobel melihat harus ada tindakan tegas dan teguran dari pemerintah terhadap KCIC. Konsorsium ini harus dituntut berlaku transparan dan jujur.**

prinsip awal yaitu *b to b*. Akibat pandemi covid-19, Indonesia dihadapkan pada keterbatasan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Soal proyek kereta cepat, seharusnya pemerintah tetap pada komitmen awal, menyerahkan sepenuhnya pada konsorsium, bukan mengucurkan dana APBN. Demi menjaga kepentingan nasional, semua pihak yang terlibat dalam proyek kereta cepat harus memperhatikan hal ini secara seksama," kata Rachmat Gobel seperti dikutip berbagai media Minggu (31/10/2021).

Rachmat Gobel juga mempertanyakan realisasi komitmen transfer teknologi yang dijanjikan China. Belum terlihat komitmen ini berjalan dengan baik. Pelaksana proyek ini adalah *High Speed Railway Contractor Consortium* (HSRCC). Konsorsium kontraktor ini membagi pekerjaan untuk kedua pihak. Indonesia mengerjakan 30% melalui Wijaya Karya, dan 70% dikerjakan oleh kontraktor dari China. Bagaimana realisasinya, masih tanda tanya besar.

Menurut Rachmat Gobel, sewaktu menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Jepang, masalah transfer teknologi ini sudah dibicarakan. Menurutnya, transfer teknologi itu memiliki tiga tahap. Pertama, *transfer of jobs*, yaitu transfer pekerjaan. Jadi, pengerjaannya dilakukan oleh warga Indonesia, bukan oleh asing. Inilah yang dilakukan dalam pembangunan *Mass Rapid Transit*

antara Lebak Bulus-Sudirman, yang juga menggunakan teknologi Jepang. Dengan cara ini, warga Indonesia memiliki pengalaman dalam membangun suatu proyek atau pabrik atau barang.

Kedua tranfer teknologi dilakukan melalui *transfer of knowhow*, yaitu bagaimana suatu hal dikerjakan. Ini soal pemahaman dan pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pengerjaan sesuatu. Biasanya ini tentang kontraktor dan atau subkontraktor pengerjaan suatu proyek atau produk. Siapa kontraktor pengeboran, siapa kontraktor pemasangan rel, siapa kontraktor instalasi, siapa kontraktor sistem sinyal, dan sebagainya. Intinya ada transfer pengerjaan, bukan sekadar transfer pekerjanya.

**Menurut Rachmat Gobel, sewaktu menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Jepang, masalah transfer teknologi ini sudah dibicarakan. Menurutnya, transfer teknologi itu memiliki tiga tahap. Pertama, *transfer of jobs*, yaitu transfer pekerjaan. Jadi, pengerjaannya dilakukan oleh warga Indonesia, bukan oleh asing.**

Ketiga, *transfer of product development*. Ini tahap tertinggi: merancang, mendesain, dan membuat teknologinya. Misalnya bisa membuat bor sendiri, membuat rel sendiri, membuat persinyalan sendiri, membuat gerbong sendiri, membuat lokomotif sendiri, dan tentu yang terpenting rahasia teknologi kereta bisa melaju cepat, dan sebagainya. Biasanya yang terpenting adalah arsitekturnya, karena teknologi lainnya bisa dibeli melalui hak cipta. Seperti dulu BJ Habibie merancang N-250 atau Ilham Habibie merancang N-2130. Rancangannya dibuat oleh Habibie, tapi teknologi turbin, mesin, landing gear dan sebagainya membeli dari pabrikan lain.

Jepang, kata Rachmat Gobel, tentu bisa melakukan transfer teknologi pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Untuk tingkat ketiga tentu tidak gampang, butuh perjanjian khusus. Seperti Mercedes, BMW, juga Honda dan Toyota misalnya, tentu tidak akan begitu saja memberikan hak ciptanya. Begitu juga Boeing dan Airbus.

Apakah China akan memberikan transfer teknologi pada tingkat ketiga itu? Ini yang ditunggu semua orang. Yang pasti, investasi China di seluruh dunia terikat pada *turn-key project*, hal ini sesuai dengan regulasi negara tersebut. Setiap investasi China di negara lain, ada keharusan pengerjaannya dilakukan oleh warga China. Mengapa? Karena China memiliki penduduk terbesar di dunia. Mereka harus memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduknya.

Tentu hal itu tak terjadi pada investor dari Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Eropa. Karena negara-negara itu tak memiliki beban penduduk yang sangat besar seperti China. Mereka hanya menaruh pegawai untuk level ahli dan menyangkut kerahasiaan teknologi. Beda dengan China, jika memasuki pembangkit listrik PLTU yang dibangun China, orang akan mendapati semua tetap dikendalikan mereka. Alat-alat yang digunakan selalu dalam Bahasa Mandarin.

**Jepang, kata Rachmat Gobel, tentu bisa melakukan transfer teknologi pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Untuk tingkat ketiga tentu tidak gampang, butuh perjanjian khusus. Seperti Mercedes, BMW, juga Honda dan Toyota misalnya, tentu tidak akan begitu saja memberikan hak ciptanya. Begitu juga Boeing dan Airbus.**



*Kondisi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (sumber: detik.com)*

Jadi, apakah pada pengerjaan pembangunan kereta cepat ada *transfer of jobs*? Ini yang harus dialami lagi, demikian pula dengan *transfer of knowhow*. Hal ini harus dilihat siapa kontraktor dan subkontraktornya. Selain itu, dari mana saja material semen, besi, dan juga relnya, apakah memenuhi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

**" Semua pihak harus mendukung upaya penyelamatan maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia."**

**Rachmat Gobel**  
Wakil Ketua DPR RI



## Dukung Penyelamatan Garuda

Rachmat Gobel juga memberi perhatian khusus pada masalah keuangan yang membelit perusahaan penerbangan nasional PT Garuda Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi *flight carrier* harus dipertahankan sekuat tenaga, sehingga jangan terlalu mudah untuk memilih opsi likuidasi.



*Permasalahan yang menjerat Garuda Indonesia*

"Kami harapkan likuidasi menjadi solusi terakhir dan kami mengharapkan hal itu tidak terjadi. Saya percaya manajemen bisa mencari solusi, dan kami siap memberi dukungan," kata Rachmat Gobel seperti dikutip berbagai media setelah Ia bertemu dengan manajemen Garuda di Kantor Pusat Garuda.

Sebelumnya pada 26 Mei 2021, Rachmat Gobel juga telah membuat pernyataan pers. Ia mendukung upaya penyelamatan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. "Upaya menjaga keberlangsungan usaha Garuda Indonesia sebagai salah satu aset bangsa, tentunya sudah seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak," kata Rachmat Gobel.

Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa (*flight carrier*), lanjut Rachmat Gobel, Garuda Indonesia berperan penting dalam penyediaan layanan konektivitas udara guna memenuhi ketersediaan aksesibilitas masyarakat khususnya di masa pandemi.

Pernyataan itu disampaikannya setelah sejumlah media memberitakan tentang dokumen milik Kementerian BUMN yang memuat masalah yang dihadapi maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Dokumen itu antara lain berisi tentang empat opsi yang bisa dilakukan mengatasi masalah Garuda. Pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas.

Kedua, menerapkan *legal bankruptcy* untuk melakukan restrukturisasi kewajiban Garuda seperti bayar utang, biaya sewa, dan pemenuhan kontrak kerja. Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi dengan kemampuan sendiri. Pada saat bersamaan ada maskapai penerbangan lain yang mengambil alih sebagian besar rute yang ditinggalkan Garuda. Keempat, Garuda akan dilikuidasi.

Beredarnya dokumen itu makin menguatkan kekhawatiran publik terhadap kondisi Garuda. Menangkap kekhawatiran itulah, pada 2 Juni 2021 Rachmat Gobel didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dari Fraksi Partai NasDem mendatangi manajemen Garuda. "Alasan bertemu karena berkembangnya berita yang membuat kekhawatiran. Karena Garuda sebagai BUMN, dengan nama besarnya, tentu kami ingin berupaya membantu supaya Garuda tetap eksis dan terus berkembang. Kami harus mencari solusi, apa yang bisa dilakukan," katanya.

Sebagian besar masyarakat memang mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan Garuda Indonesia. Tidak hanya sebagai *flight carrier*, BUMN yang sudah berdiri sejak 28 Desember 1949 atau sehari setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, mempunyai catatan sejarah yang kuat dalam perjuangan rakyat ini. Kelahirannya ditandai dengan penerbangan dua pesawat Dakota DC-3 dari Bandara Kemayoran, Jakarta, menuju Bandara Maguwo, Yogyakarta untuk menjemput Presiden Sukarno yang menandai kembalinya Presiden Pertama RI ini Jakarta setelah empat tahun mengungsi di Yogyakarta. Penjemputan ini sekaligus

**Alasan bertemu karena berkembangnya berita yang membuat kekhawatiran. Karena Garuda sebagai BUMN, dengan nama besarnya, tentu kami ingin berupaya membantu supaya Garuda tetap eksis dan terus berkembang.**

menandai perpindahan kembali ibukota negara dari Yogyakarta ke Jakarta.

Di usianya yang ke-72 tahun pada 2021, perusahaan ini telah jauh berkembang. Saat ini ada *90 destinasi* di seluruh dunia, dengan 600 penerbangan per hari dan mengoperasikan 144 pesawat. Berbagai penghargaan internasional pun sudah banyak diraih Garuda, terutama tentang kualitas layanan *cabin crew*.

Kini Garuda tengah menghadapi prahara. Sama seperti perusahaan penerbangan lainnya, pandemi covid-19 telah membuat kinerjanya anjlok. Dalam sebuah rekaman suara yang beredar di publik pada Mei 2021, terdengar suara Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra yang menyampaikan kepada karyawannya bahwa utang Garuda mencapai Rp 70 triliun dan setiap bulan terus bertambah. Kenapa? Pendapatan yang peroleh tidak sebanding dengan biaya yang harus ditanggung, *gap*-nya sangat besar.

Bulan Mei itu memang merupakan salah satu bulan terburuk Garuda. Pendapatannya diperkirakan hanya US\$ 56 juta, sementara biaya itu biaya yang harus ditanggung tidak kurang dari US\$ 136 juta yaitu untuk bayar sewa pesawat US\$ 56 juta, *maintenance* pesawat US\$ 20 juta, avtur US\$ 20 juta, biaya pegawai US\$ 20 juta. Pada Mei itu, menurut Irfan, secara *cash flow* Garuda sudah negatif, dan modal sudah minus Rp 41 triliun.

Ia juga menyampaikan bahwa bisa saja tiba-tiba operasional Garuda berhenti seketika. Pertama, para *lessor* yang meminjamkan pesawat melarang terbang semua pesawat yang disewa Garuda karena Garuda tak memenuhi kewajibannya. Kedua, dipailitkan secara hukum oleh para pihak yang merasa dirugikan Garuda.

Dari sebuah dokumen milik Garuda terungkap bahwa masalah yang dihadapi berasal dari dua arah. Pertama, tata kelola korporasi buruk, adanya kerjasama yang memberatkan perusahaan seperti *mark-up* nilai pesawat, dan kasus suap serta pencucian uang pada 2011-2012. Menurut Bloomberg Garuda adalah *highest aircraft rental cost to revenue*

... bisa saja tiba-tiba operasional Garuda berhenti seketika. Pertama, para *lessor* yang meminjamkan pesawat melarang terbang semua pesawat yang disewa Garuda karena Garuda tak memenuhi kewajibannya. Kedua, dipailitkan secara hukum oleh para pihak yang merasa dirugikan Garuda.

*in the world* dengan proporsi biaya kontrak *lessor* dibandingkan dengan pendapatan sebesar 24,7% atau empat kali lebih besar di atas rata-rata dunia.

Kedua, kondisi perusahaan diperparah oleh pandemi covid-19. Pandemi covid-19, disebut sebagai "*perfect storm*" untuk membuat Garuda melayang tersapu. Pendapatan Garuda pada 2020 turun 70% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019. Nilai pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Garuda tiap bulannya yang sekitar US\$ 130 juta– US\$ 150 juta. Dengan kondisi itu, secara teknis sebetulnya Garuda sejatinya sudah bangkrut.

Hal itu diakui Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. "Dengan kondisi saat ini, dalam istilah perbankan ini Garuda sebetulnya *technically bankrupt*, tetapi *legally* belum. Sekarang kami sedang berusaha untuk keluar dari kondisi ini," katanya.

Seperti dikutip berbagai media massa, per September 2021 ekuitas Garuda sudah negatif US\$ 2,8 miliar sekitar Rp 40 triliun per September 2021. Liabilitas atau kewajiban ke pihak luar US\$ 9,8 miliar. Kewajiban ini mayoritas berupa utang kepada *lessor* yang mencapai US\$ 6,35 miliar. Lainnya utang ke bank US\$ 967 juta, utang dalam bentuk obligasi US\$ 630 juta. Adapun asetnya hanya US\$ 6,9 miliar.

Menurut Rachmat Gobel, dalam melihat masalah Garuda ini, semua pihak diminta untuk melihat secara komprehensif antara lain peran perusahaan selama ini seperti secara konsisten melakukan penyediaan aksesibilitas layanan penerbangan bagi masyarakat.

Menurut Rachmat Gobel, dalam melihat masalah Garuda ini, semua pihak diminta untuk melihat secara komprehensif antara lain peran perusahaan selama ini seperti secara konsisten melakukan penyediaan aksesibilitas layanan penerbangan bagi masyarakat. Hal ini juga, tetap dilakukan di masa pengendalian transportasi akibat pandemi covid-19.

Bukan hanya itu saja, kata lanjut dia, di masa pandemi ini Garuda juga berperan sebagai angkutan distribusi logistik esensial seperti pengangkutan bahan baku vaksin, alat medis, hingga distribusi komoditas ekspor nasional. "Ini, tentunya turut memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan pemulihan ekonomi nasional," katanya.



*Rachmat Gobel didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, berkunjung ke Garuda Indonesia untuk membahas penyelamatan Garuda Indonesia*

Dalam upaya penyelamatan yang dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia, Rachmat Gobel menegaskan, siap membantu untuk menjembatani segala kebutuhan ruang komunikasi bersama *stakeholders* terkait untuk menciptakan ekosistem usaha yang semakin solid bagi Garuda Indonesia.





Sangat disayangkan rendahnya realisasi dukungan anggaran KUMKM padahal sektor ini memiliki peran yang besar terutama dalam pemulihan ekonomi. Ini terjadi karena belum ada *conductor* yang kuat dalam menyatukan kebijakan pengembangan KUMKM. Inilah yang membuat pengembangan KUMKM tidak maksimal









# BAB X

## APBN 2022: ANGGARAN TRANSISI DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

**P**ANDEMI covid-19 yang berkepanjangan membuat tingginya risiko ketidakpastian masih terus berlangsung. Meski penyebarannya sudah melandai, belum satu pun negara yang berani menyatakan bebas dari virus ini. Dampaknya terhadap perekonomian, termasuk keuangan negara, masih sangat dirasakan.

Hampir semua negara terpaksa memperbesar defisit anggarannya agar bisa membiayai peningkatan kebutuhan dalam menghadapi dampak pandemi. Penanganan pandemi covid-19 membutuhkan pendanaan publik yang sangat besar untuk memastikan berbagai masalah bisa ditangani secara komprehensif. Membiayai insentif untuk menghadapi pelemahan ekonomi dan penanganan sektor kesehatan yang membutuhkan tindakan tepat waktu, membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit.

Tidak hanya negara berkembang seperti Indonesia, beban berat penanganan pandemi juga sangat dirasakan oleh negara dengan perekonomian terbesar di dunia seperti China, Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Pada 2020 pemerintah AS terpaksa menaikkan defisit anggarannya menjadi 15% PDB, kemudian pada 2021 negara ini masih membutuhkan defisit anggaran 12,4% PDB. Angka-angka ini jauh di atas defisit anggaran sebelum pandemi seperti pada 2019 yang hanya 3,2% PDB.



Hal yang sama juga harus dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pada 2020 negara Matahari Terbit ini terpaksa menaikkan defisit anggarannya ke posisi 10,28% PDB dan pada 2021 sebesar 9% atau jauh dibandingkan sebelum pandemi sekitar 3,11% PDB. Begitu juga dengan China, pada 2020 pemerintah negara Tirai Bambu ini harus menaikkan defisit anggarannya ke level 11,18% dan 7,54% dibandingkan sebelum pandemi 6,34%.

Tekait kebutuhan pengelolaan anggaran menghadapi pandemi, DPR RI dan pemerintah telah mengambil cepat. Sejak awal merebaknya kasus covid-19 di berbagai negara pada Januari 2020, pemerintah telah mengantisipasinya dengan berbagai langkah. Begitu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan covid-19 sebagai pandemi global, pemerintah segera menyiapkan berbagai perangkat peraturan yang dibutuhkan.

Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui Sidang Paripurna pada 12 Mei 2020, DPR RI menyetujui Perpu ini menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020. Undang-Undang inilah yang menjadi fondasi bagi kebijakan pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam penanganan pandemi covid-19.

Melalui pasal UU No 2 Tahun 2020 pemerintah diizinkan untuk menetapkan defisit anggaran lebih dari 3% PDB atau di atas batas maksimal yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU ini juga memberi keleluasan kepada pemerintah melakukan relokasi pembiayaan dan pendanaan serta memberi sejumlah insentif untuk membantu dunia usaha dalam menghadapi pandemi.

*"Persetujuan DPR RI untuk menetapkan Perpu No.1 Tahun 2020 menjadi UU No 2 Tahun 2020 didasarkan pada adanya hal kegentingan yang memaksa dalam penanganan pandemi covid-19. Dan terbukti, keberadaan UU ini menjadi sangat strategis sehingga Indonesia bisa menangani pandemi dengan berbagai dampaknya terhadap perekonomian relatif lebih baik,"* kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

Seperti diketahui, pandemi covid-19 telah membuat perekonomian hampir semua mengalami resesi, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada 2020 yang semula diperkirakan bisa mencapai 5,3%, dalam realisasinya mengalami kontraksi 2,07%. Tidak hanya menyulitkan pelaku ekonomi, kondisi ini juga sangat membebani keuangan negara.

Pendapatan negara yang awalnya dalam APBN 2020 diproyeksikan bisa mencapai Rp 2.221,5 triliun realisasinya hanya bisa mencapai Rp 1.647,7 triliun. Sementara belanja negara yang semula ditetapkan Rp 2.528,8 triliun

**... Dan terbukti, keberadaan UU ini menjadi sangat strategis sehingga Indonesia bisa menangani pandemi dengan berbagai dampaknya terhadap perekonomian relatif lebih baik,"**



*DPR RI menetapkan Perpu Nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020*

dalam realisasinya membengkaknya menjadi Rp 2.595,4 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2020 yang semula direncanakan 2,2% PDB, dalam realisasinya melonjak menjadi 6,1% PDB.

“Tanpa ada UU No.2 Tahun 2020 sebagai fondasi kebijakan dengan memberi ruang defisit anggaran bisa melebihi 3%, bisa dipastikan APBN 2020 tidak akan mampu membiayai berbagai kebutuhan dalam penanganan covid-19 sehingga dampak pandemi ini akan lebih berat bagi masyarakat,” kata Rachmat Gobel.

Meski kondisi perekonomian relatif lebih baik dibandingkan 2020, pembiayaan APBN 2021 masih membutuhkan defisit yang masih besar. Kebutuhan terbesar adalah untuk membiayai pemulihan ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp 744.77 triliun. Pada APBN 2021, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp 1.743,6 triliun, sedangkan kebutuhan untuk belanja negara diproyeksikan bisa mencapai Rp 2.750 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2021 diperkirakan bisa mencapai Rp 1.006 triliun atau 5,7% PDB.

## APBN 2022 Anggaran Transisi

Sesuai dengan amanah UU No.2 Tahun 2020, APBN 2022 adalah kesempatan terakhir untuk menyusun anggaran dengan defisit di atas 3% PDB. Oleh karena itulah APBN 2022 ini disebut sebagai anggaran transisi menuju kembali kepada ketentuan yang diatur UU No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dimana defisit APBN maksimal hanya 3% PDB. Tidak seperti dalam tiga tahun terakhir, defisit APBN 2023 harus di bawah 3% seperti yang berlaku pada APBN sebelum pandemi covid-19.

Setelah melalui pembahasan panjang, melalui Sidang Paripurna pada 30 September 2021, DPR RI secara resmi menyetujui dan mengesahkan RUU APBN 2022 yang diajukan pemerintah menjadi UU APBN 2022. Dalam APBN 2022 antara lain disepakati pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.841 triliun yang direncanakan berasal dari penerimaan pajak Rp 1.506,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNB) Rp 33,2 triliun dan hibah Rp 0,6 triliun. Untuk belanja negara disepakati Rp 2.708,7 triliun yang dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat Rp 1.938,3 triliun dan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 770,4 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2022 ditargetkan Rp 868,0 triliun atau 4,85% PDB.



*Sidang Paripurna persetujuan dan pengesahan RUU APBN tahun 2022 menjadi UU APBN tahun 2022*

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menilai, APBN 2022 cukup realistis dan terlihat hati-hati seperti tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021 dan defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah dibandingkan 2021.

*"Dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sekuat APBN 2021. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah, kuncinya adalah pelaksanaan APBN 2022 harus mendapat dukungan kebijakan non-fiskal yang lebih efektif,"* kata Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel memaklumi langkah pemerintah mengerem belanja negara pada 2022 karena kebijakan fiskal tahun depan memang harus diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap PDB pada tahun 2023.

### Perkembangan APBN dan Defisit Anggaran ( Rp triliun)

|                          | 2019(*) | 2020(*) | 2021(**) | 2022(**) |
|--------------------------|---------|---------|----------|----------|
| <b>PENDAPATAN NEGARA</b> | 1.961   | 1.647   | 1.744    | 1.841    |
| Penerimaan Pajak         | 546,1   | 1.285,1 | 1.444,5  | 1.506,9  |
| PNPB                     | 408,9   | 343,8   | 298,2    | 333,2    |
| Hibah                    | 5,5     | 5,5     | 0,9      | 0,6      |

|                       | 2019(*) | 2020(*) | 2021(**) | 2022(**) |
|-----------------------|---------|---------|----------|----------|
| <b>BELANJA NEGARA</b> | 2.309,3 | 2.595,4 | 2.750,0  | 2.708,7  |
| Pemerintah Pusat      | 1.496,3 | 1.832,9 | 1.954,5  | 1.938,3  |
| TKDD                  | 812,9   | 762,5   | 795,5    | 770,4    |

|                          | 2019(*) | 2020(*) | 2021(**) | 2022(**) |
|--------------------------|---------|---------|----------|----------|
| <b>DEFISIT ANGGARAN</b>  | 348,7   | 947,6   | 1.006,4  | 868,0    |
| Defisit Terhadap PDB (%) | 2,2     | 6,1     | 5,7      | 4,85     |

Sumber: Laporan Realisasi dan Nota Keuangan APBN

Ket:

(\*) angka realisasi

(\*\*) angka outlook

Anggaran tahun 2022 memang harus lebih bersifat konsolidasi karena itu kebijakan non fiskal menjadi sangat penting. Ini artinya kreativitas dan kemampuan kementerian dan lembaga melahirkan kebijakan untuk mendorong pergerakan ekonomi menjadi sangat penting. *"Ini tantangan besar, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi atau kementerian agar sasaran pembangunan 2022 yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,"* kata Rachmat Gobel.

## Indikator Makro APBN 2022

APBN 2022 disusun melalui pertimbangan penuh kehati-hatian mengingat risiko ketidakpastian yang masih tinggi terkait pandemi covid-19. Dinamika pandemi yang masih cukup tinggi menjadi variabel utama yang mempengaruhi divergensi proyeksi ekonomi global maupun domestik. Risiko ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi menuntut pemerintah untuk mendesain APBN seefektif mungkin untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.

Meski sudah terlihat sinyal pemulihan ekonomi baik dalam tataran global maupun nasional, DPR dan pemerintah tetap menyikapinya pengelolaan APBN 2022 dengan kehati-hatian. Dalam tataran global, sinyal pemulihan antara lain terlihat pada *Purchasing Managers Index (PMI)* 2021 yang terdeteksi berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi lainnya juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara.

Sinyal pemulihan tersebut diharapkan terus berlanjut pada tahun 2022. Berdasarkan berbagai perkembangan indikator ekonomi, Bank Dunia melalui *World Economic Outlook* bulan Juli 2021 memperkirakan, perekonomian global 2022 akan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9%. Indonesia sendiri diproyeksikan akan tumbuh di kisaran 5,0-5,5%.

Kondisi perekonomian pada 2022 akan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya

**Meski sudah terlihat sinyal pemulihan ekonomi baik dalam tataran global maupun nasional, DPR dan pemerintah tetap menyikapinya pengelolaan APBN 2022 dengan kehati-hatian**

konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.

Penanganan covid-19 yang dilakukan secara komprehensi dan masif yang disertai akselerasi vaksinasi serta menjaga protokol kesehatan, secara simultan akan mampu meningkatkan *confidence* masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi. Hal ini diharapkan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga.

Keberhasilan tahun anggaran 2022 sangat penting mengingat sebagai periode terakhir pemberlakuan relaksasi defisit fiskal. APBN 2022 harus jadi momentum, dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Berdasarkan berbagai kondisi dan kebutuhan mencapai target pembangunan, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati sejumlah asumsi makro dalam menyusun APBN 2022 dengan tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Berdasarkan tema ini, DPR RI dan pemerintah sepakat, penyusunan APBN 2022 didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8%, laju inflasi sebesar 3 plus minus 1% dan tingkat bunga Surat Utang Negara tenor sepuluh tahun 6,32%-7,27%.

**DPR RI dan pemerintah sepakat, penyusunan APBN 2022 didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8%, laju inflasi sebesar 3 plus minus 1% dan tingkat bunga Surat Utang Negara tenor sepuluh tahun 6,32%-7,27%.**

Selain itu, nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar 13.900- 14.800 per US\$. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP US\$- US\$ 70 per bare. Lifting minyak bumi 686.000-750.000 barel per hari (bph) dan *lifting* gas bumi sebesat 1.031-1.200 juta barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD).

Selain asumsi makro itu, ditetapkan pula target pembangunan yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-6,3%, tingkat kemiskinan 8,5-9%, rasio gini 0,376-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46, nilai tukar petani pada kisaran 103-105 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 104-106.

## Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

Atas dasar indikator makro tersebut ditetapkan pokok-pokok kebijakan fiskal 2022 yang antara lain adalah memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonom, memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan.

Selain itu mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural (UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal, serta optimalisasi pendapatan dan penguatan *spending better* serta inovasi pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, pemerintah diminta untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta dengan tetap berlandaskan optimalisasi penerimaan negara dari perpajakan dan PNBPN.

Untuk itu, pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat. Basis perpajakan harus lebih diperluas melalui ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Inovasi penggalan potensi perpajakan harus lebih dikembagkan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Di bidang belanja negara, penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja harus ditingkatkan. Melakukan optimalisasi teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan. Selain itu melakukan redesain sistem penganggaran dengan menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik dengan konsep *result based* dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan atau dikenal *automatic stabilizer*.

Kebijakan belanja subsidi diarahkan lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga

**Dari sisi kebijakan pendapatan negara, pemerintah diminta untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta dengan tetap berlandaskan optimalisasi penerimaan negara dari perpajakan dan PNBPN.**

dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dapat terwujud. Arah kebijakan belanja subsidi terutama melalui integrasi subsidi energi dengan bantuan sosial secara bertahap serta penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani e-RDCK penerima subsidi dengan basis data NIK dan alamat (*by name by address*).

Selain itu, kebijakan belanja negara ditujukan untuk memperluas akses permodalan UMKM dan koperasi melalui subsidi bunga KUR, menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, dan pemberian insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Terkait dengan meningkatkan belanja negara untuk TKDD dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal maka perlu upaya mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing* Kemudian memperkuat sinergikan anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan SDM (terutama sektor pendidikan dan kesehatan). Selanjutnya melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS).

## Anggaran Sektor Ketahanan Pangan

Dalam rangka mencapai target pembangunan, sektor ketahanan pangan termasuk yang mendapat prioritas tinggi dalam pembiayaan APBN 2002. Berdasarkan data Nota Keuangan beserta RAPBN 2022, sektor ini mendapat alokasi Rp 76,9 triliun. Sebagian besar dari anggaran ini dialokasikan melalui belanja kementerian dan lembaga (K/L) seperti Kementerian Pertanian dan KKP dan Kementerian PUPR terkait irigasi pertanian. Belanja non-K/L antara lain dialokasikan untuk subsidi pupuk, subsidi bunga kredit resi gudang, dan antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga pangan.

Sasaran yang hendak dicapai melalui anggaran sektor pangan ini antara lain adalah mencapai target nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) masing-masing pada kisaran 102-104 dan 102-105 pada tahun 2022.

Sesuai dengan alokasi anggaran ketahanan pangan 2022 tersebut pemerintah menargetkan sejumlah sasaran strategis dengan meningkat produksi komoditas pangan antara lain; produksi padi 57,5 juta ton, jagung 26,0 juta ton, daging sapi dan kerbau (karkas) sebanyak 0,59 juta ton. Kemudian



***Rachmat Gobel bersama dengan Menteri Pertanian Yasin Limpo membahas mengenai ketahanan pangan di Indonesia***

bantuan kapal perikanan sebanyak 75 unit, bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan 1.000 unit, pengembangan 10 korporasi nelayan.

Untuk infrastruktur ditargetkan pembangunan jaringan irigasi seluas 5.000 hektare, pembangunan bendungan lanjutan 33 unit dan bendungan baru 4 unit, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 hektar oleh pusat dan 93.330 hektar oleh daerah, pengembangan 200 unit lumbung pangan, 66 pelabuhan perikanan, dan 90 balai benih di daerah.

Rencana kerja strategis untuk mencapai target tersebut antara lain meningkatkan efektivitas program Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*), mengarahkan subsidi pupuk lebih tepat sasaran melalui penggunaan Kartu Tani. Mendorong restorasi lahan gambut, perlindungan hutan, pengelolaan air, pengendalian aktivitas pembakaran hutan, dan promosi praktik pertanian berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah melakukan perbaikan kebijakan terkait importasi produk pangan strategis dengan meningkatkan akurasi data produksi pangan nasional dan alokasi impor dengan menggunakan Neraca Komoditas pada *Sistem Indonesia National Single Window* (INSW).





# Usul Pemutihan

Kredit Macet Usaha Mikro Bawah Rp10 juta



**Rachmat Gobel**

*Wakil Ketua DPR RI*

**Akibat pandemi Covid-19** banyak usaha yang tutup sehingga **tak bisa bayar pinjaman. Pemutihan perlu dilakukan** agar **perekonomian masyarakat** di masa pandemi ini kembali menggeliat.



## Anggaran Sektor Koperasi dan UMKM

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk klaster dukungan UMKM adalah sebesar Rp 95,87 triliun. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program lainnya untuk mendukung UMKM, seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.



*Rachmat Gobel bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membahas mengenai efektifitas penyerapan anggaran untuk pengembangan UMKM.*

Rachmat Gobel memberi perhatian besar terhadap anggaran untuk sektor UMKM ini. Ia meminta agar realisasi dan penyerapan dana untuk sektor ini harus lebih ditingkat. Sering terjadi, selama ini serapannya tergolong lambat dan rendah.

“Sangat disayangkan rendahnya realisasi dukungan KUMKM padahal sektor ini memiliki peran yang besar terutama dalam pemulihan ekonomi. Ini terjadi karena belum ada *conductor* yang kuat dalam menyatukan kebijakan pengembangan KUMKM. Ini lah yang membuat pengembangan KUMKM tidak jelas” kata Rachmat Gobel.

Keprihatinan Rachmat Gobel tersebut bisa dipahami karena realitanya memang penyerapan anggaran UMKM sering terhambat. Tidak hanya dana dari Pemulihan Ekonomi Nasional, realisasi dana dari K/L pun rendah. Sebagai gambaran, untuk 2021 dari Rp 162,40 triliun alokasi PEN untuk UMKM dan korporasi, sampai Oktober baru terserap Rp 78,73 triliun atau baru 48,5% dari pagu. Sementara secara keseluruhan realisasi realisasi PEN sudah 65% atau Rp 483,91 triliun dari pagunya Rp 744,77 triliun. Ini berarti, realisasi dukungan KUMKM ini terendah di antara kluster lainnya.

## Anggaran Sektor Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk menggerakkan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Dalam jangka pendek, sektor ini akan menjadi motor penggerak ekonomi dari sisi permintaan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur berkontribusi di sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa sehingga tercipta efisiensi ekonomi.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pada APBN 2022 dengan alokasi direncanakan Rp 384,78 triliun. Anggaran ini dikelola oleh pemerintah pusat sebesar Rp170,3 triliun yaitu melalui K/L sebesar Rp 164,25 triliun dan non K/L sebesar Rp 6,09 triliun. Sisanya, Rp 119,19 triliun disalurkan melalui TKDD dan Pembiayaan Anggaran sebesar Rp95,2 triliun.

Melalui anggaran sebesar itu pemerintah antara lain menargetkan pembangunan bidang pelayanan dasar berupa rumah susun 3,501 unit dan rumah khusus 2.250 unit, akses sanitasi dan persampahan bagi 114.124 KK,



*Rachmat Gobel bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono membicarakan mengenai anggaran infrastruktur di tengah pandemi covid-19*

bendungan 37 unit (33 unit lanjutan dan 4 unit baru), serta pembangunan jaringan irigasi seluas 5.000 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 ha.

Meningkatkan konektivitas dalam bentuk pembangunan jalan sepanjang 205 km, pembangunan jembatan sepanjang 8.244 m, pembangunan jalur kereta api sepanjang 6.624 km, dan pembangunan bandara baru pada 6 lokasi. Untuk bidang energi dan ketenagalistrikan dalam bentuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 10.000 SR dan pembangunan PLTS *Rooftop* dengan total kapasitas 2,52 MW.

Di bidang teknologi informasi dalam bentuk pembangunan 2.344 BTS baru dan penyediaan akses internet sebanyak 9.463 titik (*existing*) khususnya di daerah 3T, penyediaan kapasitas satelit sebesar 25 Gbps, dan Utilisasi Palapa Ring dengan target rata-rata 41,6%.

## Anggaran Sektor Pariwisata

Pada tahun 2022, bidang pariwisata akan tetap menjadi prioritas untuk mendukung pulihnya perekonomian nasional. Hal ini dipertegas dalam arah kebijakan dan Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2022. Anggaran bidang pariwisata direncanakan sebesar Rp 9,231 triliun yang tersebar pada beberapa pos lembaga dan kementerian.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebijakan bidang pariwisata yaitu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada aspek 3A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) dan 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta). Kemudian percepatan pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Dana juga dialokasikan untuk peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; pemulihan pasar pariwisata; dan *Rebranding* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menghadapi pandemi covid-19 menuju pasar pariwisata yang tangguh (*resilient*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

## Anggaran Sektor Industri

Pemerintah optimistis pertumbuhan industri pada tahun 2022 akan mampu menyentuh di angka 5-5,5% apabila tidak terjadi gelombang besar kasus Covid-19 di tanah air. Oleh karena itu, berbagai program dan kebijakan strategis yang mendukung laju kinerja sektor industri terus digulirkan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pada triwulan II tahun 2021, sektor industri manufaktur berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,91%, meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.

Kebijakan belanja Kementerian Perindustrian pada tahun 2022 akan mendorong belanja untuk pemulihan industri yang terdampak Covid-19, implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penumbuhan industri substitusi impor, peningkatan produktivitas dan kompetensi SDM, serta akselerasi investasi di sektor industri.

Semula alokasi APBN 2022 untuk sektor perindustrian hanya Rp 2,61 triliun, namun kemudian ditingkatkan Rp 2,86 triliun. Sebagian besar bersumber dari rupiah murni (85,96%), PNB/BLU (9,51%) dan SBSN (4,54%). Dari total anggaran tersebut sebanyak 43% dialokasikan untuk membiayai prioritas

nasional, 30,5% untuk belanja pegawai, 13,8% untuk belanja operasional, dan 12,7% untuk kegiatan reguler.

Kebijakan Kementerian Perindustrian pada tahun 2022 selain diarahkan pada upaya pemulihan industri pasca Covid-19, juga akan difokuskan pada implementasi program upaya penurunan impor bahan baku dan barang jadi sektor industri dengan target substitusi impor sebesar 35 % pada tahun 2022.

Adapun kegiatan dan output prioritas nasional pada tahun 2022 antara lain Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) melalui Fasilitasi Sertifikasi TKDN Produk industri dalam negeri, penguatan koperasi dan UMKM melalui pengembangan sentra IKM, penumbuhan wirausaha baru, dan mesin/peralatan IKM.

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi melalui Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, Pengembangan *Center Of Excellence* Industri Alat Kesehatan, Fasilitasi Pendampingan Industri dalam rangka implementasi Industri 4.0, serta Pengembangan Investasi Kawasan Industri Prioritas dan Kawasan Industri Halal.





**Tujuan politik  
Partai NasDem adalah  
meraih kemenangan pada  
Pilpres, Pileg  
dan Pilkada 2024, guna  
mewujudkan kesejahteraan  
bagi seluruh  
rakyat Indonesia**





# BAB XI

## TEKAD RACHMAT GOBEL BAGI KEMENANGAN NASDEM DI SULAWESI

**R**ACHMAT Gobel, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang juga adalah Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum legislatif 2024 mendatang di wilayah Sulawesi adalah, para kader NasDem agar senantiasa memegang komitmen tercapainya kesejahteraan rakyat serta memiliki semangat militansi yang tinggi.

*"Tujuan politik Partai NasDem adalah meraih kemenangan pada Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024, guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,"* kata Rachmat Gobel.

Untuk itu dalam pesannya kepada para kader NasDem yang ditemuinya, dia selalu meminta agar prinsip tersebut senantiasa menjadi pegangan para kader di wilayah Sulawesi.

Selain itu juga bagi Rachmat Gobel pentingnya para kader memiliki semangat militansi untuk membangun partai NasDem sebagai partai yang maju dan moderen selain juga menekankan politik NasDem yang berorientasi pada pembangunan.

Bagi Rachmat Gobel hal ini merupakan hal wajar yang harus dimiliki para kader, karena sebagai mesin partai, para kader memiliki peran yang penting dan strategis dalam memenangkan pemilihan legislatif 2024 mendatang.

Ketika memberikan pengarahannya dalam Workshop Nasional Fraksi NasDem di kota Makassar, Sulawesi Selatan, 24-26 September 2021, Rachmat Gobel mengatakan kepada para pengurus partai, pengurus sayap, badan partai dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Partai NasDem se-Sulawesi, untuk mencapai target dan menjadikan Partai NasDem sebagai partai pemenang Pemilu, sesuai tekad dan harapan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh.

Ada beberapa poin yang harus dilaksanakan:

- A. Menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) untuk mengukur kinerja partai. Dia mengutarakan setidaknya terdapat enam indikator:
  - Membangun identitas partai, dan menambah jumlah perolehan kursi dewan;
  - Membangun ketokohan dengan terus berjuang bersama rakyat;
  - Membangun kekuatan, jejaring, struktur dan meningkatkan kapasitas kader sampai ke pelosok tanah air;
  - Membangun jejaring eksternal;
  - Meningkatkan keterikatan dengan konstituen;
  - Fokus pada tema tertentu, sesuai dengan daerah masing-masing.
- B. Meningkatkan kohesivitas antara anggota dalam suatu kelompok, dimana dalam Partai NasDem kohesivitas mencakup:
  - Internal struktur;
  - Struktur dengan eksekutif;
  - Struktur dengan legislatif;
  - Struktur dengan sayap dan badan; serta
  - Struktur dan kader.

Rachmat Gobel menggambarkan bagaimana dalam Pileg 2019, Partai NasDem telah menghasilkan 59 kursi di DPR RI, 186 kursi DPRD Provinsi dan 1.629 kursi DPRD Kabupaten/Kota, sehingga total jumlah anggota legislatif dari Partai NasDem di seluruh wilayah Indonesia hasil Pemilu 2019 sebanyak 1.864 anggota (naik 24,1%) jika dibandingkan dengan pemilu 2014.

Rachmat Gobel menegaskan berdasarkan usulan dari DPW Partai NasDem seluruh Indonesia, Partai NasDem menargetkan 111 kursi DPR RI, 329 kursi DPRD Provinsi dan 2.469 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

Sedangkan bagi kemenangan Partai NasDem di wilayah Sulawesi, Rachmat Gobel memaparkan beberapa target yang telah direncanakan bagi peraihan suara dalam Pileg 2024.

## Provinsi Gorontalo

Untuk provinsi Gorontalo yang adalah daerah pemilihan Rachmat Gobel, dia mengatakan optimismenya Partai NasDem di Gorontalo bisa memenangkan posisi gubernur dan parlemen dalam Pemilu 2024. NasDem Gorontalo menargetkan minimal meraih dua kursi di DPR RI."

Caranya, adalah dengan terus bekerja keras dan berbuat yang terbaik di masyarakat," ujar Rachmat Gobel. Menurut Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu, NasDem Gorontalo memikirkan konsep yang sudah berjalan di masyarakat.

Bagi Rachmat Gobel, untuk meraih kesuksesan perolehan kursi di provinsi Gorontalo, baik di DPR RI, Provinsi, Kabupaten/Kota. Untuk meraih tujuan tersebut Rachmat Gobel melakukannya melalui peningkatan pembangunan di daerah guna melayani masyarakat dan bisa memberikan nilai tersendiri kepada masyarakat. Menurut Rachmat Gobel, pembangunan bukan hanya sekedar membangun sebuah rumah atau bangunan. Tetapi bagaimana bisa membangun kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke depan.

Ketika membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai NasDem Gorontalo 31 Maret 2021 di kota Gorontalo, Rachmat Gobel meminta seluruh pengurus maupun anggota DPRD dari Partai NasDem untuk memahami tujuan berpartai dan berpolitik.

Menurut Rachmat Gobel, berpolitik bukan hanya sekedar berkumpul untuk memenangkan calon melainkan bagaimana bisa memberi dan melayani masyarakat melalui partai politik.

Bagi masyarakat Gorontalo, langkah politik NasDem dan Rachmat Gobel, sangat diterima dan didukung penuh oleh berbagai kalangan masyarakat di sana. Hal ini, karena masyarakat melihat hampir setiap program Rachmat Gobel, menyentuh kebutuhan masyarakat, baik masyarakat yang lemah maupun masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi.

**Untuk meraih tujuan tersebut Rachmat Gobel melakukannya melalui peningkatan pembangunan di daerah guna melayani masyarakat dan bisa memberikan nilai tersendiri kepada masyarakat.**



***Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo, di kota Gorontalo, 31 Maret 2021.***

Dalam membangun Gorontalo Rachmat Gobel fokus kepada tiga sektor, yakni sektor pertama, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sedangkan sektor kedua, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ketiga, sektor pangan dan herbal. Dengan gagasan ini, Rachmat Gobel mengajak kader Partai NasDem untuk menjalani laku politik pembangunan. Menurut dia politik pembangunan adalah politik gagasan sesuai dengan visi Partai NasDem sebagai partai yang mengusung restorasi.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu basis Partai NasDem yang memperoleh kemenangan tertinggi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam Pileg 2019 lalu perolehan kursi Partai NasDem naik signifikan. Pada Pemilu 2014 hanya memiliki 1 kursi DPRD, dalam Pemilu 2019 Partai NasDem di Gorontalo memiliki 1 kursi DPR RI yang diraih oleh Rachmat Gobel, 6 kursi DPRD Provinsi



*Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, mengenakan jaket Partai NasDem kepada kader yang baru bergabung dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo, di kota Gorontalo, 31 Maret 2021.*

dan 17 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Dengan perolehan ini mengantarkan Partai NasDem menempati urutan kedua dengan jumlah suara 169.509 setelah Golkar yang menempati urutan pertama dengan perolehan suara 194.660.

Adapun perolehan 17 kursi DPRD Kabupaten/Kota tersebar di Kabupaten Bone Bolango 6 kursi, di Kabupaten Gorontalo 4 kursi, Kabupaten Gorontalo Utara 5 kursi dan di Kabupaten Boalemo 2 kursi, sedangkan di Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo NasDem belum memperoleh kursi.

Legislator NasDem dari daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo itu juga mengatakan, untuk Pemilu 2024 menargetkan perolehan kursi untuk DPR RI 2 kursi, DPRD Provinsi Gorontalo meraih 10 kursi, sedangkan seluruh kabupaten/kota memiliki 24 kursi DPRD.

Untuk menghadapi Pilkada serentak 2024 mendatang Rachmat Gobel sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Wilayah Sulawesi meminta kepada seluruh fungsionaris Partai NasDem Gorontalo agar mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024 dan sekaligus memenangkannya dengan target Gubernur Provinsi Gorontalo, 5 Bupati dan 1 Wali Kota.

## Pendidikan kader Untuk Memperkuat Partai NasDem di tanah leluhur

(Naskah isi merupakan bagian tulisan Ahmad Baidowi AR, sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Partai NasDem)

Desain struktur organisasi partai hasil Kongres II memperlihatkan keseriusan Partai NasDem membenahi tata kelola organisasi partai. Melalui Peraturan Partai No. 1/2020, seluruh jajaran pengurus diminta untuk membentuk struktur organisasi partai berdasarkan kebutuhan wilayah, melakukan penguatan kapasitas struktur yang dinilai masih potensial, dan mengelola struktur secara lebih profesional. Keseriusan mengelola struktur ini, menurut Hofmeister dan Grabow (2011) menjadi bukti konkret bahwa Partai NasDem sedang berproses menjadi salah satu partai modern yang mengedepankan tata kelola organisasi partai yang permanen dan stabil.

Mengacu pada peraturan di atas, DPW Gorontalo kemudian menyusun struktur pengurus yang baru dari tingkat wilayah sampai ranting. Proses pembentukan struktur telah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal mendasar seperti aspek kesediaan, militansi, tanggung jawab, lama



*Pengurus DPW Partai NasDem yang Baru dilantik Periode 2021-2024 bersama dengan Koordinator Teritorial Pemenangan Pemilu Sulawesi Partai NasDem Rachmat Gobel*

mengabdikan di partai, dan lain sebagainya. Di satu sisi aspek-aspek ini diperlukan untuk memastikan komitmen kader saat bertugas sebagai pengurus, namun di lain sisi masih kurang karena belum menyentuh aspek kapasitas kader dan persesuaiannya dengan potensi daerah. Seorang pengurus NasDem, harus memiliki "kemampuan lebih" dalam memahami kebutuhan daerah dan menerjemahkannya ke dalam program-program konkret.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Tim ABN yang dipimpin oleh Ahmad Baidowi AR bersama dengan Rachmat Gobel merealisasikan sebuah pendekatan yang lebih ilmiah dan kontekstual yakni pemetaan (*profiling*) kapasitas struktur dan potensi daerah berdasarkan analisis kebijakan publik. Pendekatan ini mensyaratkan studi data dan dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Struktur partai yang sudah terbentuk kemudian dievaluasi berdasarkan kapasitas pengurus dan isu-isu prioritas yang muncul dalam kebijakan pemerintah daerah.

Pendekatan ini bertujuan memudahkan struktur partai dalam menentukan figur pengurus yang tepat berdasarkan pemetaan kapasitas pengurus dan isu-isu prioritas daerah. Tanpa pemetaan jelas, besar kemungkinan terjadi pendistribusian posisi yang tidak sesuai kebutuhan struktur. Model pendekatan merupakan fondasi awal sebuah tata kelola partai yang lebih profesional. Sebab jika pendekatan ini diterapkan secara serius maka akan menutup celah dominasi dari kelompok-kelompok pragmatis, dan sebaliknya memberi kesempatan kepada kader terpilih untuk mengembangkan partai. Kader terpilih adalah individu yang tidak terikat pada jaringan patron-klien tertentu, dan bebas intervensi kelompok dominan. Tapi mereka punya kapasitas mumpuni untuk menjalankan mesin partai dan mengembangkan potensi daerah masing-masing.

Tim ABN Partai NasDem menawarkan skema *profiling* pengurus dengan pendekatan

***Profiling ini bertujuan memudahkan struktur partai dalam menentukan figur pengurus yang tepat berdasarkan pemetaan kapasitas pengurus dan isu-isu prioritas daerah. Tanpa pemetaan jelas, besar kemungkinan terjadi pendistribusian posisi yang tidak sesuai kebutuhan struktur.***



*Penyerahan Bendera Pataka Partai NasDem dari Koordinator Teritorial Pemenangan Pemilu Sulawesi Partai NasDem Rachmat Gobel kepada Ketua DPW Partai NasDem yang Baru Periode 2021-2024 Hamim Pou tanggal 30 Juli 2021 di Grand Palace Convention Center, Gorontalo yang dihadiri oleh Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem Kabupaten/ Kota serta kader Partai NasDem (Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota)*



**Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem provinsi Gorontalo sedang mengikuti profiling dari tim ABN yang dipimpin oleh Ahmad Baidowi AR**

yang lebih kontekstual melalui serangkaian proses yang disebut sebagai *profiling and in-house training* (PIHT); model pelatihan yang didesain Tim ABN untuk mengevaluasi kapasitas pengurus dan menganalisis potensi daerah di Gorontalo. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari di masing-masing tempat (DPW dan DPD). Fokus utama kegiatan ini antara lain: (1) melakukan validasi data pemetaan kapasitas pengurus, (2) membuat *roadmap* potensi daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan pemerintah daerah, dan (3) mendesain tupoksi pengurus dan program kerja masing-masing bidang.

Saat ini struktur DPW dan DPD se Gorontalo telah selesai di *profiling* atas kehendak dan keinginan kuat Rachmat Gobel demi mewujudkan NasDem sebagai partai modern yang pro pada kebijakan publik. Hasil dari *profiling* memperlihatkan kemajuan yang signifikan dari para kader di semua lini struktur untuk bekerja secara cerdas dan berkesinambungan. Laporan bulanan menjadi lebih mudah didapatkan, bahkan pola pelaporan kegiatan berpartai menjadi lebih terbuka dan transparan untuk diketahui oleh masyarakat.

## Provinsi Sulawesi Selatan

Sementara untuk provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Rachmat Gobel selaku Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, menargetkan NasDem sebagai partai pemenang Pileg 2024. Adapun perinciannya adalah untuk DPR RI semula 4 kursi menjadi 6 kursi, DPRD Provinsi dari 12 kursi menjadi 16 kursi, sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota, semula 105 kursi menjadi 172 kursi.

Rachmat Gobel meminta agar seluruh pengurus dan kader NasDem Sulawesi Selatan berjuang dan bekerja keras pada Pileg 2024 mendatang. *"Tidak ada suatu kesuksesan tanpa bekerja keras dan berkeringat. Semuanya harus bersatu padu meraih kemenangan,"* kata Rachmat Gobel.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel, menjelaskan bagaimana pengalaman Partai NasDem dalam mengikuti Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020.



**Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, ketika memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan, di kota Makassar, 29 Maret 2021.**

Pengalaman tersebut menjadi bekal yang cukup bagi NasDem. Partai NasDem ada pada kisaran 3 (tiga) besar pemenang pilkada, untuk itu dia menekankan, pada Pilkada serentak 2024, prestasi partai NasDem untuk meraih kemenangan di Sulsel harus ditingkatkan lagi. *"Selaku Ketua Pemenangan Sulawesi saya minta kepada seluruh fungsionaris partai untuk segera mempersiapkan kader-kader terbaik yang ada di Sulsel,"* kata Rachmat Gobel.

Kepada para kader Partai NasDem di Sulsel, Rachmat Gobel menekankan NasDem Sulsel harus menjadi pemenang Pilkada 2024 di 24 Kabupaten/Kota. Terutama menurut dia, pada Pilkada 2024 nanti, target pemilihan Gubernur Sulsel dimenangkan oleh kader terbaik dari Partai NasDem.

Sesuai keputusan Rakorsus, Rachmat Gobel meminta agar segera membenahi dan memperkuat Struktur Organisasi baik DPW/DPD/DPC/DPRT. Dia juga mengapresiasi upaya DPW Sulsel yang menargetkan untuk



***Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, bersama pengurus DPP Partai NasDem dan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan, dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)***

merampungkan pembenahan struktur partai sesuai dengan peraturan partai No 1 Tahun 2020 100% disertai E- KTA nya, sesuai target DPP Partai NasDem Juni 2021. Apresiasi lainnya adalah telah tersebarnya papan nama, bendera NasDem yang telah tersebar di seluruh desa-desa di Sulsel.

*"Program ini sangat strategis untuk mencapai kemenangan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kinerja Partai NasDem Sulsel patut menjadi contoh untuk DPW lainnya di seluruh Sulawesi,"* kata Rachmat Gobel.

Ada program-program khusus NasDem untuk Sulsel dalam meraih perhatian masyarakat bagi pemenangan NasDem di sana. Sebagai contoh di kota Makassar akan diberikan 10 program "Kotaku" (Kota Tanpa Kumuh), sedangkan untuk Kabupaten/Kota lainnya akan menyusul.

Program lainnya adalah "Pisew" (Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah), seperti pembangunan jembatan, jalan yang menghubungkan dari desa ke desa untuk pengembangan ekonomi. Program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), pengembangan koperasi dan pertanian serta lainnya. Rachmat Gobel menghimbau agar program-program tersebut memberikan dampak maksimal bagi pemenangan partai di provinsi Sulsel, dan menyarankan agar pengelolaannya melibatkan struktur partai dan anggota legislatif di wilayahnya masing-masing.

## Provinsi Sulawesi Utara

Untuk Sulawesi Utara terbilang istimewa. Pada Pemilu Legislatif 2014, Partai NasDem tidak memiliki kursi DPR RI untuk dapil Sulawesi Utara, namun di Pileg 2019, NasDem Sulut meraih 2 kursi untuk DPR RI. Partai NasDem bertekad akan menjadi partai nomor satu di Sulawesi Utara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Tentu saja pencapaian di Pileg 2019, memompa semangat para kader agar menjadi nomor satu di provinsi pada Pilpres, Pileg, Pilkada 2024.

Rachmat Gobel sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, dalam Rakorwil DPW Partai NasDem Sulawesi Utara 26-27 Mei 2021 lalu. Rachmat Gobel memberikan arahan serta target perolehan untuk Pileg 2024 sebagai berikut:

- DPR RI, dalam Pileg 2019 memperoleh 2 kursi untuk dipertahankan menjadi 2 kursi (tetap).
- DPRD Provinsi semula 9 kursi menjadi 12 kursi.

- DPRD Kabupaten/Kota, perolehan sebelumnya 55 kursi menjadi 65 kursi.  
Rachmat Gobel, selaku Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem juga mengingatkan kepada seluruh fungsionaris partai agar mempersiapkan kader-kader terbaik yang ada di seluruh Sulawesi Utara untuk menghadapi dan memenangkan Pilkada serentak 2024.

“Saya minta NasDem menjadi pemenang Pilkada 2024 di Sulawesi Utara,” kata Rachmat Gobel dalam sambutannya.

Rachmat Gobel sendiri sepakat dalam Pemilu 2024, Partai NasDem dihadapkan kepada tantangan yang cukup besar. Menurut dia ada 2 hal utama yang dihadapi yaitu:

- Pertama, bagaimana mempertahankan perolehan Pileg 2019 dan memenangkan kembali kepala daerah yang sebelumnya dimenangkan oleh Kader NasDem.
- Kedua bagaimana NasDem Sulut merumuskan strategi untuk memperoleh basis suara pada Pemilu 2024.



*Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, bersama pengurus dan kader DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Utara,*



*Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, memberikan sambutan dalam silaturahmi bersama tokoh masyarakat kota Bitung, November 2020.*

## Provinsi Sulawesi Barat

Perhatian khusus dari DPP Partai NasDem dalam memenangkan Pemilu 2024 di wilayah Sulawesi sangat besar. Berbagai strategi dan target telah dilakukan, salah satunya adalah menghidupkan dan menggerakkan mesin-mesin kemenangan partai yang ada.

Partai Nasdem bertekad untuk memenangkan Pemilu Serentak 2024, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Oleh karena itu berdasarkan mandat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, mantan Gubernur Sulbar dua periode Anwar Adnan Saleh ditunjuk sebagai Ketua DPW Nasdem Sulbar.



***Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, sedang berbicara dengan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, ketika menghadiri acara Pelantikan dan Rakorwil DPW Partai NasDem Sulbar, di kota Makassar, 24 – 26 September 2021.***

Rachmat Gobel mengatakan, dia meyakini dibawah kepemimpinan Anwar Adnan Saleh sebagai Ketua DPW Sulbar, konsolidasi seluruh kekuatan partai menghadapi tugas dan fungsi NasDem sebagai partai politik, khususnya untuk menghadapi Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024 dan Pilkada serentak 2024 mendatang akan berjalan dengan sukses sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

“Pak Adnan politisi berpengalaman dan sukses sebagai Gubernur Sulbar dua periode. Tentunya dengan pengalaman yang ada, dapat membawa kesuksesan bagi Partai NasDem Sulbar yang dipimpinnya,” tegas Rachmat Gobel.

Dalam arahnya di Rakorwil DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat 24-26 September 2021 lalu di Makassar, Sulawesi Selatan, sesuai target kemenangan NasDem di wilayah Sulawesi, NasDem Sulbar harus menjadi pemenang Pileg 2024, dengan memperoleh target kursi sebagai berikut:

- DPR RI, semula 1 kursi dipertahankan tetap menjadi 1 kursi;
- DPRD Provinsi, semula 6 kursi menjadi 7 kursi;
- DPRD Kabupaten/Kota semula 20 kursi menjadi 24 kursi.



*Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, memberikan sambutan dalam acara Pelantikan dan Rakorwil DPW Partai NasDem Sulawesi Barat, di kota Makassar, 24 – 26 September 2021.*

Ketua DPW NasDem Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh mengatakan dengan dipercayakannya memimpin NasDem Sulbar, Anwar bertekad untuk memenangkan perhelatan politik 2024 di enam Kabupaten Sulbar

“Saya masih ingin memperjuangkan kemajuan Sulbar. Apapun akan saya korbakan. Saya ingin membesarkan NasDem di Sulbar, sehingga saya menerima amanah sebagai Ketua NasDem Sulbar,” tegasnya.

## Provinsi Sulawesi Tenggara

Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, mengatakan optimismenya bahwa Partai NasDem akan meraih kemenangan di provinsi Sultra. Hal ini dia melihat sejalan dengan semakin gencarnya mesin pemenangan partai yang dia pimpin untuk meraih kemenangan dalam Pilkada 2024 mendatang.

“Kami sangat yakin Partai NasDem akan memenangi Pilkada di Sultra 2024 mendatang, karena semakin kuatnya konsolidasi partai dan

meningkatnya militansi para kader di sini serta tekad yang besar dari para kader dan pengurus partai baik pengurus di DPW/DPD/DPC/DPRT, jelas Ali Mazi yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara.

Sejalan dengan Ali Mazi, Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel mengatakan target kursi untuk perolehan kemenangan Pileg 2024 di Sulawesi Tenggara adalah kursi DPR RI yang sebelumnya memperoleh 1 kursi, menjadi 2 kursi. DPRD Provinsi dari 5 kursi menjadi 6 kursi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2019 meraih 55 kursi ditargetkan meningkat menjadi 65 kursi.

Perolehan ini tidak muluk, karena merupakan target dengan perolehan suara yang signifikan dengan melihat kondisi yang ada sekarang. Namun Rachmat Gobel mengingatkan para kader NasDem di Sultra, perolehan tersebut harus dibarengi pula dengan bekerja keras.

"Tidak ada cerita, semua kesuksesan dan keberhasilan hanya bisa diraih dengan ketekunan dan kerja keras," kata Ketua Pemenangan NasDem Sulawesi itu.



*Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, bersama kader Partai NasDem di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Oktober 2020.*



*Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, bersama kader Partai NasDem di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Oktober 2020.*

## Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam menghadapi Pileg 2024, Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) optimis peraihan suara akan lebih baik dibandingkan dengan Pileg periode sebelumnya. Hal ini mengingat perolehan suara Partai NasDem di provinsi tersebut dalam Pilkada 2020 sangat signifikan.

Pada Pilkada 2020, NasDem di wilayah Sulteng berhasil mengantar Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir menjadi pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng.

Selain itu, NasDem juga menang di Kabupaten Toli-toli, Tojo Una-una, Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai. Kemudian pada Pileg 2019, NasDem berhasil meraih kursi Ketua DPRD Sulteng yang saat ini dijabat oleh Nilam Sari Lawira.

Tidak mengherankan Provinsi Sulteng menjadi basis utama Partai NasDem, berdasarkan prestasi yang diraih dari hasil pemilu dan pilkada.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Wilayah Sulawesi, Rachmat Gobel, mengatakan kader dan pengurus serta simpatisan NasDem Sulawesi Tengah bertanggung jawab besar untuk memenangkan Pemilu 2024. *"Tanggung jawab berada di punggung semua kader dan pengurus Partai Nasdem di Sulteng. Semua kader bertanggung jawab menangkan NasDem di Pileg dan Pilkada,"* kata Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel mengemukakan, semua kader dan pengurus partai termasuk simpatisan harus memiliki komitmen dan cita-cita besar untuk memenangkan NasDem di Pilkada maupun Pileg dengan tetap menjunjung tinggi dan mengedepankan tujuan dari Partai NasDem, untuk membangun kesejahteraan masyarakat lewat gerakan restorasi.

NasDem pada pemilu 2019 berhasil mendapat 65 kursi legislatif terdiri dari satu kursi untuk DPR RI, 7 kursi DPRD Provinsi Sulteng dan 57 kursi di DPRD Kabupaten/Kota. NasDem berhasil meraih posisi Ketua DPRD di empat kabupaten, dan tujuh Wakil Ketua DPRD di tujuh kabupaten.



*Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, ketika kampanye Pilkada Sulawesi Tengah, mendukung Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir, November 2020.*



*Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel, bersama kader Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah, November 2020.*

Untuk Pileg 2024 Rachmat Gobel menyampaikan bahwa seluruh fungsionaris dan kader partai harus bekerja keras untuk mencapai target perolehan 2 kursi DPR RI, 10 kursi untuk DPRD Provinsi dan 70 kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota.

## Rachmat Gobel Sebagai Tokoh Nasional

Sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Wilayah Sulawesi DPP Partai NasDem, Rachmat Gobel tidak hanya memusatkan perhatiannya kepada wilayah Sulawesi saja, namun sebagai salah satu tokoh Nasional, Rachmat Gobel juga diberikan kehormatan untuk berbicara mengenai kondisi wilayah lain di Indonesia. Salah satunya, berbicara dalam Rakorwil DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur yang berlangsung 10-11 Desember 2021, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, selama 2021, Rachmat Gobel telah memberikan perhatian khusus untuk provinsi Nusa Tenggara Timur berupa beberapa program yang telah diperjuangkan dan dilaksanakan

diantaranya bantuan pupuk non subsidi yang diberikan di delapan kabupaten sejumlah kurang lebih 10 ton, bantuan pembangunan irigasi di lima kabupaten dengan jumlah 12 titik, serta bantuan program pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi wilayah (PISEW) yang diberikan di empat Kabupaten se provinsi NTT dengan jumlah empat titik.

Selain itu juga dijelaskan, selaku salah satu pimpinan di DPR RI, Rachmat Gobel telah ditugaskan menjadi Ketua Tim Pengawasan Pembangunan Wilayah Perbatasan, salah satunya wilayah perbatasan yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Motaain, Kabupaten Belu..

Pos Lintas Batas Negara Motaain, adalah salah satu percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara selain di Aruk (Provinsi Kalimantan Barat), dan Skouw (Provinsi Papua) seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 11 Januari 2021.

Rachmat Gobel menjelaskan sebagai Ketua Timwas pembangunan wilayah perbatasan, telah menugaskan Yakobus Jacki Uly (Anggota DPR RI Komisi II Fraksi NasDem) untuk memimpin sebuah tim dalam melakukan kunjungan dan pengawasan ke perbatasan Indonesia-Timor Leste 12-14 November 2021.



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel, memberikan sambutan dan Rakorwil DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur, di Labuan Bajo, NTT, 10 Desember 2021.*



*Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel, bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (kedua dari kiri), Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Timur, Julie Sutrisno Laiskodat (kedua dari kanan), Yakobus Jacki Uly, Anggota DPR RI Fraksi NasDem dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II (kanan), berfoto bersama saat menghadiri Rakorwil DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur, di Labuan Bajo, NTT, 10 – 11 Desember 2021.*

Dalam Rakorwil tersebut Rachmat Gobel mengingatkan kepada seluruh kader NasDem di NTT, agar terus membangun kekompakan dan solidaritas partai dan kader, serta berjuang dengan semangat, nilai-nilai, dan ideologi yang sesuai dengan konstitusi partai untuk memenangkan Partai NasDem dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari rangkaian tulisan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Wilayah Sulawesi, Rachmat Gobel bukan saja milik masyarakat Sulawesi atau Gorontalo, melainkan tokoh nasional yang juga memperhatikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat luar Sulawesi. Bahkan kiprahnya juga dikenal secara luas di dunia internasional. Selain itu, sikap dan perilaku politiknya juga segaris dengan karakter dan dasar kepribadiannya yang selalu bekerja keras dan menikmati prosesnya.



**Menyerap aspirasi di daerah pemilihan  
untuk meningkatkan pembangunan  
di Gorontalo dalam mewujudkan  
menjadi Provinsi 5 Termakmur  
di Indonesia**





# BAB XII

## KUNJUNGAN KERJA RACHMAT GOBEL KE DAERAH PEMILIHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN SIDANG 2020 - 2021

**P**ADA masa reses setiap Anggota DPR RI wajib melakukan kunjungan kerja perorangan ke daerah pemilihannya, sesuai UU MPR, DPR, DPD Dan DPRD (MD3) dan Tatib DPR RI, sebagai Anggota DPR RI dan juga menjadi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel juga melakukan kunjungan ke daerah pemilihan Provinsi Gorontalo yang dilakukan 5 x Reses satu tahun masa persidangan untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya menyerap aspirasi masyarakat dan memenuhi amanat UU yaitu :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3);
2. Peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 61 Tahun 1990;
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;



Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Anggota DPR RI ke Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo dalam rangka Reses tersebut sebagai berikut :

- Penyerapan aspirasi masyarakat di daerah-daerah pemilihan dari wilayah Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten/Kota guna untuk mendengarkan permasalahan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan publik;
- Pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat dan pejabat daerah antara lain Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Akademisi, Organisasi Mahasiswa, Ibu-ibu UKM, PKK, para Kelompok Tani dan Nelayan serta Ketua dan Pengurus Anggota DPW dan DPD Partai NasDem dan Organisasi Sayap dan Badan Partai NasDem di Gorontalo;
- Pertemuan dengan Pejabat dan Dinas-dinas Pemerintah Daerah serta Instansi terkait, untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dalam melaksanakan program pemerintah;
- Penyerapan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat serta mensosialisasikan produk Undang-undang dan Kebijakan yang sedang ataupun yang telah dirumuskan oleh DPR RI maupun Pemerintah;
- Sebagai forum silaturahmi antara Anggota DPR RI dengan masyarakat dan warga setempat serta konstituen di daerah pada umumnya dan di daerah pemilihan pada khususnya;
- Membentuk kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Anggota DPR RI yang mana sudah menipisnya kepercayaan ditengah masyarakat dan membangun citra DPR RI;
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Tugas dan Fungsi Anggota DPR RI sebagai Anggota Legislatif yang bertugas membuat Undang-undang, menetapkan Anggaran dan Pengawasan terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyerapan aspirasi, khususnya yang terkait dalam bidang industri dan pembangunan serta keuangan;
- Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Pengurus dan Anggota Partai NasDem terkait Kepartaian ditingkat DPW, DPD, dan DPC serta DPRT dari daerah pemilihan;
- Sosialisasi tentang Kegiatan dan Kebijakan serta Program Kerja DPP Partai NasDem;

- Melaksanakan Komsolidasi dan koordinasi pada para pejabat Pemerintah Daerah, SKPD serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Gorontalo.

Kunjungan kerja Rachmat Gobel sebagai Anggota DPR RI dari Provinsi Gorontalo dilakukan untuk melihat secara langsung permasalahan yang ada, baik melalui pertemuan dengan masyarakat, dialog, diskusi, audiensi dan tanya jawab serta kunjungan/meninjau secara langsung ke daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian di dapil Provinsi Gorontalo yaitu 5 kabupaten (Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato) dan Kota Gorontalo.

## PELAKSANAAN KEGIATAN RESES

### 1. RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021

Kunjungan reses pertama Rachmat Gobel ke Gorontalo, dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 24 Oktober 2020 ke beberapa Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.

### KABUPATEN GORONTALO

| Hari : Jumat  | Tanggal : 16 Oktober 2020   | Waktu : 13.30 WITA |
|---|---|--------------------|
| Bentuk Kegiatan   | Menghadiri kegiatan pembukaan Demplot penanaman padi dan berdialog dengan para petani di Desa Hurabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. |                    |
| Peserta   | Anggota DPRD Kab. Gorontalo, Dinas terkait, PT. Pupuk Kaltim, Pejabat BNI Kabupaten Gorontalo, Kelompok Tani.   |                    |
| <b>Isu/permasalahan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Panen padi hasilnya kurang maksimal:</li><li>2. Tanah kurang bagus untuk menanam padi, perlu adanya pengolahan tanah.</li></ol> |   |                    |

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :**

1. Memberikan bantuan program Demplot untuk meningkatkan panen para petani;
2. Menargetkan peningkatan panen padi dalam Demplot tersebut yang semula hanya panen 5 ton menjadi 7-9 ton gabah;
3. Program tersebut akan terus diperjuangkan agar tetap terwujud;
4. Program Demplot akan bekerja sama dengan PT. Pupuk Kaltim;
5. BNI akan mendukung terkait permodalan dan pendanaan, melalui Koperasi Jaya Usaha Bersama.



*Rachmat Gobel menghadiri pembukaan Demplot Penanaman Perdana Padi dan Jagung didampingi oleh Dirut. PT. Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi di Desa Hurabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo*



*Rachmat Gobel membuka sekaligus menanam padi perdana pada pembukaan Demplot Padi dan Jagung didampingi oleh Dirut. PT. Pupuk Kaltim dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Desa Hurabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo*

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Hari : Jumat   | Tanggal : 16 Oktober 2020  | Waktu : 13.30 WITA |
| Bentuk Kegiatan  | Pemberian bantuan 1 ton pupuk dan bibit serta penyaluran KUR kepada Kelompok Tani oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Dirut PT. Pupuk Kaltim dan Pejabat Bank BNI Kabupaten Gorontalo. |                    |
| Peserta  | Anggota DPRD Kab. Gorontalo, Dinas terkait, PT. Pupuk Kaltim, Pejabat BNI Kabupaten Gorontalo, Kelompok Tani.  |                    |
| <b>Isu/permasalahan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian pupuk subsidi tidak merata;</li><li>2. Bantuan pupuk subsidi sering terlambat tidak sesuai yang dijadwalkan;</li><li>3. Banyaknya permasalahan pertanian untuk kelompok tani.</li></ol>  |  |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Rachmat Gobel mengajak PT. Pupuk Kaltim untuk berkontribusi dalam meningkatkan pertanian di kabupaten Gorontalo;</li><li>2. Memberikan bantuan pupuk non subsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.</li><li>3. Untuk mengatasi masalah pertanian perlu adanya program <i>Argo Solution</i> yang merupakan program pendampingan intensif kepada petani baik untuk pengolahan tanah maupun budidaya pertanian yang dilakukan secara berkelanjutan.</li></ol> |  |                    |

#### Dokumen Kegiatan



*Kelompok Tani Kab. Gorontalo yang mendapatkan bantuan pupuk non subsidi dari PT. Pupuk Kaltim*



*Rachmat Gobel dan Dirut PT. Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi bersama Kelompok Tani Kab. Gorontalo yang menerima bantuan pupuk non subsidi*



*Rachmat Gobel bersama Dirut. PT. Pupuk Kaltim, Anggota DPRD Kab. Gorontalo, Jajaran Kementerian Pertanian RI, Bank Mandiri dan Kelompok Tani Kab. Gorontalo yang menerima bantuan pupuk non subsidi*

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Hari : Rabu</b>   | <b>Tanggal : 21 Oktober 2020</b>   | <b>Waktu : 09.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>   | Kunjungan dan Pertemuan dengan Calon Penerima Program BSPS dari PUPR di Kabupaten Gorontalo, |                           |
| <b>Peserta</b>   | Anggota DPRD Kab. Gorontalo, Jajaran PUPR, dan masyarakat yang akan menerima bantuan BSPS    |                           |
| <b>Isu/permasalahan:</b>   |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Gorontalo masih banyak yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak, perlu adanya bantuan dari pemerintah;</li> <li>2. Tidak adanya anggaran Pemda untuk bantuan tempat tinggal bagi masyarakat yang kurang mampu.</li> </ol>   |  |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b>   |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingin memastikan bahwa program BSPS benar-benar berjalan dengan baik dan tepat sasaran;</li> <li>2. Program BSPS merupakan aspirasi rakyat yang diperjuangkan oleh Rachmat Gobel di dapilnya;</li> <li>3. Tahun 2020 program tersebut sedang dalam proses pengerjaan agar tepat sasaran sesuai harapan Presiden Joko Widodo dalam mengetaskan kemiskinan di wilayah bagian timur.</li> </ol> |  |                           |

## KABUPATEN GORONTALO

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>Hari : Sabtu</b>   | <b>Tanggal : 17 Oktober 2020</b>   | <b>Waktu : 09.30 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>  | Pertemuan silaturahmi dengan Pengurus Baru DPD Partai NasDem Kota Gorontalo. |                           |
| <b>Peserta</b>  | Pengurus dan kader Partai NasDem Kota Gorontalo.                             |                           |
| <b>Isu/permasalahan:</b>  |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang maksimalnya realisasi program-program partai ke daerah-daerah;</li> <li>2. Kurangnya Sosialisasi</li> </ol>                                  |  |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b>  |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya koordinasi Pengurus DPW/DPD dengan struktur dibawahnya;</li> <li>2. Motivasi kader Partai NasDem oleh Pengurus DPW/DPD setempat</li> </ol> |  |                           |

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>Hari : Rabu</b>  | <b>Tanggal : 21 Oktober 2020</b>   | <b>Waktu : 13.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>  | Pertemuan dan Dialog dengan LSM Gorontalo di Warkop JDS 35 Kota Gorontalo. |                           |
| <b>Peserta</b>  | Pengurus dan Anggota LSM, Pengurus DPD Partai NasDem Kota Gorontalo        |                           |
| <b>Isu/permasalahan:</b><br>Banyaknya program pemerintah yang diselewengkan   |  |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b>  |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pertemuan Rachmat Gobel mengajak agar LSM ikut mengawal program pemerintah dengan tujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Gorontalo;</li> <li>2. Para LSM juga memberikan apresiasi apa yang dikerjakan Rachmat Gobel dalam membangun Gorontalo;</li> <li>3. Akan memperjuangkan anggaran dan program dari pusat untuk kemajuan Provinsi Gorontalo.</li> </ol> |  |                           |

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Hari : Kamis</b>  | <b>Tanggal : 22 Oktober 2020</b>                                 | <b>Waktu : 10.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>   | Pertemuan dengan Kepala Cabang Bank Indonesia Wilayah Gorontalo. |                           |
| <b>Peserta</b>   | Pejabat Bank Indonesia Kanwil Gorontalo dan Jajaran              |                           |
| <b>Isu/permasalahan:</b><br>Membahas peran Bank Indonesia dalam rangka mensejahterakan rakyat  |  |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b>   |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Gorontalo agar Bank Indonesia dapat memberikan bantuan peningkatan perekonomian masyarakat;</li> <li>2. Agar Bank Indonesia dapat memberikan bantuan bea siswa kepada siswa yang berprestasi.</li> </ol> |  |                           |

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| <b>Hari : Kamis</b>   | <b>Tanggal : 22 Oktober 2020</b>  | <b>Waktu : 10.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau Bantuan Program BPS di Kelurahan Biawao, Kota Selatan Gorontalo;</li> <li>2. Meninjau Program Kotaku di Siendeng</li> <li>3. Meninjau pelaksanaan Bantuan Program BPS yang sedang dalam proses pelaksanaan di Lekobalo.</li> </ol> |                           |
| <b>Peserta</b>  | Jajaran PUPR dan masyarakat yang mendapatkan bantuan BPS  |                           |
| <b>Isu/permasalahan:</b>  |   |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak masyarakat yang belum mempunyai rumah yang layak huni;</li> <li>2. Perlu adanya pengawasan pelaksanaan realisasi program kotaku 2020</li> </ol>  |   |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b>  |   |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada PUPR untuk program bantuan BPS kepada masyarakat Kota Selatan Gorontalo;</li> <li>2. Sebagai Anggota DPR RI mempunyai tugas pengawasan, dan Rachmat Gobel akan memantau program-program pemerintah di Gorontalo.</li> </ol> |   |                           |

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| <b>Hari : Jumat</b>  | <b>Tanggal : 23 Oktober 2020</b>                                    | <b>Waktu : 10.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>   | Pertemuan dengan Balai Perhubungan Darat di kantor Terminal Duingi. |                           |
| <b>Peserta</b>   | Kepala Balai Perhubungan Darat dan jajaran                          |                           |
| <b>Isu/permasalahan:</b>   |   |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sarana transportasi untuk peningkatan perekonomian masyarakat Gorontalo;</li> <li>2. Usulan-usulan Program Tahun 2021 untuk Provinsi Gorontalo terkait dengan transportasi.</li> </ol> |   |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b>   |   |                           |
| Akan menyampaikan kepada pemerintah perlunya transportasi dalam meningkatkan perekonomian dan menyampaikan agar usulan program kerja untuk Gorontalo dapat terealisasi.  |   |                           |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Hari : Kamis  | Tanggal : 22 Oktober 2020                                   | Waktu : 13.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan   | Kunjungan melihat kondisi Pelabuhan Ferry di Kota Gorontalo |                    |
| Peserta   | Balai Perhubungan dan Jajaran terkait                       |                    |
| <b>Isu/permasalahan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi pelabuhan masih bermasalah dan kurang terawat dengan baik;</li><li>2. Sistem dan mekanismenya belum tertata yang mengakibatkan kurang berfungsinya pelabuhan tersebut.</li></ol>  |   |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rachmat Gobel menyarankan agar adanya koordinasi dengan Dinas terkait ;</li><li>2. Perlunya menyusun prosedur pengelolaan pelabuhan yang bersinergi dengan pihak-pihak terkait.</li><li>3. Dengan tertatanya sistem manajemen pelabuhan yang terintegrasi, maka akan meningkatkan perekonomian yang ada di provinsi Gorontalo serta meningkatkan produktifitas rakyat dengan daya saing di pasar internasional.</li></ol> |   |                    |

#### Dokumen Kegiatan



Rachmat Gobel meninjau Pelabuhan Ferry Gorontalo didampingi oleh Balai Perhubungan Gorontalo

## KABUPATEN BONE BOLANGO

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Hari : Sabtu  | Tanggal : 17 Oktober 2020  | Waktu : 14.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan   | Pertemuan Tim ABN dengan Pengurus DPW Provinsi Gorontalo dan DPD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo dalam rangka Evaluasi Kegiatan di Tapa                           |                    |
| Peserta   | Tim ABN, DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo, DPD Kota Gorontalo, DPD Kabupaten Gorontalo, DPD Kabupaten Bone Bolango DPD Boalemo, DPD Pohnuato, DPD Gorontalo Utara. |                    |
| <b>Isu/permasalahan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurang pekanya Anggota DPRD Partai NasDem se Provinsi Gorontalo dalam merespon isu-isu krusial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat;</li><li>2. Kurangnya sosialisasi KTA Kader partai NasDem.</li></ol>  |  |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pentingnya memahami situasi secara holistik khususnya terkait dengan isu kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo;</li><li>2. Pembentukan struktur Partai sampai ke DPRT;</li><li>3. Memaksimalkan semua potensi kader yang ada untuk e-KTA.</li><li>4. Pengurus dan kader partai untuk tetap solid memperjuangkan aspirasi masyarakat karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab modal utama Partai Nasdem.</li><li>5. Partai NasDem harus hadir dan menjadi <i>problem solving</i> disetiap persoalan yang terjadi di masyarakat dan tetap berpegang teguh pada AD/ART Partai NasDem.</li></ol> |  |                    |

### Dokumen Kegiatan



Pertemuan Rachmat Gobel dengan Pengurus dan Kader Partai NasDem Gorontalo

## KABUPATEN POHUWATO

| Hari : Minggu  | Tanggal : 18 Oktober 2020   | Waktu : 14.00 WITA |
|--|---|--------------------|
| Bentuk Kegiatan  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghadiri Pelatihan Demplot Jagung bekerjasama dengan Pupuk Kaltim dan Petrokimia Gresik;</li><li>2. Memberikan bantuan pupuk 1 ton kepada Kelompok Tani Kabupaten Pahuwato dalam rangka mewujudkan hasil pertanian yang bagus.</li></ol> |                    |
| Peserta  | Pengurus DPD Kab. Pahuwato, PT. Pupuk Kaltim, PT. Petrokimia Gresik dan Kelompok Tani.  |                    |
| <b>Isu/permasalahan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan pertanian;</li><li>2. Hasil panen kurang optimal</li></ol>   |   |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan bantuan pelatihan terhadap kelompok tani yang akan didampingi oleh penyuluh Pertanian;</li><li>2. Memberikan bantuan pupuk non subsidi dari Pupuk Kaltim dan Petrokimia Gresik kepada kelompok tani Kabupaten Pahuwato.</li></ol> |   |                    |

### Dokumen Kegiatan



*Rachmat Gobel memberikan sambutan dan arahan kepada kelompok tani yang mendapatkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pahuwato*

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Hari : Minggu  | Tanggal : 18 Oktober 2020   | Waktu : 13.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan  | Pertemuan dengan KUD (yang dipimpin oleh Idris Kaji) membahas fungsi dan peran KUD di Kabupaten Pohuwato. |                    |
| Peserta  | Pengurus DPD Partai NasDem dan Anggota KUD  |                    |
| Isu/permasalahan:<br>1. Belum optimalnya fungsi KUD terhadap masyarakat petani;<br>2. Perlunya alat pertanian.   |   |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b><br>1. Mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang peran dan fungsi KUD untuk meningkatkan produktivitas pertanian ;<br>2. Memberi bantuan alat pertanian kepada kelompok tani untuk memaksimalkan hasil produksi pertanian. |   |                    |

#### Dokumen Kegiatan



*Rachmat Gobel memberikan bantuan alat pertanian kepada Kelompok Tani kabupaten Pohuwato*

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Hari : Minggu   | Tanggal : 18 Oktober 2020  | Waktu : 15.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan   | Silaturahmi dan dialog dengan masyarakat guna menyerap aspirasi di Kabupaten Pohuwato.         |                    |
| Peserta   | PT. Pupuk Kaltim, PT. Petrokimia Gresik, Masyarakat Kabupaten Pohuwato dan Kader Partai NasDem |                    |
| <b>Isu/permasalahan:</b><br>Terjadinya kelangkaan gas LPG, dan pupuk bersubsidi pada saat musim tanam.  |  |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b><br>Perlu adanya partisipasi perusahaan pupuk (Petrokimia Gresik dan Pupuk Kaltim) untuk bekerjasama mengatasi masalah kelangkaan pupuk di propinsi Gorontalo |  |                    |

#### Dokumen Kegiatan



*Sambutan Rachmat Gobel pada pertemuan dengan masyarakat Kabupaten Pohuwato*

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>Hari : Senin</b>   | <b>Tanggal : 19 Oktober 2020</b>                                   | <b>Waktu : 10.00 WITA</b> |
| Bentuk Kegiatan   | Pertemuan Silaturahmi dengan DPD partai NasDem Kabupaten Pohuwato. |                           |
| Peserta   | Ketua DPD NasDem Kabupaten Pahuwato dan jajara Pengurus.           |                           |
| <p><b>Arahan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya soliditas dalam rangka kepengurusan partai untuk mewujudkan cita-cita Partai NasDem kedepan;</li> <li>2. Berkeinginan untuk membangun Gorontalo dari 5 termiskin menjadi 5 termakmur di Indonesia.</li> </ol> |  |                           |

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>Hari : Selasa</b>  | <b>Tanggal : 20 Oktober 2020</b>   | <b>Waktu : 09.00 WITA</b> |
| Bentuk Kegiatan   | Mengunjungi Kampung Nelayan dan melihat secara langsung kondisi rumah bantuan program BSPS, dilanjutkan pemasangan peneng di Kecamatan Marisa. |                           |
| Peserta   | Jajaran PUPR, Kelompok Nelayan   |                           |
| <p><b>Isu/permasalahan:</b><br/>Banyaknya hunian para nelayan yang kurang layak, dan perlu bantuan pemerintah</p>   |  |                           |
| <p><b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b><br/>Menyampaikan kepada Kementerian PUPR untuk mendapatkan bantuan rumahh BSPS kepada para nelayan Kabupaten Pohuwato</p> |  |                           |

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| <b>Hari : Selasa</b>  | <b>Tanggal : 20 Oktober 2020</b>  | <b>Waktu : 11.00 WITA</b> |
| Bentuk Kegiatan   | Kunjungan Ke Gereja yang mendapat bantuan dari Bank Indonesia di Kecamatan Marisa yang diperjuangkan oleh Rachmat Gobel |                           |
| Peserta   | Masyarakat Nasrani, Jajaran Bank Indonesia (BI)   |                           |
| <p><b>Isu/permasalahan:</b><br/>Tempat ibadah umat Nasrani yang kurang memadai</p>  |   |                           |
| <p><b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b><br/>Memberikan bantuan dari Bank Indonesia untuk pembangunan gereja umat Nasrani Kabupaten Pohuwato</p> |   |                           |

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Hari : Sabtu    | Tanggal : 24 Oktober 2020   | Waktu : 10.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | 1. Silaturahmi dengan masyarakat Nasrani di GPIG /Gereja Desa Karagetan, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pahuwato.<br>2. Meninjau Terminal Isimu bersama Balai Perhubungan Darat. |                    |
| Peserta         | Masyarakat umat Nasrani, Anggota DPRD dan Pengurus DPD  |                    |

#### Dokumen Kegiatan



*Rachmat Gobel menghadiri pertemuan dengan pengurus Gereja GPIG Desa Karagetan, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pahuwato*

## 2. Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-20211

Kunjungan Reses kedua Rachmat Gobel ke Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 20 – 28 Desember 2020 ke beberapa Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango

| Hari : Minggu  | Tanggal : 20-12-2020   | Waktu : 13.30 WITA |
|--|--|--------------------|
| Bentuk Kegiatan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyerahan Alsintan Aspirasi Rachmat Gobel dari Kementerian Pertanian berupa :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Unit <i>Power Thresher</i></li> <li>- 1 Unit <i>Power Thresher Multiguna</i></li> <li>- 2 Unit <i>Power Thresher Multiguna Mobile</i></li> <li>- 2 Unit <i>Corn Sheller mobile</i></li> </ul> </li> <li>Pemberian Bantuan Modal untuk Koperasi Jaya Usaha Maju Bersama senilai Rp 500.000.000.</li> </ol> |                    |
| Peserta  | Peserta Kepala Bidang Pertanian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Kelompok Tani Kabupaten Gorontalo.  |                    |
| <p><b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diharapkan Koperasi Jaya Usaha Maju Bersama dapat memaksimalkan modal yang diberikan.</li> <li>Dengan bergabungnya kelompok tani ke Koperasi diharapkan para petani dapat fokus untuk meningkatkan hasil produksinya.</li> <li>Peran koperasi akan menjadi wadah bagi para petani dalam menjual hasil-hasil produksinya.</li> </ol> |  |                    |



Dokumentasi / Foto Kegiatan :



**Rachmat Gobel menyerahkan bantuan Alsintan dari kementerian Pertanian kepada kelompok tani Mutiara di Desa Mauhudu Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo.**

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Hari : Minggu   | Tanggal : 20 Desember 2020  | Waktu : 15.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Penyerahan alat pertanian dari Kementerian Pertanian Dirjen Pangan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Unit Power Thresher</li> <li>- 1 Unit Power Thresher Multiguna</li> <li>- 2 Unit Power Thresher Multiguna Mobile</li> <li>- 2 Unit Corn Sheller mobile</li> </ul> |                    |
| Peserta         | Wakil Ketua DPRD Kab. Gorontalo, DPD NasDem Kabupaten Gorontalo, Kelompok Tani.   |                    |

**Arahan Rachmat Gobel dan solusi :**

1. Pemberian alsintan dari Kementerian Pertanian dapat digunakan untuk peningkatan produktifitas pertanian.
2. *Maintenance* harus dipersiapkan oleh para petani agar alat pertanian yang diberikan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama.

Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Rachmat Gobel memberikan pengarahan kepada 7 kelompok tani Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo*



*Penyerahan Alsintan dari Kementerian Pertanian kepada 7 kelompok tani oleh Rachmat Gobel di Desa Bongomeme, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo*

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Hari : Senin</b>  | <b>Tanggal : 21 Desember 2020</b>  | <b>Waktu : 15.00 WITA</b> |
| Bentuk Kegiatan  | Meninjau Bencana Banjir Bandang Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.           |                           |
| Peserta  | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Bupati Gorontalo Utara beserta jajarannya. |                           |
| <b>Isu/permasalahan</b><br>Memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang |  |                           |

**Dokumentasi / Foto Kegiatan :**



*Penyerahan Bantuan Sembako dari Rachmat Gobel kepada korban banjir bandang di Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.*



*Penyerahan bantuan Kasur kepada korban banjir di Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara oleh Rachmat Gobel*

| Hari : Selasa   | Tanggal : 22 Desember 2020  | Waktu : 15.00 WITA |
|-----------------|---|--------------------|
| Bentuk Kegiatan | Mengunjungi Rumah Aspirasi Program BSPS program 2020 yang sudah selesai Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. |                    |
| Peserta         | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Bupati Gorontalo Utara beserta jajarannya.                                |                    |

#### Isu/Permasalahan

Pengentasan Kemiskinan, banyaknya masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak

#### Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :

1. Memberikan bantuan Program BSPS kepada masyarakat Gorontalo Utara..
2. Akan menyampaikan ke Kementerian PUPR terkait pembangunan akses jalan di Kecamatan Kwandang.

**Dokumentasi / Foto Kegiatan :**



*Pengarahan Rachmat Gobel kepada masyarakat penerima bantuan program BPS di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.*



*Penyerahan dan peresmian Program Bantuan BPS dari Kementerian PUPR oleh Rachmat Gobel didampingi Bupati Gorontalo Utara dan Anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara*

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Rabu     | Tanggal : 23 Desember 2020   | Waktu : 15.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Penyerahan bantuan bis sekolah dari Kementerian Perhubungan aspirasi Rachmat Gobel di Kabupaten Bone Bolango.                    |                    |
| Peserta         | Bupati Bone Bolango, Kepala Dinas Perhubungan, Anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bone Bolango |                    |

### Isu/Permasalahan

Mengatasi masalah transportasi untuk anak sekolah di Kabupaten Bone Bolango

### Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :

1. Bis sekolah bantuan dari Kementerian Perhubungan harus dimanfaatkan dan dirawat dengan baik.
2. Perlunya pendataan anak usia sekolah untuk mengukur keperluan berapa bis yang dibutuhkan.

### Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Penyerahan bis sekolah bantuan dari Kementerian Perhubungan diserahkan oleh Rachmat Gobel didampingi Bupati Bone Bolango dan Anggota DPRD di Kabupaten Bone Bolango*

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| <b>Hari : Kamis</b>   | <b>Tanggal : 24 Desember 2020</b>   | <b>Waktu : 16.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>  | Penyerahan Alsitan aspirasi Rachmat Gobel dari Kementerian Pertanian berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Unit <i>Power Thresher</i></li><li>- 1 Unit <i>Power Thresher Multiguna</i></li><li>- 2 Unit <i>Power Thresher Multiguna Mobile</i></li><li>- 2 Unit <i>Corn Sheller mobile</i></li></ul> |                           |
| <b>Peserta</b>  | Bupati Bone Bolango, Kepala Dinas Perhubungan, Anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bone Bolango.   |                           |
| <b>Isu/Permasalahan</b><br>Mengatasi kebutuhan alat pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang kurang optimal.  |   |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rachmat Gobel mengusahakan memberikan bantuan Alsitan dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Bone Bolango.</li><li>2. Kelompok tani agar menjaga dan merawat secara baik dengan membentuk koperasi.</li></ol> |   |                           |

**Dokumentasi / Foto Kegiatan :**



**Penyerahan Alsitan oleh Rachmat Gobel didampingi Bupati Bode Bolango kepada kelompok tani Kabupaten Bone Bolango.**



*Rachmat Gobel memberi arahan kepada kelompok tani Kabupaten Bone Bolango yang menerima Alsintan*

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Jumat    | Tanggal : 25 Desember 2020                                   | Waktu : 19.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Silaturahmi dengan umat Kristiani di Kota Gorontalo.         |                    |
| Peserta         | Masyarakat Kristiani Kota Gorontalo di cafe Community Haose. |                    |



*Silaturahmi dengan Umat Kristiani di café Community Haose, Kota Gorontalo*

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>Hari : Sabtu</b>   | <b>Tanggal : 26 Desember 2020</b>  | <b>Waktu : 10.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>  | Penyerahan bis sekolah oleh RACHMAT Gobel di Kabupaten Gorontalo Utara.  |                           |
| <b>Peserta</b>  | Bupati Gorontalo Utara, Kepala Dinas Perhubungan, Anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Gorontalo Utara |                           |
| <b>Isu/Permasalahan</b><br>Mengatasi masalah transportasi untuk anak sekolah di Kabupaten Gorontalo Utara.  |  |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b><br>Bantuan bis sekolah diharapkan dapat membantu dan mempermudah para siswa lebih semangat pergi ke sekolah. |  |                           |

**Dokumentasi / Foto Kegiatan :**



*Bantuan bis sekolah dari Kementerian Perhubungan yang diserahkan Rachmat Gobel masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara*



**Penyerahan kunci bantuan bis sekolah oleh Rachmat Gobel kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara**

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>Hari : Minggu</b>  | <b>Tanggal : 27 Desember 2020</b>  | <b>Waktu : 10.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>  | Penyerahan Alsintan dari Kementerian Pertanian RI usulan Rachmat Gobel di Rumah Tepi Sawah Kota Gorontalo : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Unit <i>Power Thresher</i></li> <li>- 1 Unit <i>Power Thresher Multiguna</i></li> <li>- 2 Unit <i>Power Thresher Multiguna Mobile</i></li> <li>- 2 Unit <i>Corn Sheller mobile</i></li> </ul> |                           |
| <b>Peserta</b>  | Wali Kota Gorontalo, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Nasdem dan Kelompok Tani Kota Gorontalo.  |                           |
| <b>Isu/Permasalahan:</b><br>Hasil panen yang sedikit menjadi keluhan oleh para petani.  |  |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan alat pertanian yang diberikan oleh Kementerian Pertanian dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga akan membuat hasil produksi panen menjadi dua kali lipat;</li> <li>2. Pemanfaatan alat dan pengolahan tanah akan dibimbing oleh penyuluh dari Dinas Pertanian.</li> <li>3. Rachmat Gobel mengusulkan agar alat-alat pertanian yang diberikan harus dirawat dengan baik, dan perlu dibentuk koperasi dari kelompok tani Kota Gorontalo.</li> </ol> |  |                           |

Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Rachmat Gobel memberikan arahan kepada kelompok tani Kota Gorontalo*



*Kelompok tani Kota Gorontalo yang akan menerima bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian*

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Hari : Senin    | Tanggal : 28 Desember 2020  | Waktu : 09.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Meninjau program BSPS 2020 yang dijadikan <i>cluster</i> mural di Kota Gorontalo.                     |                    |
| Peserta         | Kepala Dinas Pariwisata Kota Gorontalo, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan DPD Nasdem Kota Gorontalo |                    |

**Isu/Permasalahan:**

1. Di Kampung Botol banyak bangunan yang terbengkelai.
2. Kurang adanya sentuhan Pemda Kampung Botol sebagai Kota Wisata.

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap isu dan solusi :**

1. Memanfaatkan bangunan di Kampung Botol agar dimanfaatkan dengan baik untuk menjual souvenir-souvenir khas Gorontalo;
2. Rumah Kampung Botol Program PSBS yang dimural perlu dipelihara untuk wisata daerah Benteng Otanaha;
3. Harapan ke depan tersebut menjadi kawasan wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Benteng Otanaha..

**Dokumentasi / Foto Kegiatan :**



*Rachmat Gobel dan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Gorontalo di rumah Program BSPS yang telah dimural bantuan dari Rachmat Gobel*



*Kesenian masyarakat kampung botol kecamatan Dembe Kota Gorontalo*



*Rachmat Gobel mengunjungi dan melihat tata ruang rumah bantuan BSPP kampung botol kecamatan Dembe Kota Gorontalo*

### 3. RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-20211

Kunjungan Reses Ketiga Rachmat Gobel ke Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 11 s.d.19 Februari 2021 di beberapa kabupaten/kota yaitu: Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato

#### KOTA GORONTALO

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Minggu   | Tanggal : 14 Februari 2021                           | Waktu : 19.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Pertemuan dengan kader Partai Nasdem Kota Gorontalo. |                    |
| Peserta         | Garnita, Garda, Petani, Partai NasDem.               |                    |

#### Isu/Permasalahan :

1. Rachmat Gobel mengadakan ramah tamah dengan kader Partai NasDem dan sekaligus mengajak kader Partai NasDem untuk memaksimalkan Rumah Aspirasi Rachmat Gobel;
2. Memaksimalkan peran serta kader Partai NasDem untuk menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi

#### Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

1. Dalam acara *Doorprize* yang dilakukan, Rachmat Gobel mengajak kepada seluruh masyarakat dan kader Partai NasDem untuk tanggap dalam membantu permasalahan masyarakat khususnya di sektor pertanian;
2. Melalui rumah aspirasi Rachmat Gobel mengajak kader Partai NasDem untuk berperan aktif serta mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat yang nantinya akan di tindak lanjuti oleh Rachmat Gobel.

Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Rachmat Gobel sedang berdialog dengan kader Partai NasDem Gorontalo*



*Suasana pertemuan dan silaturahmi kader Partai NasDem Gorontalo bersama Rachmat Gobel*

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| <b>Hari : Senin</b>  | <b>Tanggal : 15 Februari 2021</b>   | <b>Waktu : 11.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>   | Kunjungan ke kantor BNN Provinsi Gorontalo/Kantor BNN Provinsi Kota Gorontalo.  |                           |
| <b>Peserta</b>   | Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Kepala BNN Kota Gorontalo, Kepala BNN Kabupaten Gorontalo, Kepala BNN Kabupaten Boalemo, Kepala BNN Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala BNN Bone Bolango dan seluruh jajaran BNN Provinsi Gorontalo. |                           |
| <p><b>Isu / Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang perhatiannya Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan pemberantasan narkoba;</li> <li>2. Kurangnya mobil operasional (mobil tahanan, mobil pengangkut alat bukti, mobil rehabilitasi, mobil operasional humas BNN);</li> <li>3. Kurangnya fasilitas Gedung untuk BNN Provinsi Gorontalo (Gedung untuk laboratorium, bangunan untuk rawat inap bagi pasien yang di rehabilitasi, kebutuhan pembangunan kantor BNN Provinsi Gorontalo);</li> <li>4. Khusus untuk Kabupaten Puhowato struktur BNN di kabupaten tersebut masih di bawah oleh Pemda, hal ini menyulitkan koordinasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi karena secara struktur BNN Kabupaten Puhowato tidak di vertikal, hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri karena Kabupaten Puhowato merupakan perbatasan antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>5. Masih terdapat beberapa oknum penegak hukum yang terlibat dalam pengedaran narkoba.</li> </ol> |   |                           |
| <p><b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rachmat Gobel memberikan apresiasi kepada BNN Provinsi Gorontalo terkait dengan beberapa prestasi dalam hal penindakan bagi para bandar narkoba yang cukup efektif;</li> <li>2. Rachmat Gobel akan menindak lanjuti pemberantasan narkoba di Provinsi Gorontalo dengan melakukan dialog dengan semua <i>Stakeholder</i> (Kepolisian, Kejaksaan, Pemda, BNN se Provinsi Gorontalo);</li> <li>3. Dialog akan dilakukan pada saat kunjungan dapil yang akan datang;</li> <li>4. Terkait dengan kebutuhan pembangunan Gedung dan mobil operasional bagi BNN Provinsi Gorontalo, Rachmat Gobel akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada BNN Pusat, hal ini perlu dilakukan agar pemberantasan narkoba dapat berjalan secara maksimal;</li> <li>5. Rachmat Gobel akan berkomunikasi dengan BNN Pusat agar segera membentuk BNN Kabupaten Puhowato yang definitif.</li> </ol>   |   |                           |

Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Rachmat Gobel memberikan sambutan dan arahan pada pertemuan dengan jajaran BNN Provinsi Gorontalo*



*Rachmat Gobel memberikan cinderamata Replika Gedung DPR RI kepada Kepala BNN Provinsi Gorontalo*

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Selasa   | Tanggal : 16 Februari 2021   | Waktu : 13.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Pertemuan dengan DPW, DPD, Anggota Legislatif Partai NasDem Provinsi Gorontalo/Kantor DPW NasDem Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo. |                    |
| Peserta         | Ketua DPW, Ketua DPD, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh Kader Partai NasDem Provinsi Gorontalo.                            |                    |

**Isu / Permasalahan :**

1. Banyak program yang di turunkan oleh Rachmat Gobel (Pisew) menjadi bahan bancakan dalam pelaksanaannya;
2. Masih banyak kelompok tani yang membutuhkan bantuan Alsintan untuk memaksimalkan produksi pertaniannya.

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Rahmat Gobel akan membicarakan dengan Balai Wilayah Sulawesi (BWS) II Sulawesi Provinsi Gorontalo terkait dengan program PISEW yang menjadi *bancakan* dalam tahap pelaksanaan;
2. Rachmat Gobel akan memprioritaskan kelompok-kelompok tani yang belum mendapat bantuan Alsintan, untuk segera di berikan bantuan;
3. Perlunya memaksimalkan peran rumah aspirasi Rachmat Gobel sebagai penampung aspirasi dari masyarakat, dalam memaksimalkan rumah aspirasi tersebut Rachmat Gobel meminta peran dari seluruh kader Partai NasDem sebagai garda terdepan dalam melakukan pendataan.

**Dokumentasi / Foto Kegiatan :**



*Sambutan Rachmat Gobel pada pertemuan silaturahmi Ketua BAPILU Sulawesi DPP Partai Nasdem dan Pengurus DPW/DPD Partai NasDem Gorontalo*



*Arahan Rachmat Gobel pada pertemuan silaturahmi Ketua BAPILU Sulawesi DPP Partai Nasdem dan Pengurus DPW/DPD Partai NasDem Gorontalo*



*Rachmat Gobel memberikan buku kinerja 1 tahun sebagai anggota DPR RI yang sekaligus Wakil Ketua DPR RI dengan judul "Menyerap Aspirasi, Menciptakan Solusi" kepada Bupati Bone Bolango sekaligus Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo.*

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Hari : Selasa   | Tanggal : 16 Februari 2021   | Waktu : 17.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan   | Mengunjungi rumah warga yang mendapat bantuan program BSPS dan mengunjungi situs sejarah Benteng Otanaha Kota Gorontalo. |                    |
| Peserta   | Walikota Gorontalo dan masyarakat di sekitar Benteng Otanaha   |                    |
| <b>Isu / Permasalahan :</b>   |  |                    |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masyarakat yang mendapat bantuan BSPS serta mural bagi setiap rumah berterima kasih kepada Rachmat Gobel, karena dengan adanya bantuan BSPS tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah layak huni;</li><li>2. Pemerintah Kota Gorontalo siap bekerjasama dengan Rachmat Gobel terkait dengan bantuan-bantuan BSPS dan bantuan untuk pembenahan benteng Otanaha.</li><li>3. Belum ada kepastian sejarah terkait dengan kapan didirikannya Benteng Otanaha, hal ini di karenakan terdapat perbedaan pendapat dari beberapa pakar</li></ol>   |  |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b>  |  |                    |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rachmat Gobel mendorong Pemerintah Daerah Kota Gorontalo untuk segera melakukan pencatatan terkait dengan sejarah berdirinya Benteng Otanaha, dan Rachmat Gobel berharap Pemko Gorontalo dapat menjadi mediator terkait dengan perbedaan pendapat para pakar tentang kapan berdirinya Benteng Otanaha.</li><li>2. Program BSPS serta bantuan mural bagi setiap rumah yang di realisasikan oleh Rachmat Gobel bukan hanya melakukan pembenahan terhadap rumah warga, namun Rachmat Gobel juga membantu untuk melakukan penataan lingkungan di sekitar rumah warga;</li><li>3. Rachmat Gobel akan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk membenahi Benteng Otanaha sebagai objek wisata di Kota Gorontalo;</li><li>4. Dalam acara ini Rachmat Gobel menyerahkan bantuan pribadi berupa kipas angin kepada warga Benteng Otanaha.</li></ol> |  |                    |

Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Rachmat Gobel bersama Wali Kota Gorontalo meninjau rumah mural bantuan BPS PUPR Kota Gorontalo*



*Kunjungan Rachmat Gobel ke Benteng Otahana didampingi Wali Kota Gorontalo dan berdialog dengan turis asal Jerman yang mengunjungi daerah wisata Benteng Otahana*

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Hari : Rabu  | Tanggal : 17 Februari 2021  | Waktu : 13.30 WITA |
| Bentuk Kegiatan  | Silaturahmi Bersama tokoh Gorontalo serta kegiatan <i>Launching</i> buku " <b>Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi satu tahun kiprah Wakil Ketua DPR RI Korinbang Dr. (H.C.) Rachmat Gobel</b> " / Hotel Aston, Kota Gorontalo.   |                    |
| Peserta  | Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dandim Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua adat Provinsi Gorontalo, Perwakilan Perguruan Tinggi se Provinsi Gorontalo, perwakilan ormas-ormas islam Provinsi Gorontalo, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan/pemuda Provinsi Gorontalo. |                    |
| <p><b>Isu / Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Rachmat Gobel "<b>Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi</b>" merupakan bentuk tanggung jawab Rachmat Gobel selama 1 tahun menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang bagi masyarakat Gorontalo dan Indonesia;</li> <li>2. Perlu adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membawa Provinsi Gorontalo keluar dari zona Provinsi 5 termiskin di Indonesia;</li> <li>3. Permasalahan pertanian di Indonesia harus di selesaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, agar Indonesia dapat mandiri dari sektor pertanian;</li> <li>4. Perlu adanya pencatatan secara detail mengenai adat istiadat yang ada di Provinsi Gorontalo, hal ini perlu dilakukan karena saat ini nilai adat telah bergeser dan di tinggalkan khususnya oleh generasi milenial;</li> <li>5. Masih terdapat masyarakat yang terdapat di pelosok-pelosok Provinsi Gorontalo yang belum tersentuh dunia Pendidikan;</li> <li>6. Pelaku usaha Kopra meminta kepada Rachmat Gobel untuk memfasilitasi industri bahan olahan dari Kopra;</li> <li>7. Pemerintah Daerah meminta kepada Rachmat Gobel untuk membantu mengkomunikasikan terkait dengan pembentukan armada tempur khususnya di perbatasan Provinsi Gorontalo dengan Republik Palau, hal ini perlu dilakukan demi keamanan.</li> </ol> |   |                    |

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Rachmat Gobel akan membantu Lembaga adat terkait dengan penulisan buku adat yang ada di Gorontalo;
2. Dalam waktu sisa 4 tahun jabatan Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel akan terus mendorong program-program dari Kementerian yang bersentuhan langsung untuk masyarakat, namun hal ini perlu adanya sinergi dari Pemerintah Daerah agar bantuan program-program tersebut dapat terealisasi tepat sasaran;
3. Rachmat Gobel akan terus mendorong pembangunan Demplot dan pemberian pupuk non subsidi, bagi para petani agara sektor pertanian di Provinsi Gorontalo lebih produktif lagi;
4. Sektor Pendidikan harus menjadi perhatian dari semua pihak, Rachmat Gobel akan mendorong Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar di Gorontalo, melalui program-program yang ada di Kementerian Pendidikan;
5. Rachmat Gobel telah mengusulkan kepada Kementerian PUPR untuk membangun RUSUNAWA bagi orang tua/jompo yang tidak memiliki rumah;
6. Rachmat Gobel menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk bersinergis terkait dengan semua program-program yang telah terealisasi maupun akan di realisasikan oleh Rachmat Gobel untuk Provinsi Gorontalo.

**Dokumentasi / Foto Kegiatan :**



**Sambutan Rachmat Gobel dalam acara Peluncuran Buku Kinerja 1 Tahun sebagai anggota DPR RI dengan judul "Menyerap Aspirasi, Menciptakan Solusi" didampingi staf khusus Dra. Nining Indra Shaleh M.Si di Hotel Aston Gorontalo**



*Rachmat Gobel bersama para pakar, tokoh masyarakat, akademisi, Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem Gorontalo pada Peluncuran Buku Kinerja 1 Tahun sebagai anggota DPR RI dengan judul "Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi"*



*Rachmat Gobel memberi paparan isi Buku "Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi"*

## KABUPATEN BONE BOLANGO

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Senin    | Tanggal : 15 Februari 2021   | Waktu : 13.30 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Kunjungan ke sentra produksi pabrik batako/kabupaten Bone Bolango.                   |                    |
| Peserta         | Anggota DPRD, Pelaku UMKM pengolahan batako, dan Pengurus DPD Kabupaten Bone Bolango |                    |

### Isu / Permasalahan :

1. Kebutuhan Batako di Provinsi Gorontalo di suplay sendiri oleh pengusaha UMKM batako Provinsi Gorontalo;
2. Pelaku UMKM batako meminta kepada Rachmat Gobel untuk dapat membuka pasar penjualan batako lebih luas lagi di luar dari Provinsi Gorontalo.

### Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

1. Rachmat Gobel mendorong pelaku UMKM batako membuat koperasi dan sekaligus menjadi anggota dari koperasi tersebut, agar kebutuhan modal bagi pelaku UMKM batako dapat terbantu;
2. Rachmat Gobel akan mendorong Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota serta Provinsi untuk dapat menjadi pembeli utama dari produk-produk batako.

### Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Rachmat Gobel melihat secara langsung pembuatan batako oleh UMKM Kabupaten Bone Bolango*



*Rachmat Gobel berdialog dengan pemilik usaha batako di Kabupaten Bone Bolango*



*Rachmat Gobel memperhatikan cara mencetak batako oleh UMKM Kabupaten Bone Bolango*

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| Hari : <b>Senin</b> | Tanggal : <b>16 Februari 2021</b>  | Waktu : <b>10.00 WITA</b> |
| Bentuk Kegiatan     | Menerima audiensi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Gorontalo di Rumah adat Tapa, Kabupaten Bone Bolango. |                           |
| Peserta             | Ketua Pemuda Muhammadiyah, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, Anggota Pemuda Muhammadiyah Provinsi Gorontalo.                   |                           |

**Isu / Permasalahan :**

1. Pemuda Muhammadiyah meminta kepada Rachmat Gobel agar memperhatikan UMKM binaan yang telah dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah;
2. Pemuda Muhammadiyah meminta kepada Rachmat Gobel agar melibatkan pemuda dalam setiap program-program untuk pembangunan yang disalurkan oleh Rachmat Gobel.

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Rachmat Gobel mengajak UMKM binaan Pemuda Muhammadiyah untuk bergabung ke dalam koperasi yang telah di bangun oleh Rachmat Gobel agar UMKM binaan Pemuda Muhammadiyah mendapat bantuan melalui koperasi yang didirikan oleh Rachmat Gobel;
2. Rachmat Gobel meminta Pemuda Muhammadiyah untuk membuat *Pilot Project* untuk konsep UMKM yang dibina oleh Pemuda Muhammadiyah.

**Dokumentasi / Foto Kegiatan :**



*Rachmat Gobel bersama Pengurus Pemuda Muhammadiyah Gorontalo*

## KABUPATEN BOALEMO

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Kamis    | Tanggal : 18 Februari 2021   | Waktu : 09.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Menghadiri sosialisasi OJK dengan tema "Pengelolaan dana UMKM Kabupaten Boalemo"/Hotel Grand Amalia, Kabupaten Boalemo.                          |                    |
| Peserta         | Kepala Perwakilan OJK Regional 6 : Sulawesi, Maluku dan Papua, Perwakilan OJK Provinsi Gorontalo serta masyarakat pelaku UMKM Kabupaten Boalemo. |                    |

### Isu / Permasalahan :

1. OJK telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UMKM di Kabupaten Boalemo;
2. Pentingnya pengelolaan dana UMKM, khususnya pada saat kondisi pandemik covid-19 saat ini.

### Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

1. Rachmat Gobel menyampaikan bahwa kondisi pandemik covid-19 saat ini harus di jadikan momentum untuk perubahan kehidupan baru, dalam hal ini kondisi pandemik covid-19 bukan menjadi suatu alasan untuk tidak berkembangnya ekonomi masyarakat;
2. Rachmat Gobel mengapresiasi kehadiran OJK dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu masyarakat melakukan pengembangan UMKM.

### Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Rachmat Gobel memberikan sambutan dan arahan pada sosialisasi OJK di Kabupaten Bone Bolango*



*Rachmat Gobel bersama pejabat OJK Sulawesi dan Gorontalo*



*Rachmat Gobel bersama Pengurus Partai NasDem, Pejabat OJK dan pelaku UMKM peserta sosialisasi*

## KABUPATEN POHUWATO

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Hari : Kamis</b>  | <b>Tanggal : 18 Februari 2021</b>  | <b>Waktu : 21.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>   | Penyerahan Alsintan Pertanian bagi kelompok tani/Marina Beach Resort, Kabupaten Pohuwato.                                    |                           |
| <b>Peserta</b>   | PJ Bupati Kabupaten Pohuwato, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, kelompok tani penerima alsintan Kabupaten Pohuwato. |                           |
| <b>Isu / Permasalahan :</b>  |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Pertanian dan kelompok tani berterima kasih kepada Rachmat Gobel terkait dengan Alsintan yang diberikan;</li><li>2. Dinas Pertanian berharap kepada Rachmat Gobel agar memberikan dukungan maksimal bagi para kelompok tani yang ada di Kabupaten Pohuwato;</li><li>3. PJ Bupati Kabupaten Pohuwato meminta kepada Rachmat Gobel untuk membantu mempromosikan Kabupaten Pohuwato dalam sektor Pariwisata, karena sektor Pariwisata di Kabupaten Pohuwato memiliki potensi yang luar biasa.</li></ol>        |  |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b>   |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rachmat Gobel akan melakukan pendataan terkait dengan kebutuhan Alsintan bagi kelompok tani di Kabupaten Pohuwato;</li><li>2. Rachmat Gobel mendorong kelompok tani membentuk koperasi, hal ini penting dilakukan agar sektor pertanian di Kabupaten Pohuwato banyak mendapat dari Pemerintah Pusat baik berupa modal maupun bantuan-bantuan lainnya;</li><li>3. Koperasi yang akan di buat nantinya akan menyelesaikan persoalan-persoalan teknis bagi petani, agar petani dapat focus bercocok tanam.</li></ol> |  |                           |

Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Pj Bupati Pohuwato memberikan penghargaan kepada Rachmat Gobel*



*Rachmat Gobel bersama kelompok tani penerima bantuan Alsintan di Kabupaten Pohuwato*

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Hari : Kamis</b>  | <b>Tanggal : 18 Februari 2021</b>  | <b>Waktu : 13.30 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>   | Menghadiri sosialisasi OJK dengan tema " <b>Waspada Pinjaman Online dan Investasi Ilegal</b> " di Marina Beach Resort, Kabupaten Pohuwato. |                           |
| <b>Peserta</b>   | Perwakilan OJK Provinsi Gorontalo, Pelaku UMKM Kabupaten Pohuwato.   |                           |
| <b>Isu / Permasalahan :</b>  |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap jerat pinjaman <i>online</i> yang sekarang marak di Indonesia;</li><li>2. Masyarakat harus lebih bisa melihat bagaimana pola investasi bodong yang sering terjadi di Indonesia, karena investasi bodong merupakan Tindakan pidana pencucian uang (TPPU);</li><li>3. Pandemi covid-19 sangat memiliki dampak yang signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat khususnya di kabupaten Pohuwato.</li></ol>  |  |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b>   |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rachmat Gobel menginstruksikan kepada Lembaga perbankan untuk memberikan bantuan serta fokus program kepada pengusaha kecil;</li><li>2. Rachmat Gobel menyarankan kepada pelaku UMKM untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat mempertahankan usahanya serta mengembangkan usaha;</li><li>3. Rachmat Gobel akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait agar Kabupaten Pohuwato lebih banyak mendapatkan bantuan atau stimulus untuk pelaku UMKM;</li><li>4. Rachmat Gobel meminta kepada OJK untuk memperhatikan tumbuh kembangnya UMKM, karena di tengah kondisi covid-19 saat ini UMKM merupakan sektor usaha yang dapat menopang ekonomi masyarakat.</li></ol> |  |                           |

Dokumentasi / Foto Kegiatan :



*Rachmat Gobel memberikan arahan pada sosialisasi Stimulus Kebijakan OJK dengan tema "Waspada Pinjaman Online dan Investasi Ilegal di Kabupaten Pohuwato"*



*Rachmat Gobel bersama jajaran OJK di Kabupaten Pohuwato*

#### 4. RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021

Kunjungan Reses Keempat Rachmat Gobel ke Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 28 April s.d. 5 Mei 2021 ke beberapa Kabupaten/Kota yaitu: Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Bone Bolango.

##### KOTA GORONTALO

| Hari : Kamis  | Tanggal : 29 April 2021   | Waktu : 15.00 WITA |
|---|---|--------------------|
| Bentuk Kegiatan   | Menjadi <i>Keynote Speech</i> di kegiatan OJK dalam rangka Gebyar Ramadhan, dengan tema " <i>Potensi Industry Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo</i> ". |                    |
| Peserta   | Masyarakat dan pelaku UMKM se Provinsi Gorontalo.   |                    |
| <b>Isu / Permasalahan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gorontalo merupakan Provinsi yang jumlah penduduk Islamnya dominan;</li> <li>2. Kehadiran BSI (Bank Syariah Indonesia) di Indonesia sebagai Bank berbasis Syariah, diharapkan dapat berkembang di Provinsi Gorontalo.</li> </ol>  |   |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rachmat Gobel berharap melalui OJK, Provinsi Gorontalo harus mampu berkembang menjadi lebih baik;</li> <li>2. Konsep Bank Syariah harus mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat, karena fakta yang dihadapi oleh masyarakat banyak petani yang terkena BI <i>checking</i> dan OJK <i>checking</i>;</li> <li>3. Rachmat Gobel berharap dapat bekerja sama dengan BSI dalam membangun kawasan ekonomi halal di Provinsi Gorontalo;</li> <li>4. Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang akan terus mendorong tumbuh kembangnya Bank Syariah di Indonesia.</li> </ol> |   |                    |

Dokumentasi Kegiatan :



Rachmat Gobel memberikan sambutan pada Gebyar Safari Ramadhan bersama jajaran Bank Syariah Indonesia di Kota Gorontalo



Rachmat Gobel bersama jajaran OJK dan pelaku UMKM Provinsi Gorontalo

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| <b>Hari : Jumat</b>  | <b>Tanggal : 30 April 2021</b>  | <b>Waktu : 10.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>   | Penyerahan bantuan sembako dari Bank Indonesia secara simbolis oleh Rachmat Gobel kepada masyarakat .           |                           |
| <b>Peserta</b>   | Jajaran BI Kanwil Gorontalo, Pengurus DPD Partai NasDem Kota Gorontalo dan Perwakilan Masyarakat Kota Gorontalo |                           |
| <b>Isu / Permasalahan :</b>  |   |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia memberikan bantuan bagi masyarakat di daerahnya terkena bencana</li> <li>2. Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui Yayasan Cahaya RG berupa bantuan paket sembako senilai Rp.248.750.000,-;</li> <li>3. Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui Yayasan Insan (Inspirasi Sahabat Tani) berupa bantuan paket sembako senilai Rp. 150.000.000,-;</li> <li>4. Total paket sembako yang diberikan Bank Indonesia melalui dua Yayasan diatas berjumlah 2.735 paket</li> </ol> |   |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b>   |   |                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rachmat Gobel memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas bantuan yang telah disalurkan melalui dua Yayasan tersebut, bantuan yang diberikan sangat membantu masyarakat yang terdampak bencana;</li> <li>2. Rachmat Gobel mengharapkan kepada Bank Indonesia untuk berkelanjutan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana khususnya di Provinsi Gorontalo.</li> </ol>   |   |                           |

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Sambutan Rachmat Gobel pada penyerahan bantuan dari Bank Indonesia kepada korban bencana di Provinsi Gorontalo*



*Penyerahan secara simbolis bantuan dari Bank Indonesia kepada korban bencana di Provinsi Gorontalo oleh Rachmat Gobel didampingi Anggota DPRD Provinsi dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Gorontalo*



*Penyerahan secara simbolis bantuan dari Bank Indonesia kepada korban bencana di Provinsi Gorontalo oleh Ketua DPD Partai NasDem Kota Gorontalo*

## KABUPATEN GORONTALO

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Jumat    | Tanggal : 30 April 2021  | Waktu : 13.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Penyuluhan OJK di Universitas Gorontalo, dengan tema " <i>Literasi Keuangan Dan Berantas Investasi Fiktif Di Gorontalo</i> " |                    |
| Peserta         | Civitas Akademika Universitas Gorontalo  |                    |

### Isu / Permasalahan :

1. Sosialisasi OJK dilakukan bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi serta akses keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
2. Maraknya investasi illegal di Indonesia sangat merugikan masyarakat, sehingga masyarakat harus mendapat edukasi terkait dengan dunia sector keuangan;
3. Di Indonesia terdapat kurang lebih 105,81 Triliun kerugian yang dialami masyarakat akibat banyaknya investasi illegal.

### Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

1. Sifat konsumtif masyarakat Indonesia harus di batasi, karena akan berpengaruh pada tingkat-tingkat kesejahteraan masyarakat;
2. Kita harus memanfaatkan kekayaan yang berasal dari sumber kekayaan diri kita sendiri baik memanfaatkan SDA dan SDM;
3. Masyarakat harus berhati-hati terhadap investasi ilegal yang banyak beredar saat ini di Indonesia.

### Dokumentasi Kegiatan :



*Rachmat Gobel memberikan sambutan pada Penyuluhan Jasa Keuangan di Universitas Gorontalo*



*Penyerahan cinderamata Replika` Gedung DPR RI dari Rachmat Gobel kepada Ketua Perwakilan OJK Manado*



*Rachmat Gobel bersama civitas akademika Universitas Gorontalo pada acara OJK*

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Minggu   | Tanggal : 2 Mei 2021   | Waktu : 10.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Penyerahan bibit di Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo. |                    |
| Peserta         | Masyarakat serta kelompok tani di Desa Tabongo Timur.        |                    |

**Isu / Permasalahan :**

1. Di Desa Tabongo Timur terdapat 21 kelompok tani, 300 petani serta kurang lebih 770 hektar lahan;
2. Masyarakat dan kelompok tani berterima kasih kepada Rachmat Gobel karena telah memberikan bantuan bibit;
3. Selain bantuan bibit yang telah di berikan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu benih jagung "Pioneer".
4. Masyarakat meminta kepada Rachmat Gobel untuk memberikan bantuan pembangunan infrastruktur (penerangan jalan) di desa Tabongo Timur;
5. Masyarakat dan kelompok tani berharap Rachmat Gobel terus memberikan bantuan serta perhatian bagi petani di Desa Tabongo Timur khususnya terkait dengan produktifitas dari hasil pertanian.

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Rachmat Gobel telah menuntaskan janji kampanyenya pada tahun 2019 untuk memberikan bantuan bagi pertanian di desa Tabongo Timur;
2. Rachmat Gobel mendorong agar para petani harus menjadi anggota koperasi yang telah di buat oleh Rachmat Gobel, agar Rachmat Gobel mudah memberikan bantuan lainnya melalui koperasi tersebut;
3. Rachmat Gobel akan mengupayakan bantuan mesin penggilingan bagi petani di desa Tabongo Timur;
4. Rachmat Gobel akan berupaya membangun system yang lebih terintegrasi di sector pertanian khususnya di Provinsi Gorontalo, dengan konsep membangun industry pertanian agar lebih meningkatkan produktifitas pertanian itu sendiri.

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Rachmat Gobel bersama para petani Desa Tabongo Timur, Kab. Gorontalo*



*Rachmat Gobel memberikan sambutan dan arahan kepada kelompok tani Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo*



*Secara simbolis Rachmat Gobel memberikan benih jagung Pioneer kepada kelompok tani Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo*

## KABUPATEN BONE BOLANGO

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Hari : Minggu   | Tanggal : 2 Mei 2021  | Waktu : 10.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan   | Silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Pimpinan Ormas Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Serikat Islam dan para Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), di Rumah adat Rachmat Gobel, Kec Tapa, Kabupaten Bone Bolango. |                    |
| Peserta   | Pimpinan Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah, Serikat Islam), Rekto PTS dan PTN se Provinsi Gorontalo.   |                    |
| <b>Isu / Permasalahan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan persatuan umat Islam di Provinsi Gorontalo;</li><li>2. Gorontalo sebagai provinsi yang berjuluk serambi Madinah harus menonjolkan persatuan antar umat beragama.</li></ol>   |   |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rachmat Gobel mengajak seluruh tokoh organisasi masyarakat (Ormas) Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat;</li><li>2. Rachmat Gobel akan memaksimalkan bantuan Pendidikan bea siswa bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo.</li></ol> |   |                    |

### Dokumentasi Kegiatan :



*Pertemuan Rachmat Gobel dengan Ormas Islam sebelum buka puasa bersama di Rumah Tapa, Kabupaten Bone Bolango*



*Sambutan Rachmat Gobel sebelum buka puasa bersama dengan Ormas Islam di Rumah Tapa, Kabupaten Bone Bolango*



*Rachmat Gobel memberikan cinderamata berupa buku kinerja 1 tahun menjabat sebagai anggota DPR RI pada Ormas Islam pada acara buka bersama di Rumah Tapa, Kabupaten Bone Bolango*

## KABUPATEN BOALEMO

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Minggu   | Tanggal : 2 Mei 2021   | Waktu : 16.30 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Silaturahmi dan buka puasa bersama dengan tokoh dan masyarakat Kabupaten Boalemo, di rumah Bapak Rumpa Gao, Kabupaten Boalemo. |                    |
| Peserta         | Masyarakat serta kader Partai NasDem di Kabupaten Boalemo.   |                    |



*Rachmat Gobel menghadiri buka bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Rum Pagau*

## 5. RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020-2021

Kunjungan Reses Kelima Rachmat Gobel ke Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 31 Juli 2021 ke beberapa Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo.

### KABUPATEN BONE BOLANGO

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Sabtu    | Tanggal : 24 Juli 2021   | Waktu : 19.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Pertemuan Internal untuk koordinasi kunjungan Reses Rachmat Gobel di Gorontalo |                    |
| Peserta         | DPW/DPD Partai NasDem Gorontalo dan tim.                                       |                    |

#### Isu / Permasalahan :

1. Banyaknya aspirasi masyarakat Gorontalo yang belum tertangani
2. Masyarakat Gorontalo masa pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, khususnya pedagang, buruh bangunan dan yang lainnya;
3. Banyaknya anak-anak yang membutuhkan asupan gizi dan kesehatan.
4. Rumah Sakit perlu obat-obatan dan alat ventilator untuk membantu masyarakat yang terkena covid-19.

#### Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

1. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bantuan berdasarkan skala prioritas;
2. Menyusun Rencana Kegiatan Reses Wakil Ketua DPR/Korinbang Rachmat Gobel yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021;
3. Memaksimalkan peran serta kader Partai NasDem untuk menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ;
4. Melalui rumah aspirasi Rachmat Gobel mengajak kader Partai NasDem untuk berperan aktif serta mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat yang nantinya akan di tindak lanjuti oleh Rachmat Gobel.

#### Dokumentasi Kegiatan :



*Rapat Internal Koordinasi Kegiatan Reses*

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Minggu   | Tanggal : 25 Juli 2021   | Waktu : 06.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Olah Raga Jalan Pagi sambil melihat masyarakat sekitar pada saat pandemi covid-19 yang sekiranya perlu bantuan di Kabupaten Bone Bolango |                    |
| Peserta         | Dibatasi dikarenakan pandemi covid-19 yaitu Bupati Bone Bolango, Staf Khusus dan kader Partai NasDem.                                    |                    |

**Isu / Permasalahan :**

1. Banyaknya sampah-sampah di jalan dikarenakan masyarakat kurang peduli terhadap kebersihan;
2. Kurang disiplinnya masyarakat terhadap lingkungan.

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Perlu adanya komunikasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan kepedulian untuk membuang sampah pada tempatnya;
2. Rachmat Gobel ingin memberikan edukasi terhadap masyarakat, agar sampah-sampah plastik dapat dijadikan *added value* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Akan membicarakan dengan Jajaran Pemda setempat untuk dapat diberikan bantuan bak sampah di jalan-jalan.

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Rachmat Gobel olah raga jalan pagi bersama Bupati Bone Bolango*

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| <b>Hari : Minggu</b>   | <b>Tanggal : 25 Juli 2021</b>   | <b>Waktu : 07.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan/</b>  | Meninjau pembangunan GOR Kabupaten Bone Bolango didampingi oleh Bupati Bone Bolangodi Kabupaten Bone Bolango. |                           |
| <b>Peserta</b>   | Ketua DPW, Ketua DPD, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh Kader Partai NasDem Provinsi Gorontalo      |                           |
| <b>Isu / Permasalahan :</b>  |   |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masyarakat Bone Bolango perlu fasilitas Olah Raga, untuk membangun dan mengkader para atlit dari Gorontalo, khususnya Bone Bolango;</li><li>2. Belum adanya Gelora Olah Raga yang memadai untuk pelaksanaan pertandingan Olah Raga;</li><li>3. Bangunan GOR terbengkelai.</li></ol>   |   |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b>   |   |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendukung tindak lanjut pembangunan GOR di Kabupaten Bone Bolango;</li><li>2. Dapat dijadikan motivasi untuk para atlit dan pecinta olah raga dalam meningkatkan prestasi;</li><li>3. Akan membantu menyampaikan kepada Instansi terkait, apa sebab terkendala dan terhentinya pembangunan GOR Kabupaten Bone Bolango tersebut;</li></ol> |   |                           |

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Rachmat Gobel meninjau Pembangunan GOR Kabupaten Bone Bolango yang belum tuntas dibangun didampingi oleh Bupati Bone Bolango*

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>Hari : Minggu</b>  | <b>Tanggal : 25 Juli 2021</b>  | <b>Waktu : 08.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>  | Mengunjungi UKM kemiri gabah kering, kelapa hibrida kering, kelapa biasa kering/mengkel UD. Bumi Agro Gorontalo didampingi oleh Bupati Bone Bolango di Desa Bulotalangi Timur, Kabupaten Bone Bolango. |                           |
| <b>Peserta</b>  | Didampingi oleh Bupati Bone Bolango, Staf. Khusus, Anggota DPRD dan Kader-kader Partai NasDem, Pemilik UD Bumi Agro Gorontalo, serta kelompok UKM.   |                           |
| <b>Isu / Permasalahan :</b>   |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkurangnya penjualan kelapa di masa pandemi Covid-19, yang berakibat pengurangan modal untuk pengembangan hasil produksi;</li><li>2. Butuh penambahan modal melalui kredit lunak Bank ;</li><li>3. Pemasaran kurang menjangkau keseluruhan nasional;</li><li>4. Kurangnya koordinasi dengan Koperasi terkait.</li></ol>  |  |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b>  |  |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu adanya terobosan-terobosan baru, untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19, melalui inovasi-inovasi dan bekerja sama dengan koperasi;</li><li>2. Akan mengkoordinasikan dengan pihak perbankan agar mendapatkan kredit lunak;</li><li>3. Perlunya terobosan baru dalam pemasaran produk melalui media sosial untuk mengembangkan hasil produksi;</li></ol> |  |                           |

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Rachmat Gobel berdialog dengan pekerja UMKM Kelapa Hibrida Kering UD. Bumi Agro Gorontalo (UMKM) didampingi oleh Bupati Bone Bolango*

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| <b>Hari : Minggu</b>   | <b>Tanggal : 25 Juli 2021</b>   | <b>Waktu : 09.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan/<br/>Tempat</b>   | Penanaman pohon durian oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di Asmara Garden didampingi oleh Bupati Bone Bolango dan Pengurus Garnita Partai NasDem di Desa Bulotalangi Timur, Kabupaten Bone Bolango. |                           |
| <b>Peserta</b>   | Bupati Bone Bolango, Staf. Khusus, Anggota DPRD dan Garnita Partai NasDem serta Kader-kader Partai NasDem.  |                           |
| <b>Isu / Permasalahan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan ;</li><li>2. Kurangnya penghijauan.</li></ol>  |   |                           |
| <b>Tanggapan Anggota terhadap Isu dan Solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lahan kosong perlu ditanami pohon yang bermanfaat bagi masyarakat ;</li><li>2. Memberi bantuan tanaman Durian untuk dapat dikembangkan di Gorontalo.</li></ol> |   |                           |

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Penanaman Pohon Durian oleh Rachmat Gobel didampingi Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Asmara Garden, Desa Bulotalangi Timur, Kabupaten Bone Bolango.*

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Hari : Senin    | Tanggal : 26 Juli 2021  | Waktu : 10.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Penyerahan Simbolis Beras Fortivit dari Bulog oleh Wakil Ketua DPR RI ke Masyarakat didampingi Direktur Bisnis Bulog Ibu Febby dan Bupati Bone Bolango Hamim Pho dan Anggota DPRD di Rumah Dinas, Kabupaten Bone Bolango. |                    |
| Peserta         | Bupati Bone Bolango dan Wakil Bupati, Direktur Bisnis Bulog, Staf Khusus, Anggota DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Kapolsek, Tenaga Ahli (TA) dan Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem.                              |                    |

**Isu / Permasalahan :**

1. Penuntasan masalah stunting bagi masyarakat di Kabupaten maupun Kota;
2. Masih adanya gizi buruk bagi balita yang belum dituntaskan;
3. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid-19;
4. Banyak keluarga yang masih kekurangan.

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Penanganan *stunting* perlu diberikan bantuan obat, makanan bergizi sebagian menggunakan dana desa;
2. Rachmat Gobel memberikan bantuan pribadi beras Fortivit penambahan gizi dan diberikan disaat pandemi covid-19 bagi masyarakat;
3. Dalam menangani program *stunting* Rachmat Gobel akan memberikan bantuan beras Fortivit secara bertahap pada setiap reses kepada masyarakat;
4. Pemberian bantuan beras Fortivit perlu pendataan, agar terdistribusi dengan tertib.

**Dokumentasi Kegiatan :**



**Penyerahan Beras Fortivit yang diberikan Rachmat Gobel kepada Masyarakat didampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango**



*Penyerahan Bantuan Beras Fortivit oleh Rachmat Gobel secara simbolis kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango*



*Pemberian bantuan beras Fortivit oleh Rachmat Gobel kepada Masyarakat kabupaten Bone Bolango didampingi oleh Drekteur Bisnis Bulog Ibu Febby, Bupati Bone Bolango*

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Hari : Senin    | Tanggal : 26 Juli 2021  | Waktu : 13.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Pertemuan dengan Jajaran PLN Wilayah Gorontalo di Tapa, Kabupaten Bone Bolango. |                    |
| Peserta         | Kepala Wilayah PLN dan Staf, Staf.Khusus, Anggota DPRD.                         |                    |

**Isu / Permasalahan :**

1. Gorontalo butuh energi, dan perlu ditingkatkan terutama yang ramah lingkungan;
2. Belum diberikannya ijin untuk penanganan terkait dengan penanaman;
3. Dibutuhkan investor bidang energi
4. Kurangnya kebersihan lingkungan terutama sampah plastik, botol bekas dan sampah-sampah lainnya.

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Perlu meningkatkan kebutuhan energi yang ramah lingkungan, melalui vendor untuk meminta kepada PLN;
2. Perlu adanya konsep untuk mengolah sampah yang nantinya mempunyai *added value* bagi masyarakat Kabupaten Bona Bolango;
3. Penanaman enceng gondok agar melindungi lingkungan.

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Rachmat Gobel bersama dengan jajaran PLN Kanwil Gorontalo di Tapa, Kabupaten Bone Bolango*

|                        |  |                           |
|------------------------|--|---------------------------|
| <b>Hari : Senin</b>    | <b>Tanggal : 26 Juli 2021</b>  | <b>Waktu : 15.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b> | Pertemuan dengan Kepala Balai Perumahan Sulawesi I, juga dihadiri oleh Anggota DPRD, Staf Khusus dan TA di Tapa, Kabupaten Bone Bolango. |                           |
| <b>Peserta</b>         | Kepala Balai Perumahan Sulawesi I, juga dihadiri oleh Anggota DPRD, Staf Khusus dan TA (Tenaga Ahli).                                    |                           |

**Isu / Permasalahan :**

1. Banyak Masyarakat Gorontalo yang masih membutuhkan tempat tinggal yang layak;
2. Dibutuhkan tempat tinggal bagi para medis agar dapat melayani masyarakat dengan cepat apalagi di masa pandemi covid-19;
3. Banyaknya lansia yang terlantar dikarenakan tidak terurus;
4. Banyak sekolah rusak dan terbengkelai dikarenakan keterbatasan anggaran;
5. Perlunya revitalisasi pesantren di Gorontalo.

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Perlu diinventarisir masyarakat yang akan diberi bantuan tempat tinggal;
2. Untuk membantu para lansia yang kurang terurus, maka akan direncanakan membangun rumah lansia yang akan dikelola oleh yayasan agar dapat dipertanggung jawabkan;
3. Rachmat Gobel akan mengusulkan mengusulkan kepada PUPR rencana pembangunan rusunawa untuk paramedis di Gorontalo
4. Pembangunan Pondok Pesantren di Kabupaten Boalemo dikarenakan banyaknya santri/wati yang belum terfasilitasi.

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Pertemuan dengan Kepala Balai*

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Hari : Senin   | Tanggal : 26 Juli 2021   | Waktu : 17.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan  | Pertemuan dengan Tim Pakar dari Akademisi dan para Tokoh dari Gorontalo di Tapa, Kabupaten Bone Bolango. |                    |
| Peserta  | Rektor UNG, Dosen, Pakar Sejarah, Staf Khusus dan TA.  |                    |
| <b>Isu / Permasalahan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gorontalo rencana akan mengusulkan nama-nama yang berasal dari Gorontalo yang berjasa bagi nusa dan bangsa sebagai pahlawan;</li><li>2. Belum adanya Pusat Pengembangan untuk SDM di Gorontalo;</li><li>3. Masyarakat kurang peduli terhadap sejarah Gorontalo;</li><li>4. Sulitnya bea siswa bagi masyarakat Gorontalo untuk pendidikan.</li></ol>   |  |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlunya dibentuk Tim dari Tokoh Masyarakat/Adat dan pakar/Akademisi untuk menyusun kajian terkait Pahlawan Nasional;</li><li>2. Menginventarisir Tokoh-tokoh Gorontalo yang memberikan keteladanan sebagai pahlawan nasional dan mengusulkan kepada Menteri Sosial agar dapat diproses sesuai ketentuan;</li><li>3. Perlunya dirintis membuat Lembaga Unggulan Penembangan SDM di Gorontalo ke depan;</li><li>4. Rachmat Gobel akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada BUMN agar dapat memberikan bantuan beasiswa pada masyarakat Gorontalo untuk meningkatkan SDM ke depan;</li><li>5. Perlu sosialisasi wawasan kebangsaan dan pembangunan museum di Gorontalo.</li></ol> |  |                    |

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Tim Pakar Akademisi menyerahkan Hasil Kajian tentang Tokoh Kepahlawan Gorontalo kepada Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, di Tapa, Kabupaten Bone Bolango.*

|                        |  |                           |
|------------------------|--|---------------------------|
| <b>Hari : Selasa</b>   | <b>Tanggal : 27 Juli 2021</b>  | <b>Waktu : 10.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b> | <i>Memberikan sambutan dalam acara "Opening Ceremony Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) Tahun 2021" tema "Strategi dan Kebijakan Pembiayaan Syariah untuk Pemulihan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan Diseminasi Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia"</i> |                           |
| <b>Peserta</b>         | Wakil Gubernur Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Kakanwil BI Gorontalo, Staf Khusus, Anggota DPRD dan Undangan.  |                           |

**Isu / Permasalahan :**

1. Belum tersosialisasikan pengembangan ekonomi syariah kepada masyarakat;
2. Perlu adanya program strategis terutama UMKM agar dapat meningkatkan hasil produksinya ke nasional maupun internasional;
3. Kurangnya SDM yang memahami teknologi untuk meningkatkan perekonomian;

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Agar peran Bank Indonesia (BI) Gorontalo dapat melakukan sinergi dengan baik dengan Pemprov maupun masyarakat Gorontalo;
2. Para pelaku ekonomi dalam berbagai program pengembangan ekonomi dipandang perlu untuk mengajak para UKM untuk berpartisipasi dalam menjaga tingkat inflasi sehingga dapat mendukung program TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah);

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Rachmat Gobel memberi sambutan pada acara "Opening Ceremony Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) Tahun 2021" di Kota Gorontalo*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel sedang berbincang dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada acara di BI Gorontalo*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membuka acara "Opening Ceremony Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) Tahun 2021" didampingi oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan Kepala Kanwil BI Gorontalo Budi Widihartano.*

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Hari : Selasa   | Tanggal : 27 Juli 2021  | Waktu : 12.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Meninjau pembangunan TPA Talumelito di Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango. |                    |
| Peserta         | Bupati Bone Bolango, Dinas terkait, Anggota DPRD, Staf Khusus dan TA (Tenaga Ahli).     |                    |

**Isu / Permasalahan :**

1. Banyaknya sampah dan limbah yang tidak tertampung di lokasi pembuangan sampah;
2. Kurang adanya pengolahan limbah;
3. Pembuangan sampah masih belum terkoordinir dan tertata dengan baik..

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Rencana pambangunan sampah yang dapat menampung kapasitas yang memadai, yang juga dapat untuk mengolah limbah;
2. Pembangunan Pengelolaan TPA agar dapat memilah jenis sampah, yang nantinya dapat dikelola untuk daur ulang;
3. Akan dibuat tempat pengelolaan sampah yang nantinya bisa menjadi added value bagi masyarakat setempat
4. Dibuat mekanisme dan prosedur untuk pembuangan sampah ke TPA.

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel sedang meninjau pembangunan TPA Talumelito, didampingi oleh Bupati Bone Bolango dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Gorontalo*

| Hari : Selasa  | Tanggal : 27 Juli 2021  | Waktu : 13.00 WITA |
|--|---|--------------------|
| Bentuk Kegiatan  | Penyerahan Simbolis stunting Beras Fortivit dari Bulog dan Alsintan dari Kementerian Pertanian RI oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel kepada Masyarakat Tani didampingi oleh Bupati Bone Bolango, Ketua DPRD Kab. dan Ketua PKK Kab. Bone Bolango di Desa Meranti, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. |                    |
| Peserta  | Bupati Bone Bolango dan Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Kabupaten Bone Bolango, Direktorat Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI, Pimpinan DPD, Ketua PKK Kabupaten Bone Bulango dan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten serta Masyarakat yang akan diberi bantuan.   |                    |
| <p><b>Isu / Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan masalah <i>stunting</i> bagi masyarakat di Kabupaten maupun Kota;</li> <li>2. Masih adanya gizi buruk bagi balita yang belum dituntaskan;</li> <li>3. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid-19;</li> <li>4. Banyak keluarga yang masih kekurangan</li> <li>5. Kurangnya alat pertanian untuk mengelola lahan pertanian untuk menaikkan hasil panen/produksi;</li> <li>6. Banyak lahan pertanian yang belum bisa dikelola dengan baik.</li> </ol>   |   |                    |
| <p><b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan <i>Stunting</i> merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara sungguh-sungguh, dan butuh peran aktif semua pihak;</li> <li>2. Memberikan memberikan bantuan beras Fortivit, beras yang mengandung vitamin bagus untuk anak balita dan ibu hamil, penambahan gizi dan meningkatkan imun tubuh, serta cocok diberika disaat pandemi covid-19 bagi masyarakat;</li> <li>3. Program <i>stunting</i> dengan memberikan bantuan beras Fortivit akan dilaksanakan secara bertahap setiap reses oleh Rachmat Gobel untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat;</li> <li>4. Dalam pemberian bantuan <i>stunting</i> perlu adanya pendataan, khususnya pemberinan bantuan beras Fortivit untuk masyarakat;</li> <li>5. Akan memberikan bantuan alat pertanian berupa penggiling beras/<i>power thresher</i> multiguna yang telah diusahakan melalui Kementerian Pertanian RI, agar dapat membantu para kelompok tani untuk meningkatkan hasilnya;</li> <li>6. Rachmat Gobel mengarahkan agar dalam perawatan alat pertanian tersebut, sebaiknya bekerjasama dengan UKM untuk dikoordinir dan peralatan tersebut dapat terawat dengan baik;</li> <li>7. Perlu adanya koordinasi untuk penggunaan alat pertanian tersebut agar dapat bergiliran.</li> </ol> |   |                    |

Dokumentasi Kegiatan :



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi oleh Bupati Bone Bolango dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten memberikan pengarahan kepada masyarakat Kelompok Tani maupun masyarakat lainnya sebelum memberikan bantuan Beras Fortivit dari Bulog dan Alat Pertanian dari Kementerian Pertanian RI.*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memberikan arahan kepada Masyarakat Desa Meranti, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada acara Pemberian Bantuan Beras Fortivit dari Rachmat Gobel.*

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Hari : Selasa   | Tanggal : 27 Juli 2021  | Waktu : 14.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Pertemuan dengan Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem, Pengurus Garnita Kabupaten Bone Bolango dan Kader-kader Partai NasDem. |                    |
| Peserta         | Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem, Pengurus Garnita Kabupaten Bone Bolango dan Kader-kader Partai NasDem.                  |                    |

**Isu / Permasalahan :**

1. Kurangnya solidaritas kader dari akar rumput dan jajaran Partai;
2. Belum maksimalnya koordinasi DPW dan DPD ;
3. Memaksimalkan target e-KTA baik DPW maupun DPD ;
4. Suara kader perlu diperhatikan.

**Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :**

1. Perlu ditingkatkan koordinasi kader Partai mulai dari akar rumput, jajaran s.d. tingkat tinggi;
2. Para Pengurus DPW maupun DPD perlu mendengar aspirasi kader untuk membangun Partai NasDem agar tetap maju dan besar;
3. Perlu adanya koordinasi antara DPW dan DPD Partai NasDem terkait dengan program-program yang diberikan harus disinergikan dengan DPRT.

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Pengurus dan Kader Partai NasDem DPD Kabupaten Bone Bolango menyambut kedatangan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel pada Pelantikan Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Bone Bolango*



*Rapat Koordinasi Pengurus dan Kader Partai Nasdem DPD Kabupaten Bone Bolango yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dari Fraksi Partai NasDem*



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dari Fraksi Partai NasDem memberikan doorprize kepada Kader Partai NasDem di Kabupaten Bone Bolango*

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Hari : Selasa   | Tanggal : 27 Juli 2021  | Waktu : 17.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Kunjungan dalam rangka pengawasan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Kecamatan Tapa, Kab. Bone Bolango didampingi Bupati Bone Bolango dan Anggota DPRD dan PUPR. |                    |
| Peserta         | Bupati Bone Bolango, Jajaran PUPR, Pemda terkait, Kapolsek setempat, Para Pejabat dan Guru SDN 6.   |                    |

**Isu / Permasalahan :**

1. Gedung sekolah yang rusak berat, dan kurangnya anggaran untuk renovasi;
2. Kelas banyak yang bocor;
3. Peralatan sekolah untuk siswa/i kurang memadai;
4. Tempat olah raga untu siswa banyak yang rusak.

**Tanggapan Anggota terhadap Isu dan Solusi :**

1. Akan menyampaikan kepada Dinas terkait dan PUPR untuk dapat bantuan perbaikan renovasi atau membangun kelas SDN6 dan pengecatan;
2. Menyampaikan kepada Dinas terkait perbaikan kelas yang bocor agar dapat dibantu untuk diperbaiki
3. Menyampaikan kepada PUPR agar dapat merencanakan anggaran renovasi untuk SDN 6;
4. Agar Dinas terkait mengusulkan kepada Pemda untuk dapat dianggarkan.

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meninjau SDN 6 yang rusak parah, didampingi oleh Bupati Bone Bolango dan jajaran Pemda serta PUPR serta Para Guru SDN 6 Kabupaten Bone Bolango*



*Guru SDN 6 memperlihatkan Kelas yang bocor dan rusak kepada Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel*



*Guru dan jajaran SDN 6 serta Bupati Bone Bolango dan Jajaran Pemda serta PUPR berfoto bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel*

## KOTA GORONTALO

| Hari : Rabu  | Tanggal : 28 Juli 2021   | Waktu : 10.00 WITA |
|--|--|--------------------|
| Bentuk Kegiatan  | Penyerahan Beras <i>stunting</i> Fortivit dari Bulog dan Alsintan ( <i>Power Thresher</i> Multiguna) dari Kementerian Pertanian RI oleh Rachmat Gobel kepada masyarakat dan Kelompok Tani didampingi Walikota Gorontalo. |                    |
| Peserta  | Walikota Gorontalo, Staf. Khusus, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, Anggota DPRD, Kementerian Pertanian RI, Pengurus DPD Partai NasDem Kota Gorontalo dan Ketua Garnita Partai NasDem.                     |                    |
| <p><b>Isu / Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan <i>stunting</i> bagi masyarakat di Kota Gorontalo;</li> <li>2. Masih terdapat gizi buruk bagi balita yang belum diselesaikan ;</li> <li>3. Masyarakat banyak kehilangan pekerjaan pada masa pandemi covid-19;</li> <li>4. Banyak keluarga yang masih kekurangan, terutama petani kecil di kota Bara</li> <li>5. Banyak ibu hamil yang perlu asupan gizi;</li> <li>6. Angka kematian tahun 1918 sangat tinggi, sekarang sudah menurun;</li> <li>7. Kurangnya alat pertanian untuk menaikkan hasil panen/produksi, dan para petani sangat membutuhkan peralatan tersebut;</li> <li>8. Banyak lahan pertanian yang belum bisa dikelola dengan baik.</li> </ol>  |  |                    |
| <p><b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Stunting</i> harus diselesaikan secara sungguh-sungguh, dan bertahap;</li> <li>2. Membantu memberikan bantuan beras Fortivit, beras yang mengandung vitamin bagus untuk anak balita dan ibu hamil, penambahan gizi dan meningkatkan imun tubuh, diberikan pada saat pandemi covid-19;</li> <li>3. Bantuan untuk para petani yang membutuhkan bantuan beras bervitamin untuk menurunkan angka <i>stunting</i>;</li> <li>4. Rachmat Gobel akan memberi bantuan beras Fortivit untuk <i>stunting</i> secara bertahap pada reses berikutnya;</li> <li>5. Dalam pemberian bantuan <i>stunting</i> beras Fortivit untuk masyarakat perlu ada pendataan;</li> <li>6. Memberikan bantuan alat pertanian (<i>Power Thresher Multiguna</i>) yang telah diusahakan melalui Kementerian Pertanian RI, agar hasil panen menjadi baik;</li> <li>7. Rachmat Gobel menyarankan dalam perawatan alat pertanian tersebut, sebaiknya bekerjasama dengan Koperasi agar dapat terkoordinir dengan baik dan peralatan tersebut dapat terawat dengan baik;</li> <li>8. Perlu adanya koordinasi untuk penggunaan alat pertanian tersebut agar dapat bergiliran ;</li> </ol> |  |                    |

Dokumentasi Kegiatan :



*Sambutan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam acara pemberian bantuan beras Fortivit bagi masyarakat Kota Gorontalo didampingi oleh Walikota Gorontalo untuk mengurangi stunting.*



*Jabat tangan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Walikota Gorontalo Marten Taha pada acara Pemberian Bantuan beras Fortivit dan Alsintan di Kota Gorontalo*

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| <b>Hari : Rabu</b>  | <b>Tanggal : 28 Juli 2021</b>   | <b>Waktu : 11.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>  | Memberikan bantuan Ventilator dari Rachmat Gobel (sumbangan pribadi) untuk masyarakat Kota Gorontalo yang terkena covid-19 diterima oleh Walikota Gorontalo.                                  |                           |
| <b>Peserta</b>  | Walikota Gorontalo, Staf. Khusus, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, Anggota DPRD, Kementerian Pertanian, Pengurus DPD Partai NasDem Kota Gorontalo dan Ketua Garnita Partai NasDem dan TA. |                           |
| <p><b>Isu / Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang terdampak, dan Rumah Sakit sangat membutuhkan ventilator dan alat medis lainnya;</li> <li>2. Kurangnya vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat yang terdampak dan sedang dirawat di rumah sakit;</li> <li>3. Kurangnya disiplin masyarakat dalam menjalankan prokes pada saat keluar rumah atau di tempat keramaian.</li> </ol>  |   |                           |
| <p><b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rachmat Gobel memberikan bantuan secara pribadi Alat Kesehatan Ventilator untuk Rumah Sakit Kota Gorontalo yang menangani covid-19 sebanyak 3 Unit;</li> <li>2. Memberikan bantuan obat-obatan, vitamin dan alat swab kepada masyarakat dan Rumah Sakit, Kota Gorontalo;</li> <li>3. Rachmat Gobel mengusulkan perlunya sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar mentaati Prokes dan berdisiplin memakai masker, serta menjauhi kerumunan.</li> </ol> |   |                           |

Dokumentasi Kegiatan :



Walikota Gorontalo menerima bantuan pribadi dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berupa Ventilator



Penyerahan bantuan Alat Kesehatan Ventilator dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel secara pribadi kepada Walikota Gorontalo Marten Taha didampingi oleh Dinas Kesehatan yang akan diserahkan untuk Rumah Sakit di Gorontalo untuk membantu penanganan pasien Covid-19

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Hari : Rabu</b>   | <b>Tanggal : 28 Juli 2021</b>  | <b>Waktu : 12.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>   | Pertemuan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Walikota Gorontalo, Staf Khusus, Pimpinan OPD Kota Gorontalo, Dinas terkait Kota Gorontalo dan Kementerian Pertanian RI.                               |                           |
| <b>Peserta</b>   | Walikota Gorontalo, Staf Khusus, Pimpinan OPD Kota Gorontalo, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Pimpinan OKKP, Direktorat Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI dan Garnita Kabupaten Gorontalo. |                           |
| <p><b>Isu / Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerangi Covid-19 untuk masyarakat Gorontalo;</li> <li>2. Kurangnya vaksin dan Swab PCR serta APD di daerah-daerah ;</li> <li>3. Kurang APD di Kota Gorontalo untuk membangun dan mengembangkan Kota Gorontalo;</li> <li>4. Kendala dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia Timur;</li> <li>5. Belum adanya pemikiran untuk meningkatkan produk organik dan hidroponik contohnya minyak kutus-kutus;</li> <li>6. Kurangnya informasi pemberian bea siswa bagi masyarakat Gorontalo..</li> </ol>   |  |                           |
| <p><b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya mengkampanyekan untuk hidup sehat taat prokes dalam memerangi covid-19;</li> <li>2. Memberikan bantuan Alat Kesehatan kepada Rumah Sakit ;</li> <li>3. Memberikan bantuan obat-obatan dan APD kepada Rumah Sakit Kota Gorontalo;</li> <li>4. Untuk memajukan sektor pertanian/pangan perlu adanya kerjasama dengan Perusahaan Pupuk;</li> <li>5. Perlu disampaikan kepada Dinas terkait atau Kementerian untuk dapat membantu membuat Green House untuk membangun produk hidroponik yang nantinya akan membantu meningkatkan perekonomian;</li> <li>6. Bekerjasama dengan Koperasi agar pemasarannya lebih luas dan terkoordinir dengan baik;</li> <li>7. Koperasi dapat bekerjasama dengan Bulog dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;</li> <li>8. Mengusahakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi.</li> </ol> |  |                           |

Dokumentasi Kegiatan :



*Pertemuan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Walikota Gorontalo Marten Taha, Sekda, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Anggota DPRD Kota Gorontalo, dan Ketua Garnita Partai NasDem Kota Gorontalo dan Tim Reses Rachmat Gobel*



*Pertemuan Watua DPR RI Rachmat Gobel dengan Walikota Gorontalo, Sekda dan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, Anggota DPRD Kota Gorontalo dan Kementerian Pertanian RI*

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Hari : Jumat    | Tanggal : 30 Juli 2021  | Waktu : 14.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Pelantikan Pengurus DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo oleh Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sulawesi Partai NasDem Rachmat Gobel |                    |
| Peserta         | Pengurus DPW Gorontalo yang akan dilantik, Pengurus DPD Kabupaten/Kota Partai NasDem.   |                    |

Dokumentasi Kegiatan :



*Koordinator Teritorial Pemenangan Pemilu Sulawesi Partai NasDem Rachmat Gobel sedang melantik Pengurus Baru DPW Partai NasDem Gorontalo Periode 2021-2024 tanggal 30 Juli 2021 di Grand Palace Convention Center Gorontalo dan memberikan arahan kepada Pengurus Baru & Kader Partai NasDem.*



*Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem yang Baru dilantik Periode 2021-2024 foto bersama dengan Koordinator Teritorial Pemenangan Pemilu Sulawesi Partai NasDem Rachmat Gobel*



*Rachmat Gobel bersama Pengurus Baru DPW Partai NasDem Gorontalo.*

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Hari : Jumat  | Tanggal : 30 Juli 2021   | Waktu : 17.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan   | Pertemuan silaturahmi dengan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, Bapeda, Dinas-Dinas, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.                                     |                    |
| Peserta   | Walikota Gorontalo, Wakil Walikota Gorontalo, Sekda Kota Gorontalo, Kepala Dinas, Bapeda, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Staf Khusus, dan TA (Tenaga Ahli). |                    |
| <b>Isu / Permasalahan :</b><br>Kendala-kendala pelaksanaan program kerja  |  |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b><br>Akan menyampaikan kepada Kementerian terkait dan perlu adanya koordinasi antara Pemda dan masyarakat setempat |  |                    |



*Silaturahmi Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan Walikota Gorontalo Marten Taha bersama jajaran Pemda Kota Gorontalo*

## KABUPATEN POHUWATO

| Hari : Kamis  | Tanggal : 29 Juli 2021   | Waktu : 11.00 WITA |
|---|--|--------------------|
| Bentuk Kegiatan   | Penyerahan Bantuan <i>stunting</i> Beras Fortivit dari Rachmat Gobel dan Bantuan Alsintan ( <i>Traktor dan Power Thresher Multiguna</i> ) dari Kementerian Pertanian RI oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel kepada Kelompok Tani didampingi oleh Kementan RI dan Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato serta Bupati Bone Bolango. |                    |
| Peserta   | Bupati Bone Bolango, Anggota DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Kementerian Pertanian RI, Kelompok Tani dan Masyarakat penerima <i>stunting</i> beras.  |                    |
| <b>Isu / Permasalahan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencegahan <i>stunting</i> bagi masyarakat di Kota Gorontalo;</li><li>2. Masih terdapat gizi buruk bagi balita yang belum diselesaikan dan untuk mengentaskan kemiskinan;</li><li>3. Masyarakat banyak kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid-19;</li><li>4. Banyak keluarga yang masih kekurangan, terutama petani kecil;</li><li>5. Kurangnya alat pertanian untuk menaikkan hasil panen/produksi, dan para petani sangat membutuhkan peralatan tersebut.</li><li>6. Kurang pengelolaan lahan pertanian yang belum tertangani dengan baik;</li></ol>   |  |                    |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan bantuan beras Fortivit (beras bervitamin dan bergizi) untuk meningkatkan imun tubuh, diberikan pada saat pandemi covid-19;</li><li>2. Para petani sangat membutuhkan bantuan beras, agar angka <i>stunting</i> menjadi turun di Kabupaten Pohuwato;</li><li>3. Rachmat Gobel akan memberikan bantuan beras Fortivit secara bertahap pada reses berikutnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat;</li><li>4. Pemberian bantuan beras Fortivit untuk masyarakat Gorontalo perlu didata, agar semua bantuan merata, dan akan dikoordinir oleh DPD masing-masing Kabupaten/Kota;</li><li>5. Rachmat Gobel telah mengusahakan bantuan Alsintan (<i>Traktor dan Power Thresher Multiguna</i>) melalui Kementerian Pertanian RI;</li><li>6. Untuk perawatan Alat pertanian tersebut sebaiknya bekerjasama dengan Koperasi agar dapat dikelola dengan baik;</li><li>7. Perlu adanya koordinasi untuk penggunaan alat pertanian tersebut agar pemakaiannya dapat bergiliran ;</li></ol> |  |                    |

Dokumentasi Kegiatan :



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memberikan arahan kepada Kelompok Tani sebelum mendapatkan bantuan beras bervitamin Fortivit dan Alsintan dari Kementan RI.*



*Bupati Bone Bolango Hamim Pou secara simbolis menerima bantuan beras Fortivit (bervitamin) dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel untuk masyarakat Gorontalo*

## KABUPATEN BOALEMO

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| <b>Hari : Kamis</b>  | <b>Tanggal : 29 Juli 2021</b>   | <b>Waktu : 13.00 WITA</b> |
| <b>Bentuk Kegiatan</b>   | Silaturahmi dengan Keluarga Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta, Kabupaten Boalemo dihadiri oleh Plt. Bupati Boalemo dan Bupati Bone Bolango serta Kepala Balai Perumahan.   |                           |
| <b>Peserta</b>   | Plt. Bupati Boalemo, Bupati Bone Bolango, Anggota DPRD, Staf Khusus, Pimpinan Ponpes Alkhairaat Tilamuta, Ustad, Para Santri/wati, Kepala Kanwil Perumahan Sulawesi I, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Direktorat Sarana dan Prasarana Kementan, dan Tenaga Ahli. |                           |
| <b>Isu / Permasalahan :</b>  |   |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta, selama 53 tahun belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah</li><li>2. Tempat pendidikan/kelas maupun asrama Pesantren kurang memadai, dikarenakan banyaknya Santri/wati yang belum tertampung;</li><li>3. Untuk tempat ibadah untuk santri/wati/guru/pengurus masih kurang;</li><li>4. Sarana dan prasarana kurang tertata rapi dan kurang memadai misalkan toilet, sarana olah raga, ruang guru dll.</li><li>5. Kondisi keuangan Pemkab. Boalemo tidak mencukupi untuk membantu.</li></ol>   |   |                           |
| <b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b>   |   |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rachmat Gobel menyampaikan kepada PUPR agar membantu membangun gedung sekolah dan asrama Pondok Pesantren Alkhairaat atau rumah susun;</li><li>2. PUPR telah merealisasikan pembangunan gedung sekolah dan asrama pondok Pesantren Alkhairaat dengan kapasitas 56 siswa, dan peletakan batu pertama oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel;</li><li>3. Akan memberikan bantuan tempat tidur susun, kasur, lemari, dan juga sarana belajar untuk di sekolah;</li><li>4. Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel memberikan arahan agar menyusun masterplan dalam perencanaan dan pengembangan Ponpes. Alkhairaat;</li><li>5. Membangun SDM Gorontalo ke depan, agar menjadi bangsa yang tangguh di kancah nasional dan internasional.</li></ol> |   |                           |

Dokumentasi Kegiatan :



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memberikan Sambutan pada acara Silaturahmi dengan Keluarga Besar Asatiz dan Santri Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta, Kabupaten Boalemo.*



*Rachmat Gobel bersama Plt. Bupati Boalemo, Bupati Bone Bolango dan Pimpinan Pondok Pesantren Alkhairat Tilamuta, Kabupaten Boalemo di lokasi yg akan dibangun Sekolah Pondok Pesantren bantuan PUPR Kabupaten Boalemo*

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Hari : Kamis    | Tanggal : 29 Juli 2021   | Waktu : 14.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan | Peletakan Batu Pertama Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi oleh Plt. Bupati Boalemo dan Bupati Bone Bolango serta Kepala Balai Perumahan (PUPR) dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alkhairaat.        |                    |
| Peserta         | Plt. Bupati Boalemo, Bupati Bone Bolango, Anggota DPRD, Staf Khusus, Pimpinan Ponpes Alkhairaat Tilamuta, Ustad, Para Santri/wati, Kepala Kanwil Perumahan Sulawesi I (PUPR), Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Direktorat Sarana dan Prasarana Kementan, dan Tenaga Ahli. |                    |

**Dokumentasi Kegiatan :**



*Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah dan Pondok Pesantren Alkhairaat di Tilamuta, Kabupaten Boalemo oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.*

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Hari : Kamis  | Tanggal : 29 Juli 2021   | Waktu : 15.00 WITA |
| Bentuk Kegiatan   | Penyerahan Bantuan <i>stunting</i> Beras Fortivit dari Rachmat Gobel dan bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian berupa Traktor Roda Empat dan <i>Power Thresher Multiguna</i> oleh Rachmat Gobel kepada Kelompok Tani didampingi oleh Pejabat Kementan RI dan Plt. Bupati Boalemo |                    |
| Peserta   | Plt. Bupati Boalemo, Bupati Bone Bolango, Anggota DPRD, Staf Khusus, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Direktorat Sarana dan Prasarana Kementan, dan Tenaga Ahli.  |                    |
| <p><b>Isu / Permasalahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan <i>stunting</i> bagi masyarakat di kabupaten Boalemo;</li> <li>2. Masih terdapat gizi buruk bagi balita yang belum diselesaikan ;</li> <li>3. Masyarakat kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid-19;</li> <li>4. Kondisi Keuangan Daerah tidak memungkinkan</li> <li>5. Banyak keluarga yang masih kekurangan, terutama petani kecil;</li> <li>6. Kurangnya alat pertanian untuk menaikkan hasil produksi bagi petani;</li> <li>7. Perlunya bantuan alat pertanian untuk kelompok Tani.</li> </ol>   |  |                    |
| <p><b>Tanggapan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Stunting</i> harus diselesaikan secara sungguh-sungguh, dan bertahap;</li> <li>2. Bantuan untuk <i>stunting</i> akan dilaksanakan secara bertahap, dengan memberikan bantuan beras Fortivit dari Rachmat Gobel, beras bervitamin yang akan diprogramkan setiap masa reses;</li> <li>3. Membangun anak sehat dan keluarga bahagia merupakan cita-cita Rachmat Gobel dalam membangun Gorontalo;</li> <li>4. Para petani sangat membutuhkan bantuan beras untuk menurunkan angka <i>stunting</i> dan pemberian bantuan kepada masyarakat tersebut perlu pendataan, dan akan dikoordinir oleh DPD Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Untuk meningkatkan hasil pertanian para petani Gorontalo, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel memberikan bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian RI berupa Traktor Roda Empat dan <i>Thresher Multiguna</i> kepada Kelompok Tani;</li> <li>6. Dalam perawatan alat pertanian tersebut, sebaiknya bekerjasama dengan Koperasi agar dapat terkoordinir baik dan peralatan tersebut dapat terawat dengan baik;</li> <li>7. Perlu adanya Kerjasama dengan Koperasi untuk penggunaan alat pertanian agar pemakaiannya dapat bergiliran dan terawat dengan baik ;</li> </ol> |  |                    |

Dokumentasi Kegiatan :



*Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melakukan dialog dengan ibu-ibu penerima bantuan stunting beras Fortivit dari Rachmat Gobel pribadi di Kabupaten Boalemo.*



*Penyerahan bantuan pribadi dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel kepada masyarakat untuk dapat sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemic Covid-19*



*Pemberian secara simbolis bantuan Alsintan (Traktor Roda Empat) dari Kementerian Pertanian RI kepada Plt. Bupati Boalemo disaksikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.*



# LAMPIRAN







BUPATI GORONTALO UTARA

## UCAPAN TERIMA KASIH

ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH & MASYARAKAT GORONTALO UTARA,  
DENGAN RASA BANGGA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA BAPAK :

**DR. RACHMAD GOBEL**  
WAKIL KETUA DPR - RI

ATAS PERJUANGAN DAN DUKUNGANNYA MENGALOKASIKAN ANGGARAN  
UNTUK BERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN TAHUN 2020  
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

KWANDANG, 28 DESEMBER 2020

  
Dr. INDRA YASIN, SH.,MH







# TENTANG PENULIS

## Dra. Hj. Nining Indra Shaleh, M.Si



Dra. Hj. Nining Indra Shaleh, M.Si, lahir di Cirebon, alumnus UGM ini semasa kuliah merupakan salah satu aktivis mahasiswa yang aktif dalam Gerakan Himpunan Mahasiswa Indonesia dan dipercaya untuk memimpin HMI-WATI Cabag Yogyakarta periode 1978-1980. Pengalamannya sebagai aktivis kampus ini, merupakan modal dasar bagi pengembangan kapasitas pribadinya. Dalam kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara Nining Indra

Shaleh pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR RI periode 2008-2013. Tidak hanya di birokrasi Nining Indra Shaleh pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai NasDem 2015-2017 dan Kepala Sekolah Legislatif Partai NasDem (2014-2019). Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP Partai NasDem. Dengan berbekal segudang pengalaman Nining Indra Shaleh juga di percaya oleh Partai NasDem untuk menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel 2019-sekarang.

## Nasihin Masha



Nasihin Masha lahir Cirebon dan kini tinggal di Jakarta. Selama 25 tahun berkarier sebagai wartawan di Republika, dengan posisi terakhir sebagai pemimpin redaksi. Setelah itu menjadi Staf Ahli Direksi BPJS Kesehatan. Sarjana Sisiologi Unsoed Purwokerto itu kini Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang.

## Drs. Budi Jatnika, M.Si.



Drs. Budi Jatnika, M.Si. lahir di Jakarta, 25 November 1969. Menyelesaikan Strata-1 tahun 1993 di Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dan Tahun 2005 menyelesaikan Strata-2 program studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Saat ini sebagai Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Mempunyai pengalaman sebagai tim pendukung penyusunan dan pembahasan UU diantaranya UU tentang Kementerian Negara; UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden; UU tentang Resi Gudang; UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; UU tentang Perkoperasian; UU tentang Lembaga Keuangan Mikro; UU tentang Perindustrian; UU tentang Perdagangan.

Membantu penyusunan buku berjudul "Pengembangan dan Pengelolaan Panas Bumi di Indonesia : Kondisi Terkini, Tantangan dan Alternatif Solusi; Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Skala Kecil: Alternatif Solusi di Indonesia; Kendaraan Bermotor Listrik Nasional: Pokok-Pokok Pemikiran Dr. Agus Hermanto; dan Menyerap Aspirasi Menciptaka Solusi : Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Dr. (H.C.) Rachmat Gobel.

## Dra. Rini Koentarti, M.Si,



Dra. RINI KOENTARTI, M.Si, Lahir di Kota Kediri, Jawa Timur. Lulus S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) tahun 1987, lulus S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tahun 2004, dan S3 Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta (masih desertasi). Saat ini adalah sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Sebelum menjadi tenaga ahli pernah menjadi Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI tahun 2004, Kepala Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebuah Alat Kelengkapan Dewan yang bertugas menyusun Arah Kebijakan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai Tim Teknis penyusunan awal terbentuknya Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2010. Pada tahun 2014 sebagai Kepala Sekretariat Komisi VII DPR RI yang membidangi Energidan Lingkungan Hidup, yang sekarang menjadi Energi dan Perindustrian. Tahun 2016 di Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system tugas Dewan dalam bidang keahlian perancangan undang-undang, analisa kebijakan APBN, pemantauan peraturan perundangan dan akuntabilitas keuangan negara untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan. Tim Penyusun Buku Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

## Himawan Basuki

HIMAWAN BASUKI lahir di Yogyakarta. Dia menyelesaikan pendidikan dasar sampai sekolah lanjutan atas di Yogyakarta. Pendidikan strata 1 (S1) diperoleh di Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan strata 1 (S2) di Magister Management, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Memulai karir profesional di sebuah bank swasta nasional di Jakarta dan sejak 1994 dia bergabung dengan kelompok usaha Panasonic-Gobel. Sejak bergabung dengan kelompok usaha ini, dia telah ditempatkan (*tour of duty*) di berbagai anak perusahaan dan sampai saat ini masih aktif di kelompok usaha ini.

## Andreas Ambesa



Andreas Ambesa, lahir di Ende, Flores 15 Februari 1965. Meraih gelar S1 dari Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Mengawali karirnya sebagai jurnalis dan pernah sebagai koresponden Kantor Berita Jepang, Kyodo News Service, Biro Jakarta, 1990. Lebih banyak mengamati masalah hubungan internasional, komunikasi politik dan hubungan masyarakat. Sebelum memasuki dunia politik, terakhir

menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk (Perusahaan Induk Indosiar Visual Mandiri) 2010.

Karirnya di bidang politik menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem 2013-2019 dan Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI 2015-2019. Kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel (2019-sekarang).

## Mulyadin Permana



Mulyadin Permana, lahir di Bima NTB, 07 Juli 1987. Menyelesaikan pendidikan Magister (S2) di Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2015 dan sedang merampungkan Program Doktor (S3) di Departemen yang sama. Bekerja sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem yang bertugas di Komisi IV DPR RI.

Pernah bergelut di kajian akademik sebagai Direktur Monas English Club (MEC), Direktur Kajian Interpretasi Sosial (KIS), dan Direktur Kajian Kosmologi Strategis (KKS) tahun 2011-2018. Aktif menulis banyak artikel yang dimuat di berbagai media cetak dan elektronik sejak di bangku kuliah hingga sekarang. Pernah menulis beberapa buku hasil kolaraborasi dengan kawan-kawan peneliti FISIP UI dan beberapa kementerian.

Selain bekerja, menulis, dan bergelut di dunia akademik, juga aktif berorganisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pernah menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta, masih memegang posisi sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) PWNU DKI Jakarta dan Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta.

## Hafizurrahman



Hafizurrahman lahir di Binjai Sumatera Utara, pada 1987. Menyelesaikan Pendidikan Magister (S 2) pada 2013 di departemen Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta . Bekerja sebagai Tenaga Ahli anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem 2014-2019 dan sekarang sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI/Korinbang. Tim Penyusun Buku Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel.

## Ajeng Kusumaning Ayu



Ajeng Kusumaning Ayu, Lahir di Lumajang 06-06-1992. Telah menyelesaikan Program Magister (S2) di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada tahun 2019, dan sekarang sedang menyelesaikan Program Doktorat (S3) di Universitas Diponegoro.

Bekerja sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR-RI Bidang Korinbang, yang bertugas untuk melakukan serapan aspirasi masyarakat diluar daerah

Pemilihan. Selain bekerja sebagai tenaga ahli saya juga aktif berorganisasi sebagai wakil bendahara umum pengurus DPP KNPI. Saya bergelut di dunia organisasi semenjak saya masih duduk di bangku kuliah S1, bermula karir di HMI tingkat komisariat hingga pernah menjadi pengurus besar PB HMI. Selain itu di kampus saya pernah menjadi ketua umum badan legislatif tingkat fakultas, untuk hal terkait politik bukan hal yang baru untuk saya tekuni.

## Muh. Ardiansah Laitte



Muh. Ardiansah Laitte, lahir di Makassar 19 Januari 1987 menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin (Unhas) pada tahun 2011 dan melanjutkan Program Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2017. Saat ini tengah bekerja sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem yang bertugas pada Badan Anggaran.

Selain itu, penulis aktif di dalam aktivitas riset dan kemasyarakatan. Sampai saat ini penulis tercatat menjadi peneliti di Suropati Syndicate. Penulis juga aktif menulis di berbagai media baik itu cetak maupun elektronik bahkan menjadi founder dari Locita.co yang merupakan platform digital bagi para penulis pemula.

Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi intra maupun ekstra kampus. Pernah menjadi Ketua I Ikatan Mahasiswa Akuntansi dan Direktur Ekonomi Pusat Studi Demokrasi Unhas . pada organisasi eksternal penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan pernah menjabat sebagai Direktur Badan Pengelola Pelatihan HMI cabang Makassar Timur dan Ketua Balitbang PB HMI periode 2015-2017.

**MENYERAP ASPIRASI  
MENCIPTAKAN SOLUSI**

# **NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN**

Kiprah Tahun Kedua Wakil Ketua DPR RI  
Bidang Industri dan Pembangunan

**Dr. (H.C.) RACHMAT GOBEL**

Buku *National Interest dan Agenda Pembangunan* ini merupakan laporan kegiatan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel sepanjang Masa Persidangan I-V Tahun Sidang 2020-2021. Frasa *National Interest dan Agenda Pembangunan* merupakan wujud dari tema "*Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi*" yang merupakan semangat yang selalu ada, baik saat memimpin perusahaan, berbagai organisasi maupun sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai NasDem daerah pemilihan Gorontalo yang diembannya saat ini.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif, Rachmat Gobel selalu mengedepankan Kepentingan Nasional, dan ini sudah menjadi landasannya sejak masih aktif sebagai pengusaha dan berbagai organisasi sosial dan dunia usaha.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif seperti diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, Rachmat Gobel selalu mengacu pada Kepentingan Nasional.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dan juga anggota Komisi XI, pasal 33 Undang-Undang Dasar menjadi dasar Rachmat Gobel dalam menjalankan fungsi tersebut. Berupaya memastikan, berbagai program kerja dan agenda pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak berseberangan dengan Kepentingan Nasional yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Ruang lingkup buku ini meliputi kegiatan Rachmat Gobel sebagai anggota dewan asal daerah pemilihan Gorontalo, dan juga berbagai kegiatan sebagai pimpinan DPR RI.

Solusi dan gagasan telah diperjuangkan untuk menjaga Kepentingan Nasional dalam pengelolaan sumber daya ekonomi nasional agar dirasakan semua lapisan masyarakat.

Rachmat Gobel juga aktif memperkuat diplomasi kerjasama ekonomi. Ia juga diamanatkan menjadi Ketua Tim Pengawas Pembangunan Wilayah Perbatasan dan sebagai penasehat Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

**BAGIAN PENERBITAN  
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN  
SETJEN DPR RI**

Gedung Nusantara II Lt.3  
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan  
Jakarta - 10270  
Telp. 021-571 5687  
Email: bag\_penerbitan@dpr.go.id



**dpr.go.id**